

e-ISSN 2798-8961



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

HITA AKUNTANSI DAN KEUANGAN

VOLUME 5 NOMOR 2 TAHUN 2024

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI BISNIS
DAN PARIWISATA**

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

DAFTAR ISI

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN BUDAYA ORGANISASI YANG BERBASIS TRI HITA KARANA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KECAMATAN ABIANSEMAL

Ni Luh Adi Darmawati, Putu Cita Ayu, Ni Made Wisni Arie Pramuki (1-8)

ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019- 2021

I Wayan Agus Dharmawan, Cokorda Gde Bayu Putra (9-15)

PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPERATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE-KECAMATAN TABANAN

Ni Made Ari Artika Swari, I Wayan Budi Satriya (16-27)

ANALISIS PENERAPAN *GREEN ACCOUNTING* PADA PERTENUNAN PUTRI AYU

Dewa Ayu Made Vionavianti, I Putu Fery Karyada, Ni Putu Yeni Yuliantari (28-39)

PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

Ni Ketut Ayu Manik Sugiantari, Kadek Dewi Padnyawati, Ni Made Wisni Arie Pramuki (40-49)

ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS) DALAM MENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMPN 4 GEROKGAK KABUPATEN BULELENG

Ni Komang Meri Ardhiani, Putu Cita Ayu (50-61)

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SE-KECAMATAN GIANYAR

I Gusti Ayu Putu Natih Swari, Ni Komang Sumadi, Ni Ketut Muliati (62-72)

ANALISIS KESIAPAN PERUSAHAAN DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (STUDI KASUS PADA FIFGROUP DENPASAR)

Ni Kadek Sri Adnyani Putri, I Putu Fery Karyada, I Made Endra Lesmana Putra (73-85)

PENGARUH KOMPETENSI, BUDAYA ORGANISASI, DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE - KECAMATAN SUKAWATI

Ni Wayan Mirawati, I Wayan Suidiana, Putu Nuniek Hutnaleontina (86-94)

KOMPETENSI SDM MEMODERASI HUBUNGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Ni Kadek Vina Ari Wahyuni (95-105)

PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, BUDAYA *TRI HITA KARANA* DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL

Putu Diah Eka Juniari, I Putu Deddy Samtika Putra (106-115)

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KANTOR DESA SE-KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG

Ni Luh Made Wisna Yani, Ni Putu Ayu Kusumawati, Putu Nuniek Hutnaleontina (116-127)

PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, KOMPETENSI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN LPD SE-KECAMATAN BLAHBATUH

Ni Kadek Anggi Pradnyawati, Putu Nuniek Hutnaleontina (128-146)

PENGARUH AKUNTABILITAS, KOMPETENSI APARATUR DESA DAN KESESUAIAN KOMPENSASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN KUTA UTARA DAN KUTA SELATAN

Ida Ayu Made Ariesta Dewi, Cokorda Gde Bayu Putra, Ni Wayan Alit Erlina Wati (147-157)

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Luh Komang Purnama Sari, Kadek Dewi Padnyawati, Rai Dwi Andayani W (158-167)

PENGARUH *GREEN INVESTMENT*, KINERJA LINGKUNGAN, DAN *MEDIA EXPOSURE* TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SEKTOR BAHAN BAKU YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022)

Ni Kadek Larashati Panditha Dewi, Ni Ketut Muliati, I Putu Deddy Samtika Putra (168-182)

ANALISIS AKUNTABILITAS BANTUAN DANA PEMERINTAH PADA TK. BERNUANSA HINDU DHARMA KUMARA I KECAMATAN KUTA UTARA

Ni Made Dita Rahyunita, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, I Made Endra Lesmana Putra (183-194)

PENGARUH EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-SAMSAT DAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT PEMBANTU RENON

Ade Ima Yulinda Dewi, I Wayan Sudiana (195-207)

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE (2019-2022)

I Gusti Ayu Intan Okawati, Ni Putu Ayu Kusumawati (208-216)

ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING PADA PERUSAHAAN “GALLERY AGUNG BALI COLLECTION”

Ni Wayan Puspayani, I Putu Fery Karyada, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi (217-226)

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DENPASAR BARAT

Welly Ardi Velyati, Ni Wayan Alit Erlina Wati (227-239)

ANALISIS FENOMENA *JANUARY EFFECT* (STUDI PADA SAHAM INDEKS IDX30 DARI TAHUN 2020-2023)

Putu Nova Artha Nugraha, I Putu Fery Karyada, I Made Endra Lesmana Putra (240-248)

PENGARUH KONSEP TRI KAYA PARISUDHA DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (*FRAUD*) AKUNTANSI DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Ni Kadek Yuni Candra Dewi, Ni Putu Ayu Kusumawati, Rai Dwi Andayani W (249-259)

PENGARUH *PERSONAL COST*, KOMITMEN ORGANISASI, LINGKUNGAN ETIKA DAN INTENSITAS MORAL TERHADAP INTENSI MELAKUKAN TINDAKAN *WHISTLEBLOWING* PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE – KECAMATAN BLAHBATUH

I Gusti Ayu Diah Adnyaswari, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Ni Wayan Yuniasih (260-269)

PENGARUH PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI, PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR

Gede Pramana Putra, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Ni Wayan Yuniasih (270-282)

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN KAS PADA PT BPR ANGSA SEDANAYOGA

Cok Putri Dwitayanti, Ni Wayan Yuniasih, Rai Dwi Andayani W (283-292)

PENGARUH MORALITAS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) (STUDI KASUS BUMDES AMERTHA DESA PATAS)

Komang Pande Gerry Astrana Putra, Ni Putu Ayu Kusumawati, Putu Nuniek Hutnaleontina (293-302)

PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MENGWI

Ni Kadek Dwi Yuliantari, Ni Komang Sumadi, I Wayan Budi Satriya (303-312)

PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DAN IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KECENDRONGAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA LPD SE-KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

Pande Putu Valentini, I Wayan Sudiana, I Putu Deddy Samtika Putra (313-323)

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PENGELOLAAN DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SE-KECAMATAN ABIANSEMAL

Ni Nyoman Lisa Trianti, Ni Wayan Yuniasih, Kadek Dewi Padnyawati (324-335)

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindakan penyalahgunaan wewenang oknum pengelola LPD, diterapkan sistem pengelolaan perusahaan yang baik (GCG). GCG akan membantu mengurangi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan karena tidak dapat dibantah pengelola mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemilik perusahaan. GCG menjadi salah satu kunci penting untuk menyelaraskan kepentingan untuk tercapainya kinerja LPD yang maksimal dengan berbagai prinsip didalamnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen adalah budaya organisasi untuk mampu meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik setiap saat. Budaya organisasi diartikan sebagai suatu sistem dan nilai yang dianut dan diteladani karyawan dalam suatu perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dan dijadikan acuan bagaimana operasional perusahaan akan dijalankan. Budaya organisasi menjadi acuan dan memberikan arah kepada operasional perusahaan yang diharapkan mampu mencapai tujuan dengan berbagai strategi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi LPD mengacu pada konsep yang dianut dalam agama hindu dan budaya yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar yaitu Tri Hita Karana yang menjadi pedoman dalam operasional LPD karena dianggap sesuai dengan berbagai kebutuhan operasional LPD.

Tri Hita Karana ialah konsep dasar agama hindu yang digunakan untuk mengarahkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan melakukan hubungan yang harmonis dalam kehidupannya karena pada dasarnya manusia tidak mampu hidup sendiri yang sangat tergantung dengan manusia lain sebagai manusia sosial, dengan tuhan sebagai penciptanya dan dengan lingkungan sebagai bagian dari ekosistem itu sendiri. Oleh karena itu konsep ini menjelaskan manusia harus menjaga hubungan baik dengan tuhan, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan sekitar. Tri hita karana mampu mengarahkan sikap dan perilaku manusia untuk mencapai tujuan hidupnya sehingga cocok diadopsi oleh suatu perusahaan yang dalam hal ini LPD yang senantiasa melakukan operasional dengan harapan mencapai tujuan perusahaan.

Penelitian ini didasari adanya perbedaan hasil penelitian dimana yandani (2019) menyatakan GCG berdampak pada kinerja perusahaan sedangkan Handayani, dkk (2020) menemukan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja. Amanda dan Suputra (2019) menemukan budaya organisasi berpengaruh pada kinerja.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Budaya Organisasi Yang Berbasis Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Abiansemal”

KAJIAN PUSTAKA

Theory Resource Based View (RBV)

RBV menitikbertakan pada keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Teori ini menjelaskan sumber daya dan kemampuan menjadi faktor penting untuk mampu bertahan dalam kondisi saat ini karena menjadi dasar dari operasional perusahaan.

GCG ialah seperangkat aturan yang ditentukan untuk menyelaraskan kepentingan berbagai kepentingan yang ada di organisasi diantaranya kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. GCG menjadi salah satu pedoman penting untuk perusahaan dengan harapan perusahaan mampu mencapai tujuan yang diinginkan karena mampu mengimbangkan kepentingan yang dimiliki sehingga akan tercipta kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. GCG menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan segala keterbatasan yang dimiliki dengan lebih efektif dan efisien dengan berbagai prinsip yang ada didalamnya tanpa mengesampingkan semua aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. CGC menjadikan perusahaan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan karena prinsip didalamnya.

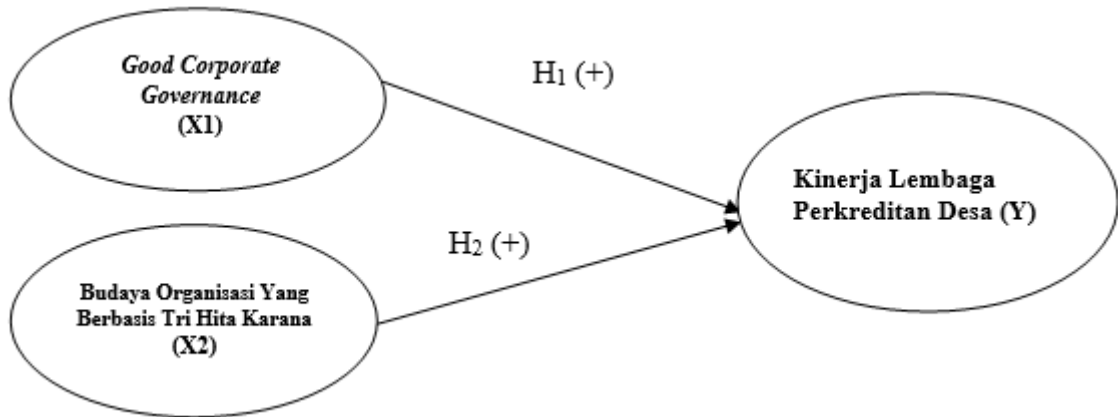
H1: GCG berdampak pada kinerja LPD

Untuk membuat suberdaya yang bernilai budaya organisasi sangat menentukan LPD di Bali menerapkan budaya organisasi Tri Hita Karana (THK). Budaya organisasi dapat dikatakan sebagai sumber daya tak berwujud dalam suatu organisasi. Budaya organisasi yang diterapkan oleh LPD di Bali diangkat dari kultur lokal yang sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat dengan berbagai filosofi dan prinsip didalamnya. Tri Hita Karana menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan hidup, manusia harus menjaga hubungan yang baik dengan tuhan sebagai pencipta, dengan sesama manusia karena tidak akan mampu hidup sendiri sebagai makhluk sosial dan kepada lingkungan sekitar karena tidak dapat dipungkiri manusia sangat tergantung dengan lingkungan sekitar. Budaya organisasi membuat perusahaan mampu mengarahkan operasional perusahaan dengan lebih baik. Hal ini membuat perusahaan mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dengan lebih maksimal dan efisien karena adanya adanya proses yang lebih baik. Manajemen menjadi lebih mudah untuk melakukan kontrol atas operasional perusahaan.

H2: Budaya Organisasi Yang Berbasis Tri Hita Berdampak pada Kinerja LPD

METODE PENELITIAN

Gambar 1.
Desain Penelitian



Variabel *independent* (X) adalah variabel yang mempengaruhi dengan cara lain yang merubah variabel dependen dimana dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dan Budaya Tri Hita Karana. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Lemabaga Perkreditan Desa (LPD) Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 orang yang terdiri Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Abiansemal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Partial Least Squares*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Hasil kalkulasi hal angka outer loading pada Bagan 4. 2 membuktikan seluruh penanda sudah penuh ketentuan asi bersumber pada patokan convergent validity ialah angka outer loading diatas 0, 60. Angka AVE semua konstruk 0, 50 serta angka√AVE tiap- tiap konstruk berkisar antara 0, 744 s. d 0, 842 lebih besar dari angka hubungan yang besarnya antara 0, 246 s. d 0, 637 alhasil penuh ketentuan asi bersumber pada patokan discriminant validity. Angka composite reliability serta Cronbach Alpha tiap- tiap konstruk sudah membuktikan angka lebih besar dari 0, 60 alhasil penuh ketentuan reliabel bersumber pada patokan composite reliability

Evaluasi Model Struktural (*Structural Model/Inner Model*)

Tabel 1 Path Analisis dan Pengujian Statistik

Variabel	Koefisien	Statistik Uji	Signifika nsi	Hasil
GCG -> Kinerja LPD	0,030	0,219	0,827	Tidak Diterima
Budaya Organisasi -> Kinerja LPD	0,339	2,713	0,007	Diterima

Sumber : Data diolah, 2023

Bagan 1 membuktikan GCG mempengaruhi positif sebesar 0, 030 kepada kemampuan LPD serta ikatan itu merupakan tidak penting pada tingkat 0, 05 dengan angka t statistik sebesar 0, 219 lebih kecil dari angka t- tabel ialah 1, 64. Budaya organisasi mempengaruhi positif sebesar 0, 339 kepada kemampuan LPD serta ikatan itu merupakan penting pada tingkat 0, 05, dimana angka t- Statistik sebesar 2, 713 lebih besar dari 1, 64.

Pembahasan

Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja

Bersumber pada hipotesis 1 membuktikan kalau good corporate governance mempengaruhi positif serta tidak penting kepada kemampuan LPD, dengan begitu anggapan awal dalam riset ini tidak bisa diperoleh(H1 ditolak). Akibat GCG yang positif namun tidak penting kepada kemampuan LPD membagikan arti kalau meski pengurusan aturan mengurus yang dipunyai oleh LPD di kecamatan abiansemal telah ditaksir bagus, tetapi pengurusan ini belum maksimal dalam pengaruhi kemampuan LPD. LPD Kecamatan Abiansemal dalam tingkatkan kinerjanya wajib berupaya tingkatkan good corporate governance. Pengaplikasian good corporate governance pada LPD di kecamatan abiansemal telah dicoba hendak namun belum membagikan akibat yang penting untuk kemampuan LPD itu sendiri. LPD di kecamatan abiansemal belum dapat dengan cara maksimal menerapkan good corporate governance yang ialah aspek pengaruhi kemampuan. Aplikasi GCG dapat menciptakan kemampuan badan, meminimalisir resiko serta menciptakan keyakinan warga buat menanamkan yang mempengaruhi kepada kemampuan LPD. Oleh sebab itu, aplikasi GCG pada pengoperasian LPD amat berarti dalam kenaikan kemampuan. Dengan terdapatnya good corporate governance, pihak yang berkaitan dengan LPD mempunyai peranan yang nyata cocok dengan prinsip yang pas, buat memberdayakan LPD yang lebih seimbang, bertanggung jawab serta saklek. Alhasil bisa menolong warga, serta bermacam pihak yang bersangkutan dengan LPD alhasil buat menyudahi serta memajukan kemampuan LPD, alhasil optimalisasi kemampuan LPD bisa terkabul. Hasil riset ini searah dengan hasil riset dari Handayani(2020) serta Bidadari(2022) yang melaporkan

kalau GCG mempengaruhi positif serta tidak penting kepada kemampuan LPD

Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal

Bersumber pada hasil pengesanan membuktikan kalau budayia organisasi mempengaruhi positif serta penting kepada kemampuan LPD, dengan begitu anggapan kedua dalam riset ini bisa diperoleh(H2 dibantu).

Akibat positif serta penting budayia organisasi kepada kemampuan LPD berikan arti kalau terus menjadi melonjaknya aplikasi budayia organisasi berplatform THK, hingga kemampuan LPD pula hendak bertambah. Adat yang kokoh serta khas amat mempengaruhi kepada kesuksesan sesuatu badan. Badan yang berhasil memiliki adat kokoh sekalian khas yang menguatkan subbudaya badan. Tingkatkan kemampuan industri(LPD) di kecamatan abiabsemal dibutuhkan aplikasi nilai- nilai adat yang memajukan kemesraan dampingi sesama orang, area serta Tuhan. Penerapan adat Tri Hita Karana yang bagus sanggup tingkatkan kemampuan LPD. Aplikasi parahyangan, pawongan serta palemahan yang bagus memiliki kedudukan berarti dalam mensupport tercapainya penerapan budayia organisasi yang berplatform tri hita karana, alhasil bisa membagikan partisipasi jelas pada kemampuan industri(LPD). Hasil riset ini searah dengan hasil penelitian Amanda serta Suputra(2019) dan Yudhasena serta Gadis(2019) mengatakan kalau Budayia organisasi berikan akibat positif serta penting pada kemampuan LPD

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal Badung Meningkatkan kinerja perusahaan (LPD) di kecamatan abiabsemal diperlukan penerapan nilai-nilai budaya yang mengedepankan keharmonisan antar sesama manusia, lingkungan dan Tuhan. Temuan lain dalam penelitian ini adalah good corporate governance memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kinerja LPD, hal ini diduga LPD di kecamatan abiansemal belum bisa secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, L. A., dan Suputra, I. D. G. D. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen dan Akuntabilitas Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.27.3, 1763-1787.

Anggayana, I. P. (2019). Pengaruh prinsip-prinsip Good Governance Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kota Denpasar. Skripsi Universitas Udayana.

Asmara, I. K. J., dan Widanaputra, A. A. G. P. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Pada Kinerja Organisasi Dengan Motivasi Kerja Sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.2, 1575-1603.

- Astini, N. K. A. T., dan Yadnyana, I. K. (2019). Pengaruh Penerapan GCG dan Budaya Tri Hita Karana pada Kinerja Keuangan LPD Di Kabupaten Jembrana. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 27.1, 90-118.
- Bali.bpk.go.id.2017. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. <http://denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/perda-3-2017.pdf> Diakses pada 29 Oktober 2022.
- Barney, J. (1991). Firm Resources And Sustained Competitive Advantage . Journal Of Management, Vol.17.1, 99-120.
- Boyatzis, R. (1982). Manajer yang kompeten: Sebuah model untuk kinerja yang efektif. John Wiley & Sons. New York.
- DetikBali.com (03 Juni 2022). Diduga Korupsi, Pengurus LPD Sangeh Badung Jadi Tersangka <https://www.detik.com/bali/berita/d-6108679/diduga-korupsi-pengurus-lpd-sangeh-badung-jadi-tersangka>. Diakses pada 28 September 2022
- Dewi, P. C. (2018). Pengaruh, Komitmen, Kompetensi dan Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan (studi pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Abiansemal) . Skripsi Universitas Udayana.
- Dewi, P. C. (2018). Pengaruh, Komitmen, Kompetensi dan Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan (studi pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Abiansemal) . Skripsi Universitas Udayana.
- FCGI. 2001. Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jakarta.
- Ghozali, Imam., (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam., (2021). Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan
- Handayani, N. K. P., Suryandari, N. N. A., dan Putra, G. B. B. (2020). Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. JURNAL KHARISMA VOL. 2.1, 11-21.
- Handayani, N. K. P., Suryandari, N. N. A., dan Putra, G. B. B. (2020). Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. JURNAL KHARISMA VOL. 2.1, 11-21.
- Juniar, Z dan Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Sasaran, Kompetensi Manajerial, Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 21.
- Juniar, Z dan Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Sasaran, Kompetensi Manajerial, Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 21.
- KNKG. 2006 Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakart
- Kusumasari, P. D., Sinarwati, N. K., dan Yuniarta, G. A. (2017). Pengaruh Penerapan PrinsipPrinsip Good Corporate Governance, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 12.
- Kusumasari, P. D., Sinarwati, N. K., dan Yuniarta, G. A. (2017). Pengaruh Penerapan PrinsipPrinsip Good Corporate Governance, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 12.Program SmartPLS 3.2.9 Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan. 2012. Pengaruh Locus Of Control Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Internal Auditor dengan Kultur Tri Hita Karana sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 3(1), h: 86100.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung. Alfabeta

Vita Indriyani Ni Made. 2018. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Budaya Tri Hita Karana Pada Kualitas Laporan Keuangan*. Tesis Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.

Windia, W. dan Dewi, R. K. 2007. *Analisis Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana*. Denpasar: Universitas Udayana

Wulantari, N. L. P., Sudiana, I. W., & Pramuki, N. M. W. A. (2022). Peran Kompetensi Manajerial Dalam Memoderasi Hubungan Good Corporate Governance Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sukawati. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 325-345.

Yandani, N. M. M., & Suryanata, I. G. N. P. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Manajerial Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pakraman Padangsembian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 24-37.

Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019- 2021

I Wayan Agus Dharmawan⁽¹⁾

Cokorda Gde Bayu Putra⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: agusdarmawan.kc@gmail.com

ABSTRACT

How effectively a company is run may be determined by looking at the share price. The buying and selling of a company's shares on the stock market is a good indicator of the health of the market. Investor perceptions of the entity's ability to boost earnings are the basis for this transaction's terms. This study's goal is to investigate the connection between financial success and stock prices for manufacturing firms involved in the consumer products sector that are listed on the Indonesia Stock Exchange between 2019 and 2021. The study's findings demonstrate the current ratio has a detrimental and statistically negligible effect on the stock prices of these firms. Similar to the Debt to Equity Ratio, the stock price of the firm has no positive or statistically significant effect. The Return On Equity and stock price of the firm have a negative and statistically insignificant association. On the other hand, Total Assets Turnover has a statistically significant positive influence on the company's stock price. Going forward, manufacturing businesses listed on the IDX should give top priority to increasing their Total Assets Turnover ratio since it will undoubtedly boost their share values.

Keywords: Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, Total Asset Turnover, Stock Price

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia memiliki dampak positif terhadap perkembangan semua perusahaan di negara ini. Ini mengakibatkan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin signifikan. Peran penting perkembangan perusahaan di Indonesia memberikan keyakinan kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan laba perusahaan dan membantu mengurangi beban operasional, yang akhirnya menciptakan penilaian positif terhadap harga saham perusahaan.

Harga saham adalah sebuah indikator penting untuk menilai sejauh mana manajemen suatu entitas berhasil. Kenaikan harga saham biasanya mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah secara konsisten menghasilkan laba selama periode tertentu, yang pada gilirannya memberikan kepercayaan kepada para investor untuk menyuntikkan modal mereka ke dalam perusahaan tersebut. Beberapa faktor mampu mempengaruhi harga saham suatu perusahaan, salah satunya termasuk beberapa variabel fundamental dan teknikal.

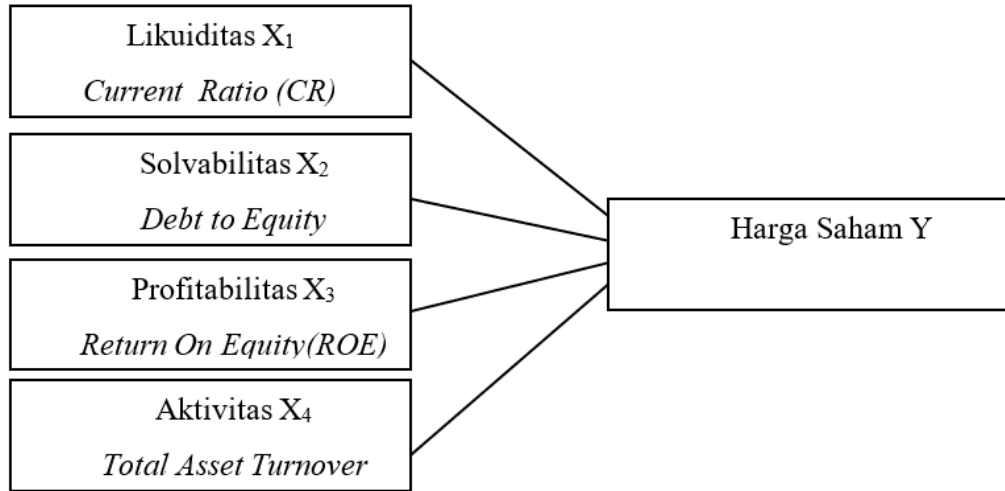
Informasi fundamental adalah data yang berkaitan dengan keadaan perusahaan dan biasanya ditemukan dalam laporan keuangan, menjadikannya satu-satunya pengukur utama kinerja keuangan perusahaan.. Penggunaan harga saham dengan mempertimbangkan faktor fundamental yang sangat penting untuk mengukur kinerja dan memperkirakan prospek perusahaan. Dalam kontrak keuangan, Anda diperbolehkan menggunakan berbagai kurs keuangan sebagai alat untuk mengurangi produktivitas organisasi. Beberapa contoh rasio keuangan yang digunakan untuk menentukan nilai saham yakni dengan rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, laba atas ekuitas, dan rasio yang mengurangi efisiensi perputaran seluruh aset.

Analisis laporan keuangan dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja keuangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan perusahaan dalam bertahan di tengah krisis dan bersaing dalam lingkungan yang kompetitif. Ini menjadi penting terutama dalam situasi yang tak terduga yang dapat berdampak negatif pada perusahaan, seperti yang terjadi pada akhir 2019 di Indonesia, dengan munculnya pandemi Covid-19 yang merugikan sejumlah perusahaan dari segi fundamental makroekonomi.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan kinerja beberapa perusahaan, namun ada beberapa perusahaan yang malah mengalami peningkatan harga saham selama masa pandemi. Sebagai contoh, perusahaan di sektor manufaktur barang konsumsi, seperti PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk (INKP), mengalami kenaikan harga saham yang sangat signifikan, mencapai 256,52%. Sementara itu, PT Kimia Farma Tbk (KAEF), yang berkontribusi di sektor manufaktur farmasi, mengalami kenaikan harga saham sebesar 520,69%. Ini menunjukkan peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang memengaruhi harga saham mereka.

Untuk mengevaluasi bagaimana kenaikan harga saham terjadi di perusahaan manufaktur yang bekerja dalam industri barang konsumsi, penelitian ini memanfaatkan berbagai faktor, seperti metrik likuiditas, tingkat solvabilitas, aktivitas operasional, dan profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan-perusahaan ini untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka selama pandemi Covid-19, yang pada gilirannya menghasilkan kenaikan harga saham. Selain itu, sektor ini memiliki keragaman yang luas dan cakupan pasar yang besar, yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap prospek kinerja keuangan dan harga saham perusahaan dalam jangka waktu panjang. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan di sektor ini juga menarik minat investor.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	
Likuiditas	33	.61	7.49	2.5603	1.39216	
Solvabilitas	33	.15	3.41	.9185	.81865	
Profitabilitas	33	.01	1.45	.3058	.39544	
Aktivitas	33	.30	2.09	1.1158	.56676	
Stock Price	33	140	53000	7300.76	11752.230	
Valid (listwise)	N 33					

Tabel 2 Hasil Uji Kelayakan dan Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7393.843	6677.522		1.107	.278
	Likuiditas	-1501.881	1387.252	-.247	-1.083	.288
	Solvabilitas	-4685.331	3234.576	-.453	-1.449	.159
	Profitabilitas	-5340.627	6283.725	-.250	-.850	.403
	Aktivitas	8138.883	3043.699	.545	2.674	.012

Dengan nilai t-statistik sekitar -1,082630 dan tingkat signifikansi sekitar 0,288, hasil analisis memperlihatkan bahwa Rasio Saat Ini memiliki dampak negatif. Tingkat signifikansi ini lebih tinggi daripada tingkat signifikansi umum 0,05. Akibatnya, hipotesis awal penelitian ini tidak

dapat diterima (H1 ditolak). Menuruthasil, rasio likuiditas saat ini hanya dapat menunjukkan jumlah sumber daya yng dapat digunkana untuk memnuhi kewjaibn jangka pendek dan tidak dapat secara menyeluruh meramalkan arus kas di masa depan.

Dengan nilai t-statistik sekitar -1,448514 dan tingkat signifikansi sekitar 0,159, hasil analisis menunjukkan bahwa rasio hutang ke kekayaan memiliki dampak negatif. Tingkat signifikansi ini lebih tinggi dari tingkat signifikansi standar, yaitu 0,05. Sehingga, hipotesis kedua dari penekitian ini ditak dapat diterima (H2 ditolak). Kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang, di jannnga pendek mataupun jangkanpanjang, diukur dengan Debt to Equity Ratio. Hasil penelitian meperlihatkan bisnis mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar kewajiban hutang mereka dalam situasi ini, terutama jika rasio ini meningkat. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus meningkatkan pendapatan agar dapat membayar dan meminjam hutang.

Dengan nilai t-statistik sekitar -0,849914 dan tingkat signifikansi sekitar 0,403, hasil yang didapat bahwa Return On Equity (ROE) mempunyai dampak yang negatif. Tingkat signifikansi ini lebih tinggi dari tingkat signifikansi standar, yaitu 0,05. Sehingga, hipotesis ketiga penelitian ini tidak dapat dietrima (H3 ditolak). Dalam studi ini Variabel Return On Equity (ROE) tidak berdampak yang signfikan terhqadap harga saham. Ini mungkin karena ROE hanya menunjukkan tingkat pengembalian investasi bagi pemegang saham biasa dan tidak menunjukkan prospek perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, pasar tampaknya tidak menganggap ROE sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi para investor.

Dengan nilai t-statistik sekitar 2,674011 dan tingkat signifikansi sekitar 0,012, hasil analisis menunjukkan bahwa Total Asset Turnover memiliki dampak yang positif. Tingkat signifikansi ini lebih rendah daripada tingkat signifikansi yang biasa digunakan, yaitu 0,05. Sehingga, hipoities keempat penelritan ini dapat diterima (H4 diterima). Kompetensi perusahaan untuk mengawasi semua investasi atau aset, sehingga penjualan ditunjukkan oleh total turnover aset. Jika nilai rasio ini lebih tinggi, harga sahamnya lebih tinggi, karena investor percaya bahwa bisnis dapat mengelola asetnya dengan baik. Dengan kata lain, penggunaan aset yang efisien dapat menguntungkan harga saham perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1. Rasio Current berkorelasi negatif seerta tidak signifikan dengan harga saham; 2. Rasio Utang ke Ekuitas berkorelasi negatif dengan harga saham, tetapi tidak signifikan; 3. Return on Equity berkorelasi negatif dan tidak signifikan dengan harga saham; dan 4. Turnover Total Asset berkorelasi positif dan signifikan dengan harga saham.

Daftar Pustaka

- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. Bandung: PT Alfabeta.
- Syaiful Bahri (2018) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) JRAK Vol.9 No.1 2018 Hal. 1 – 21
- Made Galih Wisnu Wardana, Muhammad Ali Fikri (2019) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar. JURNAL FOKUS, Volume 9, Nomor 2 September 2019.
- Vika Qorinawati, Santosa Adiwibowo (2019) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Emiten Yang Konsisten Masuk Dalam Indeks Lq45 Tahun 2017-2015). Journal Of Accounting Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019, Halaman1-11 ISSN (Online): 2337-3806.
- Daniar Krisna S, Triyonowati (2021) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Food And Beveragesdi Bei. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen : Volume 10, Nomor 5, Mei 2021.
- Vina Apriani, Situngkir (2021) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham AKUNTABEL18(4), 2021 762-769 journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL pISSN: 0216-7743-eISSN: 2528-1135
- Karimatus Zahr odanS. Hikmah Jamil (2021) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi Periode 2017-2019. Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics, Volume 4Nomor 1 Juni 2021
- Kalbe Farma Tbk. (2019,2020, 2021) Laporan Tahunan Kalbe Farma Tbk. Diakses tanggal 20 februari 2023 melalui <https://www.idx.co.id/id>
- Indofood Sukses Makmur Tbk. (2019, 2020, 2021). Laporan Tahunan Indofood Sukses Makmur Tbk. Diakses tanggal 20 februari 2023 melalui <https://www.idx.co.id/id>
- Gudang Garam Tbk. (2019, 2020, 2021). Laporan Tahunan Gudang Garam Tbk. Diakses tanggal 20 februari 2023 melalui <https://www.idx.co.id/id>
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (2019, 2020, 2021). Laporan Tahunan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Diakses tanggal 20 februari 2023 melalui <https://www.idx.co.id/id>
- Chandra Asri Petrochemical Tbk. (2019, 2020, 2021). Laporan Tahunan Chandra Asri Petrochemical Tbk. Diakses tanggal 20 februari 2023 melalui <https://www.idx.co.id/id>
- Barito Pacific Tbk. (2019, 2020, 2021). Laporan Tahunan Barito Pacific Tbk. Diakses tanggal 20

Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Tabanan

Ni Made Ari Artika Swari⁽¹⁾

I Wayan Budi Satriya⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jln. Sanggalangit, Tembau Penatih, Denpasar Timur
 e-mail: @gmail.com

ABSTRACT

Good Corporate Governance is a concept used to create a system that regulates and controls the company's management properly by taking into account the interests stakeholder such as government, administrators, community, and village manners within the LPD environment. The GCG principles are Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. The purpose of this study was to determine the effect of GCG on the performance of village credit institutions. The theory in this study uses agency theory. This research was conducted in Tabanan District, Tabanan Regency with a total population of 80 people consisting of 12 LPDs. The sampling technique used is saturated sampling technique, where all members of the population are used as samples. The analysis technique used is multiple linear regression analysis with data collection methods using a questionnaire. Based on the results of the research, it shows that transparency, accountability, responsibility, independence and fairness have a positive and significant effect on the performance of village credit institutions. The results of this study can be used as a reference to provide additional important information and input Good Corporate Governanve. By taking the components on GCG principles which include: Transparency, Accountability, Responsibility, Indepedency dan Fairness. By implementing good corporate governance, companies are expected to be able to reduce agency conflicts and be able to improve and maintain a company's performance.

Keywords: *Transparency, Accountability, Responsibility, Indepedency dan Fairness.*

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pertama kali didirikan pada tahun 1985 sebagai lembaga milik desa yang membantu masyarakat desa untuk memperoleh dana, baik yang dipergunakan sebagai modal usaha maupun kegiatan lainnya. Pembentukan LPD bertujuan untuk menunjang peran desa adat dalam menopang kehidupan sosial, budaya, adat dan agama agar desa adat mempunyai sumber pembiayaan yang mandiri dan berkelanjutan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan urusan adat atau urusan kemasyarakatan lainnya. Dalam menjalankan LPD maka sangat diperlukan *Good Corporate Governanve* agar kinerja pegawai meningkat sehingga LPD dapat berjalan dengan baik.

Definisi kinerja adalah keberhasilan personil, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu

organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Faktor yang mempengaruhi kinerja pada organisasi adalah *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar di dalam suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan serta etika bisnis. GCG dapat membantu dalam mencegah terjadinya permasalahan dalam perusahaan, kecurangan serta kejahatan yang berhubungan dengan keuangan dari organisasi (Mulyawan, 2017).

Meskipun secara umum LPD dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, namun keberhasilan ini tidak dirasakan oleh seluruh LPD yang ada. Dikutip dari detik.com (Chairul Amri Simabur, 2022), terdapat pemberitaan sebagai salah satu kasus yang ada pada LPD Desa Adat Kota Tabanan. Terdapat pemberitaan LPD Desa Adat Kota Tabanan membuat laporan fiktif keuangan. Dimana keuangan LPD yang semestinya tidak sehat atau bermasalah justru dilaporkan sehat setiap tahunnya mengakibatkan kinerja LPD Kota Tabanan belum maksimal dan mengalami penurunan kondisi kesehatan. Ketidakehatan LPD disebabkan oleh kurangnya pemahaman kerja dari para pengurus LPD dalam mengelola LPD serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal. Selain itu dilihat dari data LPLPD adanya penurunan asset mengakibatkan banyak kredit macet sehingga banyak nasabah yang tidak bisa mencairkan dananya. Pada LPD Kecamatan Tabanan mengalami penurunan ROA sebesar 0,91% (dari 2,63% menjadi 1,72%).

Berdasarkan fenomena diatas dapat diketahui bahwa LPD belum mampu memenuhi penerapan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) secara maksimal, dilihat dari kurangnya pengungkapan informasi kerja perusahaan baik ketepatan waktu dan akurasinya tidak ada keterbukaan serta tingkat kesehatan LPD yang menurun membuat tata kelola LPD terjadi permasalahan karena adanya kredit macet.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Janses dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai satu kontrak yang mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk menjalankan aktivitas perusahaan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pada penelitian ini yang bertindak sebagai prinsipal adalah desa pakraman yang merupakan pemilik LPD sedangkan yang bertindak sebagai agen adalah pengelola LPD. Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak *principal* yang dalam hal ini

Desa Pekraman mendelegasikan tugas pengelolaan LPD kepada pengurus LPD yang bertindak sebagai *agent*. Pelimpahan tugas dari prinsipal ke agen inilah yang nantinya akan menimbulkan adanya hubungan keagenan yang memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Indriati (2018) menyatakan untuk mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen maka diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Mekanisme yang dapat dipakai *good corporate governance* yang diharapkan dapat menjadi sistem yang memberikan petunjuk untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham.

Good Corporate Governance merupakan konsep yang digunakan untuk menciptakan sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan manajemen perusahaan dengan baik dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* seperti pemerintah, pengelola, masyarakat, dan krama desa dalam lingkungan LPD. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* diharapkan mampu untuk mengurangi terjadinya konflik keagenan dan mampu memperbaiki serta mempertahankan kinerja suatu perusahaan. Prinsip-prinsip GCG menurut buku pedoman KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*: 2006) dikutip yandani (2019).

1. Transparansi (*Transparasy*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountibility*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Kinerja LPD merupakan salah satu faktor penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja usaha. Kinerja LPD merupakan hasil keputusan manajemen yang ditujukan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Kualitas masing-masing dari perusahaan dikatakan baik jika tingkat kinerja perusahaan yang dikelolanya tinggi atau sudah maksimal. Bastian (2006), menjelaskan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

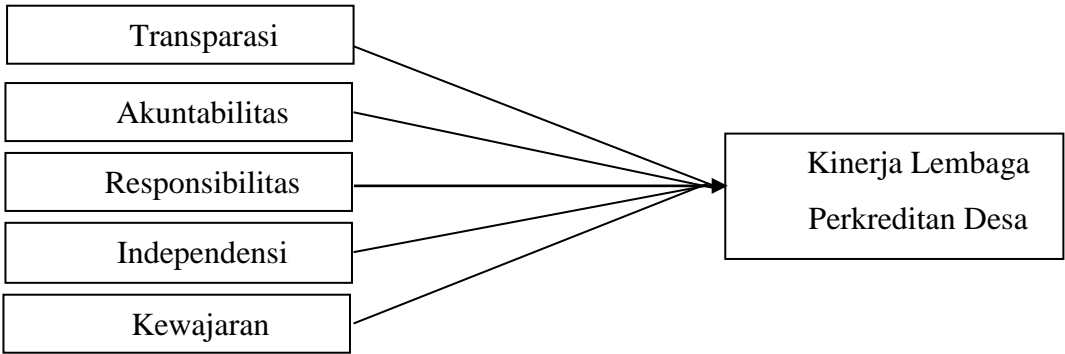
Menurut teori dan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arix Nirmala (2022), Intan Budi (2023), Ayu Mila Yanti (2022) maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Tabanan
- H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Tabanan
- H3: Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Tabanan
- H4: Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Tabanan
- H5: Kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Tabanan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. (Sugiyono, 2010). Penelitian ini

menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desas (LPD) se-Kecamatan Tabanan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja sejumlah 80 orang pada 12 LPD se-Kecamatan Tabanan. Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling jenuh dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Responden yang terlibat dalam penelitian ini ialah pengelola LPD yaitu ketua, badan pengawas internal, sekretaris, bendahara, tata usaha bagian kredit dan bagian umum beserta jajarannya, kasir bagian dana dan bagian pembukuan beserta jajarannya yang bertugas dalam kegiatan LPD. Uji Validitas, Reabilitas digunakan untuk menguji instrumen penelitian dan Teknik analisis data yang digunakan adalah Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Uji t dan Uji F. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					Unstandardized Residual
N					80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean				.0000000
	Std. Deviation				1.44662002
Most Extreme Differences	Absolute				.099
	Positive				.061
	Negative				-.099
Test Statistic					.099
Asymp. Sig. (2-tailed)					.050 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig. 99% Confidence Interval		Lower Bound		.378
			Upper Bound		.403

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil uji normalitas yang tersaji dalam tabel 1 bahwa nilai *asympt.sig* (2-tailed) sebesar 0,050 = 0,050. Berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nilai *monte carlo sig.* (2-tailed) sebesar 0,391 > 0,050. Berkesimpulan data berdistribusi secara normal, karena nilai *p-value* yang di dapat lebih besar dari 0,050 (tingkat kepercayaan statistic 95% atau 0,050).

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TRANSPARASI	.882	1.134
	AKUNTABILITAS	.787	1.270
	RESPONSIBILITAS	.730	1.369
	INDEPENDENSI	.898	1.113
	KEWAJARAN	.734	1.362

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel transparasi (X1) sebesar 0,882 dengan nilai VIF 1,134. Nilai tolerance variabel akuntabilitas (X2) sebesar 0,787 dengan nilai VIF 1,270. Nilai tolerance variabel tanggungjawab (X3) sebesar 0,730 dengan nilai VIF 1,369. Nilai tolerance variabel independensi (X4) sebesar 0,898 dengan nilai VIF 1,113. Nilai tolerance variabel kewajaran (X5) sebesar 0,734 dengan nilai VIF 1,362. Nilai tolerance kurang dari 0,1 dan VIF tidak lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	4.085	2.620		1.559	.123
	TRANSPARASI	-.102	.152	-.081	-.671	.504
	AKUNTABILITAS	-.051	.099	-.066	-.512	.610
	RESPONSIBILITAS	-.115	.086	-.178	-1.338	.185
	INDEPENDENSI	.054	.137	.047	.390	.698
	KEWAJARAN	.091	.139	.087	.656	.514

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan pada hasil uji glejser pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi variabel berada diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Table 5. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	Adjusted R Square	R Square	Std. Error of the Estimate
1	.830 ^a	.667	.688	1.495

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari hasil pengujian pada tabel 5 menunjukkan besarnya *Adjusted R-Square* (R^2) adalah 0,667 menunjukkan bahwa 66,7% variabel Kinerja LPD dipengaruhi oleh Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Dan Kewajaran. Sedangkan sisanya sebesar 33,3% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F-Test)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	364.876	5	72.975	32.664	.000 ^b
	Residual	165.324	74	2.234		
	Total	530.200	79			

a. Dependent Variable: KINERJA LPD

Sumber: Data Diolah, 2023

Pengujian dilakukan dengan membandingkan derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$). Hasil Uji F menunjukkan nilai F.hitung sebesar 32,664 dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran berpengaruh terhadap Kinerja LPD. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t-Test)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.453	3.855		1.933	.057
	Transparansi	.654	.224	.202	2.922	.005
	Akuntabilitas	.453	.146	.227	3.104	.003
	Responsibilitas	.570	.127	.341	4.495	.000
	Independensi	.452	.202	.153	2.236	.028
	Kewajaran	1.049	.204	.390	5.146	.000

a. Dependent Variable: KINERJA LPD

Sumber: Data Diolah, 2023

1. Pengaruh Transparansi (X1) terhadap Kinerja LPD (Y) Se-Kecamatan Tabanan.

Berdasarkan tabel 7 diperoleh nilai koefisien parameter sebesar 0.654 dengan tingkat

- Prinsip Gcg Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar Bali.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.3 (2014): 559-573 3(ISSN: 2302-8556): 559–73.
- Kusuma putra, Marsa, and Wayan Cipta. 2021. “Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Manajemen Risiko Pada Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng.” *Jurnal Akuntansi Profesi* 12(2): 451.
- Negari, Anindhita Ayu, and Nur Fadrijh Nur Asyik. 2018. “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Pegawai.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(08): 1–17.
- Ni Putu Arix Nirmala, Ni Made Suci, and Kadek Sinarwati. 2022. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6(2): 182–91.
- Nurmaria Rahmatika, Kirmizi & Restu Agusti. 2014. “PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Pada PT Angkasa Pura II).” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3(2): 148–59.
- Puspasari, Ni Kadek, and I Ketut Sujana. 2021. “The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure and Board Remuneration on Financial Performance with the Presence of Woman in the Good Corporate Governance Structure.” *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 5(1): 637–42. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR%0Awww.ajhssr.com>.
- Soraya, Bella Elba, and Ketut Alit Suardana. 2018. “Budaya Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Bali.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 23(3): 2414–43. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/39009>.
- Sugiyono. 2014. “Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.” In Bandung: Alfabeta.
- . 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taha, Irma Andi. 2020. “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance: Studi Kasus Pada Perusahaan Air Minum (Pam) Tirta Mangkaluku Kota Palopo.” *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 5(1): 46–64.

Yandani, Ni Made Mery, and I Gusti Ngurah Putra Suryanata. 2019. "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Manajerial Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pakraman Padangsembian." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 4(1): 24.

Yanti, Si Ayu Mila, Ni Luh Gde Novitasari, and Ni Luh Putu Sandrya Dewi. 2022. "Pengaruh Penerapan Prinsip Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan." *Jurnal Kharisma* 4(3): 333–42.

Yudhasena, I Gede Iswara, and I G. A. M. Asri Dwija Putri. 2019. "Pengaruh Good Government Governance, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)." *E-Jurnal Akuntansi* 28: 434.

Analisis Penerapan *Green Accounting* Pada Pertenunan Putri Ayu

Dewa Ayu Made Vionavianti⁽¹⁾

I Putu Fery Karyada⁽²⁾

Ni Putu Yeni Yuliantari⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia
 Jl. Sanggalangit, Penatih, Denpasar Timur, Bali
e-mail: putudewa823@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate whether or not Putri Ayu could benefit from using green accounting in her textile business. Research was conducted at Putri Ayu Weaving, located in Astina Field, Blahbatuh District, Gianyar Regency, Bali; the company's Financial Statements served as the study's primary research object. Observation, interviews, and careful documentation were used to compile the data for this study, which was then analysed using descriptive qualitative methods. Research shows that Putri Ayu Weaving has implemented waste management, but the company has failed to adequately disclose the associated costs. Although waste management expenses are not broken out in a discrete financial report, they are included in the cost of goods sold line of Putri Ayu Weaving's profit and loss statement. Based on the findings of the study, the government and affiliated organisations will start advising and educating businesses on the value of waste management practises, so that they can plan accordingly.

Keywords: Green Accounting, Presentation of Costs, Financial Reports

PENDAHULUAN

Akuntansi ramah lingkungan sebagai praktik mendapatkan daya tarik di Eropa pada tahun 1970an. Akuntansi hijau mengacu pada metode pencatatan keuangan yang "sadar lingkungan" (Cohen dan Robbins 2011: 190) dan "hemat biaya" (Aniela, 2012). Karena akuntansi ramah lingkungan adalah langkah pertama dalam memecahkan masalah lingkungan, maka akuntansi hijau juga dapat dipahami sebagai cabang akuntansi yang memperhitungkan dan mengevaluasi biaya yang terkait dengan menghindari kerusakan lingkungan atau memitigasi dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosial (Hamidi, 2019). Fungsi utama akuntansi hijau adalah untuk mengatasi masalah sosial yang berkaitan dengan lingkungan, dan berpotensi mempengaruhi praktik bisnis di masa depan yang berdampak pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di negara mana pun. Hal ini juga dapat digunakan sebagai bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingannya.

Perlu adanya kesadaran dari suatu perusahaan dan masyarakat sekitar mengenai lingkungannya agar dapat memberikan solusi untuk mengadakan gerakan peduli lingkungan. Setiap perusahaan atau industri yang berskala kecil ataupun besar dapat menerapkan konsep green accounting ini. Akuntansi ramah lingkungan dapat mengenali, mengukur, mencatat, merangkum, dan melaporkan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan dalam laporan akuntansi untuk membantu penelitian dan pengambilan keputusan ekonomi dan non-ekonomi. Karena kamu bertanya... Yuliana & Sulistyawati (2021). Akuntansi ramah lingkungan merinci bagaimana memasukkan biaya lingkungan ke dalam bisnis dan menetapkan tanggung jawab atas biaya tersebut. Akuntansi hijau dapat meningkatkan manajemen dengan menilai aktivitas lingkungan. Dengan demikian, bisnis tidak dapat mengalokasikan sumber daya tanpa mempertimbangkan lingkungan.

Sektor manufaktur UMKM menggerakkan perekonomian Indonesia. Bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi diubah menjadi produk yang lebih bernilai oleh industri. UMKM meningkatkan ketahanan ekonomi, lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Namun selain itu, kerusakan lingkungan juga dapat terancam akibat pembuangan sampah dan limbah industri yang sembarangan oleh para pemilik usaha UMKM, sehingga dapat berdampak buruk bagi masyarakat setempat. Karena usaha kecil dan menengah (UKM) berkontribusi terhadap perekonomian tetapi juga berperan dalam menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, maka mereka harus mempelajari dan menerapkan konsep akuntansi hijau untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak menyebabkan pencemaran lingkungan (Yuliana & Sulistyawati, 2021).

Salah satunya UMKM yang cukup terkenal di Bali yaitu Pertenunan Putri Ayu yang terletak di Gianyar. Pertenunan Putri Ayu dapat dikatakan sebagai industri yang memiliki peran yang strategis dalam membantu pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini telah memiliki 45 tenaga kerja dan alat tenun (ATM dan ATBM). Volume produksi yang dihasilkan rata-rata 2.000 Meter kain tenun per bulan. Terdapat banyak pencemaran yang diakibatkan dari limbah industri dan rumah tangga yang terjadi di Gianyar. Dimana pembuangan limbah jenis industri dan rumah tangga ini sudah berlangsung lama, dan hal tersebut pun belum mendapat perhatian serius dari instansi terkait. Limbah cair yang mengalir di hampir seluruh sistem pembuangan, dari got hingga air irigasi sudah terkontaminasi. Jika pembiaran terus berlangsung, pencemaran lingkungan lebih parah pun kini menghantui kota Gianyar (kilasbali.com/2022).

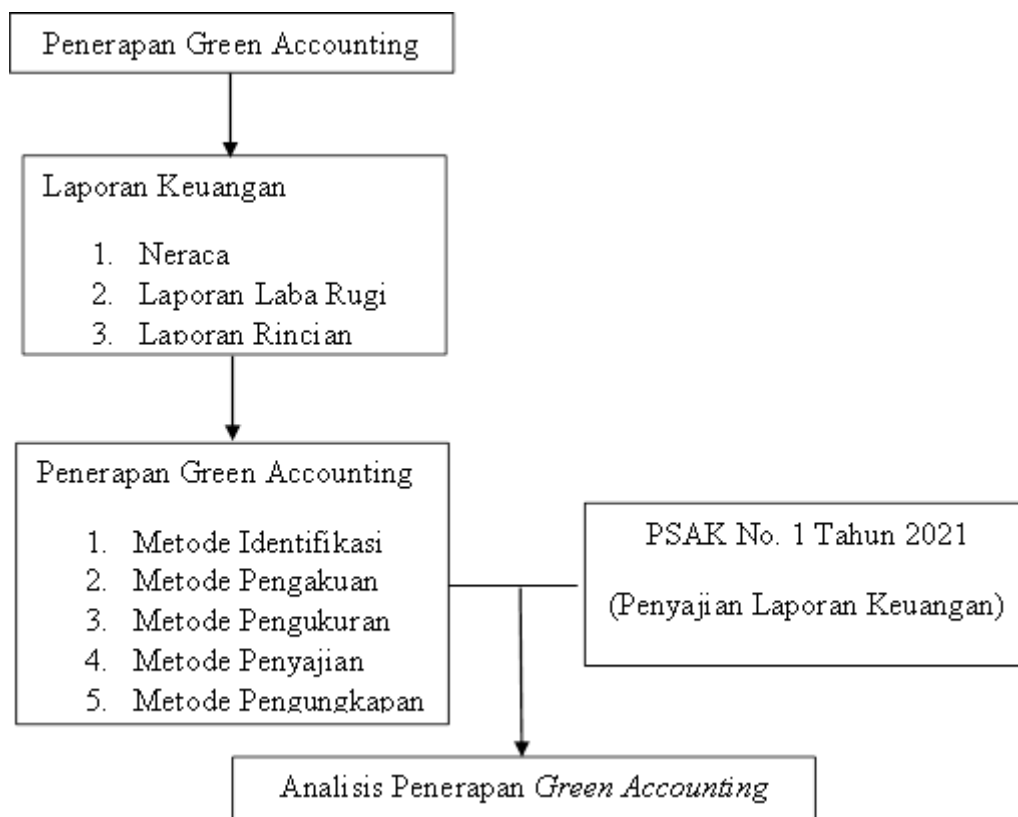
bahwa perusahaan menghasilkan limbah padat sebagai produk sampingan dari operasinya dan menggunakan sistem pengelolaan limbah internal dan eksternal.

Berdasarkan temuannya, Yuliana dan Sulistyawati (2021) menyimpulkan bahwa Pabrik Lele Kecap telah menerapkan akuntansi hijau terhadap limbah pabrik yang akan dibuang ke sungai dan selokan terdekat. Namun, penerapan biaya ramah lingkungan untuk memastikan dana akuntansi ramah lingkungan belum terjadi.

Berdasarkan kajiannya terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang memproduksi batik, Herlindawati dkk. (2022) menyimpulkan bahwa dua dari tiga orang mempunyai pemahaman dan kepedulian yang baik terhadap perlindungan lingkungan melalui penerapan Green Accounting. Mereka sadar bahwa biaya lingkungan hidup harus dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan, namun mereka tidak memiliki pengetahuan untuk memperhitungkannya secara akurat.

METODE PENELITIAN

Kerangka berpikir adalah peta mental tentang bagaimana suatu kumpulan pengetahuan terhubung dengan isu-isu dunia nyata (Sugiyono, 2019:95).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

dimasukkannya akun tambahan terkait akuntansi hijau dalam laporan keuangan perusahaan, akuntansi hijau merupakan prasyarat untuk akuntansi hijau.

- 3) Melakukan pembahasan dari seluruh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis terkait biaya-biaya pengelolaan limbah pada Pertenenan Putri Ayu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertenenan putri ayu merupakan salah satu pertenenan yang memiliki spesifikasi produk yang berbeda dengan usaha tenun lainnya yang ada dibali. Usaha ini telah melakukan revolusi dalam teknik pembuatan kain tenun sejak tahun 1997. Salah satunya, membuat kain tenun dengan teknik airbrush dan tetap menggunakan campuran warna alami. Terdapat tiga jenis kain yang dibuat oleh industri pertenenan putri ayu yaitu batik, songket dan endek. Seiring berkembangnya teknologi serta minat masyarakat terhadap kain tradisional, para pengrajin tenun terus melakukan inovasi dalam teknik, motif dan warna kain tenun. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa limbah yang dihasilkan oleh pertenenan putri ayu, salah satunya yaitu limbah cair yang berasal dari proses pewarnaan/pencelupan benang. Untuk bertanggung jawab akan hal tersebut pertenenan putri ayu membuat sistem penampungan yang efektif dengan menyediakan bak penampungan untuk limbah cair, hal tersebut dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan adanya pembuatan bak penampungan tersebut, muncul biaya-biaya terkait dengan limbah tersebut dan pertenenan putri ayu membebankan biaya yang terkait *green accounting* tersebut kedalam laporan keuangan perusahaan.

Penerapan *green accounting* pada industri pertenenan bertujuan untuk mengukur, memantau serta melaporkan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional perusahaan dalam proses produksi suatu kain tenun. Penerapan *green accounting* pada pertenenan putri ayu yaitu melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan saat proses produksi serta melakukan pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan limbah tersebut. Penerapan *green accounting* ini merupakan respon terhadap keinginan *stakeholder* yang memperhatikan faktor lingkungan, selain faktor keuangan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan *green accounting* dengan baik dianggap positif oleh *stakeholder*, karena menunjukkan perhatian terhadap lingkungan sekitar dan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial. Pada pertenenan putri ayu, siklus penerapan *green accounting* melibatkan langkah-langkah berikut ini:

Meskipun Putri Ayu telah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam bidang akuntansi ramah lingkungan, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan seperti belum menyajikan pelaporan biaya lingkungan secara rinci serta pengendalian limbah yang dihasilkan belum diperhatikan secara maksimal, agar tidak mencemari lingkungan sekitar pabrik.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertunenan Putri Ayu telah mengambil langkah awal dalam penerapan *green accounting* yaitu dengan membuat bak penampungan limbah sebagai bentuk kesadaran terhadap lingkungan. Namun, penerapan *green accounting* pada pertunenan putri ayu perlu ditingkatkandengan mengidentifikasi aspek lingkungan lainnya dalam kegiatan produksi. Pertunenan Putri Ayu saat ini tidak mempunyai laporan keuangan tersendiri, Biaya pembuangan limbah Perenunan dirinci dalam harga pokok penjualan Putri Ayu di laporan laba rugi. Tidak jelas berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh biaya yang terkait dengan pengolahan sampah. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, Tenun Putri Ayu tidak memberikan informasi dalam laporan laba rugi mengenai aset terkait pengolahan limbah yang dicatat sebagai bagian dari operasional pengolahan limbah perusahaan.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran Bagi Pertunenan Putri Ayu untuk merinci biaya pengelolaan limbah dalam laporan laba rugi perusahaan, agar perusahaan terlihat lebih transparan dan akuntabel dalam mengungkapkan pengelolaan limbah, dan perlu mempertimbangkan untuk mengungkapkan dengan lebih jelas asset yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dalam laporan laba rugi.. Bagi pemerintah disarankan dapat memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya biaya pengolaan limbah yang baik supaya para pelaku bisnis mengetahui kedepannya diharapkan untuk lebih memperhatikan pengolaan limbah dengan baik.

Daftar Pustaka

- Amri, N. F. (2015). Teori legitimasi. *Retrieved May, 15, 2020*.
- Aniela, Y. (2012). Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 1(1)*.
- Citrayantie, T., Said, D., & Mediaty, M. (2020). GREEN ACCOUNTING DALAM PENELITIAN KEPUSTAKAAN. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis,*

5(1), 1–11.

DAMNUR, J. (2013). *Analisis penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) berdasarkan laporan berkelanjutan (studi kasus pada pt. kaltim prima coal, tbk.)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Diani, A. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan (Green Accounting) dalam Pengelolaan Limbah Pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Dolok Ilir*. 3. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7423%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7423/SKRIPSI_AFTIKA_DIANI.pdf?sequence=1

Hamidi, H. (2019). Analisis Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Equilibiria*, 6(2).

Herlindawati, D., Kantun, S., Widayani, A., & Tiara, T. (2022). Pemahaman dan kepedulian dalam implementasi green accounting oleh UMKM produsen kain batik. *AKUNTABEL*, 19(1), 22–32.

Hidayah, N. (2019). *Pengaruh Sertifikasi Lingkungan Internasional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Carbon Emission Disclosure dengan Media Exposure sebagai Variabel Moderating*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ikhsan, A. (2008). *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kusumaningtias, R. (2013). Green Accounting, Mengapa dan Bagaimana? *Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 978–979.

Lindrianasari, L. (2007). Hubungan antara kinerja lingkungan dan kualitas pengungkapan lingkungan dengan kinerja ekonomi perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 11(2), 159–172.

Mahesa, D. K. N., & Amna, L. S. (2022). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN PADA PABRIK PENGOLAHAN KAYU CERMAI JAYA. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1877–1886.

Permatasari, A. Y. (2014). *PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN TERHADAP PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI (studi Kasus pada PT. Kimia Farma (persero) Tbk Plant Bandung pada periode 2010-2012)*. Fakultas Ekonomi Unpas.

Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2018). Analisis Penerapan Green Accounting Pada Industri Batik Laweyan. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 3(02).

Puspita, D. A., & Surendra, A. (2019). ANALISIS PENERAPAN GREEN ACCOUNTING (Studi Empiris Pada UKM Penggergajian Kayu UD Mega Cipta di Desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Kabupaten Sragen). *SMOOTING*, 17(3), 5–11.

Putri, N. A. H. A., Indraswari, A., Wulandari, Y., & Juniatmoko, R. (2022). Green Accounting: Analisis Penerapan Green Innovation Pada Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu di Kartasura.

Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia

Ni Ketut Ayu Manik Sugiantari⁽¹⁾

Kadek Dewi Padnyawati⁽²⁾

Ni Made Wisni Arie Pramuki⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Penatih, Denpasar, Bali, 80238, Indonesia

e-mail: ayusugiantari726@gmail.com

ABSTRACT

In order to ascertain whether restructuring policies can have an indirect impact on a company's financial performance, this study will compare financial performance before and after the restructuring policy to see if there is a discernible difference. Methods of qualitative research were applied in this study. The banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2018 and 2021 make up the study's population. Purposive sampling is the methodology employed in this study to select the sample, which selects the sample based on specific considerations or criteria. Financial records from each quarter are the primary source of secondary data for this study. The findings of this study show that there are variations in financial performance before and after the introduction of the loan restructuring policy.

Keywords: *Financial Performance, Credit Restructuring Policy, Return on Assets (ROA), Return on Assets (ROE)*

PENDAHULUAN

Tiga tahun sudah pandemi Covid-19 melanda Indonesia, berbagai sektor sudah terkena dampak dari Virus Covid-19. Di masa pandemic pemerintah berupaya menangani masalah yang ada pada sector kesehatan maupun ekonomi. Melihat bukan hanya sector kesehatan yang harus ditangani pemerintah pun mulai mengeluarkan berbagai kebijakan guna untuk menopang perekonomian Indonesia yang mulai tidak stabil. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya yaitu Kebijakan Restrukturisasi, mengingat pada masa pandemic sector perekonomian yaitu perbankan yang merupakan salah satu penggerak perekonomian mengalami tekanan dan ketidakstabilan yang ditandai dengan penurunan pendapatan operasional.

Kebijakan Restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK untuk mendorong roda perekonomian tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional. Dalam kebijakan dijelaskan bahwa bank ataupun perusahaan pembiayaan untuk memberikan restrukturisasi atau keringanan angsuran kredit kepada debitur yang terdampak Pandemi Covid-19 . Kebijakan Restrukturisasi memberikan keringanan dalam membayar hutang karena syaratnya yang lebih lebih lunak dibandingkan

syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya restrukturisasi hutang. Hal ini menyebabkan posisi keuangan debitur dapat diperbaiki dan juga dapat meringankan angsuran dari debitur (Faradina & Gayatri, 2016). Kebijakan Restrukturisasi merupakan salah satu keputusan perusahaan untuk melakukan kewajiban dalam menata kembali perusahaan dalam menghindari atau untuk menyelamatkan perusahaan dari kesulitan keuangan yang di alami perusahaan pada masa Pandemi Covid-19.

Sebuah perusahaan yang melakukan kebijakan restrukturisasi kredit selain untuk memperbaiki keadaan perusahaan secara tidak langsung juga memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaannya. Perusahaan yang mengalami penurunan kinerja maka perlu melakukan perbaikan atau restrukturisasi. Kinerja keuangan merupakan salah satu kinerja perusahaan yang perlu diperhatikan karena dapat memberikan bayangan terkait keadaan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek pengumpulan dana dan penyaluran dana. Menurut beberapa penelitian terkait restrukturisasi dan dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan yang dilakukan diberbagai negara, diterangkan bahwa kebijakan restrukturisasi mampu membantu kinerja keuangan dalam melakukan perbaikan.

Karena penelitian dengan topik Kebijakan Restrukturisasi masih jarang ditemukan, penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya kebijakan restrukturisasi dimana penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan perusahaan perbankan dikarenakan menyadari pentingnya peran bank terhadap dampak ekonomi dari kegagalan bank dan mengidentifikasi permasalahan bank sehingga kegagalan dapat dicegah. Penelitian ini menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu profitabilitas yang di proksikan dengan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Rasio ini menunjukkan tren kinerja perusahaan dalam satu periode dan juga menjadi acuan penilaian efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Penelitian ini menemukan apakah kebijakan restrukturisasi dapat memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan, hal ini terlihat dari ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan yang signifikan sebelum dan sesudah kebijakan restrukturisasi.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja adalah indikasi sejauh mana suatu organisasi menjalankan kegiatan, program, atau kebijakan dengan tujuan mencapai visi, misi, dan sasaran mereka. Kinerja ini sangat

tergantung pada strategi perencanaan organisasi. Khususnya, kinerja keuangan mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengelola keuangan mereka secara efisien. Fahmi (2018) menggambarkan kinerja keuangan sebagai hasil yang diperoleh dari berbagai aktivitas perusahaan. Ini dapat diartikan sebagai evaluasi untuk memahami sejauh mana perusahaan mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang benar dan tepat. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan rasio Profitabilitas.

Dalam karya Lubis (2019) oleh Harahap, rasio profitabilitas dijelaskan sebagai indikator kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya, termasuk operasi penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan faktor lainnya. Sementara itu, Kasmir (2014:115) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai perbandingan yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengelola asetnya secara efisien, yang tercermin dalam laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) sebagai indikator utama.

Berikut rumus perhitungan *Return on Assets* (ROA).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

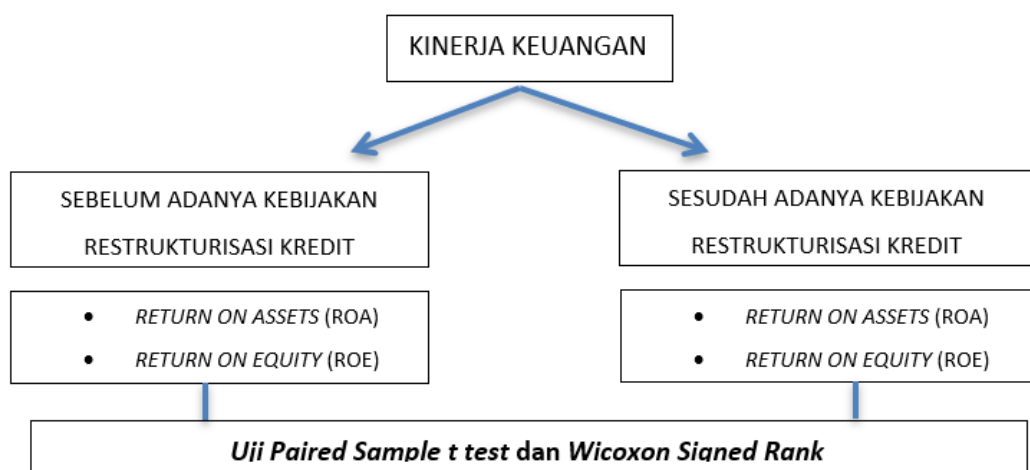
Berikut rumus perhitungan *Return on Equity* (ROE)

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Febi dan Eko (2021) menjelaskan bahwa restrukturisasi kredit adalah tindakan perbaikan yang diambil oleh bank ketika debitur menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam transaksi kredit. Tujuan utama dari restrukturisasi kredit adalah untuk membantu debitur atau nasabah agar mereka dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Selain itu, restrukturisasi kredit juga bermanfaat bagi bank, karena dapat membantu bank menjaga kualitas kreditnya dengan mencegah terjadinya kredit macet, yang merupakan indikator penting bagi kesehatan bank, dan mengurangi biaya cadangan yang harus disiapkan untuk mengatasi kredit macet, sehingga meningkatkan keuntungan bank.

Bagaskara (2021) juga menyebutkan bahwa restrukturisasi kredit melibatkan berbagai tindakan, seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pinjaman, pengurangan bunga utang dan pokok, peningkatan kredit, serta konversi kredit menjadi saham sementara. Ini adalah langkah-langkah yang dapat membantu debitur mengatasi kesulitan keuangan mereka dan memperbaiki situasi mereka dalam transaksi kredit..

Kerangka Berpikir



Hipotesis Penelitian

H1 : Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)*.

H2 : Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Equity (ROE)*

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi yang menjadi pusat perhatian. Untuk menentukan sampel penelitian, kami memilih metode yang disebut purposive sampling. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif yang mendasarkan analisis pada data berbentuk angka. Data yang kami gunakan adalah data sekunder yang kami peroleh dari laporan keuangan triwulanan yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan restrukturisasi mempengaruhi kinerja keuangan, kami menggunakan metode uji perbedaan. Kami menerapkan berbagai teknik analisis data, termasuk analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan indikator profitabilitas seperti nilai minimum,

maksimum, rata-rata, dan deviasi standar. Selain itu, kami melakukan uji normalitas untuk menentukan apakah data penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas juga ditentukan uji hipotesis mana yang paling tepat dan mana yang digunakan untuk menguji hipotesis. Jika data berdistribusi normal maka digunakan uji T sampel berpasangan parametrik. Namun jika data tidak berdistribusi normal maka uji non parametrik yaitu uji *Wilcoxon sign-rank test* lebih tepat dilakukan. Berdasarkan hasil uji normalitas juga ditentukan uji hipotesis mana yang paling tepat dan mana yang digunakan untuk menguji hipotesis. Jika data berdistribusi normal maka digunakan uji T sampel berpasangan parametrik. Namun jika data tidak berdistribusi normal maka uji non parametrik yaitu uji *Wilcoxon sign-rank test* lebih tepat dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
ROA Sebelum Restrukturisasi	78	,0083	,03579	-,14	,21
ROA Sesudah Restrukturisasi	78	,0026	,03769	-,18	,11
ROE Sebelum Restrukturisasi	78	,0178	,23339	-1,79	,25
ROE Sesudah Restrukturisasi	78	,0183	,23294	-1,24	1,21

Sumber : Data diolah, 2023

Uji Normalitas

Normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam konteks ini: Jika nilai p (sig) dari uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), maka data diasumsikan berdistribusi normal. Ini berarti data memiliki distribusi yang mirip dengan distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai p (sig) dari uji Kolmogorov-Smirnov kurang dari 0,05 (sig < 0,05), maka data diasumsikan tidak berdistribusi normal. Dalam hal ini, data tidak mengikuti distribusi normal dan mungkin mengikuti distribusi lain atau memiliki karakteristik yang tidak simetris. Ini adalah prinsip dasar pengujian normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov, yang digunakan untuk mengevaluasi apakah data berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4. 1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test						
		ROA Sebelum Restrukturisasi	ROA Sesudah Restrukturisasi	ROE Sebelum Restrukturisasi	ROE Sesudah Restrukturisasi	
N		78	78	78	78	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0083	,0026	,0178	,0183	
	Std. Deviation	,03579	,03769	,23339	,23294	
	Most Extreme Differences	Absolute	,262	,269	,339	,268
		Positive	,261	,197	,225	,215
		Negative	-,262	-,269	-,339	-,268
Test Statistic		,262	,269	,339	,268	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c	,000 ^c	,000 ^c	,000 ^c	
a. Test distribution is Normal.						
b. Calculated from data.						
c. Lilliefors Significance Correction.						

Sumber : Data diolah, 2023

Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa ROA sebelum dan sesudah restrukturisasi tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansinya sebesar 0,000 dan 0,000 lebih kecil dari ketentuan yang diberikan yaitu. lebih besar dari 0,05. ROE sebelum dan sesudah restrukturisasi tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansinya sebesar 0,000 dan 0,000 kurang dari ketentuan yang ditentukan diatas 0,05.

Uji Wilcoxon (*Wilcoxon signed ranks test*)

Tabel 4.2 Uji Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks					
			N	Mean Rank	Sum of Ranks
ROA	Sesudah	Negative Ranks	57 ^a	40,42	2304,00
Restrukturisasi	- ROA	Positive Ranks	21 ^b	37,00	777,00
Sebelum Restrukturisasi		Ties	0 ^c		
		Total	78		
a. ROA Sesudah Restrukturisasi < ROA Sebelum Restrukturisasi					
b. ROA Sesudah Restrukturisasi > ROA Sebelum Restrukturisasi					
c. ROA Sesudah Restrukturisasi = ROA Sebelum Restrukturisasi					

Sumber : Data diolah, 2023

Tabel 4.3 Uji Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks					
			N	Mean Rank	Sum of Ranks
ROE	Sesudah	Negative Ranks	52 ^a	39,62	2060,00
Restrukturisasi	- ROE	Positive Ranks	26 ^b	39,27	1021,00
Sebelum Restrukturisasi		Ties	0 ^c		
		Total	78		
a. ROE Sesudah Restrukturisasi < ROE Sebelum Restrukturisasi					
b. ROE Sesudah Restrukturisasi > ROE Sebelum Restrukturisasi					
c. ROE Sesudah Restrukturisasi = ROE Sebelum Restrukturisasi					

Sumber : Data diolah, 2023

Uji Hipotesis

Kriteria keputusan dalam pengujian hipotesis umumnya adalah sebagai berikut: Jika nilai p (sig) lebih besar dari atau sama dengan 0,05 ($sig \geq 0,05$), maka H1 (hipotesis alternatif) ditolak, yang berarti tidak ada cukup bukti statistik untuk mendukung hipotesis alternatif. Dalam konteks ini, penelitian tidak menemukan perbedaan yang signifikan, sehingga hipotesis nol (H0) diterima. Jika nilai p (sig) kurang dari 0,05 ($sig < 0,05$), maka H1 (hipotesis alternatif) diterima. Ini berarti terdapat cukup bukti statistik untuk mendukung hipotesis alternatif, yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Dalam konteks ini, hipotesis nol (H0) ditolak.

Tabel 4. 4 Uji Hipotesis

Test Statistics ^a	
	ROA Sesudah Restrukturisasi - ROA Sebelum Restrukturisasi
Z	-3,803 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000
a. <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	
b. <i>Based on positive ranks.</i>	

Sumber : Data diolah, 2023

Tabel 4. 5 Uji Hipotesis

Test Statistics ^a	
	ROE Sesudah Restrukturisasi - ROE Sebelum Restrukturisasi
Z	-2,588 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,010
a. <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	
b. <i>Based on positive ranks.</i>	

Sumber : Data diolah, 2023

1. Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan *Return on Asset (ROA)*

Pada hasil uji deskriptif statistik mengemukakan bahwa terdapat penurunan setelah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit tentang hasil keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Kemudian hasil uji Wilcoxon sign rank test juga mengalami penurunan yang signifikan sehingga uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, alasannya adalah rasio return on assets (ROA) setelah implementasi kebijakan restrukturisasi kredit terjadi penurunan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih maka dari itu dikatakan perusahaan tersebut setelah diterapkannya kebijakan restrukturisasi kredit mengalami penurunan pada rasio *Return on Asset (ROA)*. Hasilini sejalan dengan penelitian Teguh Rimbawan (2022) menerangkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan laba mengalami penurunan sehingga ada penurunan pada ROA.

2. Terdapat perbedaan kinerja keuangan menggunakan return on equity (ROE) sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI meningkat setelah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit. Kemudian hasil uji Wilcoxon sign rank test juga mengalami penurunan yang signifikan sehingga uji hipotesis dapat disimpulkan hipotesis diterima, alasannya adalah adanya hubungan *Return on Equity* (ROE) setelah diterapkannya kebijakan restrukturisasi kredit terjadi penurunan kemampuan perusahaan untuk mengelola modal yang dimilikinya maka dari itu dikatakan perusahaan tersebut setelah diterapkannya kebijakan restrukturisasi kredit mengalami penurunan pada rasio *Return on Equity* (ROE). Hasil ini sejalan dengan penelitian Muhammad (2018), bahwa banyak perusahaan yang mengalami perubahan sebelum dan saat dilakukan restrukturisasi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan laba dari aktiva mengalami penurunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data transaksi keuangan yang dilakukan sebelum dan sesudah proses restrukturisasi kredit. Kedua asersi tersebut adalah: 1) Terdapat perbedaan signifikan pada aktivitas keuangan sebelum dan segera setelah reorganisasi kredit, yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Hal ini terlihat dari penurunan angka laba bersih yang cukup signifikan. 2) Sebelum dan segera setelah reorganisasi kredit, terdapat perbedaan yang signifikan dan dibandingkan dengan Return on Equity (ROE) dalam operasional bisnis. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai modal bisnis yang sangat signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Esomar, Maria. 2021. *Analisa Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia*. Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi Vol 2 No. 2 2 April 2021.
- Dhilla, Lintang. 2020. *Dampak Restrukturisasi Utang pada Kinerja Keuangan*.
- Hasim. 2020. *Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup Dan Non Grup Di Indonesia*.

Analisis Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dalam Mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMPN 4 Gerokgak Kabupaten Buleleng

**Ni Komang Meri Ardhiani⁽¹⁾
Putu Cita Ayu⁽²⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: merryardhiani@gmail.com

ABSTRACT

The process of managing the School Operational Assistance Fund needs to be considered, especially in the process of preparing accountability reports. This is because currently there are still delays in reporting to the Central Office, one of which is caused by manual formulation of reports. This study aims to find out how to use the School Budget Activity Plan Application in terms of managing the School Operational Assistance Fund in Gerokgak 4 Public Junior High School, Buleleng Regency. in research using descriptive qualitative methods with observation, interviews, and documentation as a form of data collection. The results of this study indicate that the use of the School Budget Activity Plan Application is seen from three indicators namely planning, implementation, until the reporting as a whole has been running well and in accordance with applicable regulations. Even though at the planning stage the school had experienced problems related to several school shopping needs that were not available in the application. So the school has to report this to the Education Office and this problem has been resolved properly. This application is integrated with the Local Government Information System to provide convenience for SMP Negeri 4 Gerokgak in reporting the use of the School Operational Assistance Fund. Therefore, delays in reporting can be properly resolved.

Keywords: School Budget Activity Plan Application, BOS Fund, BOS Fund Management

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki definisi sebagai suatu bentuk usaha yang berperan sebagai perwujudan suasana pembelajaran dalam pengembangan peserta didik di berbagai potensi khususnya pada tingkat kecerdasan, serta untuk pengendalian kepribadian peserta didik, yang berguna bagi diri sendiri dan juga masyarakat serta penting bagi kemajuan Negara. Adanya sebuah Pendidikan, maka akan terciptanya kualitas sumber daya manusia yang tentunya akan menjadi aset utama Negara dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu dengan memberikan pelayanan pendidikan berupa bantuan dana pendidikan. Salah satu bantuan dana yang disalurkan oleh pemerintah yaitu berupa Dana yang diupayakan untuk membantu sekolah di Indonesia agar mendapatkan akses pendidikan yang lebih optimal. Adapun Dana yang dimaksudkan adalah Dana BOS atau yang disebut juga dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Untuk mewujudkan

pengelolaan Dana BOS agar sejalan dengan standar atau peraturan sebagaimana mestinya, maka sekolah dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam penggunaan dana BOS. Salah satunya yaitu pada sistem informasi akuntansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satu pemanfaatan tersebut yaitu dengan menggunakan sebuah Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau disebut dengan ARKAS. Aplikasi ini dapat memberikan fasilitas dalam hal merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Selama ini sistem yang mengelola anggaran di setiap sekolah masih terpisah dari sistem pengelolaan keuangan di daerah, sehingga Sekolah akan memerlukan waktu dan tenaga yang banyak untuk perihal administratif. Namun saat ini, ARKAS diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai bentuk penyederhanaan. Sehingga sekolah hanya perlu mengisi dalam satu aplikasi saja. Dengan terciptanya Aplikasi ini, maka akan memudahkan pihak sekolah dalam hal optimalisasi dan pembenahan penyaluran Dana BOS. (Srii, 2022 diakses pada Kominfo.go.id, 15/02/2022).

Penyaluran akses bantuan pendidikan tentunya perlu diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah agar seluruh sekolah dapat merasakan bantuan dari Dana BOS ini. Tetapi mengingat persebaran sekolah di Indonesia yang luas, menjadikan pemerintah sulit untuk mengawasi tingkat pengelolaan Dana BOS sehingga pemberian akses Dana BOS tidak tersebar dengan merata, khususnya pada sekolah yang berada di wilayah terpencil dan sulit untuk mengakses jaringan teknologi. Salah satu sekolah tersebut yaitu SMP Negeri 4 Gerokgak. SMP Negeri 4 Gerokgak merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berlokasi di desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Sekolah ini termasuk sekolah yang berlokasi jauh dari hiruk pikuk kota. Maka dari itu, untuk mendapatkan akses pendidikan yang maksimal perlu adanya dukungan baik sarana/prasarana yang memadai baik itu pembangunan maupun metode dalam mengajar yang tentunya akan berdampak pada proses pembelajaran siswa. Tetapi, terdapat permasalahan yang masih dialami oleh pihak sekolah terkait pada proses pengelolaan dan penggunaan dana BOS yakni pada saat menggunakan proses secara manual pihak sekolah mengalami keterlambatan saat melaporkan ke Dinas Pendidikan secara online salah satu penyebab keterlambatan tersebut yakni karena rumitnya proses penyusunan laporan secara manual mengakibatkan pihak sekolah lupa untuk mengupload laporan pertanggungjawaban ke website kemendikbud.go.id. SMP Negeri 4 Gerokgak juga mendapatkan alokasi Dana BOS setiap satu tahun anggaran hanya sebesar Rp 495.000.000

hal ini akan berdampak pada sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar seperti terdapat meja dan kursi yang kurang memadai dibandingkan sekolah lainnya. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 4 Gerokgak ini, yaitu dengan memanfaatkan sistem teknologi dalam mengelola Dana BOS baik dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pertanggungjawaban salah satunya yaitu dengan menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS). Melihat permasalahan yang dilatarbelakangi oleh keterlambatan SMP Negeri 4 Gerokgak dalam proses pelaporan Dana BOS serta rumitnya proses pelaporan secara manual serta adanya kesenjangan dalam penelitian terdahulu, maka penulis melakukan suatu penelitian dengan berjudul **“Analisis Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam Mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 Gerokgak, Kabupaten Buleleng”** .

Berdasarkan paparan tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah yaitu Bagaimanakah Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah dalam Mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 4 Gerokgak?

Serta tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui Bagaimana Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 4 Gerokgak.

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pihak Sekolah selaku penerima bantuan Dana BOS terkait pengelolaan Dana BOS melalui sistem informasi akuntansi berupa Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, serta Sebagai bahan masukan dan pengetahuan serta pengembangan dalam mengelola Dana BOS berbasis sistem informasi guna menciptakan pengelolaan Dana BOS yang baik serta dapat meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas Laporan Dana BOS.

KAJIAN PUSTAKA

Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS)

Dalam sistem informasi akuntansi terdapat sebuah aplikasi untuk merencanakan kegiatan anggaran, melaksanakan kegiatan, hingga melporkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sistem informasi tersebut dinamakan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS). Struktur ARKAS mencakup pengelolaan Dana BOS. Terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan bagi satuan pendidikan dalam

penggunaan ARKAS ini. Diantaranya, dalam hal merencanakan, menganggarkan, serta melaporkan hasil pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah akan menjadi efektif dan lebih efisien; terintegrasi dengan Dapodik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi seperti Rapor Pendidikan dan SIPLah. Selain itu, Aplikasi ini juga akan terintegrasi langsung dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang Standar Anggaran Operasi Non personalia, standar anggaran operasi non personalia merupakan sebuah ketetapan yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia dalam satu tahun anggaran. sebagai salah satu bentuk dari keseluruhan dana pendidikan. Dalam pengalokasian Dana BOS, besaran yang disalurkan oleh pemerintah yaitu berdasarkan pada besarnya biaya Dana BOS pada daerah masing-masing lalu mengalikan besaran tersebut dengan banyaknya jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN.

Dalam hal pengelolaan Dana BOS, pihak sekolah perlu menyusun laporan yang lengkap agar sesuai dengan Aturan Petunjuk Teknis yang terdapat pada Permendikbud No 2 Tahun 2022. Adapun bentuk laporan yang perlu disusun oleh pihak sekolah, yaitu diantaranya Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, serta Bukti Pengeluaran.

Adapun referensi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni berdasar pada hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut

1. Kasih Purwantini, Danang, dan Siti Nasekah 2020. Penelitian ini memberikan hasil bahwa penggunaan sistem informasi dalam menerima dan mengeluarkan kas, maka pemakai akan lebih mudah melakukan kegiatan dalam mencatat transaksi karena seluruh transaksi tersimpan dan terhubung dalam satu data serta penggunaan sistem ini dilengkapi dengan keamanan dalam mengakses sistem ini. Dengan adanya sistem penerimaan dan pengeluaran kas berbasis multiuser, maka akan memudahkan para pengguna dalam melakukan pencatatan laporan kas dengan hasil yang tepat.
2. Rafiq Ahmad dan Agustine Dwianka, 2021. hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Fadilah menggunakan sebuah perangkat lunak asisten dalam mendukung proses penyusunan pembukuan keuangan sehingga hasil yang diberikan akan lebih efektif dan efisien berbeda dengan penyusunan pembukuan keuangan sekolah secara

konvensional atau manual yang sering mengalami masalah dalam mencatat atau menghitung laporan keuangan.

3. Reiza Rosdiana, Tina Kartini, dan Risma Nurmilah, 2021. hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Dasar Cigalasar telah menggunakan sistem informasi akuntansi pada menerima dan mengeluarkan besaran Dana BOS tetapi beberapa masih secara manual. Sekolah ini juga melakukan pembukuan rutin seperti buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. setiap bulan.
4. Riseda Salatnaya, Jenny Morasa, dan Novi Swandari Budiarmo, 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan Dana BOS di SD dan SMP Negeri pada Pemerintahan Kota Manado, telah sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 yaitu menyusun laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah ke dalam aplikasi yakni Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).
5. Dede Febrianto dan Dina Aulia, 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dalam pengeluaran kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah dimiliki oleh Sekolah Dasar Al-Imam Islamic School Balikpapan Tetapi, terdapat permasalahan yang dialami oleh pihak sekolah yakni sistem informasi tersebut kurang efektif dan efisien dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga, harus dilakukan prosedur penyusunan RKAS dengan terlibatnya seluruh anggota agar proses penginputan data ke Aplikasi RKAS (ARKAS) sesuai dengan hal yang semestinya serta agar tidak terjadi penyimpangan dari arah yang sudah ditentukan.

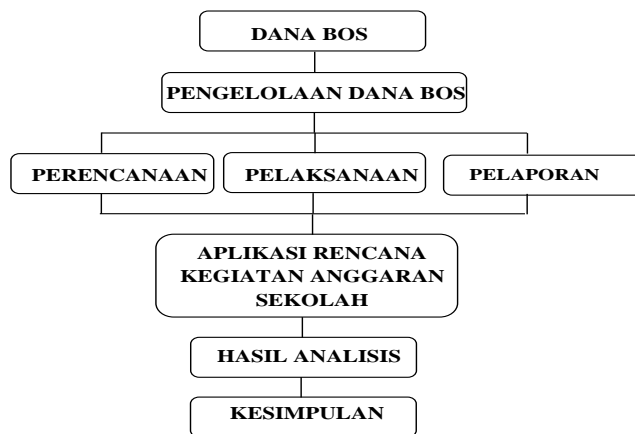
METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bentuk pengumpulan data penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis penggunaan aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah dalam mengelola Dana BOS di SMP Negeri 4 Gerokgak.

Proses mengelola Dana BOS yang baik dapat dilihat dari langkah-langkah dalam pengelolaan agar sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Selain itu, Pengelolaan juga dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan Dana BOS dengan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS). Setelah melihat kesesuaian antara pelaksanaan Dana BOS dengan RKAS, maka menghasilkan laporan realisasi yang telah sesuai dengan RKAS sebelumnya. Dalam hal ini, pihak sekolah wajib menyusun pembukuan agar sesuai dengan dana yang telah disalurkan. Pembukuan yang disusun pihak sekolah dapat berupa

pembukuan secara manual atau terinput secara sistem dengan dilampiri bukti/kwitansi pengeluaran Dana BOS. Pihak sekolah tentunya perlu memperhatikan seberapa besar manfaat yang digunakan selama pembukuan menggunakan proses secara manual serta menggunakan sistem. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak sekolah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban Dana BOS. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat seberapa besar manfaat penggunaan ARKAS dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dibandingkan pengelolaan secara manual. Berikut merupakan gambaran desain penelitian sesuai dengan uraian.

Gambar 3.1
Alur Desain Penelitian



(Sumber: Peneliti, 2023)

Untuk terhindar dari unsur kesalahan dalam menafsir variabel dalam penelitian, maka diperlukan adanya definisi operasional variabel yang terdiri dari:

1. Perencanaan Dana BOS, merupakan proses penyusunan anggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah.
2. Pelaksanaan Dana BOS merupakan proses pelaksanaan kegiatan yang berasal dari rencana anggaran yang telah disusun.
3. Pelaporan Dana BOS merupakan suatu proses pertanggungjawaban yang disusun oleh pihak sekolah selama menggunakan Dana BOS. Pelaporan Dana BOS di setiap sekolah dapat berupa laporan yang meliputi pembukuan/catatan secara lengkap terkait dengan penggunaan Dana BOS.

Adapun subjek yang digunakan yaitu pihak pengelola yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, staff dan dewan guru dengan objek penelitian ini yaitu penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) kaitannya dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. model Mille and Huberman digunakan sebagai teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini. Mereka mengatakan, untuk menganalisis data

kualitatif perlu dilakukan secara terus berulang-ulang hingga tuntas sampai data tersebut bersifat jenuh. Dalam model ini, terdapat tiga teknik dalam menganalisis data (Miles, Huberman dan Saladana, 2014:14), yaitu dengan melakukan Reduksi Data, Penyajian Data, serta Kesimpulan/verifikasi Data.

Melakukan penelitian kualitatif, maka perlu dilakukan uji keabsahan untuk menghindari hasil data yang tidak valid. Keabsahan data ini dapat diuji menggunakan teknik triangulasi. Pada teknik ini, peneliti akan membandingkan pandangan dari keempat informan tersebut mengenai penggunaan aplikasi RKAS. Apabila terjadi perbedaan pandangan, maka peneliti akan terus menggali data dari sumber- sumber lain hingga pandangan yang diberikan antar informan akan sama atau hampir sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 4 Gerokgak

Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah merupakan sebuah perangkat berbasis teknologi yang diciptakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 dan SMP Negeri 4 Gerokgak mulai menggunakan aplikasi ini sejak tahun 2022. Aplikasi ini berfungsi untuk mencatat seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS yakni penganggaran, pelaksanaan/penatausahaan, dan pertanggungjawaban diseluruh satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional termasuk SMP Negeri 4 Gerokgak. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pihak sekolah menyusun pencatatan baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban menggunakan proses secara manual. Proses penyusunan Dana BOS yang dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi sistem berbasis aplikasi tentunya tidak dapat menghasilkan laporan yang transparan dan akuntabel. (Yulyanti et al., 2022). Hal ini sejalan dengan permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 4 Gerokgak bahwa pada saat menggunakan proses secara manual, pihak sekolah terlambat melaporkan laporan secara online ke laman web kemendikbud.co.id. Dalam menyikapi hal tersebut, maka pihak sekolah telah merubah sistem penyusunan laporan Dana BOS yang menggunakan pencatatan manual kini menggunakan sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Dinas Kementrian Pendidikan yakni Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS).

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini terdiri dari beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh sekolah sehingga dapat memberikan hasil pengelolaan

berupa laporan pertanggungjawaban yang wajib dilaporkan ke Dinas dan juga masyarakat. Pengelolaan Dana BOS diawali dengan pembuatan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah). RKAS merupakan suatu susunan rencana yang dirumuskan pihak sekolah untuk membahas seluruh program/kegiatan selama 1 tahun anggaran dengan adanya RKAS ini, maka pihak sekolah dapat menyusun rencana kegiatan tahunan serta menetapkan besaran anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Pihak sekolah mulai menyusun rencana anggaran sekolah secara manual, lalu pihak kepala sekolah akan memberikan persetujuan atas RKAS yang telah disusun. Setelah RKAS manual selesai disusun dan telah di setujui oleh Kepala sekolah, maka RKAS tersebut akan diinput ke dalam Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Namun proses perencanaan tersebut sempat mengalami kendala karena terdapat beberapa kebutuhan yang tidak tersedia dalam aplikasi sehingga pihak sekolah perlu melaporkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan dan permasalahan tersebut telah terselesaikan. Proses penyusunan RKAS telah melibatkan seluruh warga sekolah termasuk komite, dengan demikian sekolah telah memberikan informasi terkait dana yang akan dikeluarkan selama periode 1 tahun anggaran kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Sesuai dengan hasil penelitian, Dana BOS diterima dalam 2 tahap yakni Tahap satu diterima pada pertengahan januari-februari, dan tahap 2 diterima pada bulan Juli-Agustus. Alokasi Dana BOS di SMP Negeri 4 Gerokgak dihitung sesuai dengan banyaknya jumlah peserta didik yang dikalikan dengan besaran satuan biaya. Bendahara selaku operator aplikasi juga bertugas dalam mengambil Dana BOS atas persetujuan dari Kepala Sekolah dan telah sesuai dengan hasil laporan RKAS yang telah disusun dalam aplikasi. Proses pengelolaan Dana BOS selanjutnya adalah tahap penatausahaan yang digunakan untuk menyusun proses realisasi dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam aplikasi ini, bendahara dapat mencetak dokumen sesuai dengan kebutuhan apabila BKU telah ditutup. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses penyusunan laporan realisasi ini telah berjalan dengan baik. Hasil realiasi dari penggunaan dana bantuan ini telah sesuai dengan hasil rapat yang tercantum pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah serta sesuai dengan Peraturan. Hal ini juga dibuktikan oleh hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti yakni berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SMPN 4 Gerokgak tahun 2022 yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada semester 2 tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor :

1. NPSN	50100308	
2. Nama Sekolah	SMP NEGERI 4 GEROKGAK	
3. Kode Sekolah	
4. Nomor/Tanggal DPA SKPD	
5. Kegiatan Dana BOS		
A. Saldo Awal Dana BOS		Rp. 0
B. Penerimaan Dana BOS		
1. Tahap I	Rp. 143.748.000	
2. Tahap II	Rp. 101.490.093	
3. Tahap III	Rp. 143.748.000	
Jumlah Penerimaan		Rp. 478.986.093
C. Pengeluaran Dana BOS		
1. Jenis Belanja Operasi	Rp. 377.789.236	
2. Jenis Belanja Modal	Rp. 101.120.000	
Jumlah Pengeluaran		Rp. 478.909.236
D. Sisa Dana BOS		Rp. 96.257
Terdiri atas		
1. Sisa Kas Tunai	Rp. 0	
2. Sisa di Bank	Rp. 96.257	

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Sekolah SMP NEGERI 4 GEROKGAK untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeliharaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Sekolah,

Nyoman Gunawa, S.Pd
NIP. 198310231985021001

(Sumber: Bendahara SMP Negeri 4 Gerokgak, 2023)

Adapun pihak-pihak yang memerlukan laporan realisasi Dana BOS ini adalah Dinas Pendidikan Daerah maupun Pusat. Selain itu, SMP Negeri 4 Gerokgak juga melaporkan hasil pengelolaan Dana BOS ini ke Komite Sekolah sehingga transparansi dalam penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 4 Gerokgak tetap terjaga.

Penggunaan ARKAS ini sangat bermanfaat bagi sekolah dalam pengelolaan Dana BOS. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa sekolah telah mampu menyusun laporan-laporan sesuai dengan format yang terdapat pada peraturan yang telah berlaku dan telah sejalan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas. Sekolah dapat membuat merencanakan, melaksanakan, serta melaporkan hasil penggunaan dana BOS serta dapat melakukan perubahan/pergeseran perencanaan anggaran dana BOS secara lebih mudah. Selain itu, keterlambatan dalam hal pelaporan Dana BOS dapat teratasi karena laporan yang telah disusun akan secara otomatis terkirim jika Bendahara sudah menutup Buku Kas Umum. Terintegrasinya sistem aplikasi sekolah dengan sistem pendidikan memudahkan setiap sekolah untuk menyusun rencana hingga melaporkan hasil realisasi tanpa harus mencatat secara manual. Sehingga proses pencairan Dana BOS akan berjalan dengan tepat waktu dan sekolah dapat menjalankan programnya dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan adanya proses digitalisasi dalam mengelola keuangan sekolah khususnya Dana BOS dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang lebih baik dibandingkan penggunaan secara manual. Hal

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan terkait dengan penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam mengelola Dana BOS di SMP Negeri 4 Gerokgak, bahwa secara keseluruhan proses pengelolaan Dana BOS (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) dapat berjalan dengan baik melalui proses dalam ARKAS. Walau pada perencanaan, sekolah sempat mengalami kendala terkait tidak tersedianya beberapa kebutuhan di aplikasi, namun hal tersebut sudah terselesaikan dengan melaporkan ke Dinas Pendidikan. Penyusunan rapat perencanaan hingga hasil realisasi juga telah melibatkan pihak masyarakat dan komite serta dinas pendidikan selaku pihak pengawas Dana BOS. Hasil laporan rencana kegiatan anggaran sekolah dan realisasi Dana BOS telah dipublikasi sehingga transparansi dalam pengelolaan ini tetap terjaga. Dengan demikian, penggunaan ARKAS menjadikan sekolah akan lebih mudah dalam melaporkan hasil realisasi penggunaan Dana BOS sehingga tidak ada keterlambatan dalam hal pelaporan Dana BOS.

Peneliti memberi saran kepada pihak sekolah khususnya tim operator yang mengoperasikan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah tentunya perlu melibatkan pihak wakil bendahara sebagai pengganti Bendahara BOS apabila beliau sedang berhalangan untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini berguna untuk memudahkan pihak sekolah dalam mengelola Dana BOS khususnya terkait pencatatan transaksi yang rutin terjadi, tetapi Bendahara sewaktu-waktu tidak dapat menginput ke Aplikasi. Selain itu, saran juga diberikan kepada Pemerintah selaku pencipta aplikasi agar lebih memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah agar proses penginputan barang dalam aplikasi pada tahap penganggaran dapat berjalan dengan lancar dan hasil laporan RKAS dapat selesai tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., Dwianika, A., Studi Akuntansi, P., Pembangunan Jaya, U., & Selatan, T. (2021). *Analisa Penggunaan Perangkat Lunak dalam Mendukung Pembukuan Keuangan Sekolah*. Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi) (Vol. 13, Issue 1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Miles, M. B, Huberman, A.M dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohid, UI-Press.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi ed.)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2007). *Manajemen berbasis sekolah: konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

- Pebrianto, D., Stie, D. A., & Balikpapan, M. (2022). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengeluaran Kas pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler (Studi Kasus pada SD Al-Imam Islamic School Balikpapan)*. Jurnal Akuntansi Manajemen Madani (Vol. 8, Issue 2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Anggaran Operasi Non Personalia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggara an Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- Purwantini, K., Danang, D., Nasekah, S. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Berbasis Multiuser di SMK Pati Unus Karangawen*. Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 13 (1), 24-36.
- Rosdiana, R., Kartini, T., & Nurmilah, R. (2021). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 5 (1), 185–193.
- Salatnaya, R., Morasa, J., Budiarmo, N. S. (2022) *Analisis Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL (Vol. 13, Issue 1).
- Salinan Persesjen No 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan ARKAS.
- Sari, Indah. (2021). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus pada Satu SD Negeri di Binjai Utara)*. Skripsi: Medan. UIN (Tidak Dipublikasikan).
- Silaen, S. (2018). *Metodologi penelitian sosial untuk penulisan skripsi dan tesis (Edisi revisi,23)*. In Media: Bandung
- Srii.(2022). ARKAS Integrasikan Pengelolaan Dana BOS dengan SIPD.Kominfo.Go.Id.<https://www.kominfo.go.id/content/detail/40011/arkasintegrasikan-pengelolaan-dana-bos-dengan-sipd/0/berita> diakses pada tanggal 10 november 2022.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, R.A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: UGM PRESS Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Wahyuni, E. D., Leniwati, D., Rahajeng, E. R., (2022) *Penataan Administrasi Keuangan Sekolah Berbasis Excel pada SD Muhammadiyah 4 Kota Malang. Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (3),150 -155.
- Yulyanti, Y., Rakib, M., & Rahman, N. (2022). *Pengaruh Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Dana BOS. Jurnal Pajar (Pendidikan dan Pengajaran)*, 6(1), 251.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Gianyar

**I Gusti Ayu Putu Natih Swari⁽¹⁾
Ni Komang Sumadi⁽²⁾
Ni Ketut Muliati⁽³⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sanggalangit, Tembau Penatih, Denpasar Timur
e-mail: klikayu09@gmail.com

ABSTRACT

Accountability for village fund management is a form of village government accountability in managing Village Funds carried out in accordance with procedures, policies and applicable laws and regulations in accordance with the principles of village fund financial management. This study aims to determine the characteristics of clarity of budget targets, internal control system, accessibility of financial statements and community participation in accountability of village fund management in villages throughout Gianyar sub-district. The number of samples used was 95 people using the purposive sampling method. Data collection using questionnaires. The data analysis technique uses multiple linear regression tests. The hypothesis test used is the t test. The results showed that Clarity of Budget Targets has a positive and significant influence on Village Fund Management Accountability. The Internal Control System has a positive and significant influence on Village Fund Management Accountability. The accessibility of Financial Statements has a positive and significant influence on Village Fund Management Accountability. Community Participation has a positive and significant influence on Village Fund Management Accountability. It is hoped that the Village in Gianyar District can evaluate and supervise so that the budget that has been used can be clearly written with evidence on every activity funded by the budget so that accountability of village funds can be managed properly.

Keywords: Clarity, Internal, Accessibility, Participation.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan Nasional. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan desa untuk mengacu atau menyelenggarakan pemerintahannya dan keuangannya sendiri. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh

untuk mendapatkan kekebalan hukum jika terjerat dengan masalah hukum, tetapi Kejaksaan hadir untuk melindungi dan mengawal dana desa agar tidak terjadi salah sasaran dalam mengambil kebijakan dan diharapkan agar kepala desa tidak ada yang terjerat atau bermasalah dengan hukum (Tribun Bali 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, akseibilitas laporan keuangan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Se- Kecamatan Gianyar.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini didukung oleh teori *agency* dan teori *stewardship*. Teori keagenan merupakan sebuah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Implikasi teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (*agent*) oleh pemerintah pusat dan daerah (*principal*) untuk mengelola dana desa. Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya suatu penyelewengan atau korupsi oleh pihak agen.

Penelitian ini juga didukung oleh teori *stewardship*. Menurut (Donaldson dan Davis 1991), teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya. Asumsi filosofi teori ini berdasarkan sifat-sifat manusia yaitu dapat dipercaya, berintegritas, bertanggungjawab dalam setiap tindakannya dan jujur.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa yang dilakukan sesuai prosedur, kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dana desa (Supadmi dan Suputra 2018).

Anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran memberikan tujuan dalam setiap penyusunannya pada sebuah organisasi. Tujuan pada penyusunan anggaran dapat mengkomunikasikan dan mengendalikan berbagai aspek baik secara financial maupun terkait operasional dari berbagai divisi. Kejelasan sasaran anggaran merupakan suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup perusahaan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehubungan dengan fungsi pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan (Permen RI No 60 2008). Selanjutnya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, dimana SPIP ini merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemeritah daerah.

Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good governance*, karena salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance* adalah aksesibilitas laporan keuangan yang baik. Pemerintah desa harus bersikap transparan dalam kegiatan apapun yang menggunakan dana desa. Pemerintah desa juga harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak aparat desa saja akan tetapi memfasilitasi masyarakat desa agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Hasan 2017).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih tertuju dengan kepentingan riil dari masyarakat.

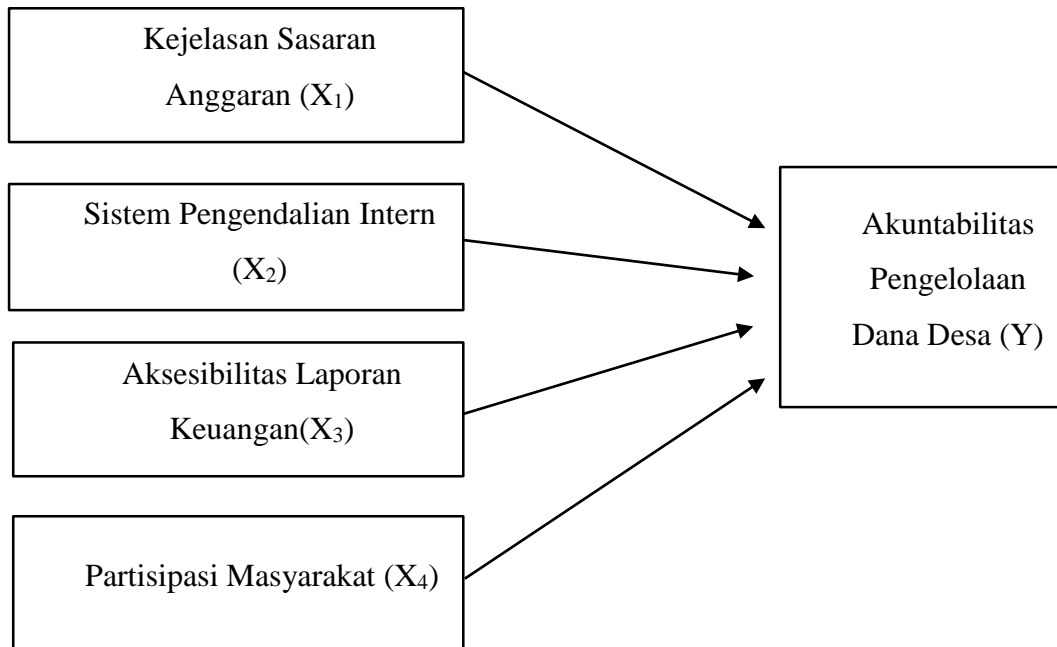
Penelitian yang dilakukan oleh Yuliastuti & Riharjo (2020), Krisnawati dkk (2020), Atiningsih & Ningtyas (2019), Polutu (2022), Indriasih dkk (2022), Sujatnika & Sulindawati (2022), Prestya & Pesudo (2022), telah membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, aksesibilitas laporan keuangan, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana pengelolaan dana desa. Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah di uraikan sebelumnya maka hipotesis yang dapat di ajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1 = Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H2 = Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H3 = Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H4 = Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuisisioner. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran itu sendiri ditetapkan secara spesifik dan jelas serta dapat dimengerti pengelolanya. Faktor SPI digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Faktor partisipasi masyarakat mempengaruhi keberhasilan dari program dari pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang

digunakan adalah *NonProbability Sampling* dengan metode *Purposive Sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 responden.



Gambar 1. Kerangka berpikir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	95	26,0	35,0	31,179	2,7249
Sistem Pengendalian Intern (X2)	95	32,0	45,0	39,547	3,5723
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	95	10,0	15,0	13,337	1,3653
Partisipasi Masyarakat (X4)	95	12,0	20,0	15,958	2,0931
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	95	29,0	40,0	34,905	3,2093

Sumber : data diolah, 2023

Nilai minimum dari Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) sebesar 26,0, nilai maksimum 35,0 serta rata-rata sebesar 31,179 dan standar deviasi 2,7249. Nilai minimum dari variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) sebesar 32,0 nilai maksimum 45,0 serta rata-rata sebesar

39,547 dan standar deviasi 3,5723. Nilai minimum dari variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) sebesar 10,0, nilai maksimum 15,0 serta nilai rata-rata sebesar 13,337 dan standar deviasi 1,3653. Nilai minimum dari variabel Partisipasi Masyarakat (X4) sebesar 12,0, nilai maksimum 20,0 serta nilai rata-rata sebesar 15,958 dan standar deviasi 2,0931. Nilai minimum dari variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 29,0, nilai maksimum 40,0 serta nilai rata-rata sebesar 34,905 dan standar deviasi 3,2093.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Variabel	Nilai r Minimal	Ke te rangan	Nilai Cronbach Alpha	Ke te rangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Sistem	0,691	Valid	0,882	Reliabel
Pengendalian Intern (X2)	0,589	Valid	0,884	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	0,801	Valid	0,747	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X4)	0,619	Valid	0,744	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,650	Valid	0,885	Reliabel

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 seluruh variabel memiliki nilai $r > 0,30$ dan Cronbach Alpha $> 0,60$ maka variabel dapat dinyatakan telah memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas (sig. 2 tailed)	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas (sig. 2 tailed-Abres)
		Tolerance	VIF.	
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,111	0,310	3,225	0,171
Sistem Pengendalian Intern (X2)		0,224	4,468	0,999
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)		0,365	2,738	0,069
Partisipasi Masyarakat (X4)		0,629	1,590	0,761

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada bagian normalitas memiliki nilai sig 0,111 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual atau model regresi berdistribusi normal. Bagian Multikolinearitas, nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Bagian Heterokedastisitas, menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen nilai absolut residual (*Abres*). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung Heterokedastisitas.

Tabel 4. Tabulasi Output SPSS

Variabel	Unstandardized Beta	t-Hitung	Probabilitas (sig.)	Keterangan
Konstanta	0,915	0,535	0,594	
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,279	2,958	0,004	Signifikan
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0,398	4,705	0,000	Signifikan
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	0,364	2,102	0,038	Signifikan
Partisipasi Masyarakat (X4)	0,294	3,414	0,001	Signifikan
<i>Adjusted R Square</i>		0,813		
F Statistik		103,404		
<i>Probabilitas (p-value)</i>		0,000		
Variabel Dependen	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)			

Sumber : data diolah, 2023

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Nilai *adjusted R square* sebesar 0,813 menunjukkan bahwa 81,3% variasi nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dapat dijelaskan oleh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) dan Partisipasi Masyarakat (X4). Sedangkan sisanya sebesar 18,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini seperti *Good Governance*, Pengawasan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Uji Signifikansi Nilai t

1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki koefisien positif sebesar 0,279 dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ berarti Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima dan H_0 di tolak.

2. Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki koefisien positif sebesar 0,398 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ berarti Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima H_0 di tolak.
3. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki koefisien positif sebesar 0,364 dengan nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$ berarti Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima H_0 di tolak.
4. Variabel Partisipasi Masyarakat memiliki koefisien positif sebesar 0,294 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ berarti Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima H_0 di tolak.

Uji Signifikansi Nilai F.

Hasil pengujian *p-value* menunjukkan nilai --0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) dan Partisipasi Masyarakat (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan (1). Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (2). Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (3). Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (4). Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yaitu pihak Desa lebih meningkatkan kejelasan sasaran anggaran langkah ini dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran jelas terhadap proses pengeluaran dana desa sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terealisasi secara tepat.

Sujatnika, I Nyoman Jagra, dan Ni Luh Gede Sulindawati. 2022. "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidemen Kabuoaten Karangasem." *Jurnal Akuntansi Profesi* 13(2): 378–88.

Supadmi, N.L, dan D.G Dharma Suputra. 2018. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar." *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata* 13(2): 132–45.

Tribun Bali. 2022. "Antisipasi Penyimpangan, Kejari Gianyar Tandatangani MoU Pemanfaatan Dana Desa." *Tribun-Bali.com*.

Analisis Kesiapan Perusahaan Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada FIFGroup Denpasar)

Ni Kadek Sri Adnyani Putri⁽¹⁾

I Putu Fery Karyada⁽²⁾

I Made Endra Lesmana Putra⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia,
Jl. Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar, Bali, 80238, Indonesia

e-mail: adnyaniputri76@gmail.com

ABSTRACT

The presence of Industry 4.0 has an impact on improving the economy because industry plays an important role in all sectors of life throughout the world. Industry 4.0 to increase the competitiveness of the national industry through the use of the latest technology and innovation. This study aims to determine FIFGROUP Denpasar's readiness to face industry 4.0. Data collection was carried out by conducting interviews with several informants who felt they had an understanding of FIFGROUP Denpasar's readiness to face industry 4.0. The data analysis step is carried out by collecting data, analyzing data which can then be drawn conclusions. From the results of the analysis that has been carried out, it can be seen that FIFGROUP Denpasar is ready to face industry 4.0, which can be seen from the size of the assessment of each indicator used to carry out the assessment.

Keywords: *Readiness, Industry 4.0*

PENDAHULUAN

Industri 4.0 adalah suatu kondisi dimana terjadi perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam berbagai kehidupan masyarakat khususnya industri yang membuat perubahan struktural dan menghilangnya berbagai keterbatasan yang dimiliki karena adanya mesin penunjang berbagai kegiatan industri (Risdiyanto, 2019). Industri 4.0 dapat dilihat dari adanya perubahan pola hidup masyarakat yang sudah menonjolkan sistem digitalisasi dibandingkan dengan kegiatan konvensional dalam berbagai bidang usaha dengan dukungan dari koneksi internet (Hamdan, 2018). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan industri yang dilakukan sehingga kemungkinan perusahaan memperoleh laba akan semakin besar. Selain itu dengan sistem digitalisasi perusahaan dapat memperoleh informasi dengan lebih baik yang kemudian akan memperbaiki respon perusahaan kepada pasar sasaran. Hadirnya Industri 4.0 membuat adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat karena industri menjadi salah satu pondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat (Suwardana, 2017). Industri 4.0 mampu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam kondisi ekonomi saat ini karena menawarkan berbagai keunggulan yang mampu diperoleh dengan adanya implementasi teknologi dalam berbagai bidang baik dari operasional hingga pemasaran yang dilakukan perusahaan.

Seperti yang kita ketahui saat ini persaingan dalam dunia industri sangat ketat karena

adanya persaingan yang sangat banyak dan adanya akses informasi yang membuat konsumen mempunyai pilihan dan informasi sebelum mengonsumsi suatu produk (Dhakiri, 2019). Oleh karena itu, salah satu upaya yang bisa diperbuat oleh perusahaan adalah dengan memperbaiki proses operasional perusahaan dengan menerapkan teknologi dalam berbagai divisi perusahaan. Salah satu industri yang mengalami perubahan akibat adanya perkembangan teknologi saat ini adalah industri pembiayaan. Akhir-akhir ini banyak bermunculan aplikasi pembiayaan online yang lebih dikenal dengan pinjaman online atau pinjol. Pinjaman online ini memberikan pinjaman dengan batas tertentu hanya dengan mengunggah beberapa dokumen yang bisa dilakukan melalui *handphone*. Hal ini membuat banyak masyarakat tertarik untuk menggunakan pinjaman online ini dan beralih dari perusahaan pembiayaan konvensional karena dirasa lebih mudah tanpa proses yang sulit.

FIFGROUP Denpasar merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Denpasar. Salah satu perusahaan pesaing FIFGROUP Denpasar adalah Adira Finance yang mempunyai cakupan pasar yang sangat besar. Adira Finance melakukan pembiayaan dalam berbagai produk konsumtif maupun produktif. Adira Finance melakukan kerjasama dengan berbagai dealer sepeda motor maupun mobil untuk meningkatkan penjualannya. Berbeda dengan FIFGROUP Denpasar yang masih mengalami fluktuasi jumlah konsumen selama empat tahun terakhir. Diketahui terjadi fluktuasi jumlah konsumen selama 4 tahun terakhir dimana jumlah konsumen tahun 2018 sebanyak 14.286 orang, konsumen tahun 2019 sebanyak 14.768 orang, tahun 2020 sebanyak 13.917 orang dan tahun 2021 sebanyak 15.189 orang. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, FIFGROUP Denpasar melakukan digitalisasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan seperti penggunaan pembayaran online, analisa kredit hingga penagihan menggunakan aplikasi online sejak tahun 2020.

Namun dalam operasionalnya, masih terjadi beberapa masalah yang timbul dari digitalisasi ini. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman karyawan industri 4.0. Seperti yang kita ketahui industri 4.0 memberikan banyak manfaat bagi operasional perusahaan. Namun dalam kenyataannya masih banyak karyawan yang kurang memahami dan kurang mempunyai pengetahuan terkait industri 4.0 yang membuat karyawan bekerja kurang menerapkan sistem industri 4.0 seperti pada bagian penagihan yang tidak menggunakan sosial media untuk mencari konsumen yang menunggak dan pindah dari alamat tagih padahal hampir semua orang saat ini menggunakan sosial media yang akan mempermudah pencarian konsumen.

Masalah lain adalah kepemimpinan dan strategi yang dapat dilihat dari pimpinan

perusahaan yang kurang tertarik mendukung pengembangan industri 4.0 karena dianggap akan memakan banyak biaya dan dibutuhkan penyesuaian yang mendalam pada operasional perusahaan. Dilihat dari indikator pekerjaan dan budaya pada bagian penagihan misalnya sudah menggunakan aplikasi penagihan yang disebut dengan *action* dimana karyawan penagihan dapat melihat data konsumen yang terlambat dengan struktur kreditnya di aplikasi ini. Namun aplikasi ini mewajibkan karyawan untuk mengunjungi alamat tagih sesuai data yang diinput awal meskipun konsumen bersangkutan sudah pindah yang membuat pekerjaan tidak efisien dan membuang waktu.

Terkait teknologi keuangan, untuk mempermudah pembayaran angsuran oleh customer, FIFGROUP Denpasar menyediakan aplikasi yang bernama Astrapay dan bisa digunakan oleh konsumen untuk membayar angsuran tanpa harus datang langsung ke kantor. Namun masih banyak konsumen yang belum memahami penggunaan aplikasi ini dan terkadang aplikasi juga mengalami error saat digunakan. Hal ini pernah dialami oleh konsumen yang melakukan pembayaran kredit melalui aplikasi yang disediakan, namun meskipun saldo di aplikasi terpotong ternyata kredit belum terbayarkan dan keesokan harinya saldo di aplikasi kembali dan belum terpotong sehingga konsumen berinisiatif melakukan pembayaran ke kantor. Hal ini tentu merugikan konsumen karena akan meningkatkan jumlah denda akibat mundurnya pembayaran yang dilakukan.

Dari indikator operasional, pada bagian analisa kredit yang menggunakan sistem bernama Monas (Monitoring Nasional) menjadi kurang akurat karena untuk kredit tertentu tidak dilakukan survey jika konsumen memenuhi kriteria tertentu saat input data pertama kali di counter. Hal ini menyebabkan adanya kesalahan data akibat kesalahan input data atau konsumen yang sengaja memberikan data salah yang akan menyebabkan analisa kredit menjadi tidak berkualitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan marketing FIFGROUP Denpasar, untuk konsumen yang baru pertama kali melakukan pengajuan kredit, konsumen akan digolongkan berdasarkan pekerjaan dan kondisi rumah apakah rumah sendiri, kontrak atau kos. Jika data pekerjaan dan kondisi rumah yang diberikan oleh konsumen saat pengajuan sudah bagus maka akan secara otomatis kredit yang diajukan konsumen akan cair tanpa harus dilakukan survei terlebih dahulu dan pernah terjadi konsumen nakal yang menyatakan bekerja di salah satu perusahaan swasta dan memiliki rumah sendiri sehingga kreditnya langsung disetujui. Namun setelah berjalan beberapa bulan konsumen tidak melakukan pembayaran sehingga dilakukan penugasan kepada pihak penagihan dan setelah dikunjungi konsumen ternyata tidak tinggal di alamat yang diberikan dan saat di cek ke tempat kerja juga konsumen sudah lama berhenti kerja. Kondisi ini tentu memberikan kerugian kepada perusahaan dan

meningkatkan kredit macet perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan dikerjakan lebih lanjut peneliti dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul **“Analisis Kesiapan Perusahaan Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada FIFGROUP Denpasar)”**

Dengan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kesiapan perusahaan dalam implementasi keuangan digital di era revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada FIFGROUP Denpasar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan perusahaan dalam implementasi keuangan digital di era revolusi Industri 4.0.

KAJIAN PUSTAKA

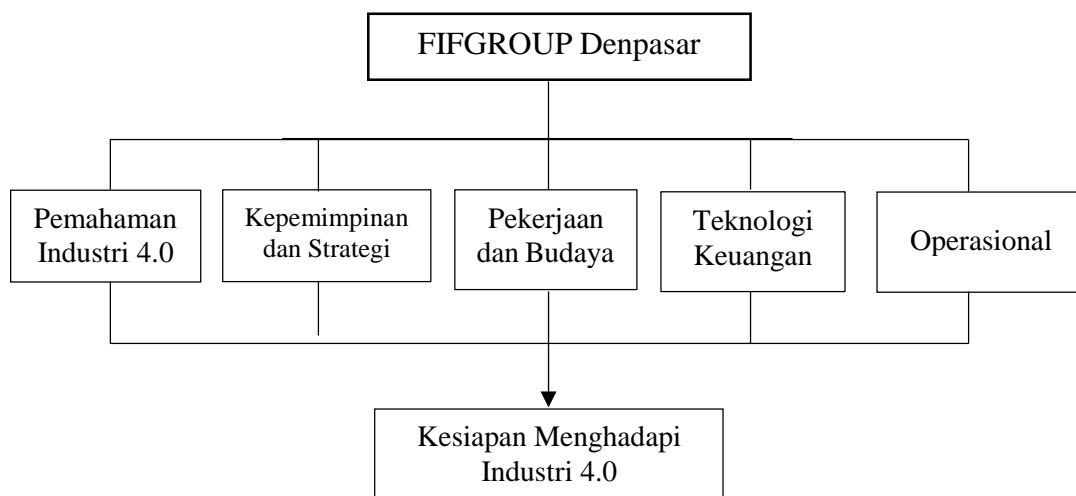
Industri 4.0 mengacu pada kemajuan teknologi terkini di mana internet dan teknologi pendukung berfungsi sebagai tulang punggung untuk mengintegrasikan objek fisik, manusia pekerja, mesin cerdas, dan proses produksi melintasi batas organisasi untuk membentuk jenis baru kecerdasan, jaringan, dan rantai nilai yang tangkas (agile). Dengan demikian, dalam Industri 4.0, fasilitas fisik didukung oleh representasi virtual untuk meningkatkan otomatisasi, fleksibilitas, dan keragaman produk dengan cara memiliki proses dan sistem manufaktur terintegrasi yang lebih baik (Lichtblau et al., 2018). Kagermann et al. (2018) mendefinisikan Industri 4.0 sebagai integrasi teknis CPS ke dalam manufaktur dan logistik dan penggunaan IoT dalam proses industri yang akan memberikan implikasi untuk penciptaan nilai, model bisnis, layanan hilir dan organisasi kerja.

Pengukuran kesiapan dilakukan di awal sebelum perusahaan mengadopsi suatu inovasi baru dengan tujuan untuk menangkap titik awal dan memungkinkan perusahaan untuk menginisialisasi pengembangan proses. Pengukuran kesiapan mengukur individu atau organisasi apakah individu atau organisasi tersebut memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki kemampuan terkait sumber daya yang diperlukan untuk memulai suatu proses (Viharos et al., 2017). Kesiapan ataupun kematangan dapat diukur secara kualitatif atau secara kuantitatif, secara diskrit atau kontinu (Kohlegger et al., 2019). Pengukuran kesiapan berlangsung sebelum proses kematangan dimulai. Sedangkan pengukuran kematangan bertujuan untuk menangkap keadaan apa adanya sementara di dalam proses pematangan yang sedang berjalan. Untuk mengukur kesiapan perusahaan dalam menghadapi industry 4.0. Indikator kesiapan teknologi dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Tan, et al., (2019) terdiri dari Pemahaman Industri 4.0, Kepemimpinan dan Strategi, Pekerjaan dan Budaya,

Teknologi Keuangan dan Operasional

Digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki dengan menggunakan teknologi dan data digital (Wijoyo, 2021). Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga keuangan bertransformasi menyeluruh agar tidak ditinggal oleh nasabahnya. Selain itu lembaga keuangan harus bisa melakukan kolaborasi dengan sesama lembaga keuangan, dengan nonbank seperti perusahaan asuransi dan perusahaan *financial technology (fintech)*, serta nasabah (Wijoyo, 2021). Di era globalisasi pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan tidak hanya dilakukan melalui cara-cara konvensional dengan model *face to face* dan menggunakan *paper document*, tetapi lembaga keuangan juga memulai beralih pada pemanfaatan teknologi dengan model *non-face to face* menggunakan *digital document*.

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber : Tan, et al., (2019)

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan FIFGROUP Denpasar yang dirasa mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kesiapan menghadapi industri 4.0 yang diukur melalui pemahaman industri 4.0 yang berkaitan dengan pemahaman yang dimiliki karyawan FIFGROUP Denpasar yang mempunyai kesadaran. Indikator kepemimpinan dan strategi, dimana berkaitan dengan

keinginan pimpinan FIFGROUP Denpasar dalam melakukan implementasi industri 4.0 dan strategi yang diterapkan untuk implementasi industri 4.0. Pekerjaan dan budaya yaitu berkaitan dengan adanya keterbukaan atas inovasi baru. Teknologi keuangan berkaitan dengan semua teknologi dalam FIFGROUP Denpasar. Operasional berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan berbagai teknologi informasi. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Mengumpulkan data-data di perusahaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara tentang masalah penelitian dengan responden penelitian. Dari pengumpulan data tersebut peneliti memperoleh gambaran umum perusahaan dan data tentang kesiapan menghadapi industri 4.0.

b) Menganalisa data.

Analisa data dilakukan dengan mengamati setiap indikator yang digunakan untuk mengukur kesiapan menghadapi industri 4.0 pada perusahaan dan kemudian dinilai kesiapannya.

c) Menarik Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan harus disesuaikan dengan keseluruhan hasil dari proses pengumpulan data. Dari keseluruhan temuan penelitian yang dilakukan kemudian disimpulkan sehingga diperoleh penjelasan tentang kesiapan menghadapi industri 4.0

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di FIFGROUP Denpasar dimana dilakukan pengkajian mendalam mengenai digitalisasi di era industri 4.0 dengan lima indikator yaitu pemahaman industri 4.0, kepemimpinan dan strategi, pekerjaan dan budaya, teknologi keuangan dan operasional

Pemahaman industri 4.0 mengacu pada kemajuan teknologi terkini di mana internet dan teknologi pendukung berfungsi sebagai tulang punggung untuk mengintegrasikan objek fisik, manusia pekerja, mesin cerdas, dan proses produksi melintasi batas organisasi untuk membentuk jenis baru kecerdasan, jaringan, dan rantai nilai yang tangkas (*agile*). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Buk Anik selaku marketing manager yang mengatakan bahwa

“Sejauh ini karyawan sudah punya pemahaman yang cukup dari industri 4.0 dan dapat dilihat dari kemampuan karyawan dalam menggunakan teknologi yang mampu membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan seperti penggunaan komputerisasi dalam backup data perusahaan sehingga mampu diakses dengan lebih mudah”.

Pemahaman industri 4.0 menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan global saat ini. Pemahaman industri 4.0 mencakup bagaimana karyawan mempunyai kesadaran akan adanya terkait industri 4.0 dan sudah memahami dan mampu mengaplikasikan. Hasil wawancara menunjukkan karyawan FIFGROUP Denpasar sudah cukup memahami konsep dari industri 4.0 yang saat ini terjadi. Hal ini dapat dilihat dari karyawan yang sudah mampu melakukan pekerjaan dengan menggunakan berbagai teknologi buatan. Salah satu contohnya adalah menggunakan sistem komputer untuk menyimpan semua data yang dimiliki perusahaan sehingga dapat meminimalisir penggunaan ruangan dan mampu diakses oleh berbagai pihak berkepentingan sehingga operasional perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dari segi hasil yang diperoleh, menurut narasumber perusahaan mampu mencapai hasil yang lebih baik dengan adanya implementasi industri 4.0 karena semua operasional perusahaan mampu dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dengan hasil yang jauh lebih besar.

Kepemimpinan dan strategi sangat penting bagi perusahaan yang mau berkembang dan terus tumbuh. Pimpinan akan memberikan arah pada pertumbuhan perusahaan dengan berbagai strategi yang diterapkan dimana dalam hal ini apakah pimpinan perusahaan mempunyai keinginan untuk melakukan implementasi industri 4.0 dengan adanya strategi, tim khusus dan adanya perencanaan anggaran untuk menghadapi industri 4.0. Narasumber dalam penelitian ini menyatakan pimpinan selalu berusaha melakukan implementasi dari industri 4.0. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan Pak Agus Selaku Kepala Cabang yang menyatakan

“Pimpinan selalu berusaha melakukan implementasi dari industri 4.0. Hal ini dilakukan karena industri 4.0 dianggap memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan dan pimpinan juga menggunakan berbagai strategi implementasi industri 4.0 untuk mampu memenangkan persaingan yang terjadi saat ini mengingat tingginya persaingan yang terjadi saat ini. Pihak manajemen juga menyiapkan data untuk pengembangan dan implementasi industri 4.0 yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dari operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan profit yang lebih besar”.

Hal ini dilakukan karena industri 4.0 dianggap memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Pimpinan juga menggunakan berbagai strategi implementasi industri 4.0 untuk mampu memenangkan persaingan yang terjadi saat ini mengingat tingginya persaingan yang terjadi saat ini. Pihak manajemen juga menyiapkan data untuk pengembangan dan implementasi industri 4.0 yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dari operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan profit yang lebih besar.

Pekerjaan dan Budaya menjadi landasan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Adanya budaya yang baik akan membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan yang dapat dilihat dari adanya kompetensi yang dimiliki karyawan, keterbukaan inovasi baru, adanya kerjasama tim dan kolaborasi antar dividi dalam operasional perusahaan. Dari segi pekerjaan dan budaya diketahui bahwa karyawan FIFGROUP Denpasar dianggap sudah mempunyai kompetensi yang mendukung industri 4.0 dimana karyawan sudah terbiasa dengan berbagai teknologi yang digunakan dalam operasional perusahaan. Selain itu perusahaan mempunyai keterbukaan atas ide-ide baru yang muncul dari karyawan yang mampu memaksimalkan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Buk Rina selaku manajer keuangan yang menyatakan

“Karyawan FIFGROUP Denpasar dianggap sudah mempunyai kompetensi yang mendukung industri 4.0 dimana karyawan sudah terbiasa dengan berbagai teknologi yang digunakan dalam operasional perusahaan. Inovasi dan keterbukaan ide sangat dijaga dalam operasional perusahaan mengingat diperlukannya transformasi setiap waktu untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.

Keterbukaan ini membuat adanya inovasi yang membuat adanya perbaikan dari berbagai kegiatan perusahaan kearah yang lebih baik. Selain itu, kerjasama dari berbagai departemen juga dilakukan di FIFGROUP Denpasar. Kerjasama ini dilakukan untuk mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan dengan lebih baik. Salah satu contohnya adalah departemen marketing yang ikut membantu melakukan penagihan untuk konsumen yang terlambat melakukan pembayaran karena mempunyai kedekatan yang lebih baik dibandingkan dengan departemen kolektor.

Teknologi keuangan memberikan dampak besar dalam dunia usaha saat ini. Teknologi yang baik akan membuat semua aktivitas perusahaan dalam dilakukan dengan lebih efektif dan efisien yang salah satunya dengan menggunakan teknologi yang modern dan dapat dikendalikan penuh oleh perusahaan tanpa mengesampingkan keamanan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Sejalan dengan pernyataan Pak Bakti selaku kepala kolektor yang mengatakan

“Untuk mendukung kinerja yang lebih efisien, FIFGROUP Denpasar menggunakan teknologi industri 4.0 yang modern dan mampu bekerja dengan efektif. Salah satunya adalah aplikasi untuk konsumen yang akan melakukan pembayaran angsuran yang dimiliki. Aplikasi ini membantu konsumen melakukan kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor sehingga konsumen memperoleh berbagai kemudahan dimana semua teknologi yang digunakan perusahaan saat ini bisa dikendalikan penuh oleh perusahaan mengingat pentingnya semua data nasabah dan juga untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah”.

Untuk mendukung kinerja yang lebih efisien, FIFGROUP Denpasar menggunakan teknologi industri 4.0 yang modern dan mampu bekerja dengan efektif. Salah satunya adalah aplikasi untuk konsumen yang akan melakukan pembayaran angsuran yang dimiliki. Aplikasi ini membantu konsumen melakukan kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor sehingga konsumen memperoleh berbagai kemudahan. FIFGROUP Denpasar juga sangat memperhatikan keamanan data dari nasabah. Aplikasi mampu menyimpan data nasabah dengan sangat baik sehingga tidak perlu ada kekhawatiran konsumen akan kehilangan data.

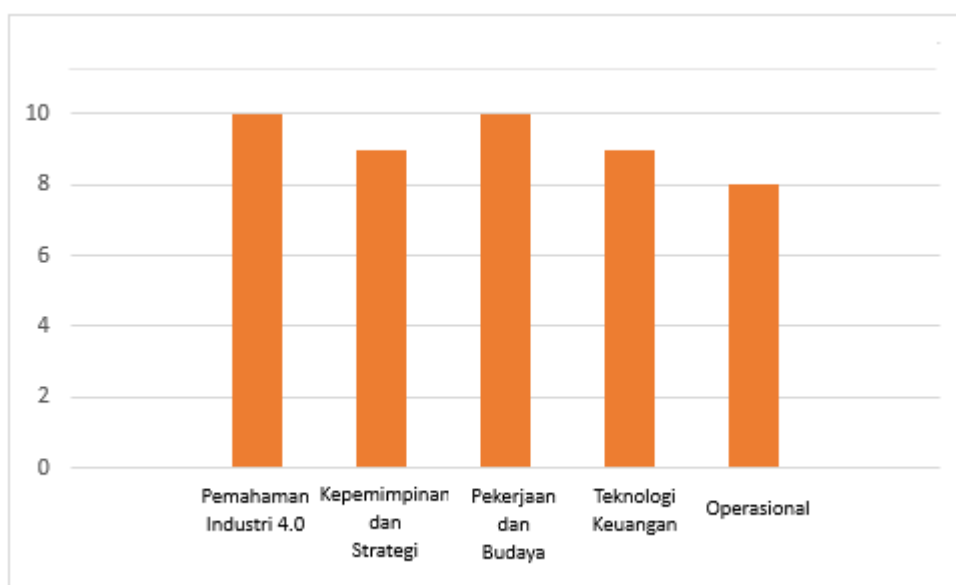
Operasional menjadi faktor kunci yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak manajemen. Diharapkan operasional perusahaan dapat dijalankan dengan fleksibel dengan sistem komputerisasi untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. FIFGROUP Denpasar dalam operasionalnya menggunakan berbagai teknologi industri 4.0. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Bakti selaku kepala kolektor yang menyatakan

“Untuk saat ini semua operasional perusahaan didukung dengan sistem komputer. Semua teknologi itu dapat dikendalikan penuh oleh pihak manajemen seperti aplikasi action yang dilengkapi dengan lokasi update sehingga pihak manajemen mampu mengontrol semua tindakan yang dilakukan oleh karyawan dan pihak manajemen juga mampu mengakses hasil kunjungan karyawan pada konsumen sehingga bisa dilakukan evaluasi untuk meningkatkan hasil kerja”.

Salah satu contohnya adalah bagian penagihan yang menggunakan aplikasi bernama action. Aplikasi ini membantu karyawan penagihan menemukan data konsumen yang terlambat melakukan pembayaran. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan foto konsumen sehingga memudahkan karyawan dalam melakukan penagihan. Semua teknologi itu dapat dikendalikan penuh oleh pihak manajemen contohnya aplikasi action tersebut dilengkapi dengan lokasi update sehingga pihak manajemen mampu mengontrol semua tindakan yang dilakukan oleh karyawan dan pihak manajemen juga mampu mengakses hasil kunjungan karyawan pada konsumen sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan hasil kerja.

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti dapat menjelaskan kesiapan FIFGROUP Denpasar dalam menghadapi industri 4.0 melalui sebuah grafik yang merupakan penilaian peneliti yang disajikan sebagai berikut :

Gambar 1
Kesiapan FIFGROUP Denpasar Menghadapi Industri 4.0



Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di FIFGROUP Denpasar dimana dilakukan pengkajian mendalam mengenai digitalisasi di era industri 4.0 dengan lima indikator yang selanjutnya akan dinilai kesiapan dari FIFGROUP Denpasar dalam menghadapi industri 4.0. Hasil wawancara menunjukkan karyawan FIFGROUP Denpasar sudah cukup memahami konsep dari industri 4.0 yang saat ini terjadi. Hal ini dapat dilihat dari karyawan yang sudah mampu melakukan pekerjaan dengan menggunakan berbagai teknologi buatan. Salah satu contohnya adalah menggunakan sistem komputer untuk menyimpan semua data yang dimiliki perusahaan sehingga dapat meminimalisir penggunaan ruangan dan mampu diakses oleh berbagai pihak berkepentingan sehingga operasional perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dari segi hasil yang diperoleh, menurut narasumber perusahaan mampu mencapai hasil yang lebih baik dengan adanya implementasi industri 4.0 karena semua operasional perusahaan mampu dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dengan hasil yang jauh lebih besar.

Narasumber dalam penelitian ini menyatakan pimpinan selalu berusaha melakukan implementasi dari industri 4.0. Hal ini dilakukan karena industri 4.0 dianggap memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Pimpinan juga menggunakan berbagai strategi implementasi industri 4.0 untuk mampu memenangkan persaingan yang terjadi saat ini mengingat tingginya persaingan yang terjadi saat ini. Pihak manajemen juga menyiapkan data untuk pengembangan dan implementasi industri 4.0 yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dari operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan profit yang lebih besar.

Dari segi pekerjaan dan budaya diketahui bahwa karyawan FIFGROUP Denpasar dianggap sudah mempunyai kompetensi yang mendukung industri 4.0 dimana karyawan sudah terbiasa dengan berbagai teknologi yang digunakan dalam operasional perusahaan. Selain itu perusahaan mempunyai keterbukaan atas ide-ide baru yang muncul dari karyawan yang mampu memaksimalkan operasional perusahaan. Keterbukaan ini membuat adanya inovasi yang membuat adanya perbaikan dari berbagai kegiatan perusahaan kearah yang lebih baik. Selain itu, kerjasama dari berbagai departemen juga dilakukan di FIFGROUP Denpasar. Kerjasama ini dilakukan untuk mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan dengan lebih baik. Salah satu contohnya adalah departemen marketing yang ikut membantu melakukan penagihan untuk konsumen yang terlambat melakukan pembayaran karena mempunyai kedekatan yang lebih baik dibandingkan dengan departemen kolektor.

Untuk mendukung kinerja yang lebih efisien, FIFGROUP Denpasar menggunakan teknologi industri 4.0 yang modern dan mampu bekerja dengan efektif. Salah satunya adalah aplikasi untuk konsumen yang akan melakukan pembayaran angsuran yang dimiliki. Aplikasi ini membantu konsumen melakukan kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor sehingga konsumen memperoleh berbagai kemudahan. FIFGROUP Denpasar juga sangat memperhatikan keamanan data dari nasabah. Aplikasinya mampu menyimpan data nasabah dengan sangat baik sehingga tidak perlu ada kekhawatiran konsumen akan kehilangan data.

FIFGROUP Denpasar dalam operasionalnya menggunakan berbagai teknologi industri 4.0. Salah satu contohnya adalah bagian penagihan yang menggunakan aplikasi bernama action. Aplikasi ini membantu karyawan penagihan menemukan data konsumen yang terlambat melakukan pembayaran. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan foto konsumen sehingga memudahkan karyawan dalam melakukan penagihan. Semua teknologi itu dapat dikendalikan penuh oleh pihak manajemen contohnya aplikasi action tersebut dilengkapi dengan lokasi update sehingga pihak manajemen mampu mengontrol semua tindakan yang dilakukan oleh karyawan dan pihak manajemen juga mampu mengakses hasil kunjungan

karyawan pada konsumen sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan hasil kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pemahaman Industri 4.0 karyawan sudah baik yang dapat dilihat dari karyawan yang sudah mampu melakukan pekerjaan dengan menggunakan berbagai teknologi buatan. Kepemimpinan dan strategi yang digunakan sudah mendukung implementasi industri 4.0. Hal ini dilakukan karena industri 4.0 dianggap memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Dari segi pekerjaan dan budaya diketahui bahwa karyawan FIFGROUP Denpasar dianggap sudah mempunyai kompetensi yang mendukung industri 4.0 dimana karyawan sudah terbiasa dengan berbagai teknologi yang digunakan dalam operasional perusahaan. Teknologi Keuangan yang digunakan FIFGROUP Denpasar merupakan teknologi industri 4.0 yang modern dan mampu bekerja dengan efektif. FIFGROUP Denpasar juga sangat memperhatikan keamanan data dari nasabah. Aplikasinya mampu menyimpan data nasabah dengan sangat baik sehingga tidak perlu ada kekhawatiran konsumen akan kehilangan data. Operasional FIFGROUP Denpasar menggunakan berbagai teknologi industri 4.0. Semua teknologi itu dapat dikendalikan penuh oleh pihak manajemen.

Berdasarkan simpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian pustaka dalam melakukan replikasi penelitian sejenis dengan menambah jumlah sampel serta mengoptimalkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain sehingga hasil yang diperoleh mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Bagi FIFGROUP Denpasar, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengimplementasikan industri 4.0 dan diharapkan terus mengevaluasi penerapan industri 4.0 yang diterapkan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dalam memberi pelayanan yang baik dan cepat pada nasabah serta sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhakiri, M. Hanif. 2019. *Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Manajer Energi Di Industri Dan Bangunan Gedung*. Jakarta: Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Efendi, Bayu, and Riza Fathoni Ishak. 2022. Analisis Pengukuran Kesiapan Industri 4.0 Pada

- PT. Indonesia Power Suralaya Pgu Menggunakan Metode Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0). *Jurnal Akutansi*. Fakultas Teknik Unpas.
- Ekawati, Irna, and Puji Rahayu. 2021. Pengukuran Kesiapan Industri Minuman Teh Menjangkau Revolusi Industri 4.0 dengan Metode INDI 4.0. *Jurnal INVENTORY: Industrial Vocational E-Journal On Agroindustry 2.2* : 76- 80.
- Hamdan. 2018. Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi. *Jurnal Akutansi NUSAMBA*, 3.
- Kagermann, H., Wahlster. W, Held, J., and Deutsche P.A. 2018. Recommendations For Implementing The Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0, Final Rep. Ind. 4.0 WG. 82.
- Kohlegger, M., Maier, R. and Thalmann, S., 2019, *Understanding Maturity Models Results of a structured Content Analysis, presented at the IKNOW '09 and I-SEMANTICS '09*, Graz, Austria.
- Lichtblau, K., Stich, V., Bertenrath, R., Blum, M., Bleider, M., Millack, A., Schmitt, K., Schmitz, E., and Schröter, M., 2018. IMPULS - *Industrie 4.0- Readiness, Impuls Stiftung des VDMA*, Aachen-Köln
- Risdianto, Eko. 2019. Analisis Pendidikan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Akutansi*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi, 2019. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suwardana, Hendra. 2017. Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental. *Jurnal Akutansi Tuban: Universitas PGRI Ronggolawe*. Vol. 1. No. 2
- Tan, Hauw Sen Rimo, et al. 2019. Pengembangan Model Pengukuran Kesiapan Industri 4.0 Untuk Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri 13.2* : 106-120.
- Utomo, Satrio, and Nugraheni Setiastuti. 2019. Industri 4.0: Pengukuran Tingkat Kesiapan Industri Tekstil dengan Metode Singapore Smart Industry Readiness Index." *Techno Nusa Mandiri: Journal of Computing and Information Technology 16.1* : 29-36.
- Viharos, Z., J., Soós, S., Nick, G., Várgedő, T., and Beregi, R., 2017. *Non-comparative, Industry 4.0 readiness evaluation for manufacturing enterprises, Technical Diagnostics in Cyber-Physical Era*. 15th IMEKOTC10 Workshop on Technical Diagnostics
- Widayani, Anna, and Dwi Ariani Finda Yuniarti. 2021. Kesiapan industri kecil dan menengah dalam menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan 8.2* : 128-137.
- Wu. C. 2018. A Readiness Model for Adopting Web Services. *Journal of Enterprise Information Management*. Vol. 17(5), 361-371

Pengaruh Kompetensi, Budaya Organisasi, Dan Fungsi Badan Pengawas Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se - Kecamatan Sukawati

Ni Wayan Mirawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

e-mail: mirami368@gmail.com

ABSTRACT

LPD performance is an important factor that can be used to increase company performance. LPD performance is the result of management's decisions to achieve the goal effectively and efficiently. To improve the performance of LPD, competent employees are needed in their work. The purpose of this study is to determine the impact of competence, organizational culture and performance of supervisory bodies on the performance of Village Credit Institutions (LPDs) in Sukawati District. All LPD personnel from Sukawati District who were still active participated in this study. In this study, the number of samples was 99 individuals, which was determined by purposive sampling and tested by multiple linear regression analysis techniques. The results of this study show that expertise has a significant positive impact on LPD performance in Sukawati District. Organizational culture has a significant positive effect on LPD performance in Sukawati District. The work of the supervisory body has a significant positive impact on the functioning of LPD in Sukawati district. In the future, the results of this study can be used as considerations for designing regulations and policies related to increasing the responsibility of village resource management.

Keywords: Competence, Organizational Culture, Function of the Supervisory Body, Institutional Performance

PENDAHULUAN

Dalam memnetukan efektifitas LPD bias dilihat dari kinerja lembaganya. Kinerja dari sebuah “Lemabaga Perkreditas Desa” merupakan sebuah bentuk putusan akhir yang dihasilkan pihak manajemen untuk dapat mencapai sebuah sasaran yang diharapkan. Sebagai upaya peningkatan kinerja LPD diperlukan dukungan dari kemampuan/kompetensi pegawai didalamnya. Herawati (2015) menjelaskan kompetensi merupakan factor yang memberikan dampak bagi kinerja. Seseorang yang berkompeten atau memiliki kemampuan tinggi diharapkan akan mampu menghasilkan kinerja yang baik. Hal inilah yang menyebabkan para pegawai biasanya akan dituntut untuk selalu mampu meningkatkan “kompetensi” mereka.

Kinerja LPD akan sangat dipengaruhi oleh sebuah kebiasaan dalam organisasinya dimana kebiasaan ini sering diisitlahkan dengan “budaya organisasi”. Budaya organisasi dapat dijelaksan sebagai rangkaian nilai ataupun sebuah system yang diterima, diterapkan maupun ditelaah oleh seluruh komponen dalam organisasi. Budaya organisasi biasanya memiliki sifat turun temurun dan diterapkan sudah cukup lama dalam sebuah organisasi sehingga menjadi

sebuah kebiasaan. Adanya budaya organisasi akan membentuk motivasi seseorang dalam bekerja sehingga nantinya mereka mampu menghasilkan kinerja yang efektif. Budaya organisasi harus bersifat baik sebab semakin baiknya budaya akan mampu mendorong kinerja karyawan yang semakin unggul.

Pertumbuhan kinerja pada sebuah lembaga juga berkaitan dengan peran dari badan oengawasnya. Badan pengawas yang terdapat pada LPD memiliki fungsi selayaknya auditor internal sebab badan pengawas merupakan orang khusus dalam organisasi yang diberikan mandate mengawasi jalan serta pengelolaan segala aktivitas lembaga (LPD).

“Kinerja Organisasi (LPD) dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai, diperoleh, atau dihasilkan oleh LPD, yang selanjutnya menjamin tercapainya berbagai tujuan LPD dalam upayanya melakukan pengembangan usaha. Secara umum LPD dapat dikatakan berhasil, namun tidak dapat dipungkiri masih banyak LPD yang bermasalah”. Terdapat 270 LPD di Kabupaten Gianyar, dengan kategori data 153 “sehat”, 50 “cukup sehat”, 38 “kurang sehat” dan 29 “tidak sehat”. Ada juga 33 LPD di Kecamatan Sukawati (bali.tribun.news.com, 30 Juli 2019).

LPD belakangan mengalami permasalahan terkait dengan kinerja lembaganya. Salah satu masalah yang muncul pada LPD di kecamatan Sukawati yakni berkaitan dengan “kredit macet” yang dialami oleh LPD DesaAdat Guwang dan LPD Belaluan (<http://balipost.com>). Kredit macet bisa menjadi cerminan bahwa LPD belum memiliki kinerja yang baik. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukawati karena merupakan kawasan strategis dan memiliki beragam destinasi wisata. Seperti Pasar Seni Sukawati dan Pasar Seni Gwan. Oleh karena itu, LPD berperan sangat penting dalam menyalurkan dana kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sukawati untuk meningkatkan perekonomian. Semakin banyak dana yang disalurkan maka kinerja LPD akan semakin berdampak. Berikut “rata-rata laba bersih, total aset dan ROA LPD Kabupaten Sukawati tahun 2020 hingga 2022”.

Tabel 1.1 Laba Bersih, Total Aset,dan ROA LPD SE-KECAMATAN SUKAWATI Tahun 2020-2022

TAHUN	LABA BERSIH	TOTAL ASET	ROA	Kredit Macet
2020	Rp 26.084.014	Rp 1.041.383.263	2,50	Rp 16.844.686
2021	Rp 22.987.260	Rp 1.044.192.644	2,20	Rp 34.426.818
2022	Rp 21.749.994	Rp 1.040.897.111	2,08	Rp 41.294.751

Sumber: LPLPD Kabupaten Gianyar

Berdasarkan Tabel 1.1 Terlihat laba bersih LPD Kabupaten Sukawati mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 2022 dan mengalami penurunan menjadi Rp 1,5 juta pada tahun 2020-2022. 26. 084. 014 menjadi 21. 749. 994 Rp. Total aset LPD di Kabupaten Sukawati meningkat sebesar Rp dari tahun 2020 ke tahun 2021. 2. 809. 381. Dan total neraca tahun 2021 ke tahun 2022 justru mengalami penurunan sebesar Rp 3. 295. 533. Return on Asset (ROA) LPD di Kecamatan Sukawati mengalami penurunan dari 2,50% menjadi 2,08% pada tahun 2020 ke tahun 2022. Penurunan laba bersih ini disebabkan oleh meningkatnya kredit bermasalah (*non-performing loan*) dari tahun ke tahun.

Hal inilah yang terjadi pada lembaga pemberi pinjaman hipotek di kawasan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang saat ini sedang berjuang untuk memberikan pinjaman tanpa kewajiban akibat kredit macet. Kredit macet juga dapat menimbulkan kredit macet bagi pengelola LPD, termasuk pegawai. Meskipun kredit macet setiap tahunnya semakin meningkat, namun terlihat bahwa jumlah kredit macet LPD di wilayah Sukawati mencapai peningkatan serupa yaitu Rp dari tahun 2020 hingga 2022. 16.844.686 ~ Rp. 41.294.751, Karena meningkatnya kredit bermasalah, maka kegiatan administrasi harus lebih diperhatikan untuk meningkatkan kinerja usaha LPD dan mengurangi LPD bermasalah. LPD digunakan sebagai evaluasi kinerja masa lalu dan sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan masa depan.

Berdasarkan uraian fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH KOMPETENSI, BUDAYA ORGANISASI, DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE - KECAMATAN SUKAWATI**”

KAJIAN PUSTAKA

Mengacu pada pernyataan Barney (1991), diartikan bahwa “teori *view-based resource* (RBV) perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang berfokus pada pemahaman berbagai sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi suatu organisasi atau organisasi. perusahaan tertentu”. Penelitian “Prakoso, Ratnadi dan Putri (2017) menemukan bahwa keterampilan berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian Jelantik dkk (2021) menemukan bahwa budaya organisasi, pembelajaran dan kinerja lembaga pengawas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Studi Wulantari dkk (2022) menemukan bahwa tata kelola perusahaan dan praktik manajemen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD. Penelitian Amanda dan

Dharma Suputra (2019) menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh langsung terhadap kinerja positif LPD di Kota Denpasar”.

Dalam memnetukan efektifitas LPD bias dilihat dari kinerja lembaganya. Kinerja dari sebuah “Lemabaga Perkreditas Desa” merupakan sebuah bentuk putusan akhir yang dihasilkan pihak manajemen untuk dapat mencapai sebuah sasaran yang diharapkan. Sebagai upaya peningkatan kinerja LPD diperlukan dukungan dari kemampuan/kompetensi pegawai didalamnya. Herawati (2015) menjelaskan kompetensi merupakan factor yang memberikan dampak bagi kinerja. Seseorang yang berkompeten atau memiliki kemampuan tinggi diharapkan akan mampu menghasilkan kinerja yang baik. Hal inilah yang menyebabkan para pegawai biasanya akan dituntut untuk selalu mampu meningkatkan “kompetensi” mereka

H1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

Kinerja LPD akan sangat dipengaruhi oleh sebuah kebiasaan dalam organisasinya dimana kebiasaan ini sering diisitlahkan dengan “budaya organisasi”. Budaya organisasi dapat dijelaksan sebagai rangkaian nilai ataupun sebuah system yang diterima, diterapkan maupun ditelaah oleh seluruh komponen dalam organisasi. Budaya organisasi biasanya memiliki sifat turun temurun dan diterapkan sudah cukup lama dalam sebuah organisasi sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Adanya budaya organisasi akan membentuk motivasi seseorang dalam bekerja sehingga nantinya mereka mampu menghasilkan kinerja yang efektif. Budaya organisasi harus bersifat baik sebab semakin baiknya budaya akan mampu mendorong kinerja karyawan yang semakin unggul

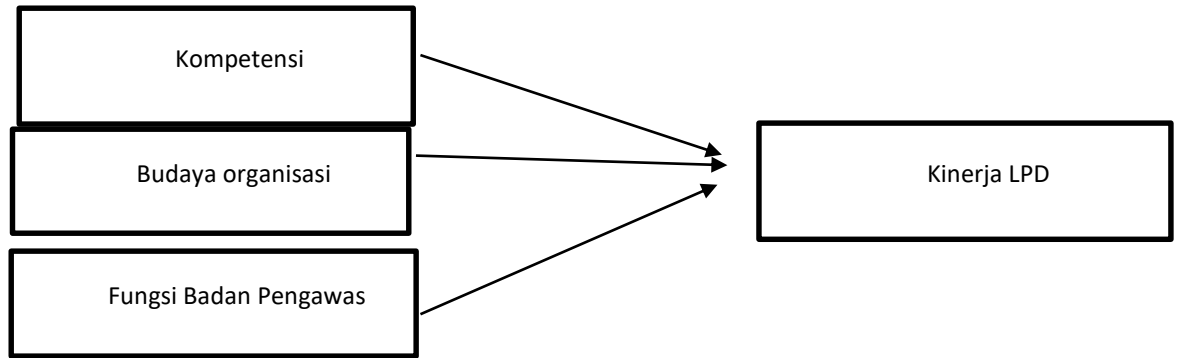
H2: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

Pertumbuhan kinerja pada sebuah lembaga juga berkaitan dengan peran dari badan oengawasnya. Badan pengawas yang terdapat pada LPD memiliki fungsi selayaknya auditor internal sebab badan pengawas merupakan orang khusus dalam organisasi yang diberikan mandate mengawasi jalan serta pengelolaan segala aktivitas lembaga (LPD)

H3: Fungsi Badan Pengawas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

METODE PENELITIAN

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja yang bekerja dan aktif di LPD wilayah Sukawati. LPD yang digunakan adalah yang terdaftar pada LP LPD 2022 di Kecamatan Sukawati, berjumlah 33 LPD, pegawai 280 orang (Sumber : LP LPD Kabupaten Gianyar). Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah seluruh karyawan sebanyak 280 karyawan dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi sampel penelitian adalah Badan Pengawas, Kepala LPD (*Pamucuk*) yang memiliki tugas memeriksa data transaksi pembukuan sesuai dengan peraturan yang ada, dan Bendahara/Kasir (*Patengen*) yang bertugas merekap transaksi keuangan dan bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Berdasarkan teknik diatas sampel yang mejadi responden dalam penelitian ini di sesuaikan menjadi sebanyak 99 orang”. Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan satatistik deskriptif yang dimana fungsinya untuk memberikan gambaran secara umum kondisi dari data penelitian. Selanjutnya akan diuji validitas dengan tujuan memastikan bahwa data yang ada dalam penelitian ini akurat “valid” sehingga dapat digunakan. Uji reliabilitas difungsikan untuk memastika data “reliabel” karena data harus memiliki konsistensi jawaban dari waktu ke waktu. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan data akan memiliki distribusi yang normal dengan dilakukan “uji normalitas”, data tidak memiliki gejala heteros serta terbebas dari gangguan dengan dilakukan “uji multikolinearitas. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t, uji f, dan uji

konefisien determinasi. Serta dalam penelitian ini akan dilakukan uji analisis regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Survei dilakukan di 33 LPD di Kecamatan Sukawati. Proses pengumpulan data terdiri dari penyebaran pertanyaan penelitian kepada 74 responden yang semuanya telah lengkap dan tersedia untuk dianalisis. Berdasarkan pengujian instrumen penelitian, nilai indeks seluruh variabel lebih besar dari 0,30 dan koefisien alpha lebih besar dari 0,6, yang dapat menggambarkan semua instrumen tersebut akurat dan dapat diandalkan.

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *asymp.sig*(2-tailed) lebih besar dari 0,05 (0,200>0,05) yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dari hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai toleransi variabel kompetensi (X1) sebesar 0,903 dan nilai VIF sebesar 1,108. Nilai toleransi indeks budaya organisasi (X2) sebesar 0,956 dan nilai VIF sebesar 1,046. Nilai indeks fungsi kendali (X3) sebesar 0,873 dan nilai VIF sebesar 1,145. Karena nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat bukti multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji Glejser dapat disimpulkan bahwa semua nilai signifikansi yang berbeda lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat bukti terjadinya heteroskedastisitas.

Tabel 2 Hasil Uji Kelayakan dan Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,003	,311		6,440	,000
Kompetensi (X1)	,236	,047	,435	5,060	,000
Budaya organisasi (X2)	,288	,108	,134	2,661	,003
Fungsi badan pengawas (X3)	,210	,067	,276	3,153	,002

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dibuatkan persamaan sebagai berikut:

“Y= 2,003 + 0,236X1 + 0,288 X2 + 0,210X3 + e”

1. “Nilai Adjusted R square 0,392, hal ini berarti bahwa kompetensi, budaya organisasi,

fungsi badan pengawas mampu mempengaruhi kinerja LPD sebesar 39,2% dan sisanya 60,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini”.

2. “Nilai uji F sebesar 22,092 dengan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini adalah layak untuk menganalisis pengaruh kompetensi, budaya organisasi, dan fungsi badan pengawas terhadap kinerja LPD”.

Pengaruh kompetensi terhadap kinerja LPD se Kecamatan Sukawati

Berdasarkan hasil pengujian kemampuan berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD dapat dijelaskan sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima. Pengaruh kapabilitas yang signifikan terhadap kinerja LPD menunjukkan bahwa semakin baik kapabilitas sumber daya manusia LPD di wilayah Sukawati maka semakin baik pula kinerja LPD tersebut. Keterampilan SDM sangat penting bagi LPD untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sehingga mempengaruhi kinerja organisasi (LPD). Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dapat menciptakan keseimbangan internal dalam LPD, yang mencakup tujuan, sasaran dan kegiatan berbagai kelompok organisasi (LPD). LPD wilayah Sukawati mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat mencapai tujuan LPD, terkait dengan kegiatan organisasi (LPD). Hasil penelitian ini mendukung temuan Prakoso, dkk (2017). Lestari dan Andyani (2023) menemukan bahwa kapabilitas SDM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD.

Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja LPD se Kecamatan Sukawati

Berdasarkan hasil pengujian dijelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD, sehingga hipotesis kedua penelitian ini diterima. Pengaruh positif budaya organisasi terhadap kinerja LPD menunjukkan bahwa peningkatan penerapan budaya organisasi diiringi dengan peningkatan kinerja LPD di wilayah Sukawati. Budaya manajemen merupakan salah satu jenis aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. “Adanya budaya organisasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk berbuat yang terbaik bagi organisasi dan melaksanakan pekerjaannya, sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan Jelantik. et al., (2021) dan Wulantari et al., (2022) mengemukakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD”.

Pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kinerja LPD

“Berdasarkan hasil pengujian maka hipotesis ketiga penelitian ini dapat diterima karena menjelaskan bahwa kinerja lembaga inspeksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja pengurus LPD maka semakin baik pula kinerja LPD. Peran tim audit sebagai auditor internal merupakan mitra strategis dalam pengembangan LPD. Dengan mengoptimalkan operasional tim pengurus dengan memastikan setiap pengawas LPD di wilayah Sukawati melakukan pekerjaan sesuai tugasnya, membina hubungan baik dengan sesama pengawas dan melakukan evaluasi terhadap kerja pengelola LPD”.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: “Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja LPD se Kecamatan Sukawati. Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja LPD se Kecamatan Sukawati. Fungsi badan pengawas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja LPD se Kecamatan Sukawati”. Saran yang dapat saya berikan kepada LPD se-wilayah Sukawati adalah agar sistem pengelolaan (LPD) dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas, penerapan proses manajemen dan perhatian terhadap kerja auditor yang melakukan audit internal. Pengecekan terkait kepatuhan LPD dilakukan sembari melaksanakan SOP yang telah ditetapkan. Memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Adgnani, K.W. & Juliento, I.P (2021) “Pengaruh Kapasitas, GCG dan Kehadiran Awig-Awig Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa dengan Toli Hita Karana Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Jembrana Kabupaten Mendoyo”. . Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Ganesha, 12(02), 413-424.
Amanda, LA dan I.D.G. DS (2019). “Pengaruh budaya organisasi, komitmen, dan akuntabilitas terhadap kinerja lembaga perkreditan desa”. Jurnal Elektronik Akuntansi, 27(3): 1763.
Amanda, LA & Dharma Sputra, IDG (2019). “Pengaruh budaya organisasi, komitmen, dan akuntabilitas terhadap kinerja lembaga perkreditan desa”. E-Jurnal Akuntansi, 27, 1763. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p05
Angayana, I. P. (2019). “Pengaruh prinsip good governance dan budaya organisasi terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan di Kelurahan Kota Denpasar”. Tesis PhD, Universitas Udayana.
Arca, Idaho (2016). “Keberadaan lembaga perkreditan desa dalam pengembangan desa Pakramang sebagai desa wisata di Bali. Ganek Swara”, 10(2), 78-84.
Ardiani, NJ (2020). “Pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas penyaluran kredit pada lembaga perkreditan desa di kecamatan Busumbiu”. Tesis Undiksha.
Barney, J. (1991). “Sumber daya yang kuat dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan”. Jurnal Manajemen, 17, 19-120. Endiana, P. Dunn. (2020). Pengaruh sistem informasi

- akuntansi dan kapabilitasnya terhadap kinerja (studi kasus pada koperasi di kecamatan Payangan). *Jurnal KRISNA: Koleksi Penelitian Akuntansi*, 11, 179-189.
- Gelantik, I.P. GA, Kepramareni, P. , Apriada, K. , Ulandari, PR (2021). "Pengaruh sistem manajemen internal, budaya organisasi, disiplin kerja, dan fungsi dewan pengawas terhadap kinerja lembaga perkreditan desa (LPD) di kecamatan Mengwi kabupaten Badung". *Karma (Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 168–176. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/1627>
- Grichtno, F. (2018). "Pamela 6 Pengukuran kinerja supermarket menggunakan Balanced Scorecard. Tugas Akhir Program Penelitian Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta".
- Herawati, NLM 2015. :Pengaruh pengawasan manajemen, kedisiplinan, dan kinerja pegawai terhadap kinerja pegawai pada Biro Inspeksi Kabupaten Tavana". kertas. Denpasar : Universitas Udayana.
- Iri hati, NM (2017). "Pengaruh sistem informasi akuntansi, budaya organisasi, disiplin kerja dan fungsi dewan terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung". kertas. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Bali.
- Lestari, Michigan (2013). "Pengaruh budaya organisasi dan pengendalian internal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Mahardini Shinta, A. (2018). "Dampak sistem pengendalian internal dan partisipasi anggaran terhadap kinerja lembaga perkreditan desa". Disertasi dari Jurusan Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Mira, NC (2019). "Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi, budaya organisasi, disiplin kerja dan fungsi lembaga pengawas terhadap kinerja LPD pada lembaga perkreditan desa Kabupaten Badung". *Karma (Forschungsarbeit....* <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/1627> <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/download/1627/1312>
- N. LP, Sudhiana, IW, Ali Pramukhi, NMW. (2022). "Peran kapasitas manajerial dalam memoderasi hubungan good governance dan budaya organisasi terhadap kinerja lembaga perkreditan desa (LPD) di kabupaten Sukawati". *Akuntansi dan Keuangan Hita*, 3(1), 325-345. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2310>
- Tazkia, (2017) MTs Negri 2 Hubungan Budaya Organisasi dengan Komitmen Kerja Guru di Medan (Medan: Fakultas Tarbiya dan Keguruan, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Yamin, F. (2016). "Pengaruh budaya perusahaan dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai faktor yang mempengaruhi (studi kasus di Trans Studio, salah satu mega cabang bank di Makassar)". *Jurnal Universitas Islam Indonesia*

Kompetensi SDM Memoderasi Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Ni Kadek Vina Ari Wahyuni

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia Denpasar
 Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar
 email: vinaariwahyuni@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the role of human resource competence in moderating the relationship between the use of information technology and internal control systems on the quality of the financial reports of the Kuta District LPD. The population used in this research were all LPD employees in Kuta District who were registered with the Badung Regency LPD BKS, totaling 289 people from 23 LPD units, sampling using a purposive sampling technique with 69 respondents were obtained as respondents. Data analysis uses moderation regression and other relevant tests. The research results show that the use of information technology is able to improve the quality of financial reports, the internal control system is able to improve the quality of financial reports, human resource competence is not able to moderate the influence between the use of information technology and knowledge systems.

Keywords: IT; ICS; Competency; Financial Reports

PENDAHULUAN

LPD memiliki keberadaan yang sangat penting bagi masyarakat khususnya di Bali, lembaga keuangan diwajibkan menyusun dan melaporkan laporan keuangannya sebagai bentuk tanggungjawab pengelola LPD atas kegiatan yang dilakukan LPD selama satu periode. Sebuah laporan keuangan menjadi gambaran tingkat kesehatan LPD serta memuat keseluruhan informasi tentang LPD yang dibutuhkan oleh berbagai pihak seperti masyarakat desa adat, karena LPD merupakan lembaga keuangan milik bersama desa adat di Bali (Anggayana & Wirajaya, 2019). LPD sebagai sebuah perusahaan keuangan, memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga keuangan lain, dalam hal pengelolaannya melibatkan aturan desa adat (*awig-awig* dan *pararem* desa) serta berlandaskan ajaran agama Hindu yang berkembang di Bali (Suadi & Mitsuhiko, 2019).

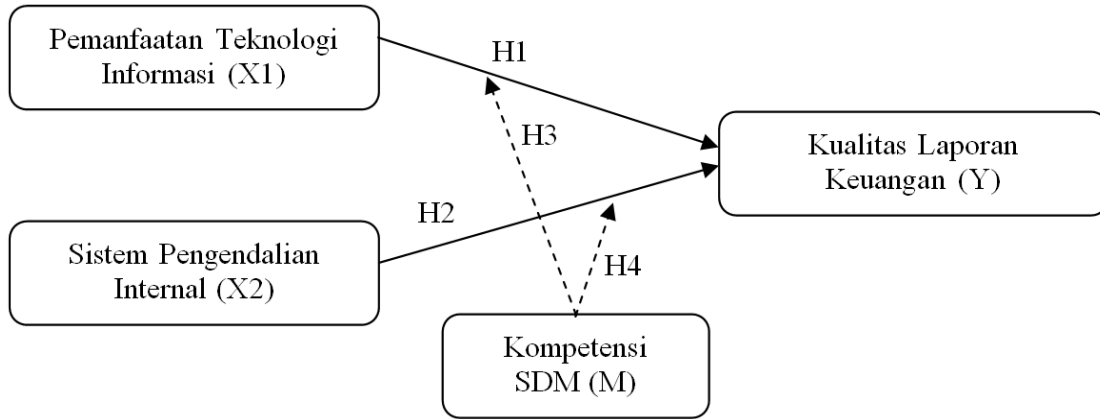
LPD yang berkembang pesat tidak terhindar dari masalah yang mengikuti, seperti kondisi LPD yang “sakit” serta dalam pengelolaannya tidak jarang terjadi penggelapan dana yang berujung pada bangkrutnya LPD tersebut, manajemen yang kurang menerapkan tata kelola dengan baik menjadi penyebab utama dalam hal tersebut, kurangnya ketaatan pengelola terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah, sistem pengendalian internal LPD yang masih belum efektif dalam melakukan pengawasan, kurangnya analisis risiko terhadap

kredit yang diberikan membuat kualitas kredit LPD memburuk, serta adanya kecurangan akuntansi berupa penggelapan dana nasabah (Sudiartha, 2017).

Portal berita *online* baliportalnews.com (2022) memuat berita yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar menghukum pidana dengan penjara atas Terdakwa selama 1 Tahun 4 Bulan kepada pegawai Bagian Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken, Susut, Bangli I Wayan Denes sebagai yang terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan LPD. Terdakwa melakukan pemalsuan pencatatan buku dan laporan LPD, dimana LPD seharusnya merugi pada tahun tersebut tetapi dinyatakan seolah-olah menghasilkan laba dan berjalan baik atau dengan pelaporan laba fiktif. Terdakwa juga melakukan manipulasi dengan memindahkan simpanan tabungan dan deposito nasabah untuk menjadi pendapatan bunga yang menunjukkan LPD mendapatkan keuntungan, sehingga membuat operasional yang harus dibayarkan LPD tidak sesuai dengan keadaan aslinya yang membuat dana yang tersedia di LPD Tanggahan Peken tidak seimbang serta dana likuiditas yang tidak tersedia sesuai dengan risiko yang ditanggung LPD dari tabungan dan deposito nasabah, yang membuat nasabah banyak yang tidak bisa menarik tabungan di LPD Tanggahan Peken.

Kasus mengenai rekayasa laporan keuangan juga terjadi pada LPD Kapal, Mengwi, Kabupaten Badung menurut portal berita *online* (Bali.antaranews.com, 2023) serangkaian kasus yang terjadi di LPD Kapal, Ditreskrimsus Polda Bali menetapkan MB (58) yang bekerja sebagai *programmer*, menjadi tersangka pada tanggal 20 Juni 2023 yang berperan merekayasa laporan keuangan LPD Kapal untuk memanipulasi kredit bermasalah dan macet dan menyembunyikannya dengan membuat kode-kode tertentu dengan keahlian yang dimilikinya dan laporan keuangan LPD Kapal terlihat tidak bermasalah, padahal dalam kenyataannya LPD Kapal sedang mengalami masalah keuangan. Tersangka MB juga memanipulasi tingkat parameter kredit sehingga tidak ada data yang menyatakan kredit macet, kredit macet dirubah seolah-olah menjadi lancar. Akibat perbuatannya LPD Kapal mengalami kerugian sebesar Rp. 15 miliar, sesudah adanya audit oleh akuntan publik yang ditemukan banyak kerugian nasabah serta jumlahnya bervariasi.

Terjadinya kasus tersebut diduga karena adanya penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan keuangan, dengan membuat laporan keuangan palsu. Hal inilah pentingnya laporan keuangan yang berkualitas sehingga nasabah maupun lembaga lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dapat mengetahui keadaan sesungguhnya pada LPD. Melihat dari kasus-kasus yang terjadi pada LPD, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan jawaban terhadap kualitas laporan keuangan LPD yang semakin rendah, yang



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2022) variabel independen yaitu “variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan berubahnya variabel dependen (variabel dependen). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Pemanfaatan teknologi informasi (X1) dan sistem pengendalian internal (X2), Kompetensi SDM (M), serta kualitas laporan keuangan (Y) merupakan variabel dependen”. Seluruh karyawan pada 23 unit LPD di Kecamatan Kuta yang masih aktif sampai saat ini yang terdaftar di BKS LPD Kabupaten Badung sebanyak 289 orang, Metode penentuan sampel menggunakan sampel jenuh, dengan pengambilan responden memakai metode *purposive sampling*.

Pengumpulan data dengan berbagai metode diantaranya wawancara, dan kuesioner dengan skor diukur menggunakan skala linkert 5 point jawaban skor paling rendah 1 dan paling tinggi 5 (Sugiyono, 2022). Data dianggap lolos uji instrument penelitian sesuai dengan (Ghozali, 2018) person correlation > 0,05 dan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Pengujian selanjutnya menggunakan uji asumsi klasik dengan asumsi normalitas > 0,05, multikolinearitas dengan kriteria nilai *tolerance* ≥ 0,10 atau *VIF* ≤ 10, dan heteroskedastisitas dengan kriteria signifikansi > 0,05. Jika seluruh pengujian sudah memenuhi kriteria uji asumsi klasik maka pengujian dapat dilanjutkan menuju uji hipotesis.

Pengujian regresi moderasi digunakan untuk menguji hipotesis, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 M + \beta_4 X1 * M + \beta_5 X2 * M + e$$

Dimana:

- Y = Kualitas laporan keuangan
- α = Konstanta
- X1 = Pemanfaatan sistem informasi
- X2 = Sistem pengendalian internal
- M = Kompetensi SDM
- X1*M = Interaksi antara pemanfaatan sistem informasi dan kompetensi SDM

Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Budaya *Tri Hita Karana* dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial

Putu Diah Eka Juniari⁽¹⁾

I Putu Deddy Samtika Putra⁽²⁾

^{(1),(2)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar
email: putudiah418@gmail.com

ABSTRACT

This study intends to ascertain the impact of implementing tri hita karana culture, accounting information systems, and effective corporate governance on the performance of management in village credit institutions (LPD) throughout Blahbatuh District. The population for this study consisted of all 171 LPD personnel in the Blahbatuh District who were registered at LPLPD Gianyar. Samples were taken using the purposive sampling technique, and 124 respondents were gathered. Multiple linear regression analysis, a t test, and a F test were used to analyze the data. The investigation' findings revealed that Tri Hita Karana culture, effective company governance, and accounting information systems all had an important and beneficial effect on managerial performance.

Keywords: *GCG, THK, Information Systems, Managerial*

PENDAHULUAN

Menurut (Tresna dan Jati, 2015), keberadaan LPD disetiap daerah dapat menjadikan peluang kemajuan daerah tersebut semakin besar dengan tersedianya lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat adat dalam mengelola keuangan yang langsung dikelola dan diawasi masyarakat daerah tersebut. LPD sama seperti lembaga keuangan lain yang bersifat formal maupun non formal, dengan kegiatan operasional yang membutuhkan manajerial yang baik serta sumber daya manusianya mampu menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja manajerial ialah sekelompok orang dalam manajerial yang mampu menunjukkan hasil kerja yang memuaskan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka terutama dalam mengoperasikan perusahaan (Yandani, 2019).

Dalam perkembangan yang sangat pesat tidak semua LPD mampu menunjukkan dan mengalami perkembangan yang baik khususnya di Kabupaten Gianyar. Seperti yang terjadi di Blahbatuh sebagai salah satu kecamatan, terdapat LPD yang sangat pesat kemajuannya adapula yang tidak. Berdasarkan Lembaga Pemerdayaan Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar tercatat tahun 2021 ada beberapa LPD di Gianyar yang masih beroperasi namun tidak melaporkan laporan keuangan yaitu LPD Madangan Kelod, LPD Griya Sakti, ada 2 (dua) LPD yang tidak beroperasi LPD Pasdalem dan LPD Pinda Saba, dan ada 1 (satu) LPD yang dalam kondisi kurang baik yaitu LPD Bedulu. Permasalahan yang dialami LPD tersebut terjadi akibat adanya permasalahan internal dan eksternal pada LPD itu sendiri. Dimana akibat adanya pengelolaan

individu dalam mengelola perusahaan di bidang kegiatan manajerial yang sudah ditetapkan seperti penyusunan rencana, melaksanakan rencana yang dibuat, pengorganisasian, pelaporan hasil kegiatan, pembinaan kekurangan yang ditemukan, dan mengawasi kegiatan berikutnya (Paramitha dan Mulyadi, 2017).

Good Corporate Governance

Menurut (Dewi, 2021), *Good corporate governance* (GCG) merupakan sebuah sistem yang mengatur sebuah perusahaan dengan seperangkat aturan yang mengikat bagi seluruh individu yang berkaitan dengan perusahaan. Menurut (Indriyani dan Putra, 2020), GCG merupakan upaya-upaya yang dilakukan seperangkat organisasi perusahaan dalam mengelola perusahaan dengan memperjelas wewenang, fungsi dan standar pekerjaan yang harus dilakukan setiap individu tersebut. penerapan sistem yang baik akan membawa dampak bagi manajerial dimana kinerjanya akan semakin meningkat (Yandani, 2019) dalam penelitiannya menemukan hasil *Good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian (Suparbawa dan Kusnita, 2018) dalam penelitiannya menemukan hasil *good corporate governance* memberikan pengaruh signifikan ke arah positif terhadap kinerja manajerial. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

H₁ : *Good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Budaya Tri Hita Karana

Tri Hita Karana sebagai landasan kehidupan masyarakat di Bali yang termasuk salah satu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bali, dan diterapkan dalam aktivitas sehari-hari demi menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, di bidang ekonomi, lingkungan, budaya, dan spiritual (Sumadi, Srikasih dan Putri, 2022). Menurut (Yandani, 2019) hasil budaya Tri Hita Karana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian (Suparbawa dan Kusnita, 2018) dalam penelitiannya menemukan hasil dan budaya Tri Hita Karana memberikan pengaruh signifikan ke arah positif terhadap kinerja Manajerial. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

H₂ : Budaya Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Sistem Informasi Akuntansi

SIA adalah sistem yang digunakan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan mengolah hasil data akuntansi dengan output informasi yang penting dan digunakan sebagai dasar kebijakan suatu perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengendalian bisnis (Nengsy et al., 2018). Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi dapat membantu pengguna dalam melakukan fungsi agregasi informasi keuangan sehingga perusahaan atau LPD dapat menyediakan informasi keuangan, menyusun laporan keuangan sesuai permintaan dengan

tepat waktu dan juga membuat keputusan yang terencana. Hasil penelitian (Nengsy, 2018) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi manajemen. Penelitian (Paramitha dan Mulyadi, 2017) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajemen. Untuk hipotesis yang dibentuk:

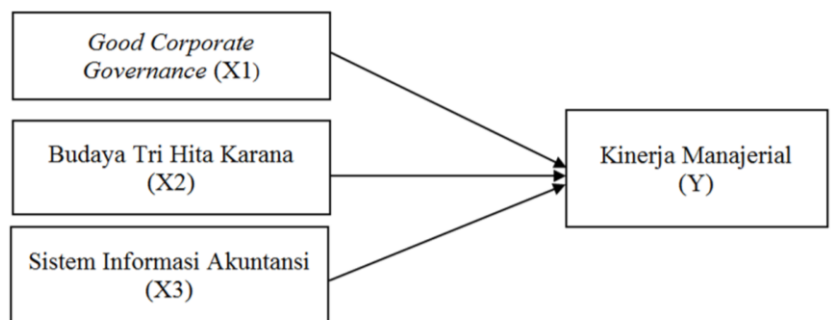
H₃: Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya oleh (Paramitha dan Mulyadi, 2017) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja manajemen. Penelitian (Yandani, 2019) menunjukkan tata kelola manajemen yang baik dan adanya budaya lokal masyarakat seperti Tri Hita Karana mampu meningkatkan efektivitas manajemen. Penelitian (Suparbawa dan Kusnita, 2018) menyatakan pengelolaan perusahaan dan budaya THK mampu memberikan sumbangsih pengaruh positif terciptanya efektivitas manajemen. Penelitian (Utama, 2022) dengan hasil menunjukkan sistem dalam akuntansi yang diterapkan dengan baik memengaruhi secara positif kinerja manajemen perusahaan. Penelitian (Nengsy, 2018) memberikan bukti empiris bahwa sistem informasi mampu memberikan dampak positif terhadap terciptanya efisiensi manajemen.

METODE PENELITIAN

Peneliti membuat kerangka berfikir dengan melihat kajian penelitian terdahulu dan teori-teori yang ada yang digunakan pada penelitian ini, dengan kerangka konsep tersebut dituangkan seperti berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Pendapat (Sugiyono, 2020) variabel independen ialah “variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan berubahnya variabel dependen (variabel dependen). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah tata kelola perusahaan yang baik (X1), sistem budaya Tri Hita Karana (X2) dan sistem informasi akuntansi (X3) dan kinerja manajemen (Y) merupakan variabel

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Item Pernyataan	Validitas		Reliabilitas	
			Koefisien Korelasi	Ket.	Alpha Cronbach	Ket.
1	Kinerja manajerial (Y)	Y.1	0,777	Valid	0,865	Reliabel
		Y.2	0,789	Valid		
		Y.3	0,690	Valid		
		Y.4	0,875	Valid		
		Y.5	0,841	Valid		
		Y.6	0,695	Valid		
2	<i>Good corporate governance</i> (X ₁)	X1.1	0,877	Valid	0,899	Reliabel
		X1.2	0,789	Valid		
		X1.3	0,842	Valid		
		X1.4	0,862	Valid		
		X1.5	0,848	Valid		
3	Budaya Tri Hita Karana (X ₂)	X2.1	0,833	Valid	0,836	Reliabel
		X2.2	0,808	Valid		
		X2.3	0,653	Valid		
		X2.4	0,841	Valid		
		X2.5	0,806	Valid		
4	Sistem informasi akuntansi (X ₃)	X3.1	0,664	Valid	0,787	Reliabel
		X3.2	0,723	Valid		
		X3.3	0,583	Valid		
		X3.4	0,735	Valid		
		X3.5	0,734	Valid		
		X3.6	0,740	Valid		

Sumber: Data diolah, 2023

Menurut (Sugiyono, 2020) pengujian pertama-tama dilakukan dengan uji instrumen yang secara keseluruhan sudah memenuhi kriteria yang dapat dinyatakan valid dan reliabel yang sudah memenuhi ketentuan menurut (Ghozali, 2018) yaitu $r > 0,30$ dan $\alpha > 0,6$ yang dinyatakan valid dan reliabel. Pengujian asumsi klasik penelitian ini juga dinyatakan lolos dengan 0,105 signifikan pada normalitas $> 0,05$, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang sudah memenuhi kriteria sehingga dinyatakan data penelitian lolos pada uji asumsi klasik.

Selanjutnya pada pengujian linier berganda dapat dilihat hasil berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.859	1.052		3.669	.000
	X1	.461	.110	.445	4.197	.000
	X2	.325	.129	.298	2.520	.013
	X3	.176	.074	.180	2.388	.019

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dibuat persamaan berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 3,859 + 0,461X_1 + 0,325X_2 + 0,176X_3$$

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

Ni Luh Made Wisna Yani ⁽¹⁾

Ni Putu Ayu Kusumawati⁽²⁾

Putu Nuniek Hutnaleontina⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jl. Sangalangit , Tembau , Penatih, Denpasar, Bali 80238
e-mail: madewisnayani01@gmail.com

ABSTRACT

This research looks at how the responsibility of managing village funds with the competency of village fund management officials is affected by the specificity of budget aims and the structure of the village financial system. Thirteen village administration centres in Banjarangkan Klungkung were visited for this study. There were a total of 39 participants. Using the Smart PLS programme, we do a structural equation modelling PLS analysis of the data. The findings demonstrated that the responsibility of village fund administrators was positively and significantly impacted by the clarity of budget proposals. Accountability in the handling of village funds was improved somewhat by the use of the village financial system (siskeudes). The responsibility of village fund managers is not enhanced by the competency of village fund management officials due to the clarity of budget aims and the local financial system.

Keywords: *budget targets, financial system, management officials, accountability*

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Peningkatan Daerah Tertinggal Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 merinci proses penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 oleh Kementerian. “Dana Desa” (disebut juga dana APBN yang dikirim ke pedesaan dan diteruskan melalui sistem APBD perkotaan) diimplementasikan untuk mendorong pertumbuhan dan kemandirian masyarakat lokal sangatlah penting. Salah satu tujuan bantuan adalah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan sebagai subyek pembangunan dengan kekuatan untuk memilih nasib ekonomi mereka sendiri dan mengentaskan kemiskinan dengan memperkuat pelayanan publik dan ekonomi lokal. Tingkat keadilan ekonomi dan tingkat pertumbuhan dapat dimaksimalkan dengan pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat.

Subsidi desa diberikan di provinsi tertentu, termasuk Provinsi Bali. Ada beberapa desa di Bali, mungkin sebanyak 636. Pembiayaan desa naik dari Rp 185 miliar pada 2015 menjadi Rp 416 miliar pada 2016, Rp 573 miliar pada 2017, dan Rp 530 miliar pada 2018, sedikit menurun

Sasaran Anggaran, Sistem Keuangan Desa dengan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa sebagai Variabel Moderasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa”.

KAJIAN PUSTAKA

The Stewardship Theory digunakan dalam investigasi ini; itu menggambarkan manajemen yang menempatkan kebutuhan organisasi di atas kebutuhan mereka sendiri. Pemerintah adalah penjaga sumber daya, bertindak atas nama rakyat seolah-olah mereka adalah pemilik sumber daya (prinsip). Pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan oleh Anggreni (2021) akan dipermudah dengan adanya target keuangan yang ditetapkan, karena hal ini akan memudahkan pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan organisasi. Catatan keuangan akan memfasilitasi perencanaan strategis dan dapat dilaksanakan secara efisien. Tujuan akhir dari sistem akuntansi kelompok atau organisasi mana pun adalah untuk menyediakan sarana yang jauh lebih efisien untuk menemukan data yang relevan. Mengutip Indralaksana dan Suaryana (2014). Menurut Mada (2017), kompetensi adalah apa yang diketahui, dapat dilakukan, dan telah dipraktikkan seseorang untuk berhasil dalam suatu kegiatan tertentu. Sepanjang penerima fidusia (principal) berhak untuk itu, mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Anda merupakan tugas fidusia (agen), sebagaimana dikemukakan oleh Mardiosmo (2018:27).

Temuan dari studi yang dilakukan oleh Anggraeni (2021) menunjukkan bahwa ketika kepala desa terlibat, anggaran lebih transparan dan tujuan lebih mudah dipahami. Penelitian Supriyanto (2021) ini menyimpulkan Kewajiban pengelola dana desa tetap tidak berubah terlepas dari transparansi tujuan anggaran. Menurut Ningsih, sistem keuangan desa tidak terlalu berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Kajian Sutrepti dari tahun 2022 menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan uang desa tidak dipengaruhi oleh kualitas peralatan yang digunakan untuk mengelola dana tersebut maupun kualitas sistem keuangan desa. Menurut temuan penelitian Monika (2022) ini, kualitas peralatan berpengaruh besar terhadap transparansi kantor desa di Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian ini menguatkan pendapat Arfiansyah (2020) yang menemukan bahwa siapa yang bertanggung jawab mengelola keuangan daerah tergantung pada sistem keuangan desa dan mekanisme pengendalian intern pemerintah.

Ketika kita berbicara tentang kejelasan tujuan anggaran, kita merujuk pada betapa lugas dan mudahnya bagi orang yang ditugaskan untuk mencapai tujuan tersebut untuk memahaminya. Sebuah studi tahun 2006 oleh Suharono dan Solichini. Untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat dan untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, anggaran sangat penting untuk administrasi keuangan desa yang baik. Dwipayani (2022) dan Pratiwi (2022)

mengutip penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelolaan uang desa dipengaruhi oleh kejelasan tujuan anggaran. Hipotesis kerja adalah sebagai berikut, berdasarkan uraian yang diberikan:

H1 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kekhususan anggaran.

Mengevaluasi kinerja pemerintah desa memerlukan sistem keuangan yang handal. Memiliki kerangka kerja ini membuat administrasi lebih mudah dan tidak rentan terhadap kesalahan. Menurut penelitian Arfiansyah (2020), sistem keuangan desa terkait dengan akuntabilitas pengelolaan uang masyarakat. Sistem Keuangan Desa berperan dalam penatausahaan keuangan desa, menurut penelitian sebelumnya oleh Sutrepti (2021). Berdasarkan informasi yang diberikan, hipotesis berikut dapat dibuat:

H2: Pertanggungjawaban dana desa dipengaruhi oleh struktur moneter masyarakat.

Dengan tujuan keuangan yang terdefinisi dengan baik, akan lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban karyawan atas apakah mereka membantu organisasi mencapai tujuan Devi (2021) atau tidak. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan anggaran sebagai "pedoman tindakan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah" rencana komprehensif untuk jangka waktu tertentu yang merinci berapa banyak uang yang akan dibuat, dibelanjakan, ditransfer, dan dibiayai menggunakan mata uang Indonesia, rupiah, dan bagaimana semuanya akan dibayar. Hipotesis berikut digunakan berdasarkan deskripsi sebelumnya:

H3: Sasaran anggaran untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan berkat keahlian otoritas pengelola dana desa.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk meningkatkan pengelolaan fiskal di masyarakat pedesaan. Pemerintah desa tidak dapat berfungsi tanpa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Semua fase pengembangan—mulai dari konseptualisasi hingga pelaksanaan hingga penilaian—memanfaatkan keberadaannya, sebagaimana dicatat oleh Julianto (2019). Siskeudes ini akan memudahkan pengalokasian dana desa periode berikutnya secara lebih efisien dan tepat waktu dengan melaporkan realisasi periode sebelumnya secara transparan dan bertanggung jawab. Hipotesis berikut digunakan berdasarkan deskripsi sebelumnya:

H4 : Akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan desa didukung oleh keahlian dari yang disertai pengawasannya.

METODE PENELITIAN

Seluruh 185 perangkat desa di Kecamatan Banjarangkan, 13 desa di Kabupaten Klungkung menjadi populasi penelitian. Dalam analisis ini, sampel dipilih berdasarkan kriteria

tujuan anggaran, sistem keuangan desa, dan kompetensi otoritas pengelola dana desa semuanya menjadi contoh. interaksi antara sistem keuangan desa dengan aparatur pengelola uangnya, serta antara kejelasan tujuan anggaran dan kompetensi aparaturnya.

b. Analisis F-Square untuk Mengevaluasi Model Struktural

Tabel tersebut meringkas temuan pengujian, yang mengungkapkan bahwa hanya satu variabel yang memiliki pengaruh sedang: transparansi tujuan keuangan. Koefisien 0,033, 0,034, 0,038, dan 0,007 menunjukkan pengaruh sedang dari faktor-faktor yang meliputi variabel sistem keuangan desa, karakteristik sistem keuangan desa, kejelasan hasil anggaran yang dimaksudkan, dan kemampuan aparatur yang digunakan untuk mengawasi hasil tersebut. faktor penting.

a. Path Analisis dan Pengujian Hipotesis

Tabel 4.8
 Path Analisis dan Pengujian Statistik

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran -> Akuntabilitas Dana Desa	0,447	2,216	0,027	Signifikan
Sistem Keuangan Desa -> Akuntabilitas Dana Desa	0,193	1,264	0,207	Tidak Signifikan
Kompetensi Aparat -> Akuntabilitas Dana Desa	0,241	1,142	0,254	Tidak Signifikan
KomAP<>KSA Akuntabilitas Dana Desa ->	-0,211	1,147	0,252	Tidak Signifikan
KomAP<>SKD Akuntabilitas Dana Desa ->	-0,095	0,630	0,529	Tidak Signifikan

Sumber : Lampiran 5

Semakin bertanggung jawab pengelolaan uang desa, semakin baik dan pentingnya dampak transparansi terhadap tujuan anggaran. Proyeksi awal organisasi dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan dengan penggunaan desain sasaran alokasi yang tepat sejalan dengan tujuannya. Akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan memasukkan secara spesifik dalam anggaran untuk mengelola uang lokal. Kemajuan organisasi menuju tujuan dan sasarannya akan lebih mudah diukur dengan adanya tolok ukur keuangan yang jelas. Temuan penelitian ini menguatkan kesimpulan penelitian Krisnawati, dkk (2020) dan Anggraeni (2021) bukti yang menunjukkan bahwa tujuan anggaran yang jelas memiliki efek positif dan besar pada siapa yang bertanggung jawab untuk membelanjakan uang di daerah pedesaan.

memperluas tingkat kekuatan atau kemampuan kerja. Diketahui bahwa pada saat semakin seringnya seseorang melakukan tugas-tugas atau pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang sama, maka secara otomatis akan semakin mampu terjadinya peningkatan keterampilan dan juga akan mampu semakin cepat pula melakukan penyesuaian tugas-tugas atau pekerjaan tersebut. Pada saat semakin banyak jenis macam tugas-tugas atau pekerjaan yang mampu dilakukan atau diselesaikan oleh seseorang, maka secara otomatis pengalaman kerjanya akan mampu semakin kaya dan juga semakin luas dan dalam hal ini akan adanya kemungkinan yang besar terjadinya peningkatan kinerja keuangan (Simanjuntak, 2005 : 113).

Kondisi ini telah berhasil selaras dengan yang namanya Teori Keagenan yang mampu dipakai dalam memberikan penjelasan terkait mengenai jalinan hubungan, dimana pihak principal dalam hal ini dinilai sebagai pihak yang telah berhak mempunyai wewenang untuk mempekerjakan pihak agent agar melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas guna mewujudkan kepentingan dari pihak principal sedangkan pihak agent dalam hal ini dinilai sebagai pihak yang telah bertugas untuk menjalankan kepentingan dari pihak principal (Scot 2015). Kondisi ini memunculkan arti bahwa pada saat seorang pihak agent telah berhasil dalam hal ini memberikan bentuk kewenangan pada seseorang, maka dalam hal ini pihak agent sudah mampu memberikan rasa percaya atau yakin pada seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas dan juga tanggung jawab yang diberikannya.

H2 : Kompetensi Memunculkan Pengaruh Pada Kinerja Keuangan

Dengan mampu adanya motivasi yang dimana dalam hal ini dinilai sebagai sebuah kondisi atau keadaan yang ada dalam pribadi seseorang yang mampu memberikan dorongan atau dukungan pada keinginan individu guna dipakai dalam melakukan kegiatan tertentu guna mewujudkan suatu tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan (Sari, 2021). Dengan tampak adanya motivasi kerja, maka hal ini mampu dipakai sebagai alat yang dapat menjadikan seseorang memiliki semangat ingin manju melangkah ke depan dengan secara yakin guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dan juga dipakai dalam memenuhi standar yang dalam hal ini ada.

Hal ini sejalan dengan Teori Maslow yang dimana dalam hal memberikan ungkapan bahwa segala keperluan atau kebutuhan atau juga keinginan yang telah berhasil diwujudkan atau dipenuhi akan secara otomatis mampu dalam hal ini memberi motivasi. Pada saat seseorang mendapatkan keputusan untuk mendapatkan uang yang nilai nominalnya cukup dalam suatu

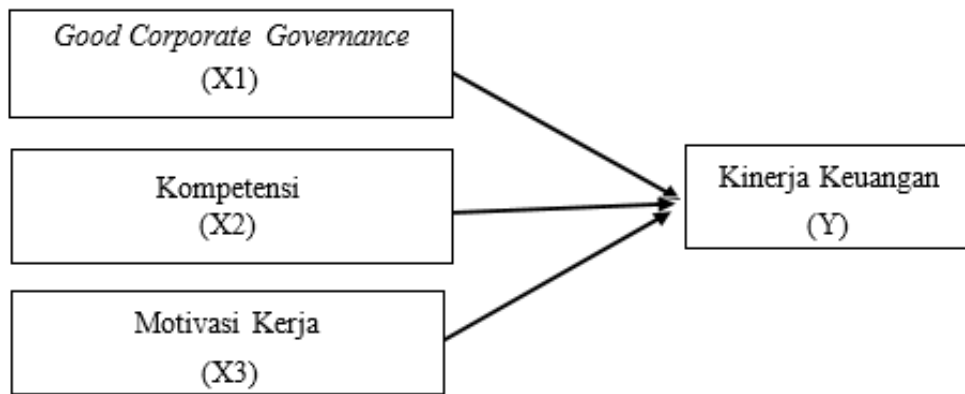
pekerjaan yang ada dalam sebuah organisasi yang menjadi tempatnya bekerja, maka dalam hal ini uang dinilai tanpa memiliki daya intensitasnya secara kembali. Suatu keperluan atau kebutuhan guna mewujudkan puncaknya, maka apa yang mendi keperluan atau kebutuhan itu secara otomatis akan berhenti untuk berubah menjadi motivasi secara utama dari sikap atau perilaku.

H3 : Motivasi Kerja Memunculkan Pengaruh Pada Kinerja Keuangan

METODE PENELITIAN

Kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak peneliti dalam kesempatan ini memakai pendekatan kuantitatif. Penggunaan populasi dalam penelitian ini ialah 186 orang karyawan dengan sampel ialah seluruh karyawan LPD sebanyak 186 orang karyawan. Teknik sampel jenuh digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka berpikir dalam kegiatan ini telah ditampilkan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Kompetensi, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Blahbatuh



Sumber : Peneliti (2023)

Semua data yang telah berhasil dilakukan pemeriksaan, maka proses selanjutnya yang wajib untuk dilakukan ialah melakukan proses analisis data dengan adanya tampak beberapa tahapan.

1. Melakukan proses analisis statistik deskriptif, dimana uji ini dilakukan oleh pihak peneliti guna menghasilkan ringkasan atau memberikan deskripsi apapun dengan berladaskan pada nilai yang memperlihatkan angka rata-rata (*mean*), nilai yang memperlihatkan angka minimum, nilai yang memperlihatkan angka maksimum, dan nilai yang memperlihatkan

angka standar deviasi dari data kegiatan riset (Ghozali, 2016). Selain itu proses analisis ini dipakai guna melakukan kegiatan evaluasi kualitas data dan guna melakukan proses pengujian hipotesis.

2. *Validity test*, dipakai guna melakukan perhitungan pada korelasi yang dalam hal ini terjadi antara tiap-tiap soal guna dipakai dalam mengetahui tingkat validitas angket yang dinilai sebagai alat yang dipakai dalam melakukan kegiatan riset ini. Diketahui bahwa pada tahap uji ini dipakai pedoman ialah tiap-tiap variabel akan dilakukan proses penentuan oleh nilai Korelasi Pearson yang nilainya telah berada di atas angka 0,30.
3. Kuesioner yang dalam hal ini mampu untuk diberikan kepercayaan ialah pada saat jawaban atas pertanyaan mampu secara konsisten atau juga mampu secara konstan. Pada saat perolehan nilai koefisien *Cronbach Alpha* tampak hasilnya lebih dari angka 0,60, maka secara otomatis keandalan instrumen dalam hal ini diberikan kategori sangat baik.
4. Kegiatan ini telah memakai uji normalitas guna mendapatkan hasil yang dalam hal ini secara benar. Uji statistik yang mampu dipakai guna melakukan proses pengujian ialah berupa normalitas residual dengan memperhatikan hasil uji statistik *Non-parametrik Kolmogrov Smirnov Test (K-S)*. Pada saat adanya hasil yang memperlihatkan nilai sig yang tampak kurang dari angka 0,05, maka artinya data tanpa mampu memberikan hasil dalam kondisi yang berdistribusi normal, namun pada saat sig yang tampak lebih dari angka 0,05 maka artinya data mampu memberikan hasil dalam kondisi yang berdistribusi normal (Ghozali, 2016).
5. Uji heteroskedastisitas dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa uji yang satu ini mempunyai maksud untuk melakukan tahapan atau proses pengujian terkait apakah model regresi berhasil ditemukan kesamaan pada varian yang tampak dari residual yang mengamati mengarah ke pihak yang mengamati lainnya. Dalam melakukan proses pendeteksian ada tidaknya masalah gejala heteroskedastisitas, maka dalam penelitian ini telah memakai *uji glejser*. Pada saat adanya perolehan nilai probabilitas signifikansi yang berhasil mencapai angka $> 0,05$, maka dalam kondisi ini tanpa terjadi masalah gejala heteroskedastisitas, namun pada saat adanya perolehan nilai probabilitas signifikansi yang berhasil mencapai angka $< 0,05$ maka dalam kondisi ini terjadi masalah gejala heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016).

6. Uji multikolinieritas memiliki maksud guna melakukan proses pengujian terkait apakah model regresi yang berhasil ditemukan tampak korelasi yang terjadi antar variabel bernilai bebas (*independen*). Model regresi yang dalam hal ini dinilai baik, maka sewajarnya atau seharusnya tanpa munculnya korelasi yang terjadi di antara variabel bernilai independen. Pada proses atau tahapan pengujian ini akan memandang dari (1) nilai yang dihasilkan oleh *tolerance* (2) nilai yang dihasilkan oleh *variance inflation factor* (VIF). Diketahui bahwa dalam hal ini nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk memperlihatkan muncul atau adanya multikolinieritas ialah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 . (Ghozali, 2016).
7. Dalam kegiatan ini, maka teknik analisis data yang dipakai pihak peneliti ialah berupa analisis regresi linier berganda. Jenis model regresi berganda ini memberikan asumsi bahwa dalam hal ini telah mampu adanya dampak atau pengaruh satu garis lurus atau dengan secara linier yang terjadi antara variabel bernilai dependen dengan tiap-tiap prediktornya. Dalam hal ini, maka jenis model regresi linier berganda yang dipakai dalam kegiatan ini dengan memberikan persamaan, yaitu: $Y = + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$.
8. Koefisien determinasi (R²) dinilai sebagai alat yang dipakai pihak peneliti guna untuk mencari tahu seberapa besar tingkat efek pengaruh yang diberikan oleh variabel bernilai bebas pada variabel bernilai bebas terikat. Perolehan nilai koefisien determinasi dalam hal ini ada antara nilai nol dan nilai satu. Pada saat adanya perolehan nilai R² yang nampak kecil, maka secara otomatis memberikan makna adanya tingkat kemampuan yang dihasilkan oleh variabel-variabel bernilai bebas independen dalam memberikan keterangan variabel bernilai bebas dependen yang dinilai begitu terbatas.
9. Uji F atau lebih dikenal dengan uji pengaruh dengan arah simultan dapat dinilai sebagai sebuah uji yang dilakukan pada jenis kegiatan penelitian kuantitatif guna mencari tahu bagaimana hasil dari pengaruh secara dengan arah simultan atau secara individu dari variabel tergolong independen terhadap variabel tergolong dependen. Dengan begitu, maka dalam uji ini dipakai mencari hasil pengujian secara signifikan dari variasi jalinan hubungan yang terjadi diantara variabel X dan Y secara bersamaan. Ambang signifikansi $F = \alpha = 0,05$, maka adanya hasil yang tampak bahwa tanpa muncul pengaruh signifikan yang terjadi antara variabel X pada variabel Y secara simultan. (Ghozali, 2016).

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

Keterangan	Klasifikasi	Jumlah	Persentase (%)
Usia	20-35	52	30,23%
	36-50	71	41,28%
	>50	49	28,49%
	Total	172	100%
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	94	54,65%
	LAKI-LAKI	78	45,35%
	Total	172	100%
Pendidikan Terakhir	SMA/SEDERAJAT	126	73,26%
	S1	37	21,51%
	D1	4	2,33%
	D2	2	1,16%
	D3	2	1,16%
	SMP	1	0,58%
	JUMLAH	172	100%

Sumber : Data diolah 2023

Mengacu data Tabel 4.2, maka mampu diketahui bahwa banyaknya jumlah responden dengan berada di usia 20-35 tahun mencapai hasil 52 orang (30,23, usia 36-50 tahun mencapai hasil 71 orang (41,28% dan usia >50 tahun mencapai hasil 49 orang (28,49%). Jumlah responden yang terdata sebagai perempuan mencapai hasil 94 orang (54,65%) dan terdata sebagai laki-laki mencapai hasil 78 orang (45,35 %). Jumlah responden yang terdata memiliki tingkat Pendidikan terakhir SMA/Sederajat mencapai hasil 126 orang (73,26%), S1 mencapai hasil 37 orang (21,51%), D1 mencapai hasil 4 orang (2,33%), D2 mencapai hasil 2 orang (1,16%), D3 mencapai hasil 2 orang (1,16%) dan SMP mencapai hasil 1 orang (0,58%).

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GCG	172	3,30	5,00	4,2035	,39823
Kompetensi	172	3,00	5,00	4,2081	,44609
Motivasi	172	2,71	5,00	4,1071	,48215
Kinerja keuangan	172	2,57	5,00	4,1901	,44105
Valid (listwise)	N 172				

Sumber : Lampiran 6 (Data diolah 2023)

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui informasi dari hasil analisis deskriptif dengan 172 data dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. GCG (X1) maka tampak menghasilkan nilai minimum dengan angka yang mencapai 3,30, menghasilkan nilai maksimum dengan angka yang mencapai 5,00 dan tampak nilai *mean* dengan angka 4,2035 serta nilai standar deviasi sebesar 0,39823.
2. Kompetensi (X2) maka tampak menghasilkan nilai minimum dengan angka yang mencapai 3,00, menghasilkan nilai maksimum dengan angka yang mencapai 5,00 dan tampak nilai *mean* dengan angka 4,2081 serta nilai standar deviasi sebesar 0,44609.
3. Motivasi (X3) maka tampak menghasilkan nilai minimum dengan angka yang mencapai 2,71, menghasilkan nilai maksimum dengan angka yang mencapai 5,00 dan tampak nilai *mean* dengan angka 4,1071 serta nilai standar deviasi sebesar 0,48215 .
4. Kinerja Keuangan (Y) maka tampak menghasilkan nilai minimum dengan angka yang mencapai 2,57, menghasilkan nilai maksimum dengan angka yang mencapai 5,00 dan tampak nilai *mean* dengan angka 4,1901 serta nilai standar deviasi sebesar 0,44105.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Nilai r Minimal	Keterangan	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
X1	0,382	Valid	0,751	Reliabel
X2	0,687	Valid	0,794	Reliabel
X3	0,564	Valid	0,765	Reliabel
Y	0,614	Valid	0,761	Reliabel

Sumber : Lampiran 7 (Data diolah 2023)

Berlandaskan pada data yang dihasilkan dalam Tabel 4.4, maka berhasil memperlihatkan bahwa semua variabel yang dalam hal ini dipakai berhasil memberikan perolehan hasil yang nilai signifikansi berada diatas angka 0,3 dan nilai *Cronbach's Alpha* telah tampak > 0,60, sehingga mampu diberikan kesimpulan secara akhir bahwa semua butiran pertanyaan yang dipakai oleh pihak peneliti pada kuesioner memunculkan sifat yang secara reliabel.

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		172
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,22427971
Most Extreme Differences	Absolute	,122
	Positive	,055
	Negative	-,122
Test Statistic		,122
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Lampiran 8 (Data diolah 2023)

Berlandaskan pada data yang dihasilkan dalam Tabel 4.5, maka berhasil memperlihatkan bahwa besar nilai signifikansi mencapai angka 0,200, dimana angka signifikansi ini telah berhasil > 0,05, maka artinya data mampu memberikan hasil dalam kondisi yang berdistribusi normal.

Tabel 4.6
Hasil Uji Mutikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5,740	1,900		3,021	,003		
X1	,344	,068	,444	5,030	,000	,396	2,525
X2	,264	,118	,191	2,242	,026	,425	2,350
X3	,124	,066	,135	1,872	,063	,595	1,682

Sumber : Lampiran 8 (Data diolah 2023)

Berlandaskan pada data yang dihasilkan dalam Tabel 4.6, maka berhasil memperlihatkan bahwa hasil melakukan proses perhitungan *tolerance* memberikan hasil yang dimana semua variabel berhasil memiliki nilai *tolerance* yang angkanya menunjukkan nilai yang sudah sangat jelas lebih dari angka 0,1. Merujuk pada perolehan hasil perhitungan nilai VIF juga memberikan hasil yang dimana semua variabel berhasil memiliki nilai VIF yang angkanya tampak kurang dari 10. Dengan demikian, maka mampu diberikan kesimpulan akhir bahwa tanpa muncul kondisi yang memberikan hasil gejala multikolinieritas.

- variabel GCG, Kompetensi, dan Motivasi Kerja ialah konstan.
2. Nilai koefisien regresi variabel GCG memunculkan nilai yang bermakna positif dengan memperlihatkan hasil dengan angka yang tampak 0,344. Hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap kenaikan variabel GCG dengan angka 1 satuan, maka secara otomatis kinerja keuangan akan mengalami peningkatan dengan angka yang mencapai 0,344 dengan diberikannya asumsi bahwa variabel lain dinilai konstan.
 3. Nilai koefisien regresi variabel Kompetensi memunculkan nilai yang bermakna positif dengan memperlihatkan hasil dengan angka yang tampak 0,264. Hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap kenaikan variabel Kompetensi dengan angka 1 satuan, maka secara otomatis kinerja keuangan akan mengalami peningkatan dengan angka yang mencapai 0,264 dengan diberikannya asumsi bahwa variabel lain dinilai konstan.
 4. Nilai koefisien regresi variabel Motivasi Kerja memunculkan nilai yang bermakna positif dengan memperlihatkan hasil dengan angka yang tampak 0,124. Hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap kenaikan variabel Motivasi Kerja dengan angka 1 satuan, maka secara otomatis kinerja keuangan akan mengalami peningkatan dengan angka yang mencapai 0,124 dengan diberikannya asumsi bahwa variabel lain dinilai konstan.

Tabel 4.9
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,694 ^a	,481	,472	2,24405
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : Lampiran 10 (Data diolah 2023)

Mengacu pada data yang ada dalam Tabel 4.9, maka secara otomatis tampak *adjusted R square* memberikan nilai dengan angka yang tampak 0,472, maka dalam hasil ini memberikan makna bahwa variasi variabel GCG, Kompetensi dan Motivasi Kerja hanya mampu memiliki kemampuan dengan angka yang mencapai 47,2% variasi variabel Kinerja Keuangan. Sisanya dengan angka yang mencapai 52,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain di luar ini.

Tabel 4.10
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	784,102	3	261,367	51,902	,000 ^b
	Residual	846,009	168	5,036		
	Total	1630,110	171			

a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
 Sumber : Lampiran 10 (Data diolah 2023)

Berladaskan pada Tabel 4.10, maka tampak perolehan melakukan hasil pengujian F-hitung dengan angka yang mencapai 51,902 adanya perolehan tingkat signifikansi dengan angka yang tampak 0,000. Nilai signifikan yang dihasilkan telah secara jelas lebih kecil dari angka 0,05, sehingga GCG, Kompetensi dan Motivasi Kerja memunculkan pengaruh yang simultan terhadap Kinerja Keuangan.

Tabel 4.11
Hasil Uji t

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,740	1,900		3,021	,003
	GCG	,344	,068	,444	5,030	,000
	Kompetensi	,264	,118	,191	2,242	,026
	Motivasi	,124	,066	,135	1,872	,063

Sumber : Lampiran 10 (Data diolah 2023)

Mengacu pada data 4.11, maka dijelaskan hasilnya, ialah:

1. GCG berhasil memberikan hasil dengan memunculkan arahnya tampak positif dengan angka 0,344 pada kinerja keuangan dengan perolehan nilai sig. yang angkanya tampak mencapai 0,000<0,05. Kondisi ini secara otomatis memperlihatkan GCG memunculkan pengaruh yang arahnya tampak positif signifikan pada Kinerja Keuangan.
2. Kompetensi berhasil memberikan hasil dengan memunculkan arahnya tampak positif dengan angka 0,264 pada kinerja keuangan dengan perolehan nilai sig. yang angkanya tampak mencapai 0,026<0,05. Kondisi ini secara otomatis memperlihatkan Kompetensi memunculkan pengaruh yang arahnya tampak positif signifikan pada Kinerja Keuangan.

3. Motivasi kerja berhasil memberikan hasil dengan memunculkan arahnya tampak positif dengan angka 0,124 pada kinerja keuangan dengan perolehan nilai sig. yang angkanya tampak mencapai $0,063 > 0,05$. Kondisi ini secara otomatis memperlihatkan Motivasi kerja tanpa memunculkan pengaruh pada Kinerja Keuangan

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan

Mengacu pada perolehan hasil pengujian memperlihatkan GCG memunculkan pengaruh yang arahnya tampak positif signifikan pada Kinerja Keuangan LPD, sehingga secara otomatis memberikan keputusan H1 berhasil di terima. Semakin baik penerapan GCG yang dilakukan pada LPD Se-Kecamatan Blahbatuh , maka akan meningkatkan Kinerja Keuangan. Hal ini mampu memberikan gambaran bahwa LPD Se-Kecamatan Blahbatuh telah menerapkan tata kelola yang baik, secara keseluruhan LPD Se-Kecamatan Blahbatuh telah memiliki struktur organisasi dimana tanggung jawab, wewenang sudah tergambar dengan jelas. Dengan mampu adanya GCG yang dilakukan atau implementasikan dengan baik, maka secara otomatis mampu memberikan dorongan pada pengelolaan organisasi yang mampu secara lebih demokratis, mampu dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan mampu tampak transparan, sehingga hal ini mampu membantu terjadinya peningkatan kinerja keuangan.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan

Mengacu pada perolehan hasil pengujian memperlihatkan Kompetensi memunculkan pengaruh yang arahnya tampak positif signifikan pada Kinerja Keuangan LPD, sehingga secara otomatis memberikan keputusan H2 berhasil di terima. Pada saat mampu semakin baiknya kompetensi yang dipunyai oleh seorang karyawan, maka secara otomatis akan memberikan efek implikasi pada semakin baik pula tingkat kinerja keuangan yang akan dihasilkan oleh LPD.

Kompetensi mampu dipakai dalam memperdalam dan juga mampu dipakai untuk memperluas tingkat kekuatan atau kemampuan kerja. Diketahui bahwa pada saat semakin seringnya seseorang melakukan tugas-tugas atau pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang sama, maka secara otomatis akan semakin mampu terjadinya peningkatan keterampilan dan juga akan mampu semakin cepat pula melakukan penyesuaian tugas-tugas atau pekerjaan tersebut. Pengurus dan karyawan bagian keuangan LPD Se-Kecamatan LPD sudah memiliki kompetensi yang baik terutama dalam memahami kondisi keuangan LPD, dengan adanya kompetensi yang

dimiliki oleh pengurus dan karyawan bagian keuangan LPD secara tidak langsung akan berdampak terhadap kinerja keuangan.

Motivasi Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Mengacu pada perolehan hasil pengujian memperlihatkan Motivasi kerja tanpa memunculkan pengaruh pada Kinerja Keuangan LPD, sehingga secara otomatis memberikan keputusan H3 berhasil di tolak. Dimana dalam hal ini Motivasi kerja yang mampu dilakukan atau diberikna baik dari pihak pimpinan, maka hal ini yang akan mampu menimbulkan bawahan mampu memaksimalkan keinginan atau minat terbesar yang dimilikinya guna mewujudkan sasaran yang ingin diraihnya.

Akan tetapi situasi berbeda di miliki oleh LPD Se-Kecamatan Blahbatuh Gianyar dimana para pegawainya belum memiliki motivasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang dijalannya, terutama dalam hal yang terkait dengan peraturan keuangan diduga pengurus dan pegawai bagian keuangan LPD kurang mendapatkan stimulus atau rangsangan dalam bekerja seperti misalnya kurang pelatihan, kurang memahami aturan-aturan keuangan sehingga mereka kurang memiliki semangat dalam bekerja dan hal ini akan berdampak terhadap kinerja keuangan LPD.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada perolehan hasil analisis data dan juga merujuk pada pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, maka mampu dalam hal ini disimpulkan secara akhir sebagai berikut:

1. GCG memunculkan pengaruh yang arahnya tampak positif serta berhasil tampak signifikan pada Kinerja Keuangan LPD. Hal ini menunjukkan bahwa LPD telah menerapkan tata kelola yang baik, secara keseluruhan dan LPD telah memiliki struktur organisasi dimana tanggung jawab, wewenang sudah tergambar dengan jelas.
2. Kompetensi memunculkan pengaruh yang arahnya tampak positif serta berhasil tampak signifikan pada Kinerja Keuangan LPD . Kondisi ini berhasil memberikan makna bahwa pada kondisi yang semakin baiknya kompetensi yang mampu dipunyai seorang karyawan, maka dengan secara otomatis akan semakin baik pula tingkat kinerja keuangan yang mampu dihasilkan oleh LPD tersebut.
3. Motivasi kerja tanpa memunculkan pengaruh pada Kinerja Keuangan LPD. Hal ini menunjukkan bahwa para pegawainya belum memiliki motivasi yang tinggi terhadap

pekerjaan yang dijalannya, terutama dalam hal yang terkait dengan peraturan keuangan diduga pengurus dan pegawai LPD kurang mendapatkan stimulus atau rangsangan dalam bekerja seperti misalnya kurang pelatihan, kurang memahami aturan-aturan keuangan sehingga mereka kurang memiliki semangat dalam bekerja dan hal ini akan berdampak terhadap kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pada hasil dari penelitian ini, maka saran yang muncul, ialah:

1. Bagi seluruh LPD Se- Kecamatan yang ada di daerah Blahbatuh, maka perolehan hasil kegiatan riset ini mampu dipakai sebagai bahan-bahan guna melakukan peningkatan terkait atau mengenai Kinerja Keuangan yang akan dihasilkan oleh LPD.
2. Bagi para penelitian selanjutnya, maka perolehan hasil kegiatan riset ini mampu dipakai sebagai materi serta dapat dijadikan sebagai salah satu contoh dalam menelaah studi kasus, sehingga hendaknya pada melakukan kegiatan riset selanjutnya mampu melakukan penambahan jumlah variabel-variabel lain yang mampu dinilai memberikan efek pengaruh serta mampu dipakai dalam meningkatkan tingkat Kinerja Keuangan yang dihasilkan oleh LPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, I. K. J., & Widanaputra, A. A. G. P. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Pada Kinerja Organisasi Dengan Motivasi Kerja Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1575-1603.
- Astini, N. K. A. T., & Yadnyana, I. K. (2019). Pengaruh Penerapan GCG dan Budaya Tri Hita Karana pada Kinerja Keuangan LPD Di Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 91-118.
- Enceng, Liestyodono, dan Purwaningdyah. 2008. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen*. Vol.2: 12-15
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jayantari. P.R. Gorda. A.A.N.ES. 2020. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Keberadaan Awig-Awig Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa dengan

Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Kuta Utara Dan Kuta Selatan

Ida Ayu Made Ariesta Dewi⁽¹⁾

Cok Gde Bayu Putra⁽²⁾

Ni Wayan Alit Erlina Wati⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238
e-mail: ariestadewi06@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to ascertain whether or not North Kuta and South Kuta Districts have a sufficiently accountable, competent, and appropriately compensated village apparatus to prevent fraud in the management of village funds. Six Village Offices in the North Kuta and South Kuta districts, with a combined population of 197, served as the sample population for this analysis. This study used a purposive sampling method to select 48 participants to test with multiple linear regression analysis. Based on the findings of this research, it can be concluded that Accountability significantly contributes to reducing instances of fraud. Knowledgeable village police forces can significantly reduce the incidence of fraud. The prevention of fraud benefits greatly from fair compensation. Based on the findings, all forms of accountability, including financial reporting for villages, must be met on time in the future, with reports being sent out to the entire community at predetermined intervals. This must be done to improve transparency and honesty in the village's finances and reduce the likelihood of fraud.

Keywords: *Accountability, Village Apparatus Competence, Appropriateness, Compensation, Fraud Prevention*

PENDAHULUAN

Dana anggaran desa paling rentan dikorupsi, menurut hasil pemantauan yang disusun Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menemukan 154 kasus korupsi yang melibatkan dana desa; Oleh karena itu, ICW merekomendasikan agar anggaran dana desa dipantau, dikendalikan, dan dievaluasi secara ketat oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena besarnya anggaran dana desa, sayangnya korupsi sering terjadi di industri ini. Menurut antaranews.com, negara akan mengalokasikan Rp. 68 triliun ke dana desa pada tahun 2022. Ketika anggaran besar dilaksanakan tanpa laporan pertanggungjawaban yang baik, perangkat desa yang kompeten, dan kompensasi yang layak untuk setiap perangkat desa, korupsi dana desa menjadi salah satu masalah mendasar yang ditimbulkan.

Anggaran, dan lebih khusus lagi kejelasan target anggaran, penting dalam mengelola anggaran tahunan desa yang terus meningkat. Seberapa jelas tujuan anggaran didefinisikan dan dikomunikasikan kepada manajemen merupakan indikasi seberapa baik anggaran dikelola.

dengan anggaran Rp. 1,5 miliar (balipuspanews.com dan jarrakpos.com) sebelum tiga sertifikat ditemukan

Karena tidak ada pola yang jelas, kasus ini masih diproses dan diselidiki pihak berwajib. Dengan menjadikan Kabupaten Badung sebagai pilot project program Desa Antikorupsi tahun 2022, Bupati Badung beserta jajarannya bekerja sama dengan KPK untuk memberantas kasus penyelewengan dana desa. Penekanan program ini adalah untuk memperkuat praktik tata kelola yang ramah antikorupsi seperti pengawasan yang kuat, layanan publik, keterlibatan warga negara, dan pengetahuan tradisional. Desa Dalung, Kutuh, dan Blahkiuh (balitribune) dipilih karena kasus penyelewengan dana desa yang terdokumentasi

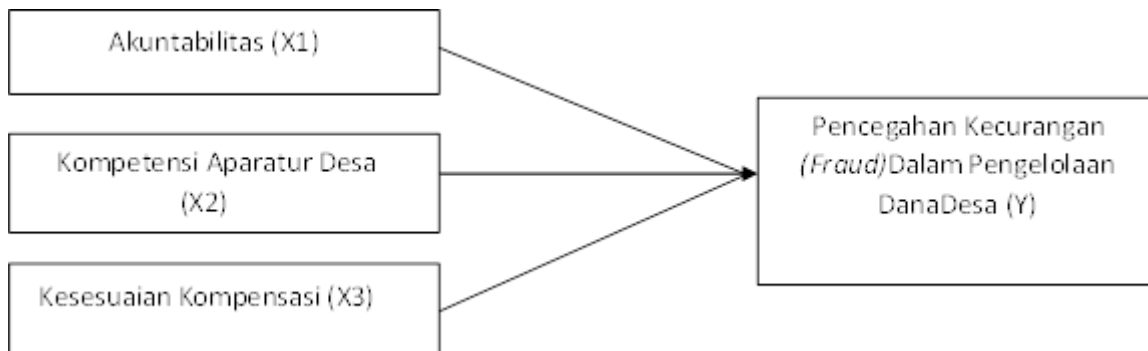
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa SeKecamatan Kuta Utara Dan Kuta Selatan”.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Fraud Triangel Theory yang melandasi penyelidikan ini, ketiga komponen fraud dirangkum oleh Cressey dalam Ratmono, et al. (2017) biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Tekanan atau motif untuk melakukan kecurangan direpresentasikan di bagian atas diagram, sedangkan peluang dan rasionalisasi ditampilkan di bagian bawah. Menurut Sriani (2021), akuntabilitas adalah aturan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dan memerlukan pemenuhan kriteria yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik pada setiap tahapan proses penganggaran, dimulai dengan perencanaan dan dilanjutkan melalui persiapan dan pelaksanaan. . Kompetensi, sebagaimana didefinisikan oleh Sariwati (2021), adalah kapasitas untuk menangani tantangan dalam kehidupan profesional seseorang. Keahlian seseorang dapat diukur dengan melihat kreativitas, inovasi, dan kemampuannya memecahkan masalah. Menurut Veithzal dalam Sari, dkk (2019), kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya kepada perusahaan dalam bentuk jasa, dan kompensasi yang diberikan kepada karyawan terdiri dari dua bentuk yaitu kompensasi finansial, yang meliputi membayar karyawan dalam berupa upah, gaji, bonus, atau komisi; dan kompensasi nonfinansial, yang mencakup bentuk pengakuan atau penghargaan lainnya. Mengutip Fitrawansyah dalam Arthana (2019), kecurangan terjadi ketika salah satu pihak salah merepresentasikan atau menghilangkan fakta material untuk mendapatkan kendali atas suatu aset.

1. Hasil penelitian "Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa" (Kuriawan Saputra et al., 2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia berdampak positif terhadap pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
2. Hasil penelitian berjudul "Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa" oleh Sariwati dan Sumadi. (2021) menunjukkan bahwa sementara kompetensi tidak mempengaruhi pencegahan penipuan, akuntabilitas mempengaruhi dan moralitas individu memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pencegahan penipuan juga.
3. Menurut penelitian Anwar dan Ati berjudul "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Intern, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak" (2020), adanya faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh positif secara parsial" terhadap pencegahan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa di Wajak.
4. Temuan "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa" oleh Aprilia dan Yuniasih (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, moral individu, dan budaya organisasi semuanya memiliki pengaruh positif berdampak pada pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Temuan studi Silitonga, et al. (2020) dengan judul "Pengaruh Peran Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Ketepatan Kompensasi Terhadap Pencegahan Fraud" menunjukkan bahwa masing-masing faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan dalam mengurangi terjadinya fraud apabila digunakan bersamaan dengan faktor lainnya. individu.
6. Hasil penelitian Prabawa and Son (2020) dengan judul "Pengaruh Peran Audit Internal, Moralitas, dan Ketepatan Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi" menunjukkan bahwa masing-masing faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan kejadian dari penipuan akuntansi.

Tanggung jawab badan pemerintahan desa untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan memastikan bahwa kebijakan dan programnya mengarah pada hasil yang diinginkan adalah pemahaman umum tentang apa yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban" dalam konteks pemerintahan desa. Sariwati dan Sumadi telah melakukan beberapa penelitian



Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

Perangkat desa dari kedua kecamatan Kuta Utara dan Selatan merupakan populasi sampel. Enam Kantor Desa di Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan, dengan total populasi 197 orang, menjadi populasi sampel untuk analisis ini. Penelitian ini menggunakan strategi nonprobabilistic sampling berdasarkan sampel purposive. Besar sampel sebanyak 48 responden dipilih karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Pendekatan analitik berikut digunakan untuk penyelidikan ini

1. Nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat diperiksa melalui uji statistik deskriptif untuk memberikan gambaran tentang distribusi dan perilaku data sampel penelitian.”
2. Jika Anda ingin mengetahui apakah kuesioner Anda dapat dipercaya, jalankan melalui uji validitas. Jika Anda ingin mengetahui apakah pernyataan-pernyataan dalam pertanyaan pada kuesioner benar-benar dapat mengukur apa yang ingin Anda ukur, Anda perlu mengetahui apakah kuesioner tersebut valid, artinya pertanyaan dan pernyataan pada kuesioner tersebut dapat mengungkapkan apa saja yang kuesioner akan mengukur.
3. Ketiga, kuesioner dapat berfungsi sebagai indikator suatu variabel atau konstruk, dan uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengevaluasi keakuratannya.
4. Untuk mengetahui apakah data mengikuti distribusi normal, maka dilakukan uji normalitas. Uji statistik satu sampel Kolmogorof-Smirnov (K-S) dapat digunakan untuk memeriksa normalitas.
5. Uji Heteroskedastisitas menguji apakah residual dari satu pengamatan memiliki varians yang berbeda dari yang lain dalam model regresi.
6. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) berkorelasi dalam model regresi.
7. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk analisis. Persamaan untuk regresi berganda terlihat seperti ini (Sugiono, 2011):

$$Y = a + \beta 1 X1 + \beta 2 X2 + \beta 3 X3 + e$$

- 8. Saat menguji pengaruh bersama atau simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5% (a 0,05) (Ghozali, 2016: 96), digunakan uji F.
- 9. Untuk mengevaluasi seberapa baik model memperhitungkan variasi yang diamati dalam variabel dependen, ahli statistik menghitung koefisien determinasi (R2).
- 10. Uji t digunakan untuk memverifikasi hipotesis (10). Uji-t juga merupakan uji signifikansi individual, sebagaimana dikemukakan oleh Ghozali (2016:97). Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi interaksi yang signifikan secara statistik antara variabel independen dan variabel dependen. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan call Bila H1 diterima dan sig t lebih kecil dari 0,05. Tolak H1 jika sig t > 0,05.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan menghitung rerata (mean) berdasarkan tanggapan responden pada masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimu	Maximu	Mean	Std.
Akuntabilitas	48	25.00	36.00	31.4167	2.43060
Kompetensi Aparatur	48	20.00	30.00	23.8958	2.37218
Kesesuaian	48	18.00	26.00	23.2083	1.87887
Pencegahan	48	20.00	35.00	26.7292	3.51132
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data diolah, 2023

Menurut Tabel 4.1, ada total 48 variabel yang valid. Informasi akuntabilitas (X1) berkisar antara 25.00 sampai dengan 36.00, dengan rata-rata 31.4167 dan standar deviasi 2.43060. Kisaran nilai X2 mengukur kemampuan perangkat desa meliputi 20.00, 30.00, 23.8958, dan 2.37218. Ada standar deviasi 18.00, 26.00, 23.2083, dan 1.87887 dalam kumpulan variabel Data

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan; nilai koefisien regresi sebesar 0,336, dan nilai t-hitung sebesar 2,132, keduanya pada taraf signifikansi 0,005. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam masyarakat yang akuntabilitasnya tinggi, upaya untuk mengurangi kecurangan lebih mungkin berhasil. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan hasil-hasilnya. Konsisten dengan temuan sebelumnya, penelitian ini mendukung temuan Sariwati dan Sumadi. Hal ini sejalan dengan temuan Kurniawan Saputra et al. (2019) bahwa akuntabilitas berdampak pada pengurangan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana pemkot, dan dengan (2021) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berdampak positif terhadap pengurangan penyelewengan (fraud) dalam pengelolaan dana pemkot

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan; nilai koefisien parameter sebesar 0,535, dan nilai t-hitung sebesar 2,462 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018. Jelas dari data bahwa desa akan lebih mudah mencegah penipuan di dalam institusi mereka jika peralatan mereka lebih kompeten. Kompetensi mengacu pada keterampilan dan pengetahuan seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dituntut darinya dalam pekerjaannya saat ini. Semakin banyak kekuasaan atau prestise yang dinikmati seseorang dalam suatu organisasi, semakin kecil kemungkinan mereka tidak akan melakukan praktik penipuan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Anwar & Ati (2020), yang menemukan bahwa penduduk desa yang kompeten lebih mampu mencegah (dan mendeteksi) kasus penipuan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Aprilia dan Yuniasih (2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa memberikan pengaruh yang menguntungkan dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien parameter adalah 0,407 dan menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,305 pada tingkat signifikansi 0,001; dengan demikian, dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Temuan mengungkapkan bahwa jika desa memperbaiki sistem kompensasinya, akan lebih mudah mencegah penipuan. Ketika seseorang mengalami kesulitan keuangan dan sosial, mereka mungkin melakukan perilaku tidak jujur. Ketika orang memiliki ketakutan yang sah akan kehilangan sumber pendapatan mereka, mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku curang.

Temuan dari penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Silitonga et al. Menurut penelitian Prabawa (2020) yang juga menunjukkan bahwa kompensasi yang sesuai berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, maka tahun 2020 akan dikenang sebagai tahun dimana kompensasi yang sesuai mulai berdampak pada pengurangan fraud.”

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Akuntabilitas, Kompetensi aparatur desa, dan Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud). Melihat hasil penelitian, sebaiknya seluruh bentuk pertanggung jawaban seperti pelaporan keuangan desa harus dilakukan tepat waktu, dimana pelaporannya terjadwal dan diarahkan kepada seluruh masyarakat. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sehingga ada transparansi keuangan di desa yang dapat mencegah adanya peluang tindak kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Kedepannya, agar pemerintah desa juga wajib diberikan pelatihan kerja yang maksimal dimana pelatihan kerja ini akan membantu meningkatkan kompetensi para pengelola dana desa. Dengan adanya pelatihan diharapkan terbentuk kemampuan kerja yang baik sehingga dihasilkan hasil kerja yang maksimal sehingga nanti peluang melakukan tindak kecurangan juga semakin menurun. Kedepannya, agar besaran kompensasi yang akan diberikan kepada aparatur desa juga harus disesuaikan dengan beban kerja, hal ini dilakukan untuk memotivasi pegawai dalam bekerja agar menghasilkan kinerja yang baik dan terhindar dari upaya melakukan tindak kecurangan.

Daftar Pustaka

- Anwar dan Ati, Sari 2020. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa, Etika, Sistem Pengendalian Intern dan Whistleblower Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. Jurnal Penelitian Mahasiswa Akuntansi (JRMA). Episode 8, nomor 1.
- Aprilia, Kadek dan Yuniasih, Wayan. 2021. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa, Etika Pribadi dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntansi dan Keuangan Hita. Universitas Hindu Indonesia.
- Arthur, Komang. 2019. Analisis Penyebab Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Amabi Oefeto Timur. Jurnal akuntansi:
- Transparansi dan akuntabilitas. Buku 7, nomor 1. Asmawati, Ika dan Basuki, Prayino. 2019. Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Desa. Jurnal penelitian akuntansi dan keuangan. Penerbangan. 2(1).

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Luh Komang Purnama Sari⁽¹⁾

Kadek Dewi Padnyawati⁽²⁾

Rai Dwi Andayani W⁽³⁾

¹²³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar
email: komangpurnamasari17@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the impact of budget target clarity, community participation, and control management on village fund accountability in villages in Manggis District, Karangasem District. . The population used in this study includes all the village apparatuses that are still actively working in the village offices of Manggis district, Karangasem district, i.e. up to 276 people, sampled using a sampling technique that can aim to get 120 people as respondents. The data were analyzed using multivariate linear regression analysis, t-test and F-test. The results of the analysis show that clarity of budget targets has a positive and significant impact on accountability. accountability in managing village funds in villages in Manggis district, Karangasem Regency, community participation has a positive and significant impact on accountability in managing village funds in villages in Manggis district, Karangasem Regency, and monitoring has had a positive and significant impact on accountability in the management of village funds in villages in Manggis District, Karangasem District.

Keywords: Budget Targets, Community Participation, Supervision, Accountability

PENDAHULUAN

Pengembangan desa mulai diprioritaskan pembangunannya oleh pemerintah sejak diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014, desa sebagai pendorong suksesnya pembangunan nasional membuat desa memiliki otonomi khusus dalam melakukan pengembangan dan pembangunannya sendiri dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Salah satu Peraturan Mendes PDTT No. 21 Tahun 2015 menyatakan bahwa dana desa bersumber dari APBN yang diberikan kepada masing-masing desa di Indonesia melalui ABPD Kabupaten/Kota yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan dan pembangunan di desa sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

pemberian dana kepada desa memiliki tujuan dalam meningkatkan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, meminimalkan pembangunan yang masih jauh berbeda antara desa dan kota, sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Dana desa yang cukup besar untuk dikelola, kejelasan anggaran menjadi aspek penting dalam penggunaannya. Biaya-biaya yang dikeluarkan harus secara spesifik tercatat dalam rencana biaya maupun realisasinya dari waktu ke waktu diukur dan diolah agar menjadi tepat sasaran dan efektif sesuai dengan manfaat yang diinginkan (Pebriyanto & Sumadi, 2021). Berdasarkan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) keuangan dari dana desa harus dikelola dengan transparan, akuntabel, dan tetap

mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengawasan agar tertib dan sesuai dengan anggaran. Penyajian laporan yang transparan dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat, mampu memberikan laporan akhir yang baik, maka perangkat desa sebagai pengguna anggaran sudah melakukan kewajibannya dengan baik.

Pengelolaan dana desa yang akuntabel menjadi tujuan yang penting untuk dicapai perangkat desa, untuk mewujudkan tanggung jawab dan memperlihatkan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan yang akuntabel menjadi penilaian yang penting dalam kinerja sebuah organisasi termasuk pemerintah desa. akuntabilitas menjadi salah satu prinsip penting dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menciptakan dan mewujudkan pembangunan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Di Provinsi Bali terdapat 636 desa yang tersebar dari ujung barat sampai timur provinsi Bali, dari 9 kabupaten yang ada di Bali. Pada tahun 2019 dana desa yang di berikan kepada Provinsi Bali mencapai 630 Milyar Rupiah kemudian pada tahun 2020 dana desa yang di terima meningkat menjadi 657 Milyar Rupiah dana desa pada tahun 2021 terus meningkat mencapai 678 Milyar Rupiah (djpk.kemenkeu.go.id/).

Dari tahun ke tahun alokasi penerimaan dana desa pada Provinsi Bali terus mengalami peningkatan yang berbanding terbalik dengan penyerapan yang tidak semua berjalan lancar. Seperti di Kabupaten Karangasem, dimana terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan evaluasi di Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 terhadap tingkat serapan dana desa. Hal itu di karenakan dari 75 desa di kabupaten karangasaem terdapat 28 desa dengan penyerapan dananya masih kurang dari 75%. Di Kecamatan Manggis terdapat 5 desa yang serapan dana desanya masih rendah. Serapan dana desa yang masih rendah dikarenakan perencanaan yang kurang cermat menurut Kepala Dinas PMD (balipost.com).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di lakukan pada kantor desa Se-Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 masih terjadi permasalahan dalam pengelolaan dana desanya dimana penyerapan atau realisasinya pada beberapa desa belum maksimal tidak bisa mencapai 100 persen dari dana yang di terima. Kemudian hingga Juni 2023 Ada dua desa yang serapan dana desa tahap I nya masih rendah yaitu kurang dari 60 persen hal ini mengakibatkan desa tersebut belum bisa mencairkan untuk dana desa tahap II nya. Rendahnya penyerapan dana desa di akibatkan kurang cermatnya dalam perencanaan anggaran serta ada kegiatan lain sehingga apa yang di anggarkan belum bisa terealisasikan atau di laksanakan.

Kecamatan Manggis memiliki 12 desa yang terbanyak kedua kategori kecamatan pada Kabupaten Karangasem, sehingga total dana desa yang diterima tergolong besar. Besarnya dana

desa yang diterima menjadikan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi suatu perhatian khusus., sebab akuntabilitas memperlihatkan keberhasilan terwujudnya visi dari Undang-Undang Desa untuk merealisasikan desa yang demokratis, berkeadilan, mandiri, kuat, dan maju.

Masalah yang ada dapat dirumuskan menjadi: Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KAJIAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Stewardship Theory menjelaskan situasi dimana para manajer memiliki tujuan utama untuk organisasi bukan termotivasi dengan tujuan pribadi masing-masing (Donaldson & Davis, 1991). *Stewardship teory* menggambarkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang menjalankan pelayanan publik, tertampungnya aspirasi masyarakat desa, pelayanan yang baik, serta mempertanggungjawabkan dana-dana yang didapatkan dari pemasukan desa. Perilaku *steward* dalam mewujudkan target organisasi akan dinilai oleh masyarakat desa, dimana organisasi dalam hal ini desa harus mendahulukan kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat desa, prinsip tersebut menjadi dasar utama bagi *stewardship theory* (Ajzen, 1991).

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran yang memiliki sasaran yang jelas dapat dilihat dari sejauh mana sebuah tujuan dari penggunaan dana tersebut dapat dicapai dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan memperlihatkan secara rinci penggunaannya (Anggreni et al., 2021). Sejalan dengan hal tersebut, teori *Stewardship* menjelaskan aparat desa atau pemerintah desa berperan sebagai pelayan berkewajiban menyajikan segala informasi pelaksanaan anggaran secara jelas dan terperinci guna tercapainya tujuan masyarakat. Pengelolaan dana desa memerlukan anggaran yang baik, dan perencanaan yang matang, serta realisasi yang sama dengan anggaran yang sudah disusun dan ditetapkan untuk mencapai hasil kerja yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penelitian yang di lakukan oleh (Anggreni et al., 2021) dan (Pratiwi et al., 2022) menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa mampu dipengaruhi kejelasan sasaran anggaran yang baik secara positif. Dengan demikian hipotesis yang dapat di ajukan adalah:

H₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sebagai salah satu komponen yang ada dalam sebuah desa harus ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan program, maupun ikut serta dalam penyusunannya, sehingga prinsip anggaran yang akuntabel dan transparan dapat dicapai. Salah satu prinsip penggunaan anggaran juga dilakukan secara parsipatif yang melibatkan masyarakat agar segala aspirasi yang dimiliki masyarakat dapat disalurkan dan pengelolaan dana desa tetap melibatkan masyarakat. Hal ini di perkuat oleh penelitian (Atiningsih & Cahya, 2019) yang menunjukkan partisipasi mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa kemudian (Umaira & Adnan, 2019) menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa mampu dipengaruhi oleh masyarakat dengan partisipasi yang tinggi. Dengan demikian hipotesis yang dapat di ajukan adalah :

H₂: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabiblitas pengelolaan Dana Desa

Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan aktivitas penggunaan dana desa agar sesuai dengan apa yang direncanakan (Umaira & Adnan, 2019). Pengawasan juga diperlukan untuk mengawasi agar prinsip akuntabilitas dapat tercapai, dari perencanaan sampai akhir pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. pengawasan dibutuhkan untuk meminimalkan kecurangan, penyimpangan, dan hal lainnya yang dapat merugikan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan hal tersebut (Umaira & Adnan, 2019) menyatakan pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh pengawasan yang baik. Penelitian (Ningsih, 2020) menyatakan pengawasan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis yang dapat di ajukan adalah :

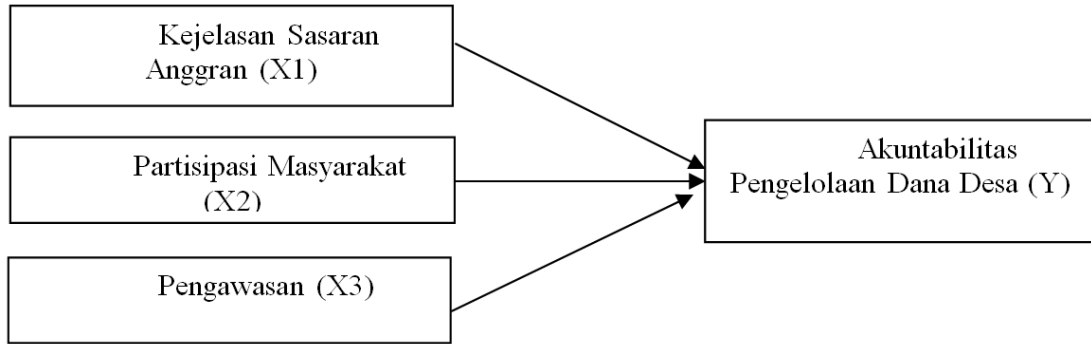
H₃ : Pengawasan berpengaruh terhadap Akuntabiblitas pengelolaan Dana Desa.

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian (Sujatnika & Sulindawati, 2022) menyatakan partisipasi masyarakat mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Anggreni et al., 2021) menyebutkan kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Atiningsih & Cahya, 2019) dengan hasil partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Pratiwi et al., 2022) menyebutkan kejelasan sasaran anggaran mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa ke arah yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penyusunan kerangka berpikir untuk memudahkan dalam pembahasan teori, hipotesis, dan penentuan arah pembahasan hasil penelitian agar tidak melebar jauh dari tujuan yang ingin dicapai (Sugiyono, 2020), kerangka pemikiran dilihat dari Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2020) penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kejelasan sasaran anggaran (X_1), partisipasi masyarakat (X_2) dan pengawasan (X_3) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebagai variabel terikat”. Populasi penelitian ini merupakan seluruh aparatur desa yang masih aktif bekerja di kantor desa Se-Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yaitu sebanyak 276 orang. Teknik penentuan sampel adalah *purposive sampling* jadi jumlah sampel 120 orang.

Tabel 1. Tahapan Seleksi Sampel dengan Kriteria

Kriteria sampel	Jumlah
Seluruh perangkat desa yang ada di kecamatan manggis	276
Aparatur desa yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa	-156
Total sampel	120

Tabel 2. Rincian Jumlah Sampel

No	Nama Desa	Populasi	Kepala desa	Sekretaris desa	Kaur keuangan	Kaur T.U & umum	Kaur perencanaan	Kasi pemerintahan	Kasi kesejahteraan	Kasi pelayanan	ketua BPD	ketua LPM	Jumlah sampel
1	Antiga	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2	Gegelang	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3	Padangbai	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
4	Ulakan	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5	Manggis	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6	Selumbang	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
7	Ngis	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	Nyuhtebel	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
9	Tenganan	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
10	Antiga kelod	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11	Sengkidu	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
12	Pesedahan	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Jumlah	276											120

Pengumpulan data yang paling utama menggunakan kuisisioner dengan skala linkert penentuan skor. Data dianalisis menggunakan pengujian sebagai berikut (Ghozali, 2018):

1. Pengujian uji validitas dengan kriteria *person correlation* > 0,05 dan reliabilitas dengan kriteria, *Cronbach Alpha* > 0,70.
2. Pengujian asumsi klasi terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas dengan kriteria $\text{sig} > 0,05$, uji multikolinieritas dengan kriteria $\text{tolerance} \geq 0,10$, $\text{VIF} \leq 10$.

3. Uji hipotesis dengan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

4. Uji t, sebagai uji parsial
5. Uji F, sebagai uji kelayakan model

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	120	24.00	40.00	33.5750	3.64303
X1	120	23.00	35.00	29.3917	2.99943
X2	120	12.00	20.00	16.4583	2.14944
X3	120	16.00	25.00	20.7167	2.02166
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil analisis statistik deskriptif memuat nilai tertinggi, terendah, rerata, dan std. deviasi dari masing-masing variabel.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Item Pernyataan	Validitas		Reliabilitas	
			Koefisien Korelasi	Ket.	Alpha Cronbach	Ket.
1	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	Y.1	0,666	Valid	0,879	Reliabel
		Y.2	0,735	Valid		
		Y.3	0,742	Valid		
		Y.4	0,607	Valid		
		Y.5	0,761	Valid		
		Y.6	0,750	Valid		
		Y.7	0,792	Valid		
		Y.8	0,858	Valid		
2	Kejelasan sasaran anggaran (X ₁)	X1.1	0,783	Valid	0,874	Reliabel
		X1.2	0,762	Valid		
		X1.3	0,672	Valid		
		X1.4	0,755	Valid		
		X1.5	0,781	Valid		
		X1.6	0,732	Valid		
		X1.7	0,803	Valid		
3	Partisipasi masyarakat (X ₂)	X2.1	0,885	Valid	0,877	Reliabel
		X2.2	0,810	Valid		
		X2.3	0,877	Valid		
		X2.4	0,851	Valid		
4	Pengawasan (X ₃)	X3.1	0,704	Valid	0,772	Reliabel
		X3.2	0,690	Valid		
		X3.3	0,657	Valid		
		X3.4	0,788	Valid		
		X3.5	0,774	Valid		

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian instrumen, seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel. Pada pengujian asumsi klasik seluruh variabel dinyatakan data berdistribusi normal, tidak terdapat gejala multikolinearitas dan gejala heteroskedastisitas.

Persamaan regresi diuji dengan regresi linier berganda berikut.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.003	1.977		1.013	.313
X1	.597	.110	.492	5.433	.000
X2	.227	.090	.157	2.519	.013
X3	.499	.160	.277	3.127	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil tersebut jika di buat dalam bentuk persamaan menjadi seperti berikut.

$$Y = 2,003 + 0,597X_1 + 0,227X_2 + 0,499X_3$$

Tabel 6. Hasil Analisis Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.835 ^a	.697	.689	2.03095

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil di atas, berarti informasi yang terkandung dalam persamaan sebesar 68,9% dan sisanya 31,1% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Pengujian kelayakan model dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 7. Uji Simultan (F-test)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1100.855	3	366.952	88.964	.000 ^a
	Residual	478.470	116	4.125		
	Total	1579.325	119			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan pengujian di atas, F hitung didapatkan 88,964 dan sig. 0,000 < 0,05, maka dinyatakan persamaan model yang digunakan layak untuk dilanjutkan, dimana setiap variabel memiliki pengaruh yang saling mempengaruhi.

Pembahasan

Hasil pengujian *t-test* menunjukkan kejelasan sasaran anggaran mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan arah positif. Artinya, semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan dana desa maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Anggaran yang memiliki sasaran yang jelas dapat dilihat dari sejauh mana sebuah tujuan dari penggunaan dana tersebut dapat dicapai dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan memperlihatkan secara rinci penggunaannya (Anggreni et al., 2021). Sejalan dengan hal tersebut, teori *Stewardship* menjelaskan aparat desa atau pemerintah desa berperan sebagai pelayan berkewajiban menyajikan segala informasi pelaksanaan anggaran secara jelas dan terperinci guna tercapainya tujuan masyarakat. Pengelolaan dana desa memerlukan anggaran yang baik, dan perencanaan yang matang, serta realisasi yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mencapai kinerja yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hasil penelitian yang serupa ditunjukkan oleh (Anggreni et al., 2021) dan (Pratiwi et al., 2022) menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan dengan peningkatan kejelasan sasaran anggaran.

Hasil pengujian *t-test* menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mampu meningkatkan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Artinya, semakin tinggi partisipasi masyarakat akuntabilitas juga akan tercapai dengan baik dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Masyarakat sebagai salah satu komponen yang ada dalam sebuah desa harus ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan program, maupun ikut serta dalam penyusunannya, sehingga prinsip anggaran yang akuntabel dan transparan dapat dicapai. Salah satu prinsip penggunaan anggaran juga dilakukan secara parsipatif yang melibatkan masyarakat agar segala aspirasi yang dimiliki masyarakat dapat disalurkan dan pengelolaan dana desa tetap melibatkan masyarakat. Penelitian serupa dilakukan (Atiningsih & Cahya, 2019) yang menyatakan partisipasi berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serupa dengan hal tersebut (Umaira & Adnan, 2019) menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan melalui partisipasi masyarakat.

Hasil pengujian *t-test* menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Artinya, semakin baik pengawasan dalam pengelolaan dana desa maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Pengawasan dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan aktivitas penggunaan dana desa agar sesuai dengan apa yang direncanakan (Umaira

& Adnan, 2019). Pengawasan juga diperlukan untuk mengawasi agar prinsip akuntabilitas dapat tercapai, dari perencanaan sampai akhir pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. pengawasan dibutuhkan untuk meminimalkan kecurangan, penyimpangan, dan hal lainnya yang dapat merugikan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Penelitian serupa didapatkan (Umaira & Adnan, 2019) menyatakan pengawasan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta diperkuat hasil penelitian penelitian dari (Sintia & Hutnaleontina, 2022) menyatakan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat, dan pengawasan sama-sama mampu memberikan pengaruh yang positif dan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan lebih baik serta dapat menunjukkan kinerja laporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.

Saran yang dapat diberikan yaitu: Pernyataan kejelasan sasaran anggaran terendah yaitu pada indikator tingkat kesulitan, maka disarankan agar aparat desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem agar lebih meningkatkan keterampilan dengan mengikuti seminar dan pelatihan sehingga memiliki keahlian yang lebih baik agar tingkat kesulitan dalam pengelolaan dana desa dapat lebih mudah dan menghasilkan akuntabilitas dana desa yang lebih baik. Pernyataan partisipasi masyarakat terendah yaitu pada indikator pengelolaan anggaran, maka disarankan agar aparat desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa seperti melakukan sosialisasi terhadap draf rencana anggaran sebelum disahkan, sehingga masyarakat dapat memberikan usulan dan saran yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan pengawasan terendah yaitu pada indikator pengawasan APBDDes, maka disarankan agar desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap penganggaran dan penggunaan APBDDes, agar dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Open University Press.
- Anggreni, N. L., Sumadi, N. K., & Andayani, W. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(1), 12.
- Atiningsih, & Cahya, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono

mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di bumi mulai dari aspek lingkungan, kesehatan, kehidupan sosial, bahkan perekonomian.

Berlandaskan pada kejadian tersebut, maka dalam hal ini telah menimbulkan adanya kekhawatiran akan keadaan atau kondisi yang ada di bumi ini untuk yang akan terjadi di waktu masa yang akan datang kemudian hari, sehingga dalam hal ini pihak pemerintah diwajibkan guna melakukan upaya atau usaha dalam melakukan proses penurunan emisi karbon ialah dengan mengambil langkah dengan melakukan proses penetapan pada beberapa kebijakan yang dalam hal ini berhasil mencakup UU. No. 6 Tahun 1994 atas UNFCCC yang selanjutnya melakukan proses adopsi Protokol Kyoto yang telah tampak di dalam UU No.17 Tahun 2004, Perpres No. 61 Tahun 2011 yang dalam hal ini isinya ialah melakukan proses perencanaan, melakukan proses implementasi, melakukan proses pengawasan dan juga melakukan proses evaluasi atas penurunan emisi GRK yang dijadikan sebagai pedoman untuk seluruh kalangan yang ada di daerah kawasan Indonesia seperti para pihak yang memiliki peran sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini ialah pihak perusahaan.

Diketahui bahwa Perpres No. 71 Tahun 2011 yang memberikan penjelasan di dalamnya terkait Inventarisasi GRK Nasional dan UU No. 16 tahun 2016 yang mengacu atas adanya persetujuan Paris tahun 2015 yang dimana dalam hal ini telah mempunyai target atas penurunan emisi karbon yang angkanya mencapai 29% hingga angkanya mencapai 41% pada tahun 2030 (Septriyawati & Anisah, 2019). Guna melakukan perhitungan nilai besarnya emisi karbon, maka dalam hal ini wajib untuk dilakukan proses pengukuran jejak karbon.

Pengungkapan yang dilakukan pada emisi karbon atau melakukan proses pengungkapan yang adanya kaitan dengan keadaan atau kondisi lingkungan, maka wajib dalam hal ini dilakukan guna memberikan informasi mengenai berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan lingkungan, apa saja dampak yang diterima lingkungan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, serta informasi lainnya terkait hubungan perusahaan dengan lingkungannya. Dari informasi yang dijabarkan tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis seberapa besar sumber daya yang diperlukan untuk menanggulangi akibat atau dampak yang telah dimunculkan oleh emisi karbon yang dalam hal ini sudah jelas disebabkan oleh pihak perusahaan itu sendiri.

Melalui adanya melakukan proses pengungkapan pada emisi karbon, maka dalam hal ini pihak stakeholder mampu melakukan proses penilaian perannya serta juga pihak perusahaan dalam kondisi ini melakukan pengurangan pada GRK, maka upaya atau usaha perusahaan guna melakukan proses pengurangan emisi karbon dengan cara melakukan *carbon accounting* telah

berhasil selaras dengan kebijakan yang ada pada Protokol Kyoto. *Green investmen* merupakan salah satu kebijakan investasi yang diperlukan dengan jelas membutuhkan biaya-biaya yang nominalnya tanpa sedikit guna melakukan peralihan dari pemakaian sumber daya fosil yang berubah ke sumber daya yang dinilai telah lebih ramah lingkungan.

Diketahui bahwa kinerja lingkungan dalam hal ini dinilai sebagai adanya jalinan atau hubungan pihak perusahaan dengan lingkungan yang ada disekitarnya yang adanya kaitan mengenai dampak atau akibat dari lingkungan dari sumber daya yang telah dipakai, dimana efek lingkungan dari melakukan kegiatan proses organisasi, maka implikasi yang mengarah pada lingkungan atas produk dan juga jasa, adanya pemulihan yang ada dalam melakukan pemrosesan produk serta dalam hal ini juga mematuhi peraturan yang dipakai acuan dalam lingkungan kerja. *Media Exposure* memiliki perannya yang begitu esensial dalam memberikan publik berbagai macam informasi yang adanya kaitan mengenai kontribusi yang diberikan oleh pihak perusahaan yang arahnya pada keberlangsungan lingkungan yang ada di sekitar. Melalui informasi lingkungan yang diterbitkan oleh media akan berpengaruh terhadap perhatian publik dan stakeholder, terlebih lagi bagi para pihak yang memiliki ketertarikan terhadap kondisi lingkungan.

Berlandaskan pada catatan *International Energy Agency* (IEA) yang ada tepatnya pada tahun 2020, maka emisi karbon dengan secara global telah diketahui mengalami kondisi yang tampak terjadinya penurunan yang dimana hal ini terjadi dari tahun 2019, sebab akibat adanya keterbatasan dari mobilitas kalangan masyarakat terkait adanya kondisi atas kasus pandemi Covid-19, namun tepatnya pada tahun 2021 telah diketahui bahwa emisi karbon global telah secara kembali mengalami kondisi yang naik hingga hasilnya tampak telah mencapai angka 36,3 gigaton CO2.

Emisi karbon yang ada pada 2021 diketahui mengalami peningkatan yang angkanya mencapai sekitar 6% dari tahun 2020, maka hal ini telah berbarengan dengan adanya pemulihan ekonomi global yang telah mengalami pertumbuhan dengan angka yang tampak mencapai 5,9% yang telah terjadi dalam periode sama. IEA dalam hal ini melakukan pencatatan bahwa emisi karbon global yang ada pada 2021 telah dinilai paling banyak asal sumbernya dari melakukan proses pembakaran batu bara dan juga gas alam (databoks.katadata.co.id, 2022). Mengacu pada data analisa *Carbon Brief*, maka diketahui dari rentang tahun 1850 hingga pada tahun 2021 dengan secara komulatif, maka diketahui posisi dari Indonesia telah berada pada urutan yang tampak berada di rangking ke-5 dari 10 negara sebagai pihak penyumbang emisi karbon yang dinilai paling terbesar dengan cakupannya secara global. Dengan terjadi selama 20 tahun, maka

diketahui bahwa sektor energi telah berhasil dianggap sebagai pihak yang menjadi penyumbang emisi karbon yang paling terbesar yang ada di daerah kawasan Indonesia ialah dengan angka mencapai 32%.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi dinilai sebagai salah satu teori yang mampu dipakai dalam memberikan penjelasan pada jalinan hubungan yang dalam hal ini tampak terjadi diantara pihak perusahaan dengan kalangan masyarakat. Legitimasi mampu diwujudkan oleh pihak perusahaan pada saat kegiatan perusahaan mampu selaras dengan batasan dan juga dengan kaidah atau norma yang telah dipakai acuan di dalam kalangan masyarakat.

2. Pengungkapan Emisi Karbon

Diketahui dalam hal ini, maka emisi karbon mampu dinilai sebagai suatu tahapan atau proses pelepasan gas-gas yang di dalamnya adanya kandungan berisikan karbon yang mengarah ke lapisan atsmosfer. Pengungkapan yang dilakukan pada emisi karbon yang ada di dalam Velte, Stawinoga & Lueg (2020), maka telah berhasil dijelaskan sebagai bagian dari informasi regular yang dalam hal ini diberikan pada para pihak pemangku kepentingan yang ada di internal dan juga yang ada di eksternal perusahaan yang tampak di dalamnya mencakup berisikan berbagai macam informasi kinerja karbon perusahaan.

3. Green Investment

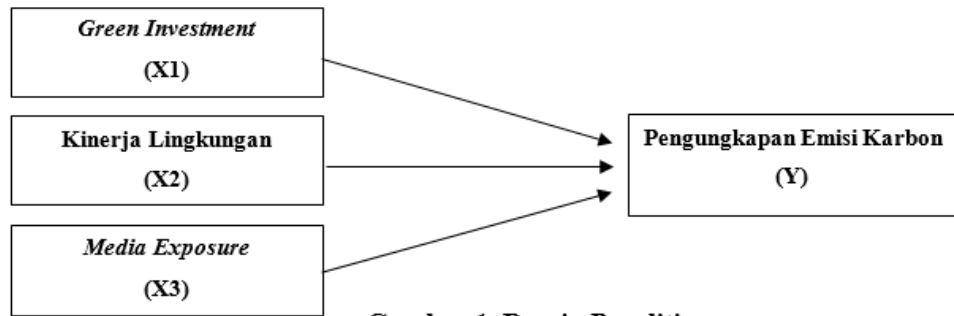
Green Investment telah dinilai sebagai suatu upaya atau upaya yang dalam hal ini telah dilakukan oleh pihak perusahaan guna dipakai dalam melakukan proses pengelolaan lingkungan (Chariri et al., 2018). Kegiatan investasi yang dalam hal ini dilakukan dengan maksud melakukan proses pengurangan emisi GRK dan juga polutan udara dengan tanpa secara signifikan yang dimana terjadinya penurunan pada perolehan hasil produksi dan juga konsumsi barang yang berkategori non-energi.

4. Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan dalam hal ini berhasil dinilai sebagai adanya tingkat kemampuan perusahaan mewujudkan lingkungan yang mampu tampak hijau dan juga tampak bersih. Entitas bisnis yang dalam hal ini mempunyai kinerja lingkungan relatif tinggi telah memiliki kaitan jalinan hubungan dengan terjadinya suatu kondisi perubahan pada iklim (Dawkins & Fraas, 2011). Perusahaan yang dalam hal ini mempunyai tingkat proaktif pada lingkungan, maka secara otomatis akan mendapatkan dorongan guna untuk melakukan suatu proses pengungkapan pada

METODE PENELITIAN

Kegiatan riset ini telah masuk dalam kategori penelitian kuantitatif dengan adanya melakukan pendekatan secara asosiatif, dimana kegiatan ini memiliki tujuan guna melakukan proses pengujian dan juga dipakai dalam mengetahui pengaruh yang dimunculkan oleh variabel X pada variabel Y. Adapun desain penelitian yang mampu dihasilkan tampak pada Gambar 1.



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber : Peneliti (2023)

Pihak peneliti dalam kegiatannya ini memakai data sekunder yang bentuknya berupa laporan yang secara keberlanjutan yang telah berhasil dihasilkan oleh pihak perusahaan. Kemudian kegiatan ini didukung oleh populasi yang berupa perusahaan yang melakukan kegiatan di dalam bidang sektor energi dan juga dalam bidang sektor bahan baku yang masuk daftar di BEI yang terjadi di periode 2019-2022, maka sampel yang ada dalam kegiatan ini dilakukan penentuan dengan cara memakai teknik *Purposive Sampling* dengan mengacu pada kriteria, ialah:

1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang sektor energi dan juga di bidang sektor bahan baku yang masuk daftar di BEI yang terjadi di periode 2019-2022.
2. Perusahaan yang berhasil melakukan proses penerbitan Laporan Keberlanjutan yang terjadi selama periode 2019-2022.
3. Perusahaan yang berhasil mengikuti pemeringkatan PROPER yang terjadi selama periode 2019-2022.

Setelah berhasil dilakukan penyesuaian, maka berhasil ditemukan 13 perusahaan yang berhasil memenuhi kriteria, dengan unit analisis yang terjadi selama periode 2019-2022 (4 tahun) maka, diperoleh 52 sampel yang dipakai dalam kegiatan ini.

Variabel *Green Investmen* yang dipakai dalam kegiatan ini dilakukan proses pengukuran dengan memakai peringkat PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Variabel kinerja lingkungan ang dipakai dalam kegiatan ini dilakukan proses pengukuran dengan memakai variabel dummy, ialah nilai 1 perusahaan berhasil memiliki sertifikasi ISO 14001, dan

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	,249	,066		3,779	,000
GI	-,028	,016	-,235	-1,806	,077
KL	-,042	,022	-,268	-1,904	,063
MX	-,031	,024	-,187	-1,326	,191

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 24

Berdasarkan data Tabel 4, maka semua variabel bernilai independen mampu dalam hal ini memiliki probabilitas signifikansi mencapai angka 5% (probabilitas signifikansi > 0,05). Dengan demikian, maka mampu diberikan kesimpulan akhir bahwa tanpa muncul kondisi yang menunjukkan gejala heteroskedastisita.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,663 ^a	,439	,404	,12236	1,848

a. Predictors: (Constant), MX, GI, KL

b. Dependent Variable: CED

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 24

Berdasarkan data Tabel 5, maka hasil uji *Durbin-Watson* berhasil memperlihatkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) dengan angka yang tampak mencapai 1,848. Perolehan nilai DW yang tampak dengan angka yang mencapai 1,848 pada saat dilakukan proses perbandingan dengan cara memakai *significance level* dengan angka yang tampak 5%, maka banyaknya jumlah sampel (T) = 52 dan juga banyaknya jumlah variabel independen yang dipakai dalam kegiatan ini ialah 3 variabel. Dengan memperhatikan nilai yang tampak pada DW, maka berhasil dalam hal ini ditemukan bahwa nilai du dengan angka yang tampak mencapai 1,6333. Kriteria data yang dipakai acuan untuk berhasil dinilai lolos uji DW ialah pada saat nilai yang tampak pada $du < dw < 4 - du$. Dengan begitu, maka hasil yang diperoleh secara akhir ialah du dengan angka 1,6333, nilai dw dengan angka 1,848 dan nilai $4 - du$ ialah tampak 2,3667 yang dimana kemudian berhasil diperoleh hasil $1,6333 < 1,848 < 2,3667$, sehingga hasil dari melakukan kegiatan ini ialah tanpa terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	,297	,111		2,671	,010
	GI	,068	,026	,282	2,596	,012
	KL	,087	,038	,272	2,313	,025
	MX	,150	,040	,441	3,756	,000

a. Dependent Variable: CED

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 24

Uji Kelayakan Model

Tabel 7. Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,563	3	,188	12,540	,000 ^b
	Residual	,719	48	,015		
	Total	1,282	51			

a. Dependent Variable: CED

b. Predictors: (Constant), MX, GI, KL

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 24

Hasil melakukan uji F tampak pada Tabel 7, maka telah berhasil memperlihatkan bahwa nilai F hitung dengan angka yang mencapai 12,540 dengan perolehan hasil *Sig* yang tampak angkanya mencapai 0.000 yang sudah sangat jelas angkanya lebih kecil dari hasil ialah $\alpha = 0,05$, hasil ini berhasil memberikan makna bahwa model yang dipakai dalam kegiatan ini sudah dinyatakan layak untuk dipakai. Dengan begitu, maka disimpulkan bahwa dengan secara simultan atau dengan bersama-sama variabel yang berupa *green investment* (X1), kinerja lingkungan (X2) dan *media exposure* (X3) mampu menghasilkan pengaruh tampak signifikan pada pengungkapan emisi karbon (Y).

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,663 ^a	,439	,404	,12236

a. Predictors: (Constant), MX, GI, KL

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 24

Berlandaskan pada data yang nampak pada Tabel 8, maka hasil yang diperoleh memperlihatkan besarnya *adjusted R²* ialah mencapai angka 0,404. Dengan begitu, maka hal ini memberikan makna bahwa pengungkapan emisi karbon (CED) mampu dipengaruhi dengan

Pengungkapan Emisi Karbon (Y). Hasil melakukan perhitungan uji t memperlihatkan nilai *t-statistic* dengan angka yang tampak 0,150 dengan tingkat *sig.* yang angkanya mencapai 0,000 yang dimana sudah sangat jelas lebih kecil dari tingkat *sig* $\alpha=0,05$. Dengan begitu, maka mampu diambil kesimpulan akhir bahwa variabel *Media Exposure* (X3) menghasilkan pengaruh yang arahnya tampak positif pada Pengungkapan Emisi Karbon (Y), dimana H_3 menerima keputusan diterima dan H_0 menerima keputusan ditolak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu pada hasil dari kegiatan riset ini, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) *Green Investment* menghasilkan pengaruh yang tampak arahnya positif dan juga arahnya signifikan pada Pengungkapan Emisi Karbon, (2) Kinerja Lingkungan menghasilkan pengaruh yang tampak arahnya positif dan juga arahnya signifikan pada Pengungkapan Emisi Karbon dan (3) *Media Exposure* menghasilkan pengaruh yang tampak arahnya positif dan juga arahnya signifikan pada Pengungkapan Emisi Karbon.

Saran

Adapun saran yang berhasil diberikan dari kegiatan riset ini, ialah:

1. Bagi perusahaan, maka dalam hal ini begitu sangat diharapkan guna mampu melakukan peningkatan pada komitmen tanggungjawab terhadap lingkungan terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor energi dan sektor bahan baku sebagai penyumbang emisi terbesar dengan melakukan proses kegiatan pengungkapan emisi karbon. Selain mengungkapkan emisi karbon dalam laporan keberlanjutan perusahaan secara berkala, perusahaan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk stakeholder terutamanya masyarakat sekitar dengan melakukan kegiatan-kegiatan CSR yang dapat menunjukkan komitmen atau kepedulian perusahaan terhadap lingkungan serta memberikan dampak yang positif.
2. Bagi pihak peneliti yang ada pada selanjutnya, maka begitu sangat diharapkan agar mampu melakukan perluasan cakupan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal, serta menggunakan sampel yang lebih luas dengan meneliti perusahaan sektor lainnya agar tingkat generalisasinya lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Adelia Tanasya, S. H. (2020). Green Investment Dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan: Profitabilitas Sebagai Pemediasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 225–238. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.727>
- Afni, Z., Gani, L., Djakman, C. D., & Sauki, E. (2018). the Effect of Green Strategy and Green Investment Toward Carbon Emission Disclosure. *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, 1(2), 97–112. <https://doi.org/10.17509/tjr.v1i2.13879>
- Amaliyah, I., & Solikhah, B. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 2(2), 129–141. <https://doi.org/10.32500/jematech.v2i2.720>
- Anggraeni, D. Y. (2015). Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca, Kinerja Lingkungan, Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 12(2), 188–209. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.11>
- Ayu Laksani, S., Andesto, R., & Kirana, D. J. (2021). Carbon Emission Disclosure Ditinjau dari Nilai Perusahaan, Leverage dan Media Exposure. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 145–164. <https://doi.org/10.21632/saki.3.2.145-164>
- Ayu, P. S. W. (2022). Pengaruh Economic Pressure, Peringkat PROPER, Tipe Industri, dan Media Exposure Terhadap Carbon Emission Disclosure. 13, 525–535.
- Bae Choi, B., Lee, D., & Psaros, J. (2013). An analysis of Australian company carbon emission disclosures. *Pacific Accounting Review*, 25(1), 58–79. <https://doi.org/10.1108/01140581311318968>
- Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id
- Chariri, A., Bukit, G. R. S. B., Eklesia, O. B., Christi, B. U., & Tarigan, D. M. (2018). Does Green Investment Increase Financial Performance? Empirical Evidence from Indonesian Companies. *E3S Web of Conferences*, 31, 1–7. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183109001>
- Dani, I. M., Harto, P., Akuntansi, D., Ekonomika, F., & Diponegoro, U. (2022). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Green Investment Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. 11, 1–10.
- databoks.katadata.co.id. (2022). *Emisi Karbon Global Meningkat Pada 2021, Tertinggi Sepanjang SEjarah*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/21/ini-negara-penyumbang-emisi-karbon-terbesar-pada-2021>
- Dawkins, C., & Fraas, J. W. (2011). Coming Clean: The Impact of Environmental Performance

- and Visibility on Corporate Climate Change Disclosure. *Journal of Business Ethics*, 100(2), 303–322. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0681-0>
- Eyraud, L., Clements, B., & Wane, A. (2013). Green investment: Trends and determinants. *Energy Policy*, 60, 852–865. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.04.039>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. (5th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro. Semarang.
- kompas.com. (2021). *Sumbang Emisi Terbesar, PLTU Batu Bara Harus Dipensiunkan Lebih Cepat*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/23/084833370/sumbang-emisi-terbesar-pltu-batu-bara-harus-dipensiunkan-lebih-cepat?page=all>
- Maulidiavitasari, & Yanthi. (2021). 11849-35431-1-Pb. *Akuntabilitas*, 15(1), 1–18.
- Murniati, M., Maski, G., Noor, I., & Ekawaty, M. (2021). Entrepreneurship in the Tourism Industry: Implication on Sustainable Economic Development. *Emerald Insight*, 29B(8 November 2021), 137–156. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1571-03862021000029B030/full/html>
- Nurrahmah, A. (2021). *Pengantar Statistika 1* (S. Haryanti (ed.)). MediaSains Indonesia.
- Paramita, S. (2015). Determinan dan Konsekuensi Investasi Lingkungan. *Bachelor Thesis*, 2(1987), 1–13.
- Pratama, Y. M. (2021). Analisis Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Di Indonesia. *Modus*, 33(2), 120–137. <https://doi.org/10.24002/modus.v33i2.4644>
- Pratiwi, P. C. (2016). Pengaruh Tipe Industri, Media Exposure, Dan Profitabilitas Terhadap Carbon Emission Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Industri Jasa Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi*, 4 (2).
- Rahmanita, S. (2020). Pengaruh Carbon Emission Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(01), 54–71. <https://doi.org/10.29080/jai.v6i01.273>
- Saptiwi, N. W. T. (2019). Pengungkapan Emisi Karbon: Menguji Peranan Tipe Industri, Kinerja Lingkungan, Karakteristik Perusahaan dan Komite Audit. *Nur Widhya Tyas Saptiwi*, 17 (2), 1–14.

- Septriyawati, S., & Anisah, N. (2019). Pengaruh Media Exposure, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Dewantara*, 103–114. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/SNEB/issue/view/46>
- Sugiyono. (2020a). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020b). Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D). In *Bandung: Alfabeta*. Alfabeta. <https://books.google.co.id/books?id=0xmCnQAACAAJ>
- Susilo, Mudi, Abbas, D. S. (2022). Pengaruh Leverage , Kinerja Lingkungan , Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Carbon. *Jurnal Mahasiswa*, 4, 56–70.
- Syabilla, D., Wijayanti, A., & Fahria, R. (2021). Pengaruh Investasi Hijau dan Keragaman Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1171–1186.
- Taslim, S. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 97. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.97-109>
- Velte, P., Stawinoga, M., & Lueg, R. (2020). Carbon performance and disclosure: A systematic review of governance-related determinants and financial consequences. *Journal of Cleaner Production*, 254. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120063>
- Yasin, M. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 61–76.

Analisis Akuntabilitas Bantuan Dana Pemerintah Pada TK. Bernuansa Hindu Dharma Kumara I Kecamatan Kuta Utara

Ni Made Dita Rahyunita ⁽¹⁾
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati ⁽²⁾
I Made Endra Lesmana Putra ⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jln. Sanggalangit, Tembau Penatih, Denpasar Timur
 e-mail: Ditarahyu1007@gmail.com

ABSTRACT

This research is a type of descriptive qualitative research that aims to analyze the accountability of government funding assistance in Kindergarten with Nuances of Hindu Dharma Kumara 1, North Kuta District. Permendikbud No 63 of 2022 explains that accountability is the management of funds that can be accounted for as a whole based on logical considerations in accordance with statutory provisions. Therefore, accountability is an obligation to provide accountability in explaining the performance and actions of a person or legal entity or an organization to a party which in this case has the right or authority to ask for information or accountability. The results of the analysis in this study are that most of the implementation of BOP funds in Kindergarten with Hindu Nuances of Dharma Kumara has been carried out in accordance with the planning of the School Activity Plan and Budget (RKAS). Accountability Reporting on the use of BOP in Kindergarten with Hindu Nuances Dharma Kumara has implemented an accountability system so that it can be accounted for in accordance with the technical guidelines for financial management of the applicable PAUD BOP funds. The financial management of the BOP Fund in Dharma Kumara's Hindu Nuanse Kindergarten applies the principles of effectiveness, efficiency and accountability so that it is effective in its use.

Keywords: Accountability; RKAS; BOP PAUD

PENDAHULUAN

Biaya pendidikan merupakan dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran, dan berbagai jenis keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Biaya langsung merupakan pengeluaran yang secara langsung untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan sedangkan, biaya tidak langsung merupakan biaya yang pada umumnya tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah.

Untuk merealisasikan aktualisasi pendidikan, maka dibuatlah perencanaan program pemerintah dalam membantu penyediaan bantuan dalam pendanaan biaya operasional lembaga PAUD. Program ini disebut sebagai Dana Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), program ini membantu meringankan beban

masyarakat terhadap pembiayaan terkait dengan pendidikan khususnya pada pendidikan anak usia dini agar masyarakat bias merasakan pendidikan secara merata.

Dana Alokasi BOP PAUD ini tidak boleh disalah gunakan untuk keperluan lainnya, sebab dalam penggunaan Dana bantuan operasional ini harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk tahun 2023 ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Suryaden,2022). Tiap tahunnya pemerintah selalu memperbaharui JUKNIS BOP PAUD, agar pengelolaan dana BOP PAUD terus meningkat menjadi lebih baik dan mengurangi angka penyimpangan.

PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Dalam hal ini, khusus di Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2022 berupaya membantu penyediaan BOP PAUD melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9.777.080.000 untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (BPKAD Badung.2022). Tahun 2022 jumlah BOP setiap anak diberikan dengan nominal Rp. 1.200.000 naik 100 persen dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp. 600.000 (Wulandari,2022). Besaran dana BOP yang diterima di tiap sekolah berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Syaratnya adalah anak didik sudah terdaftar dalam Data Pokok PAUD dan Pendidikan Masyarakat (DAPODIK). Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke rekening satuan PAUD dilakukan 2 kali tahapan dalam 1 tahun.

Namun, berdasarkan temuan dari peneliti terdahulu seperti misalnya Nodera dkk. (2023), Suliyanto (2020) serta Fitriani dan Hayati (2019) berkaitan dan berbagai media online yang mewartakan seperti misalnya (Masyhari,2021) berkaitan dengan dugaan adanya korupsi dana BOP di Kabupaten Kediri Jatim serta Pramono (2022) berkenaan dengan korupsi dana buku BOP PAUD di Kabupaten Bone Sules. Hal ini menandakan bahwa masih ditemukannya dugaan korupsi dan juga penyelewengan dana bantuan operasional (BOP) , selain itu juga ditemukan adanya yayasan sekolah yang belum menerapkan pengelolaan keuangannya dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Disdikpora Kabupaten Badung termotivasi untuk menyelenggarakan sosialisasi BOP PAUD pada bulan Februari 2023 (Disdikpora,2023). Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada para guru TK, didalam menggunakan dana bantuan dari pemerintah harus memenuhi beberapa ketentuan yang ada

dalam petunjuk teknis dana alokasi khusus non fisik. Salah satunya harus menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparansi. Hal ini dilakukan agar pengelolaan dana alokasi khusus non fisik tepat sasaran, tidak adanya penyimpangan ataupun penyelewengan. Dan juga agar dana yang ada dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Akuntabilitas publik sangat diperlukan dalam proses pengelolaan anggaran pendidikan. Akuntabilitas publik ini suatu wujud pertanggungjawaban untuk semua aktivitas yang dilaksanakan oleh individu yang diberikan amanah kepada instansi atau individu yang memerlukan pertanggungjawaban (Zulaika, 2022). Akuntabilitas dilakukan sebagai bentuk transparansi terhadap laporan keuangan dari suatu kegiatan operasional yang dilakukan oleh lembaga publik salah satunya lembaga pendidikan. Akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan bertujuan agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Tujuan dari akuntabilitas yaitu melibatkan publik untuk melakukan pengawalan layanan pendidikan serta pertanggungjawaban kewajiban layanan pendidikan.

Salah satu PAUD di Kabupaten Badung yakni TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara, merupakan suatu lembaga non profit, yang mana sumber dananya berasal dari pemerintah dan masyarakat. Dipilihnya Kabupaten Badung sebagai tempat penelitian dikarenakan Angka Partisipasi Sekolah Taman Kanak-Kanak Perkembangan angka partisipasi kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sudah melampaui target nasional, pada akhir tahun 2020 dengan realisasi 100%, mengingat bahwa jenjang pendidikan anak usia dini sangat penting bagi anak-anak usia dari 5 s/d 6 tahun maka Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen membantu masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan anak usia dini (Renstra Disdikpora,2021). Oleh karena itu dalam penyusunan dan pelaporan keuangan harus mengikuti sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Akuntabilitas

Permendikbud No 63 Tahun 2022 menjelaskan bahwa akuntabel merupakan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau suatu organisasi kepada suatu pihak yang dalam hal ini memiliki hak atau berwenang dalam meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Sukarso, 2002).

untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.

5. Prinsip-Prinsip Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP).

Adapun prinsip yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan disebutkan bahwa pengelolaan Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip: a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana; b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan; c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

6. Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP).

Dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, disebutkan bahwa Dana BOP PAUD terdiri dari Dana BOP PAUD Reguler dan Dana BOP PAUD Kinerja. Dana BOP PAUD diberikan kepada satuan pendidikan yang melaksanakan layanan PAUD, yaitu 1) Taman Kanak-Kanak, 2) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, 3) Kelompok Bermain, 4) Taman Penitipan Anak, 5) Satuan PAUD sejenis, 6) Sanggar Kegiatan Belajar serta 7) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Adapun Syarat Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP PAUD Reguler yang diatur Dalam Juknis BOP PAUD 2023, disebutkan bahwa Syarat satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD Reguler, yaitu: 1) Mempunyai NPSN yang terdata di Aplikasi Dapodik, 2) Sudah mengisi dan melakukan pemuktahiran data pada aplikasi dapodik sesuai kondisi nyata di satuan pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya, 3) Mempunyai izin untuk melaksanakan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik, 4) Mempunyai Rekening Satuan Pendidikan atas nama satuan pendidikan, 5) Tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Sedangkan Syarat Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP PAUD Kinerja disebutkan bahwa Syarat satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD Kinerja, yaitu 1) Penerima Dana BOP PAUD Reguler pada tahun anggaran berkenaan 2) Telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana sekolah penggerak.

7. Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP).

Berkaitan dengan besaran alokasi dana BOP PAUD Reguler, dapat dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP PAUD pada setiap daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Bagi Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD yang ditetapkan sebagai penerima dana BOP PAUD Reguler berada di daerah khusus dan mempunyai jumlah peserta didik kurang dari 9, maka jumlah peserta didik dalam perhitungan besaran alokasi dana BOP PAUD ditetapkan menjadi 9 peserta didik.

8. Komponen Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP).

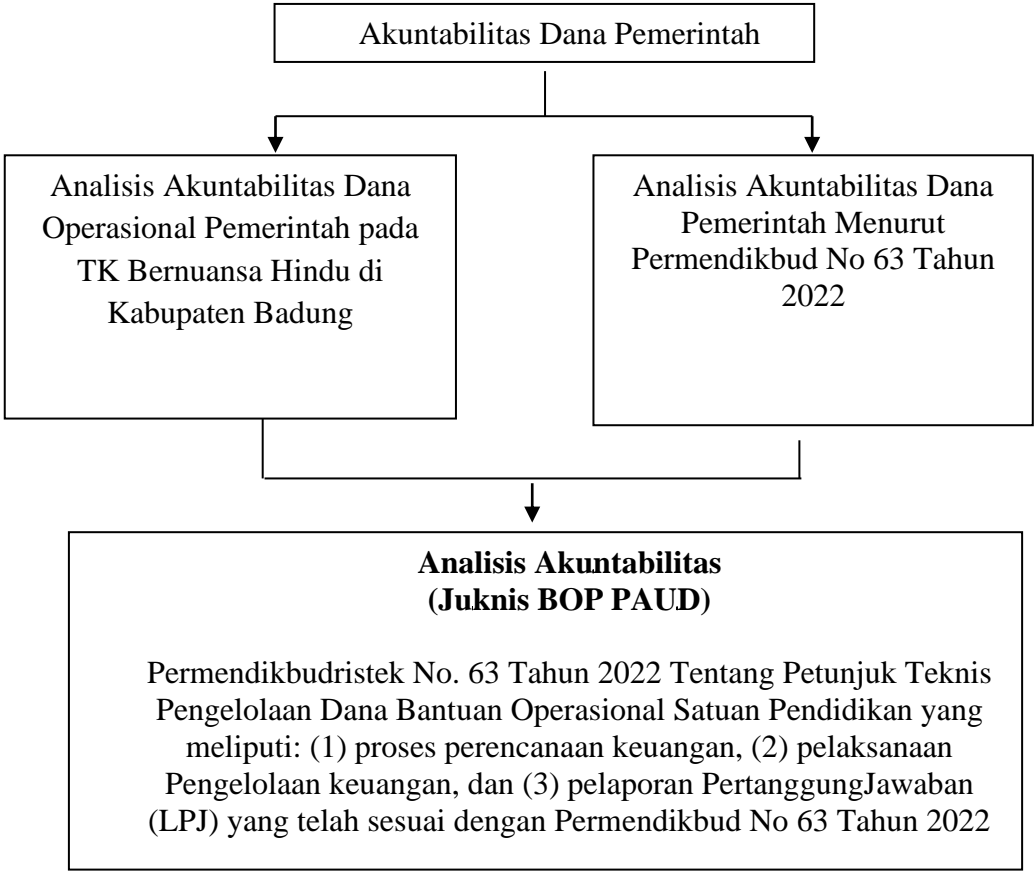
Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Reguler disebutkan bahwa Komponen penggunaan dana BOP PAUD Reguler, yaitu: 1) Penerimaan Peserta Didik Baru 2) Pengembangan Perpustakaan dan/atau layanan pojok baca 3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain 4) Pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain, 5) Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan, 6) Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, 7) Pemeliharaan sarana dan prasarana, 8) penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan, 9) Pembayaran honor untuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan: a) tercatat di Dapodik, b) Ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan yang dibuktikan dengan Surat penugasan atau surat pengangkatan, c) aktif melaksanakan tugas di satuan PAUD, dan d) belum mendapat gaji pokok sesuai ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dari satuan pendidikan bersangkutan.

9. Pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP).

Pelaporan Penggunaan Dana BOP PAUD : Menurut Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) pada Pasal 8 ayat 1, antara lain : 1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan PAUD, satuan Pendidikan Nonformal, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Pemerintah Pusat. 2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi : a) Rencana kegiatan dan anggaran satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal (RKAS) b) Pembukuan realisasi Penggunaan Dana c) Rekapitulasi Penggunaan Dana BOP PAUD; dan d) Penanganan pengaduan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas dana pemerintah pada TK. Bernuansa Hindu di Kabupaten Badung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi dokumen, studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Keuangan Dana BOP-PAUD Pada TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara Kabupaten Badung tahun 2022 sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Permendikbudristek no 2 tahun 2022, prinsip dalam pelaksanaan penggunaan dana BOP PAUD meliputi: 1) Efisien yaitu Penggunaan Dana dikelola sesuai sasaran yang

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden, penulis juga melihat bahwa semua pihak sudah memahami dengan baik dan memahami sumber Dana BOP PAUD yang diterima oleh TK. Adapun sumber dana utama yang diperoleh oleh TK adalah dana dari pusat yaitu Dana BOP PAUD dari Dinas Pendidikan dan Ristek Republik Indonesia, sebelum adanya pencairan terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas Penerimaan dan Penggunaan (Realisasi) Dana BOP. Selain itu sumber dana lain juga diperoleh dana dari hasil pembayaran iuran yang dibayarkan oleh orang tua siswa setiap bulan. Sumber dana ini menjadi alternatif lain untuk pembelanjaan apabila uang dari Dana BOP sudah habis dibelanjakan.

Berdasarkan dokumen yang diterima oleh peneliti, sekolah sudah menerapkan sistematika yang sesuai dengan format penyusunan RKAS yang berlaku menurut permendikbud nomor 63 tahun 2022. Yang pada penyusunannya terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Kegiatan Pembelajaran, Kegiatan Pendukung dan Kegiatan Lainnya. Pada penyusunan RKAS nya sudah mencantumkan uraian kegiatan, jumlah biaya yang diperlukan disertai dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan penanggung jawab kegiatan pada RKAS.

b. Pelaksanaan Dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara

Pelaksanaan adalah upaya yang dijalankan untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang dijalankan untuk mencapai semua rencana yang telah ditetapkan pada penyusunan rencana sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis, peneliti mengamati bahwa sebagian besar dari Penggunaan Dana BOP TK dialokasikan untuk belanja jasa dan Tenaga Kerja Pegawai sebesar Rp. 165.600.000 atau sekitar 78.41%, selanjutnya dialokasikan ke dalam komponen pendukung yang mencakup belanja ATK Rp. 1.680.000; belanja muatan lokal Rp. 4.080.000; belanja foto kopi Rp 1.200.000; belanja internet dan listrik Rp. 4.800.000 serta belanja kurikulum dan pengenalan Rp. 10.000.000. Selanjutnya terdapat alokasi ke dalam komponen lainnya yang termasuk belanja makanan dan minuman Rp. 8.280.000 serta belanja untuk wastra pelinggih Dewi Saraswati sebesar Rp. 199.000.

Berdasarkan pengamatan tersebut, maka alokasi pengeluaran dana ini sudah sesuai dengan Permendikbudristek no 63 tahun 2022, yaitu a). penerimaan Peserta Didik baru; b) pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca; c). pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain; d) pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain; e) pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan; f) pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; g). pembiayaan langganan daya dan jasa; h).

pemeliharaan sarana dan prasarana; serta i. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan; j. pembayaran honor.

Dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaannya semua rencana yang telah disusun oleh Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Bendahara maupun orang tua siswa telah terlaksana, karena pihak sekolah memiliki komitmen bahwa segala perencanaan yang telah disusun harus diupayakan untuk dilaksanakan.

c. Pelaporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelolaan dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara Kabupaten Badung

Penyusunan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara dilakukan oleh Bendahara TK kemudian menyampaikannya kepada Kepala Sekolah TK. Selanjutnya akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Badung untuk kemudian ditinjau kembali apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis Pengelolaan dana BOP. Laporan pertanggungjawaban memuat rincian Penggunaan Dana yang digunakan dalam pengalokasian dana BOP. Yang disertai dengan kwitansi, tanda bukti pembelian dan penerimaan barang serta foto-foto pembelian barang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan responden, TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara telah melaporkan perincian pelaporan pertanggungjawabannya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Permendikbudristek no 63 tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran dan BOP di TK, juga terdapat bukti fisik Penerimaan dan Penggunaan (Realisasi) Dana BOP PAUD, yang perinciannya dicantumkan didalam Laporan Pertanggungjawaban, Bendahara TK menyampaikan rincian alokasi dan kepada Kepala Sekolah TK, sedangkan dalam Penyusunan Pelaporan PertanggungJawaban menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana bentuk pertanggungjawaban dengan prinsip akuntabilitas diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan publik dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Penerapan akuntabilitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban di perkuat dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak Komite Sekolah untuk meninjau kembali apakah barang yang dibeli benar ada, juga dapat dilihat pada Laporan Pertanggung Jawaban dimana Realisasi dana BOP sudah sesuai dengan RKAS yang dibuat sebelumnya. Sedangkan untuk bukti pembelian barang atau perbaikan sarana dan prasarana TK sudah dilampirkan pada Laporan PertanggungJawaban (LPJ) berupa kwitansi pembayaran, bukti penerimaan barang, dan bukti foto barang yang dibeli.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Istianatul Khairiyah, Nini aryani, Nopa Wilyanta (tahun 2016) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Menunjang sarana dan prasarana Pekanbaru. Pada penelitian ini diperoleh bahwa sistem penerimaan dan pengeluaran dana BOP berjalan dengan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dibuktikan dengan setiap TK yang memiliki buku kas yang mencakup detail penggunaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan Juknis pemerintah. Namun dalam penelitian ini tidak menerapkan prinsip pengelolaan Dana BOP sebagai fokus analisis pengelolaan keuangannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RKAS) pada TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara sudah sesuai dengan format penyusunan anggaran pada juknis pengelolaan dana BOP PAUD Tahun 2022. Secara keseluruhan segala bentuk perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh TK Kumara telah sesuai dengan peraturan Permendikbud No 63 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil telaah dokumen yang ada, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pelaporan Pertanggung Jawaban penggunaan BOP Di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara telah menerapkan sistem akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dana BOP PAUD yang berlaku. Pengelolaan keuangan Dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sudah efektif dalam penggunaannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan peneliti, maka peneliti ingin memberikan saran kepada:

1. Kepala Sekolah TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara

Peneliti menyarankan agar publikasi Penggunaan Dana BOP di pasang pada pengumuman yang ada di depan sekolah, atau bisa dilakukan secara Online melalui sosial media, sehingga

akan lebih banyak lagi orang yang mengetahui tentang Pengelolaan dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara.

2. Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian tentang dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara, penulis menyarankan untuk meneliti sejauh mana efektifitas dana BOP dalam memajukan pendidikan di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara.

Daftar Pustaka

BPKAD Badung 2022. "Penjabaran APBD Kabupaten Badung 2022."

Disdikpora, 2023. "Sosialisasi Bantuan Operasional Pendidikan PAUD Kabupaten Badung."

Edi Sukarso. 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Heliani, Dede Wahidin, dan Erma Susilawati. 2022. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah." *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(2): 56–65.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Nodera, Mimi Sintia, Ratih Kusumastuti, dan Salman Jumaili. 2023. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Merangin Tahun 2021." *Owner* 7(1): 799–809.

Slamet Suyanto. 2005. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.

Suliyanto, Dimas. 2020. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri Senduro Kabupaten Lumajang." *Counting: Journal of Accounting* 3(1): 38–46.

Tahir. 2014. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Zulaika, Nurfitri et al. 2022. "Analisis Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Bop Paud Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8(2): 1325.

Pengaruh Efektivitas Penggunaan E-Samsat Dan Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pembantu Renon

Ade Ima Yulinda Dewi (1)
I Wayan Sudiana (2)

(1)(2)Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sanggalangit, Tembau Penatih, Denpasar Timur
e-mail: imayulinda@gmail.com

ABSTRACT

The Samsat Office is a public service engaged in the payment of motorized vehicle tax (PKB). (PKB) is a type of regional tax whose authority is delegated to the provincial government as stipulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. The largest state revenue is obtained through taxes, one of which is Motor Vehicle Tax (PKB). PKB is one aspect of Regional Original Income (PAD). However, there are many obstacles in paying PKB, including many people who are in arrears paying PKB, the level of public compliance in paying PKB is still low, and the community's limitations in paying PKB during the Covid-19 pandemic. To overcome these problems an e-government system was created in which tax payment services are made online, namely through e-Samsat (Electronic One-Stop Manunggal Administration System). The purpose of this research is to determine the effect of the effectiveness of e-samsat and progressive taxes on taxpayer compliance. The theory in this study uses the theory task technology. The data used is primary data which will be obtained from distributing questionnaires. The number of samples used in this study were 97 respondents. The data collection technique used is in the form of a questionnaire. The analysis technique uses multiple linear regression. The results of this study found that the effectiveness of e-samsat and progressive tax simultaneously had a positive and significant effect on taxpayer compliance.
Keywords : E-Samsat Effectiveness, Progressive Tax, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kewajiban utama dari seluruh aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan yang bersifat administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik juga menjadi salah satu kewenangan yang paling penting bagi pemerintah daerah karena menyangkut keberhasilan dan membangun kinerja pelayanan yang profesional, transparan, partisipatif, efisien, efektif yang akan berpengaruh pada citra pemerintah.

Salah satu instansi pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik adalah Kantor Samsat. Kantor Samsat merupakan pelayanan publik yang bergerak di bidang pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang

kewenangannya diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendapatan terbesar Negara diperoleh melalui pajak salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan salah satu aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam pembayaran PKB banyak mengalami kendala diantaranya banyaknya masyarakat yang menunggak membayar PKB, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB masih rendah, dan keterbatasan masyarakat dalam membayar PKB di masa pandemi Covid-19. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diciptakanlah sistem e-government dalam pelayanan pembayaran pajak yang dilakukan secara online yakni melalui e-Samsat (Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Di Provinsi Bali, layanan e-Samsat ini mulai di operasionalkan sejak tanggal 20 September 2017. E-Samsat diluncurkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembayaran secara elektronik atau non tunai. Oleh karena itu, layanan ini diluncurkan untuk membantu dalam memudahkan pendaftaran kendaraan secara online, agar dapat dibayar dimana saja dan kapan saja.

Gubernur Bali memberikan insentif pajak kendaraan bermotor dan insentif bea balik nama kendaraan bermotor untuk masyarakat Provinsi Bali agar kewajiban membayar pajak masyarakat menjadi berkurang dan sumber dana masyarakat dapat dimanfaatkan untuk sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Penurunan jumlah unit kendaraan yang menunggak disebabkan banyaknya masyarakat yang wajib pajak sudah memanfaatkan pelayanan e-Samsat, dimana aplikasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi masyarakat kota Denpasar sebagai wajib pajak yang mempermudah untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

Dengan Adanya aplikasi tersebut masyarakat Kota Denpasar cukup memanfaatkan kapan pun dan dimana pun berada dapat membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga dengan adanya e-Samsat masyarakat kota Denpasar tidak perlu lagi datang ke Kantor Samsat untuk mengantri karena cukup membayar pajak kendaraan bermotor dari smartphone-nya. Namun dalam kenyataanya, tunggakan pembayaran pajak masih mengalami fluktuasi yang menunjukan penerimaan pajak yang belum konsisten.

Peningkatan kendaraan bermotor pribadi tidak dapat diantisipasi karena kapasitas jalan untuk kendaraan pribadi tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan bermotor, oleh karena itu kemacetan tidak dapat dihindarkan. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemacetan yaitu dengan menerapkan pajak progresif yang bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan. Pajak

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa E-Samsat merupakan sebuah layanan jaringan elektronik guna memproses pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan tempat serta batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang sudah tercantum. Dengan adanya e-Samsat dapat memberikan rasa aman bagi wajib pajak dimana pembayaran dapat dilakukan dengan non tunai dengan mengakses aplikasi e-Samsat ataupun melalui Bank yang menyediakan jasa pembayaran e-Samsat. Hal ini sejalan dengan *Theory Task Technology Fit* (TTF) yang menyatakan sejauh mana teknologi membantu individu dalam mengerjakan tugasnya.

3. Pajak Progresif

Pajak Progresif adalah penerapan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya yang lebih besar dari tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama. Tujuan dari diterapkannya pajak progresif adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan pada suatu daerah. Penerapan pajak progresif merupakan kewenangan dari gubernur suatu provinsi. Pada pasal 6 UU No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pasal 4,Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotr (PKB) berpotensi besar dalam upaya meningkatkan PAD suatu daerah seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor,se sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini Wajib Pajak Badan,kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.Sementara objek pajak kendaraan bermotor sendiri adalah kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor (PKB).

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Kurnia Rahayu (2010). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010)

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan peundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Terdapat beberapa jurnal penelitian yang dijadikan sebagai refrensi penelitian kali ini,diantaranya :

1. Kamilatus Sholikhah dan Mortigor Afrizal Purba,(2021),diperoleh hasil bahwa bahwa penerapan e-Samsat secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.Pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.Penerapan e-Samsat,sanksi pajak dan pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
2. Ni Putu Mahindu Pradnya Utami dan Putu Sukma Kurniawan(2020) diperoleh hasil bahwa penerimaan masyarakat menggunakan e-Samsat khususnya masyarakat/wajib pajak Kota Denpasar dipengaruhi oleh persepsi kebermanfaatn atau sesuatu yang timbul dari diri sendiri karena terasa yakin/percaya bahwa sistem yang digunakan bermanfaat dan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja.
3. Dewi Kusuma Wardani dan Rumiayatun(2017),diperoleh hasil bahwa pengetahuan wajib pajak kesadaran wajib pajak sanksi 7 pajak kendaraan bermotor dan sistem samat Drive Thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. (I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi,2019),diperoleh hasil bahwa penerapan e-Samsat dan pajak progresif serta kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi bali di Kota Denpasar.Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar akan meningkatkan juga pendapatan asli daerah Kota Denpasar,karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pajak daerah yang tertinggi.
5. Ria Indrawati dan Muhammad Nasri Katman (2021),diperoleh hasil bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki perekonomian yang terkena dampak covid-19. Salah satu dampak Covid-19 yaitu yang berpengaruh terhadap pendapatan atau anggaran yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, dimana PKB merupakan sumber anggaran terbesar yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan dana atau pendapatan anggaran suatu provinsi atau daerah. Berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan

pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti pembebasan denda pada waktu yang telah ditentukan pemerintah provinsi Sulawesi selatan seperti SK yang dikeluarkan.

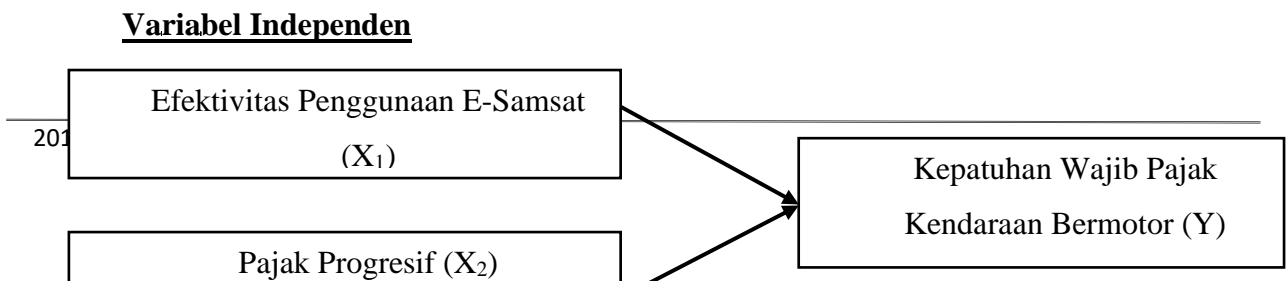
- 6. Bashiruddin Ahmad dan Muhammad Adil (2020),diperoleh hasil bahwa, Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat kabupaten Gowa sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 7. Nurul Fajriyanti,Rahayu Kusumadewi dan Fitri Pebriani Wahyu (2020),diperoleh hasil bahwa, sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui online (E-Samsat) ini sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan teori efektivitas ada beberapa dimensi yang harus diperbaiki. Dimensi integrasi dalam mengukur kemampuan PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek dalam mensosialisasikan E-Samsat ini sudah cukup baik dengan metode penyebaran pamflet, banner, spanduk, media sosial, dan juga bekerja sama dengan BUMDES.

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah di uraikan sebelumnya maka hipotesis yang dapat di ajukan dalam penelitian ini adalah :

- H1 = Efektivitas Penggunaan E-Samsat Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- H2 = Pajak Progresif Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel dala penelitian.Jenis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini berbentuk deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini menguji pengaruh efektivitas penggunaan e-samsat dan pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat pembantu renon.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diamati dan dicatat langsung oleh peneliti merupakan jawaban dari responden pada kuisioner.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak sebanyak 97 orang.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Variabel	Nomor Item	Validitas	Reliabilitas
Efektivitas E-Samsat (X ₁)	X _{1.1} -X _{1.6}	0.852, 0.792, 0.828, 0.667, 0.508, 0.594	0.888
Pajak Progresif (X ₂)	X _{2.1} -X _{2.6}	0.688, 0.596, 0.620, 0.683, 0.442, 0.627	0.834
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1-Y6	0.528, 0.627, 0.347, 0.590, 0.615, 0.333	0.755

Sumber : Lampiran 3&4 (Halaman 39-40)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat seluruh variabel memiliki nilai korelasi lebih dari 0,30 dan koefisien alpha lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan valid dan reliable. Instrumen penelitian sudah baik dan dapat dilanjutkan untuk analisis berikutnya.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36354881
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.049
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.101 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan uji normalitas yang ditampilkan pada Tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,101 yaitu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	EFEKTIVITAS E-SAMSAT	.449	2.226
	PAJAK PROGRESIF	.449	2.226

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel kinerja karyawan memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF-nya dibawah 10. Ini berarti tidak terjadi multikolinearitas pada variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.087	.889		2.347	.021
	EFEKTIVITAS E-SAMSAT	-.047	.045	-.159	-1.043	.300
	PAJAK PROGRESIF	.008	.046	.027	.180	.857

a. Dependent Variable: ABRESID

Tabel 4 tersebut, ditunjukkan bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu absolute error. Maka dari itu, penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.876	1.431		3.407	.001
	EFEKTIVITAS E-SAMSAT	.297	.072	.332	4.124	.000
	PAJAK PROGRESIF	.531	.074	.576	7.146	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

1. Koefisien konstanta sebesar 4,876 yang memiliki makna bahwa apabila variabel efektivitas e-samsat dan pajak progresif pada angka nol (0) maka kepatuhan wajib pajak sebesar konstan yaitu 4,876.

2. Nilai koefisien efektivitas e-samsat adalah sebesar 0,297 artinya apabila variabel efektivitas e-samsat meningkat dari 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,297. Hal ini berarti setiap peningkatan pada efektivitas e-samsat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
3. Nilai koefisien pajak progresif adalah sebesar 0,531 artinya apabila variabel pajak progresif meningkat dari 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,531. Hal ini berarti setiap peningkatan pada pajak progresif maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.852 ^a	.726	.720	1.37798

a. Predictors: (Constant), PAJAK PROGRESIF, EFEKTIVITAS E-SAMSAT

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dari hasil pengujian pada Tabel 4.8 menunjukkan besarnya Adjusted (R^2) adalah 0,720. Hal ini berarti 72% variasi variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas e-samsat dan pajak progresif, sedangkan sisanya $(100\% - 72\%) = 28\%$ dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	472.603	2	236.302	124.446	.000 ^b
	Residual	178.489	94	1.899		
	Total	651.093	96			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), PAJAK PROGRESIF, EFEKTIVITAS E-SAMSAT

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4.9, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 124.302 dengan signifikan F sebesar $0,00 < 0,05$, dengan taraf kepercayaan 5% secara statistik

variabel Efektivitas E-Samsat (X1) dan Pajak Progresif (X2) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga model layak digunakan.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	4.876	1.431		3.407	.001
	EFEKTIVITAS E-SAMSAT	.297	.072	.332	4.124	.000
	PAJAK PROGRESIF	.531	.074	.576	7.146	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

1. Efektivitas E-Samsat (X1), berpengaruh positif terhadap kepatuhanw wajib pajak (Y). Hasil ini ditunjukkan oleh t hitung > t tabel = $4.124 > 1.985$ dan signifikan = $0,00 < 0,05$, sehingga hipotesis 1 (H_1) diterima dan dapat dibuktikan secara empiris. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pajak Progresif (X2), berpengaruh positif terhadap kepatuhanw wajib pajak (Y). Hasil ini ditunjukkan oleh t hitung > t tabel = $7.146 > 1.985$ dan signifikan = $0,00 < 0,05$, sehingga hipotesis 2 (H_2) diterima dan dapat dibuktikan secara empiris. Hasil menunjukkan bahwa pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian dan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1).Efektivitas E-Samsat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada efektivitas e-samsat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (2). Pajak Progresif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada pajak progresif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

(1).Efektivitas E-Samsat Kebanyakan wajib pajak belum mengetahui e-samsat dan kurangnya sosialisasi dari pihak kantor samsat. Untuk meningkatkan efektivitas e-samsat dengan melakukan sosialisasi dari kantor samsat sehingga wajib pajak memahami sistem dari e-samsat. (2). Pajak Progresif Peningkatan pembelian kendaraan bermotor setiap tahunnya dan kurangnya informasi wajib pajak sehingga wajib pajak tidak taat membayar pajak. Dengan adanya pajak progresif dapat memberikan informasi yang lebih jelas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (3) Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pembantu Renon agar tetap meningkatkan factor efektivitas e-samsat dan pajak progresif tersebut serta memperhatikan faktor lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. (4) Bagi peneliti selanjutnya,Kepada pihak peneliti mendatang dapat memodifikasi model penelitian dengan menambahkan atau mengembangkan indikator maupun variabel lain, dan memungkinkan digunakan pada institusi lainnya. Hal ini didasari bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak cukup banyak dan berbeda dengan kondisi institusi satu sama lainnya

DAFTAR PUSTAKA.

Alfisyahrin,Muhammad.(2018).Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia.

Abral,Al Putri.(2017).Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Pekanbaru Selatan.Hal.6-9,Vol.4,No2.

Bapenda Bali.2019.E-Samsat Bali.Di akses dari <https://bapenda.baliprov.go.id>

Darwin.(2010).Pajak dan Restribusi Daerah.Jakarta:Mirta Wacana Media.

Hasan,M.Ikbal.(2002).Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.Jakarta.Ghalia indonesia.

Kamus besar bahasa indonesia (2001).Di akses dari <https://kbbi.kata.web.id>

Kotler & Laksana (2018).Pengaruh kualitas pelayanan.Di akses dari <https://jurnal.unpal.ac.id>

Meolong,L.J.(2011).Metedologi penelitian kualitatif edisi Revisi,Banung PT.Remaja Rosdakarya.

Megi Megayani & Ni Komang dan Naniek Noviyari.(2021).Pengaruh Program E-Samsat,Samsat keliling dan kepuasan Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,31(8),107-124.

Mulyadi & Deddy.(2015).Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.Alfabeta Bandung.

Mahmudi.(2015).Efektivitas Pelayanan Publik.Yogyakarta.Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH.(2010).Pajak dan Restribusi Daerah.Jakarta.Mitra Wacana Media.

Sugiyono,(2019).Metode penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D Alfabeta,Bandung.

Sinambela.(2016).Reformasi Pelayanan Publik.Teori,Kebijakan dan Implementasi,PT.Bumi Aksara,jakarta.

Siahaan & Marihot P (2006).Pajak daerah dan Retribusi Daerah.PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Steers & Richard.M.(1985).Efektivitas Organisasi (kaidah perilaku).Jakarta.

Sugiyono,(2020).Metode Penelitian Kualitaif.Bandung:Alfabeta

Signal (Samsat Digital Nasional)Bapenda Bali.Di akses dari <https://bapenda.tutorial.baliprov.go.id>.

Soeparman Soemahamijga.(2010).Pajak dan Restribusi Daerah.Jakarta.Mitra Wacana Media.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.15 September 2009.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.15 Oktober 2004.Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126.Jakarta.

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2019-2022)

I Gusti Ayu Intan Okawati ⁽¹⁾

Ni Putu Ayu Kusumawati ⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80238

e-mail: okawatiintan@gmail.com

ABSTRACT

The results of this study indicate that institutional ownership and inflation have no effect on stock prices. Dividend Policy has a positive effect on Stock Prices. It is suggested that manufacturing companies in the Consumer Goods Industry sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange should continue to increase shareholder confidence in the company, so companies must be able to show good company performance, especially in generating profits, so as to attract investors to invest in a company. company. And items for disclosure of corporate social responsibility should be in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning limited liability companies so that they are in accordance with the conditions that exist in society.

Keywords: *Institutional Ownership, Dividend Policy, Inflation, Stock Prices*

PENDAHULUAN

Kinerja emiten berkorelasi dengan pergerakan harga saham. Prestasi emiten meningkatkan keuntungan yang dapat dihasilkan dari operasi perusahaan. Supply dan demand membentuk harga saham. Menurut Achmad (2012), "Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut." Begitu banyak elemen yang berkontribusi, termasuk tingkat suku bunga, tingkat inflasi, nilai mata uang, serta elemen non-ekonomi seperti situasi sosial dan politik, yang mempengaruhi pasokan dan permintaan ini.

Kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan inflasi adalah beberapa faktor yang dianggap bisa memengaruhi nilai saham. Kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap harga saham. Bagian puncak manajemen perusahaan biasanya memiliki kepemilikan institusional yang bertugas mengatur penggunaan aset dan dana perusahaan guna mencapai potensi keuntungan maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah (2019) yang menginvestigasi hubungan antara kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan harga saham menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak yang signifikan pada nilai saham. Sebaliknya, penelitian lain yang dilakukan oleh Wadani (2010) menemukan bahwa dampak dari kepemilikan institusional terhadap harga saham tidak signifikan.

Kebijakan peningkatan pembayaran dividen tahunan, yang dapat memperkuat kepercayaan investor, dapat memiliki dampak pada harga saham, menggambarkan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan dengan meningkatkan pembagian keuntungan bagi para investor. Informasi ini juga bisa memengaruhi permintaan dan penawaran saham, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Inflasi merujuk pada "kemiringan kenaikan harga secara keseluruhan dari produk-produk" (Dalimunthe, 2018). Ketika kondisi ekonomi menjadi terlalu panas atau overheated, permintaan melebihi penawaran, sampai harga itu cenderung meningkat. Inflasi yang naik dapat mengurangi minat beli uang, termasuk bagi investor, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga saham. Dampak inflasi terhadap harga saham tidak selalu signifikan, tetapi beberapa penelitian (Dalimunthe, 2018) menemukan kalau inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan kepada harga saham. Namun, ada pencari lain yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham tanpa signifikansi (Rifky, 2020).

Harga saham yang mengalami fluktuasi signifikan telah menjadi topik perbincangan sejak pandemi COVID-19 mengubah lanskap pasar secara drastis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa dampak pandemi tersebut telah memengaruhi sektor keuangan dan pasar modal secara menyeluruh, termasuk indeks harga saham IHSG. Dari awal tahun 2020 hingga 20 Maret 2020, indeks ini turun drastis dari level 6.300an menjadi hanya 3.900an dalam waktu hanya tiga bulan. Dampak dari penurunan harga saham ini terlihat dalam penurunan nilai kapitalisasi perusahaan manufaktur, yang merosot dari Rp2.317,14 triliun pada akhir 2019 menjadi Rp2.008,01 triliun selama periode perdagangan tersebut. Penurunan nilai kapitalisasi ini merupakan yang paling signifikan secara nominal di antara sepuluh sektor yang ada. Pandemi ini telah mengganggu ekonomi global secara luas.

Dalam konteks ini, fokus penelitian tertuju pada perusahaan manufaktur karena perusahaan-perusahaan ini memiliki pengaruh yang signifikan. Akibatnya, harga saham perusahaan manufaktur mengalami penurunan dari Rp2.317,14 triliun pada akhir 2019 menjadi Rp2.008,01 triliun selama perdagangan. Penurunan ini merupakan yang terbesar di antara sepuluh sektor jika dipandang dari segi nominal. Perusahaan manufaktur memerlukan lokasi dana jangka panjang untuk mendukung operasional mereka. Salah satu metode untuk memperoleh dana ini adalah melalui investasi surat berharga dari sang investor, yang dapat mempengaruhi harga saham.

Tahun 2022 menunjukkan penurunan kinerja industri manufaktur Indonesia. Ini ditunjukkan oleh penurunan kinerja Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia. Pada Oktober, PMI manufaktur Indonesia tercatat sebesar 51,8, turun dari capaian sebelumnya sebesar 53,7. Penurunan ini disebabkan oleh perlambatan ekonomi global. Sri Mulyani tampaknya menyadari fenomena ini. Menteri keuangan juga menyatakan bahwa dia mulai memperhatikan industri manufaktur Indonesia. Kami harus memperhatikan PMI manufaktur kami. Ada di level ekspansi selama dua belas bulan pertama, tetapi di bulan terakhir ada penurunan. Karena ini berkaitan dengan produksi yang sangat penting, kita harus memerhatikannya (cnbcindonesia.com, 2022). Kapasitas produksi telah meningkat dan mendekati level sebelum pandemi, menurut Sri Mulyani, meskipun melambat.

KAJIAN PUSTAKA

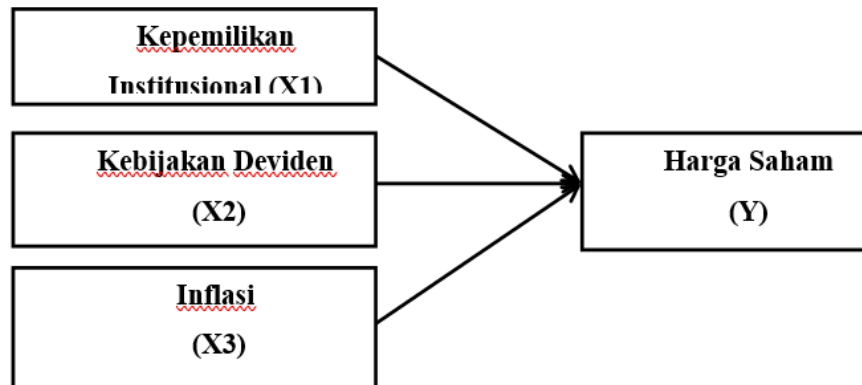
Dalam studinya yang berjudul Signalling Market for Job, Spence pertama kali menawarkan Teori Sinyal. Mengatakan bahwa isyarat atau sinyal merupakan upaya dari pihak pengirim atau pemilik informasi untuk menyampaikan bagian informasi yang relevan kepada pihak penerima, yang pada gilirannya akan memodifikasi perilakunya sesuai dengan pemahaman mereka tentang pesan yang disampaikan oleh sinyal tersebut.

Entitas seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau jenis perusahaan serupa biasanya memiliki mayoritas saham dalam suatu perusahaan, yang disebut sebagai kepemilikan institusional. Apabila penggunaan aset dan sumber dana oleh institusi ini tidak terkendali, hal ini dapat menjadi isyarat negatif bagi para investor dan berpotensi memengaruhi harga saham. Kepemilikan saham ini mencerminkan kekuatan yang dapat digunakan untuk mendorong atau bahkan mengkritik kinerja manajemen, sehingga pemilik institusional dapat peningkatan pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja manajemen. Tingkat investasi yang signifikan menentukan sejauh mana pengawasan akan dilakukan oleh investor-investor institusional tersebut.

H1 : kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap harga saham

Menurut Istani (2007), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai potensi untuk mengubah cara bisnis menyediakan laboratorium kepada karyawannya dengan cara yang aman, berdasarkan jumlah total saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham di perusahaannya. Menurut Sjahrial (2007), sebagian laba perusahaan diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Besar kecilnya dividen yang dikeluarkan oleh manajemen emiten

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Teknik Analisis Data:

Analisis statistik deskriptif yaitu untuk mengumpulkan dan memberikan informasi secara jujur dengan menggunakan data yang akurat dan komunikasi yang lebih efektif. Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah suatu variabel pengganggu dalam suatu model regresi mempunyai distribusi yang menyimpang dari normal. Metode Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam penelitian ini, meskipun tingkat signifikansinya harus lebih tinggi dari 0,05. Uji multikolinearitas alat yang penting untuk menentukan apakah terdapat korelasi antar variabel dasar yang mungkin mempengaruhi hasil model regresi. Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan Uji Glacier untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Apabila tingkat signifikansi (sig) lebih besar dari 0,05 maka model dianggap bias terhadap heteroskedastisitas. Uji autokorelasi digunakan untuk tau ada tidaknya korelasi antara jumlah pengganggu pada waktu tertentu dengan waktu sebelumnya pada model garis lengkung yang mengalami regresi. Analisis uji regresi linier berganda akan memberikan hasil yang memungkinkan pemahaman hubungan antara variabel terikat (X1, X2, dan X3) dan variabel bebas (Y). Uji digunakan untuk menjalin hubungan pribadi antara variabel dasar dan variabel target. Untuk memenuhi syarat signifikan, ambang batas signifikan harus lebih besar dari 0,05. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen sama-sama dipengaruhi oleh variabel dependen dalam suatu model regresi. Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu model dapat menjelaskan variasi variabel terikat.

atau jarang berubah, menjadi tidak memengaruhi return saham.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada harga saham. Nilai deviden tinggi menunjukkan prospek yang baik karena perusahaan dapat memberikan dividen yang besar. Investor membeli saham karena mereka mendapatkan dividen yang besar dan terus meningkat. Menurut Gibson (2003:116), minat investor dalam membeli saham perusahaan terkait akan meningkat karena minat ini. Peningkatan minat beli investor ini seiring dengan kenaikan harga saham perusahaan terkait.

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa inflasi tidak sama sekali memiliki pengaruh yang signifikan kepada harga saham. Temuan ini sejajar dengan teori yang mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat inflasi relatif memberikan isyarat negatif bagi berbagai sektor pasar modal (Tandelilin, 2010). Tingkat inflasi yang tinggi cenderung meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang kemudian mendorong perusahaan untuk mengeluarkan lebih banyak saham untuk mendapatkan modal tambahan (Tandelilin, 2010). Tingkat inflasi yang tinggi juga dapat mengurangi daya beli investor, yang pada akhirnya mengurangi minat investor untuk berinvestasi. Ini mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan karena ada penurunan dalam permintaan saham. Karena inflasi tidak memengaruhi permintaan atau penawaran saham dari sudut pandang seorang investor, inflasi yang stabil tidak berdampak pada harga saham. Namun, jika inflasi terus meningkat tanpa disertai dengan kenaikan suku bunga yang sesuai, hasil investasi menjadi kurang menarik, terutama di pasar uang, yang dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, sementara kebijakan dividen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap harga saham. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada emiten manufaktur di sub-sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk terus membangun kepercayaan investor dengan menunjukkan kinerja yang baik, terutama dalam mencapai laba yang stabil, sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Selain itu, penting juga bagi perusahaan untuk mematuhi item-item keterbukaan informasi dan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, agar sesuai dengan kondisi yang berlaku dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Achmad. (2012). *Pengaruh suku bunga sbi dan kurs dollar terhadap harga saham di bei.*

Amaliyah. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Dewan Komisaris. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 187–200.

cbncindonesia.com. (2020). *Terparah di BEI, Kapitalisasi Sektor Manufaktur Raib Rp 309 T.*
<https://www.cbncindonesia.com/market/20200227113256-17-140811/terparah-di-bei-kapitalisasi-sektor-manufaktur-raib-rp-309-t>

Dalimunthe, H. (2018). *Jurnal Program Studi Akuntansi PENGARUH MARGIN LABA BERSIH , PENGEMBALIAN ATAS.* 4(November), 62–70.

Darmadji. (2001). *Pasar Modal di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Deitiana. (2011). *Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan dan Dividen Terhadap Harga Saham, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol.13: 57-66.*

Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.*

Gilarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro.* Yogyakarta: Kanisius.

Ginting, M., Topowijono, T., & Sulasmiyati, S. (2016). PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, NILAI TUKAR DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Sub-Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 35(2), 77–85.

Irfani. (2019). *Harga Saham (Studi Empiris : Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.* 28(01), 143–152.

istani. (2007). *PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ 45 Sri Layla Wahyu Istanti.* 7–13.

Kurniawati, L., Manalu, S., & Ovtavianus, R. J. N. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Dividen, dan Harga Saham. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 59–74.
<https://journal.maranatha.edu/index.php/jmm/article/view/26>

Manalu. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Dewan Komisaris. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 187–200.

Mishkin. (2008). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Edisi 8. Buku 2.* Jakarta: Salemba Empat.

murhadi. (2008). Analisis Saham Pendekatan Fundamental. Jakarta. PT Indeks. *Analisis Saham Pendekatan Fundamental. Jakarta. PT Indeks.*

Nainggolan. (2005). *Teori Ekonomi Makro. Edisi Pertama. Bantul: Pondok Edukasi.*

Rahmandia, F. (2018). Analisis Yang Mempengaruhi Harga Penilaian Dalam Perusahaan Di Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar. *Jurnal Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1): 1-21, 2(1), 1–21. <https://www.neliti.com/id/publications/188855/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-harga-saham-perusahaan-di-sektor-industri-barang>

Rifky, M. A. (2020). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Harga Saham. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 3(3), 102–112.

sjahrial. (2007). *Manajemen Keuangan*.

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tandelilin. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi: Edisi Pertama*. Yogyakarta: Kanisius.

Wadani, L. (2010). No Title 26–21, □□□□□ □□□□□□□□□□. ٢٦٢١.

**Analisis Perhitungan Biaya Produksi Menggunakan Metode Full Costing Pada Perusahaan
"Galery Agung Bali Collection"**

Ni Wayan Puspayani⁽¹⁾

I Putu Fery Karyada⁽²⁾

Ni Putu Trisna Windika Pratiwi⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur, 80238, Kota Denpasar, Indonesia
e-mail: puspayani2401@gmail.com

ABSTRACT

In general, a company has targets or goals to achieve. Agung Bali Collection is one of the Endek and Weaving Galleries which sells various types of endek and woven fabrics. A conclusion drawn from the researcher's interviews with business owners and several employees from the Agung Bali Collection, it was explained that the Agung Bali Collection Gallery had not exercised proper control over the calculation of production costs, where the Agung Bali Collection Gaellery calculataaed productiion costs using a relativealy simple method and had not implemented the process of calculating production costs. based on cost accounting, how much baesic production costs are incurred without carrying out detailed and accurate calculations. Purposive sampling is a qualietative descriptieve research meithod that is used to identify informants in this type of study. The whole costing method is used in this study to calculate the cost of manufacturing. The study's findings indicate a difference of Rp. 198,105, or an excess of Rp. 198,105, between Rp. 877,922 based on theocalcationoofotheocompany's cost of production and Rp. 1,076,027 based on the calculation method based on the full costing method.

Keywords: Cost, Full Costing, Production, Cost of Goods

PENDAHULUAN

Perusahaan biasanya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Mengurangi biaya selama proses produksi adalah salah satu tujuan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Salah satu sumber data penting dalam analisis strategi bisnis adalah biaya. Oleh karena itu, pengendalian biaya yang akan dikeluarkan dalam produksi diperlukan untuk mencapai produksi yang efisien. Untuk menghindari pemborosan, kelancaran, atau keberhasilan, manajemen harus mengendalikan biaya produksi. Manajemen juga memerlukan informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan agar operasi perusahaan berjalan dengan baik. Tingkat laba yang diperoleh perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk menentukan biaya produksi dan penjualan.

Berbagai macam kain endek dan tenun yang dibuat langsung oleh Agung Bali Collection dijual di Galeri Endek dan Tenun Agung Bali. Tingkat laba yang diperoleh perusahaan akan dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk menetapkan biaya produksi; jika penjualan meningkat, laba yang diperoleh juga akan meningkat. Kemampuan suatu perusahaan untuk

menentukan biaya produksinya akan mempengaruhi tingkat laba yang diperolehnya, karena karena kondisi persaingan sengit dalam dunia bisnis, perusahaan harus lebih efisien dalam hal menghitung biaya produksi. Ini disebabkan oleh fakta Perusahaan menentukan harga penjualan produknya berdasarkan biaya produksi yang terkait. Mengawasi pengeluaran produksi perusahaan adalah salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi biaya..

Peneliti mewawancarai pemilik usaha dan staf Galeri Agung Bali Collection. Hasilnya menunjukkan bahwa Galeri Agung Bali Collection menggunakan metode yang relatif sederhana untuk menghitung biaya produksi; perusahaan menggunakan akuntansi biaya untuk menghitung Menghitung harga produksi tetapi tidak melakukan perhitungan sebenarnya dari biaya pokok produksi. Studi sebelumnya Menurut hasil dari Ilham Nurizki dan Rizka Ramayanti tahun 2020, dijelaskan bahwa Menerapkan Full Costing Metode dalam perhitungan HPP, yang mencakup semua elemen biaya yang digunakan selama tahap produksi, lebih akurat dan tepat. Penelitian ini telah menerapkan pendekatan kualitatif dalam analisisnya.

Tujuan utama dari penelitian ini yakni untuk memberikan gambaran atau pemahaman mengenai. perhitungan biaya dengan metode biaya penuh, yang merupakan metode untuk Menetapkan HPP yang mencakup semua production cost, baik yang memiliki sifat tetap maupun yang bersifat variable, dalam perhitungannya. Peneliti sangat menyarankan penggunaan metode ini karena penting bagi Perusahaan perlu menghitung semua biaya yang dikeluarkan.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam karyanya, Mulyadi (2015:7) dijelaskan cost accounting merupakan. suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan pencatatan, pengelompokan, ringkasan, dan penyajian informasi berkaitan dengan biaya yang terlibat dalam produksi dan penjualan barang serta jasa, serta interpretasinya. Dalam penghitungan harga pokok, akuntansi biaya menetapkan, mengevaluasi, dan melaporkan pos biaya yang mendukung laporan keuangan untuk menampilkan informasi yang relevan. Menghitung harga pokok penjualan adalah tujuan akuntansi biaya, di mana Biaya perusahaan harus diklasifikasikan dan didokumentasikan dengan akurat agar memungkinkan perhitungan HPP yang tepat.

cost accounting membantu manajemen dengan mengklasifikasikan biaya, yakni mengorganisir biaya ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan prinsip-prinsip yang ada untuk menyediakan informasi yang relevan. kuntansi biaya ini dibutuhkan untuk melaporkan kinerja perusahaan kepada manajemen internal dan juga kepada pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Akibatnya, akuntansi biaya sangat penting bagi setiap bisnis karena data yang

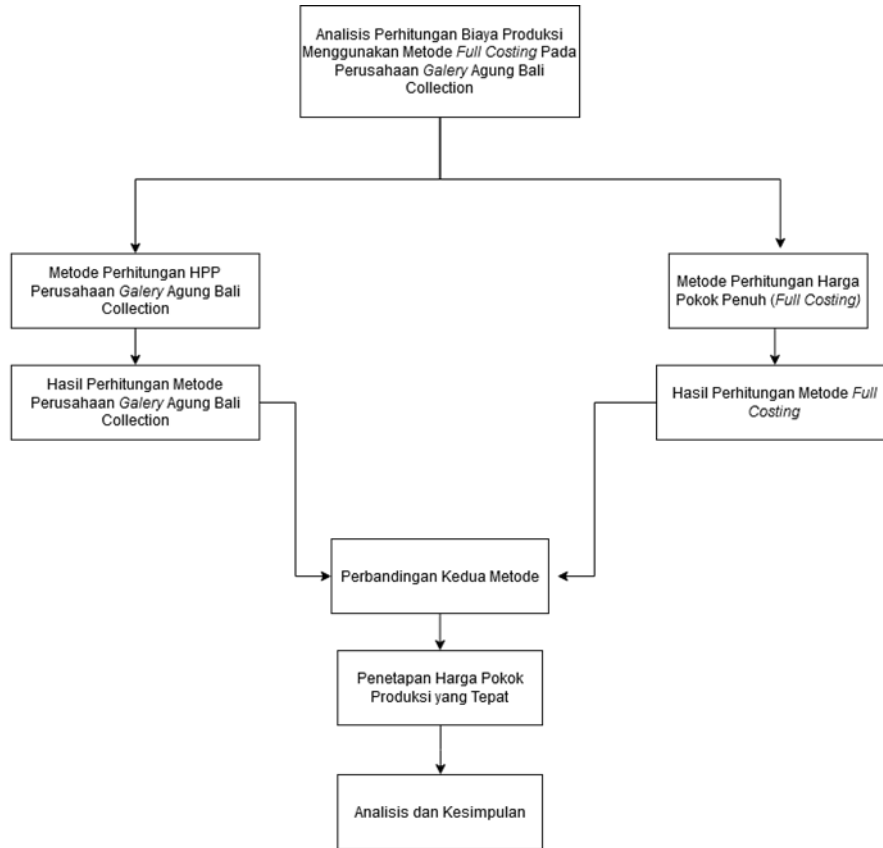
dicatat di dalamnya akan sangat penting bagi manajemen untuk membuat kebijakan atau membuat keputusan di masa depan.

Biaya produksi merujuk kepada pengeluaran yang perusahaan keluarkan selama proses manufaktur atau pengelolaan untuk menciptakan produk akhir atau produk setengah jadi yang siap untuk dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini mencakup seluruh tahap dari awal pengolahan hingga produk akhir atau setengah jadi tersebut selesai. Dalam pandangan Sutrisno (2012), biaya yang timbul dari aktivitas departemen produksi dalam proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir termasuk dalam penghitungan biaya adalah raw material costs, direct labor wages, dan factory overhead costs. Dalam pandangan Sutrisno (2012), biaya yang timbul dari aktivitas departemen produksi dalam Mengelola bahan baku utama menjadi produk akhir melibatkan biaya-biaya seperti bahan baku, upah TK langsung, dan factory overhead costs. Kemudian, biaya tersebut akan dihitung secara individual untuk setiap unit produknya, sehingga mempermudah perhitungan dan penentuan angka keuntungan.

Cost diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang siap digunakan dinamakan sebagai biaya produksi, sesuai dengan penjelasan Mulyadi (2012:14). Biaya produksi ini mencakup seluruh biaya yang perusahaan keluarkan dalam proses mengolah bahan baku menjadi produk. akhir. Perusahaan akan membebaskan biaya Setelah melalui proses pengolahan, produksi menghasilkan Produk yang telah mencapai tingkat kesiapan untuk dijual di pasar. Cost Production terdiri dari tiga elemen utama, yakni raw material costs, direct labor wages, dan factory overhead costs. Nanti, biaya akan diperhitungkan untuk setiap unit produknya, sehingga lebih mudah untuk menghitung angka keuntungan dan menghitungnya.

Harga adalah nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang mereka tawarkan, atau sebagai kompensasi untuk aktivitas lain Yang diberikan oleh perusahaan sebagai respons terhadap kebutuhan atau keinginan pelanggan. Dalam pandangan Rudianto (2013), harga penjualan merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan, dan hal ini akan berimbas pada perkembangan operasionalnya. Harga penjualan dijelaskan sebagai nilai dalam bentuk jumlah uang atau barang yang dibutuhkan untuk memperoleh sejumlah barang atau jasa tertentu. Penetapan harga jual merupakan bagian dari strategi bisnis. untuk menarik perhatian pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Menurut Mulyadi (2001), Harga penjualan harus mencakup semua biaya produksi dan juga memberikan keuntungan yang memadai. Harga jual yakni sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pembeli sebagai imbalan atas barang atau jasa yang mereka tawarkan ditawarkan, sesuai dengan penjelasan Hansen dan Mowen (2001). Dengan demikian,

Gambar 1. Framework Of Thinking



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Perhitungan Harga Pokok Produksi Perusahaan Agung Bali Collection Bulan Maret 2021

No	Keterangan	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	Benang Pakan	100 Gulung	Rp. 250.000	Rp.25.000.000
2	Benang Lungsi	200 Gulung	Rp.105.000	Rp.21.000.000
3	Prada	10kg	Rp.550.000	Rp.5.500.000
4	Pewarna Alam	15kg	Rp.200.000	Rp.3.000.000
5	Pewarna Tekstil	20kg	Rp.50.000	Rp.1.000.000
6	Upah Penenun	200 Bahan	Rp.350.000	Rp.70.000.000
7	Upah Gulung Benang	200 Bahan	Rp.5.000	Rp.1.000.000
8	Upah Cucuk Mesin	200 Bahan	Rp.5.000	Rp.1.000.000
9	Upah Ikat Benang	200 Bahan	Rp.7.000	Rp.1.400.000
10	Upah Prada	200 Bahan	Rp.150.000	Rp.30.000.000
Jumlah Biaya Produksi				Rp.158.900.000
Jumlah Produksi				200 Kain
Hpp = Jumlah Biaya / Jumlah produksi – 15%				Rp. 675.325

Sumber : Galery Agung Collection, 2023

Proses sederhana yang digunakan Agung Bali Collection untuk menghitung biaya produksi tidak Mendekomposisi semua pengeluaran Agar bisa menetapkan HPP perusahaan, biaya produksi dibagi jumlah produksi dan dikurang 15%.

Perhitungan full costing Galery Agung Bali Collection, peneliti memisahkan dan mengidentifikasi secara terperinci semua biaya yang terkait dengan raw materials, direct labor wages, and factory overhead.

Tabel 2 Biaya Bahan Baku Variabel

Keterangan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
Benang Pakan	100 Gulung	Rp. 250.000	Rp.25.000.000
Benang Lungsi	200 Gulung	Rp.105.000	Rp.21.000.000
Prada	10kg	Rp.550.000	Rp.5.500.000
Pewarna Alam	15kg	Rp.200.000	Rp.3.000.000
Pewarna Tekstil	20kg	Rp.50.000	Rp.1.000.000
Total Biaya Bahan Baku			Rp. 55.500.000

Sumber : Galery Agung Collection, 2023

Menurut tabel di atas, Galery Agung Bali Collection menggunakan bahan-bahan berikut untuk membuat kain tenun endek, benang pakan, benang lungsi, prada, pewarna alam, dan pewarna tekstil. Bahan-bahan ini digunakan untuk proyek bulanan membuat kain tenun endek.

Tabel 3 Biaya Tenaga Kerja Langsung

No	Ket	Jumlah Tenaga Kerja Langsung	Upah/ Kain	Jumlah Produksi/ Orang	Upah Bulanan
1	Upah Penenun	15	Rp.350.000	14	Rp.4.900.000
2	Upah Gulung Benang	4	Rp.5.000	50	Rp.250.000
3	Upah Cucuk Mesin	3	Rp.5.000	67	Rp.335.000
4	Upah Ikat Benang	3	Rp.5.000	67	Rp.335.000
5	Upah Prada	5	Rp.150.000	40	Rp.6.000.000
TOTAL =Rp.73.500.000 + Rp.1.000.000+ Rp.1.005.000+Rp.1.005.000+Rp.30.000.000					Rp.106.510.000

Sumber : Galery Agung Collection, 2023

Galery Agung Bali Collection menggunakan tenaga kerja langsung untuk pekerjaan seperti cucuk mesin, gulung benang, ikat benang, menenun, dan memprada. Setiap bagian dilakukan oleh individu yang berbeda. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp106.510.000

untuk bagian cucuk mesin, gulung benang, dan ikat benang, serta Rp73.500.000 untuk pekerjaan tenun, dan Rp30.000.000 untuk bagian memprada.

Table 4 Perhitungan Biaya Overhead Pabrik

No	Keterangan	Jumlah
1	Biaya Bahan Penolong	Rp.550.000
1	Listrik	Rp.400.000
2	Air	Rp.200.000
3	Telepon	Rp.150.000
4	Internet/Wifi	Rp.1.500.000
Total		Rp.2.800.000

Sumber : Galery Agung Collection, 2023

Biaya bahan penolong, listrik, air, telepon, dan internet adalah biaya overhead variabel, yang dihitung berdasarkan jumlah tagihan yang tercatat. Dengan demikian, biaya overhead variabel total adalah 2.800.000 rupiah.

Table 5 Biaya Overhead Tetap

No	Keterangan	Tahun Perolehan	Jumlah (unit)	Harga Perolehan (Rp)	Umur Ekonomis	Penyusutan Per tahun (Rp)
1	Mesin Tenun	2016	15	Rp.27.500.000	7	Rp.3.929.000
2	Peralatan	2016	3	Rp.5.000.000	7	Rp.715.000
3	Komputer	2016	1	Rp.10.500.000	7	Rp.1.500.000
4	Laptop	2016	2	Rp.6.000.000	7	Rp.858.000
4	Printer	2016	1	Rp.7.500.000	7	Rp.1.072.000
5	Ac	2016	2	Rp.5.000.000	7	Rp.715.000
Total Biaya Overhead Tetap						Rp.8.789.000
Total Biaya Overhead Tetap Perbulan						Rp.732.417

Sumber : Galery Agung Collection, 2023

Table 6 Calculation of Production Prices Full Costing Method

Keterangan	Total Biaya
Biaya Bahan Baku	
Benang pakan	Rp.25.000.000
Benang Lungsi	Rp.21.000.000
Prada	Rp.5.500.000
Pewarna Alam	Rp.3.000.000
Pewarna Tekstil	Rp.1.000.000
Total Biaya Bahan Baku	Rp.55.500.000
Biaya Tenaga Kerja Langsung	
Upah Penenun	Rp.73.500.000
Upah Gulung Benang	Rp.1.000.000
Upah Cucuk Mesin	Rp.1.005.000
Upah Ikat Benang	Rp.1.005.000
Upah Prada	Rp.30.000.000
Total biaya tenaga kerja langsung	Rp.106.510.000
Biaya Overhead Variabel	
Biaya bahan penolong	Rp.550.000
Listrik	Rp.400.000
Air	Rp.200.000
Telepon	Rp.150.000
Internet/Wifi	Rp.1.500.000
Total Biaya Overhead Variabel	Rp.2.800.000
Biaya Overhead Tetap	
Mesin Tenun	Rp.3.929.000
Peralatan	Rp.715.000
Komputer	Rp.1.500.000
Laptop	Rp.858.000
Printer	Rp.1.072.000
Ac	Rp.715.000
Total Biaya Overhead Tetap	Rp.8.789.000 / 12
	Rp.732.417
TOTAL	Rp.165.542.417

Sumber : Galery Agung Collection, 2023

Menurut perhitungan dengan metode full costing, biaya produksi total untuk pembuatan kain tenun endek adalah sebesar Rp. 165.542.417.

Table 7 Perbandingan Perhitungan Biaya Produksi

No	Keterangan	Biaya produksi per bulan(Rp)	Harga pokok produksi/Kain	Keuntungan yang diinginkan	Harga Jual
1	Menurut metode Galery Agung Bali Collection	Rp.158.900.000	Rp. 675.325	30%	Rp.877.922
2	Menurut metode <i>Full Costing</i>	Rp.165.542.417	Rp.827.713	30%	Rp.1.076.027
Selisih harga pokok produksi Metode Agung Bali Collection Dengan Metode Full Costing					Rp.198.105

Sumber : Galery Agung Collection, 2023

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Penerapan *e-system* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat

**Welly Ardi Velyati⁽¹⁾
Ni Wayan Alit Erlina Wati⁽²⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan. Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: wiliardi89499@gmail.com

ABSTRACT

The growth in taxpayers does not account for individual characteristics, such as taxpayers who are aware of their tax duties, as well as tax legislation that taxpayers comprehend. State income will increase with compliance from taxpayers. The purpose of this study is to define what it means for individual taxpayers at the Pratama Denpasar Barat to be aware of, comprehend, and use the tax system. The sample for this study consists of 100 actual individual taxpayers who are registered with the Pratama Denpasar Barat. The data in this study were selected using the slovin approach, which means that the preset criteria had been established. Quantitative data are the kind employed. Both primary and secondary data sources are employed as sources of information. Direct online data collection is done utilizing a Google form. Multiple linear regression analysis, a traditional assumption test, is the method of data analysis employed. Tests of determination coefficient, F, and t. The findings demonstrated that the Pratama Denpasar Barat's individual taxpayers benefited significantly and positively from increased taxpayer knowledge, tax comprehension, and application.

Keyword: *Taxpayers, tax comprehension, tax e-system use, and individual taxpayers are some of the related terms.*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan nasional agar dapat terus berkembang. Kepatuhan di antara wajib pajak akan mendorong peningkatan pungutan pajak negara. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189), pengertian kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak telah merealisasikan penerimaan pajak negara sejumlah Rp1.846,136 triliun per 30 September 2022.

1) Ketepatan pengiriman surat pemberitahuan (SPT), yang mencakup:

2) Tidak ada tunggakan pajak untuk setiap pajak, tidak termasuk tunggakan pajak yang sudah diberikan izin agar melunasi atau menunda pembayaran pajak. Persyaratan ini berlaku untuk keadaan per 31 Desember tahun sebelum penetapan kepatuhan dan tidak terhitung hutang pajak yang belum mencapai tenggang waktu pembayaran.

3) Laporan Keuangan sudah menjalani audit Akuntan Publik maupun lembaga pengawas keuangan pemerintah selama tiga tahun berjalan wajar tanpa terkecuali.

4) Tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran pajak dalam waktu lima tahun sebelumnya berdasarkan penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Kondisi kesadaran wajib pajak keadaan mengetahui, memahami, dan secara bebas menerapkan semua peraturan pajak yang berlaku. Wajib pajak individu harus tunduk seluruh aturan wajib pajak, memanfaatkan sepenuhnya semua opsi hukumnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang relevan dikatakan patuh. Semakin meningkatnya wajib pajak kepatuhan akan wajib pajak juga ikut meningkat. Deskripsi ini memungkinkan perumusan hipotesis berikut:

H1= Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

Karena dapat membantu wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak sangatlah penting. Setelah mempelajari tentang pajak, wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan. Karena diketahui bahwa tingkat kepatuhan orang wajib pajak di Jakarta Selatan berpengaruh secara signifikan dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran perpajakan mereka, penulis mengajukan hipotesis berikut:

H2 = Pemahaman Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

Gagasan *Task Technology Fit* (TTF) adalah menjelaskan bagaimana teknologi memengaruhi seberapa baik orang melakukan tugas. Operasi kerja diharapkan dapat berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan tepat dengan bantuan E-System yang digunakan untuk mendorong efisiensi administrasi dengan menggunakan teknologi internet, bahwa pengenalan sistem pajak elektronik memiliki dampak yang baik kepatuhan wajib pajak pribadi. Rumusan hipotesis berikut dapat dibuat berdasarkan uraian yang diberikan di atas:

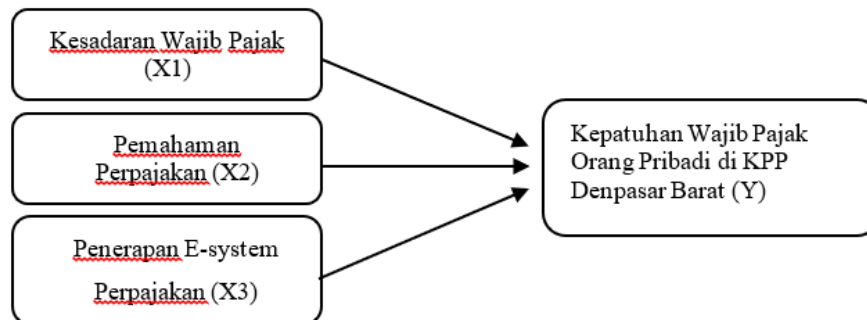
H3 = Penerapan *e – system* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

METODE PENELITIAN

Mengingat sifatnya, jenis penelitian. yang termasuk dalam kategori data kuantitatif, yang menggunakan dasar perhitungan dan angka. Angka-angka yang diperoleh akan digunakan untuk melakukan analisis data lebih lanjut. Informasi yang dihimpun berdasarkan kumpulan jawaban kuesioner wajib pajak pribadi sudah tercantum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat memakai *google form*. Sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan tujuan penelitian digunakan untuk mengumpulkan penelitian. Penelitian ini menggunakan Skala Likert, suatu teknik untuk mengukur sikap dengan apakah responden setuju atau tidak setuju dengan fenomena tertentu, digunakan dalam penelitian ini. Awal analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis, diawali melakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) pada tahap awal pengolahan data.

Gambar 1

Kerangka Berpikir Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat



Metode slovin digunakan sebagai pendekatan pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Wajib pajak orang pribadi yang telah memanfaatkan e-system perpajakan untuk melaporkan kewajibannya dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdaftar di Pratama Denpasar Barat memenuhi kriteria.

Jumlah wajib pajak pribadi yang terdaftar di Pratama Denpasar Barat sebanyak 72.237 wajib pajak digunakan untuk menghitung besar sampel metode slovin, dengan menggunakan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + Ne}$$

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

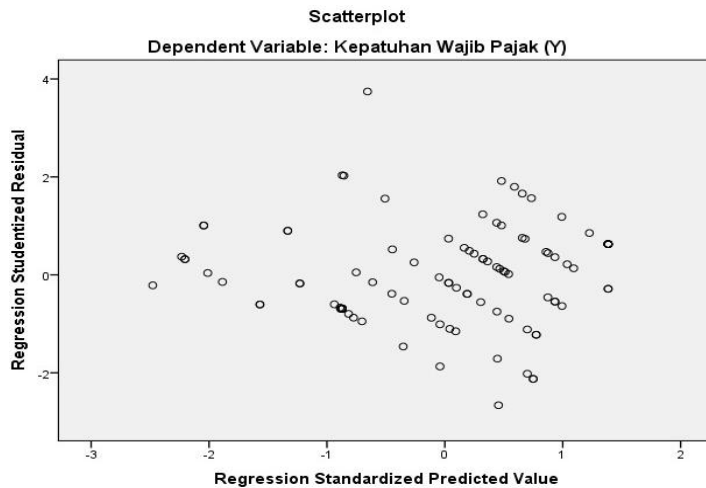
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.251	.051	.359	4.924	.000	.641	1.559
Pemahaman Pajak (X2)	.186	.086	.195	2.161	.033	.416	2.403
Penerapan E-System Pajak (X3)	.091	.022	.391	4.101	.000	.374	2.671

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut tinjauan analisis multikolinieritas memperlihatkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Dengan demikian, variabel bebas model regresi ini tidak menunjukkan multikolinieritas.

Gambar 1



Berdasarkan gambar *scatter plot* dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan data bersifat homogen karena sebaran plot data untuk regresi ini dapat dilihat menyebar *random* dan tidak berkumpul pada satu sudut atau wilayah.

Tabel 6

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	6.537	1.281
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.251	.051
Pemahaman Pajak (X2)	.186	.086
Penerapan E-System Pajak (X3)	.091	.022

Aplikasi SPSS digunakan untuk melakukan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ketiga faktor independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen atau Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun hasil rekapitulasi analisis regresi linier berganda sebagai berikut.

Persamaan regresi linier berganda berikut dapat dibangun dari temuan tabel di atas :

$$Y = 6,537 + 0,251X_1 + 0,186 X_2 + 0,091 X_3$$

- 1) Konstanta variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai nilai sebesar 6,537. Pemahaman Perpajakan (X2), dan Penerapan E- System Perpajakan (X3) sama dengan 0 atau konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat adalah sebesar 6,537 satuan.
- 2) Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai nilai sebesar 0,251 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) satuan Kesadaran Wajib Pajak (X1), maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat akan meningkat 0,251.
- 3) Koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X2) mempunyai nilai sebesar 0,186 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) Pemahaman Perpajakan (X2) maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat akan meningkat sebesar 0,186.
- 4) Koefisien regresi variabel Penerapan *E-System* Perpajakan (X3) mempunyai nilai sebesar 0,091 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) satuan Penerapan *E-System* Perpajakan (X3) maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat akan meningkat sebesar 0,091.

Tabel 7
Rangkuman Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.821 ^a	.673	.663	1.115

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-System Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2)

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, nilai determinasi keseluruhan (Adjusted R Square) atau besarnya pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen dihitung sebesar 0,663 atau 66,30%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor patuh wajib pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dapat dipengaruhi faktor Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan penerapan *e-system* perpajakan. (KPP) Sisanya sebesar 33,70 persen disebabkan oleh variabel lain di luar lingkup penelitian ini.

Tabel 8
Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	245.973	3	81.991	65.957	.000 ^b
	Residual	119.337	96	1.243		
	Total	365.310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-System Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2)

Berdasarkan Perhitungan diperoleh Uji - F sebesar 65,957 dengan tingkat Signifikansi 0,000 dan nilai (b) 5% (0,05), menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara variabel Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) , pemahaman Perpajakan (X2), serta implementasi *e-system* Perpajakan (X3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 9
Hasil Uji Secara Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.102	.000		
<u>Kesadaran Wajib Pajak (X1)</u>	4.924	.000	.641	1.559
<u>Pemahaman Pajak (X2)</u>	2.161	.033	.416	2.403
<u>Penerapan E-System Pajak (X3)</u>	4.101	.000	.374	2.671

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

Hasil perhitungan untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) diperoleh thitung sebesar 4,924 dengan taraf signifikan 0,000 dan nilai 5% (0,05), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap pribadi. kepatuhan wajib pajak pada Pratama Denpasar Barat.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

Nilai terhitung sebesar 2,161 diperoleh dengan tingkat signifikan 0,033 dan nilai () 5% berdasarkan hasil perhitungan pengaruh variabel pemahaman pajak (X2). (0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan Pratama Denpasar Barat yang beragam memiliki pengaruh yang baik dan substansial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sampai batas tertentu.

3. Pengaruh Penerapan *e-system* Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

Didapatkan thitung sebesar 4,101 dengan taraf signifikan 0,000 dan nilai (α) sebesar 5% berdasarkan hasil perhitungan pengaruh variabel penerapan e-system perpajakan (X3). (0,05). Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan *e - system* perpajakan memiliki dampak yang cukup besar dan menguntungkan kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian ini memungkinkan kesimpulan berikut untuk dibuat.

1. Kepatuhan wajib pajak pribadi dipengaruhi signifikan oleh pengetahuan wajib pajak. Dengan kata lain Denpasar Barat akan melihat peningkatan kepatuhan.Wajib.Pajak.Orang.Pribadi. semakin.besar.penetahuan.wajib.pajak.
2. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat pengetahuan perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak \ pribadi.berpengaruh baik dan.signifikan.terhadap.beberapa faktor. Hal.ini..menunjukkan..bahwa..kepatuhan..wajib..pajak..orang pribadi pada Denpasar Barat semakin tinggi perpajakannya semakin baik.
3. Di Pratama Denpasar Barat penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh yang menguntungkan dan substansial antar faktor. Dengan kata lain, Denpasar Barat akan semakin terlihat kepatuhan.wajib.pajak.orang.pribadi.semakin baik.implementasi *e - system* pajaknya.

Kesimpulan dan rekomendasi berikut dapat dibuat sehubungan dengan temuan penelitian ini:

Berikut saran untuk penelitian ini yang dapat dilakukan berdasarkan temuan kesimpulan pada pembahasan di atas:

1. Sebagai bagian dari peningkatan kesadaran wajib pajak, disarankan agar masyarakat mendaftar dan membayar pajaknya tepat waktu dan tanpa paksaan.
2. Wajib Pajak harus memahami peraturan perpajakan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pajak.
3. Wajib Pajak harus mendaftarkan NPWP, membayar pajak, dan melaporkan SPT secara online menggunakan e-system sebagai bagian dari implementasi e-system perpajakan.
4. Untuk memastikan bahwa Wajib Pajak patuh, disarankan agar secara konsisten melengkapi dan melaporkan SPT tepat waktu sebelum batas waktu berlalu.
5. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat aspek lainnya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pradana, Rieza Adhitya. (2019). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak () Pratama Kudus. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Skripsi.

Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak () Pratama Singaraja. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7(1).

Rahayu, Siti Kurnia (2020), Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.

Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2011). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada Pratama Bandung" X"). Jurnal Akuntansi, 1(2), p-119.

Saida Said & Aslinda. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Pratama Makassar Selatan). ATESTASI Vol. 1 No. 1 September 2018.

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyorini, M., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). In Prosiding Seminar Nasional & Internasional (Vol. 1).

Ulyani, T. A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan E-System Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). Jurnal Akuntansi, 1(2).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Analisis Fenomena *January Effect*
(Studi Pada Saham Indeks IDX30 Dari Tahun 2020 – 2023)

Putu Nova Artha Nugraha⁽¹⁾

I Putu Fery Karyada⁽²⁾

I Made Endra Lesmana P⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: arta98885@gmail.com

ABSTRACT

Observation research at IDX30 index equities experience the January Effect from 2020 to 2023. These results are founded on an examination of the Indonesian stock market, specifically the IDX30 index, whose population consists of 45 companies and sample size is 17. Participants were selected for the research using a sampling strategy based on predetermined criteria. As data, normalized abnormal returns from months other than January (February - December). To evaluate if January's average anomalous returns differ significantly from other months, a t-test was performed on independent samples. According to the collected data, the January Effect does not exist because January and other months do not exhibit statistically significant abnormal returns. It is recommended that investors in the Indonesian stock market look beyond the January Effect phenomenon and consider macroeconomic and microeconomic growth as well as other fundamental factors.

Keywords : *IDX30, January Effect*

PENDAHULUAN

Anomali di pasar modal adalah salah satu sumber ketidakefisienan, di antara banyak sumber lainnya. Banyak peristiwa terjadi yang bertentangan dengan konsep pasar yang efisien. Perbedaan di pasar modal yang dapat dimanfaatkan investor untuk menghasilkan imbal hasil yang tidak normal dikenal sebagai anomali. (*abnormal return*) (Alliyah dan Ekawaty, 2017).

Efek Januari adalah fenomena musiman di mana arus balik memiliki pola yang menguntungkan sepanjang bulan Januari. (Saputer & Sukirno, 2014:163). January effect menggambarkan fenomena bahwa Januari menunjukkan **laba** yang tidak proporsional dikomper dengan **bulan** lainnya (Kartikasari, 2016).

Nursanti (2015) menyebutkan perusahaan akan melakukan aktivitas baru yang dapat berdampak pada harga saham. Ketika investor melihat respon ini, maka investor akan memikirkan kembali strategi investasinya, yang mungkin akan menyebabkan harga saham yang diminati oleh investor tersebut menjadi lebih tinggi.

Dengan strategi ini, investor dapat mengharapkan keuntungan yang besar dari pembelian saham perdana mereka. Volume transaksi saham di Indonesia telah meningkat secara dramatis ketika kita memasuki dua bulan terakhir tahun ini dan bulan pertama tahun yang baru (terutama dari awal 2021 hingga akhir 2021).

Dimulai pada Desember 2020 dan berlanjut hingga Desember 2021, volume transaksi bulanan meningkat dari rata-rata 100 juta hingga 200 juta saham menjadi 400 juta hingga 500 juta saham. Aktifnya permintaan dan penawaran saham yang disebabkan oleh peningkatan volume perdagangan membuat fluktuasi harga saham menjadi sangat likuid sehingga sangat responsif terhadap sinyal atau informasi yang didapat oleh investor. Kondisi pasar modal Indonesia saat ini tidak sama dengan kondisi tahun terdahulu, karena fenomena yang disebutkan di atas. Penelitian ini akan meneliti harga saham pada indeks IDX30 dari tahun 2020 hingga 2022 untuk melihat apakah kejadian January Effect yang berlangsung pada periode tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Anomali Pasar Modal

Dalam penelitian Cederburga dan O'Doherty (2015) mendefinisikan anomali sebagai pola rata-rata return saham yang menyimpang dari pola standar perilaku harga aset. Anomali, seperti yang didefinisikan oleh Tandelilin (2010), adalah penyimpangan dari norma atau kejadian tak terduga yang memberikan potensi keuntungan yang tidak biasa bagi investor. Secara umum, ketika fenomena anomali pasar modal ini muncul, maka akan muncul abnormal return dari saham-saham yang menjadi fokus pasar. Dalam literatur keuangan, anomali

pasar dapat dibagi menjadi empat kategori, seperti yang dijelaskan oleh Alteza (2007).

January Effect

Efek bulan-fakta bahwa setiap bulan memiliki jumlah pengembalian rata-rata yang berbeda-adalah salah satu keanehan musiman yang paling banyak dibahas (Norvaisiene, Stankeviciene, dan Lakstutiene, 2015). Pengembalian yang sangat tinggi di bulan Januari dikenal sebagai efek Januari. (Yunita dan Rahyuda, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan kuantitatif, penyajian pengolahan data secara bertahan di tes Kolmogorov Smirnov, dilanjutkan pembuktian dengan tes perbedaan data uji berpasangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Normality Check

Tabel 1
Normality Check

Uji	January	Non January
K-S	0,932	1,415
Sig	0,350	0,036
Keterangan	Normal	Tidak normal

Periode january ditampilkan $0,350 > 0,05$, menampilkkan nilai Non-January $0,036 < 0,05$ dapat ditafsirkan tidak normal. Untuk selanjutnya pengolah data dilakukan menggunakan analisis non parametrik, karena syarat pengujian parametrik tidak terpenuhi (salah satu variabel tidak berdistribusi normal) (Sugiyono, 2019).

Pengujian Hipotesis

Dalam memahami data yang diobservasi pada laba *abnormal* pada Januari dengan bukan januari digunakan uji non parametrik (uji Wilcoxon), berikut ini.

Tabel 2
Pengecekan Wilcoxon Test

Uji	Non January - January
Z	-0,028
Sig	0,978

Tabel 2 memberikan petunjuk bahwa nilai Wilcoxon ditampilkan $0,978 > 0,05$ memberikan isyarat tidak signifikan, sehingga hipotesis ditolak dengan kata lain, *un-occur* of fenomena *January Effect* pada indeks saham IDX30 dari tahun 2020 hingga data pengamatan 2023.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pasar saham, seperti pandemi COVID-19 dan perubahan politik global, yang mungkin mempengaruhi Januari efek. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, investor mungkin lebih berhati-hati dalam menginvestasikan uang mereka, dan mungkin tidak terjadi tren kenaikan yang kuat pada bulan Januari.

Efek Januari menunjukkan efisiensi pasar yang tidak memadai. Hal ini dikarenakan harga saham Bursa Efek Indonesia mencerminkan semua pergerakan harga saham sebelumnya, sehingga tidak ada investor, baik individu maupun institusi, yang menerima lebih banyak informasi dan menggunakan informasi tersebut untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi secara rata-rata pada bulan Januari, yang dapat menyebabkan terjadinya *January effect* (Yunita, 2019). Tidak adanya *January Effect* menunjukkan bahwa saham-saham indeks IDX30 memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan berkinerja baik, sehingga memberikan imbal hasil yang baik bagi para investor. Karena perbedaan budaya, liburan Natal dan Tahun Baru di Amerika dan negara-negara Barat lainnya lebih panjang daripada di Indonesia, yang mempengaruhi imbal hasil investor (Yunita, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan Yunita (2019), Wiarta (2020), Saofiah, R., Abidin, Z., & Oktaryani, G. S. (2019)

Audina, M., & Laturette, K. (2017). *January Effect* pada sektor property, real estate, dan building Construction Di Bei. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 1337-1348.

Brigham and Ehrhardt: 2005 *Financial Management Theory And Practice*. Jakarta. Salemba Empat.

Cederburg, S., & O'Doherty, M. S. (2015). *Asset-pricing anomalies at the firm level*. *Journal of Econometrics*, 186(1), 113-128.

Danusatrio, D., & Sulasmiyati, S. (2018). Analisis Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Setelah Penutupan Program Tax Amnesty (Studi pada Saham Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Ditunjuk sebagai Gateway dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty). *Jurnal Administrasi Bisnis*.

Dewi, A. T., & Rahyuda, H. H. (2014). *Studi empiris abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman right issue pada perusahaan go public di bursa efek indonesia* (Doctoral dissertation, Udayana University).

Diakses pada 29 Desember 2021, dari <https://finance.yahoo.com/chart/%5EJKSE>

Diakses pada 28 Desember 2021, dari <https://www.idx.co.id/produk/indeks/>

Diakses pada 19 Desember 2022, dari <https://www.bps.go.id>

Fadlilah, A. (2019). *Pengujian Fenomena Anomali Pasar: January Effect, The Day Of The Week Effect, Dan Rogalski Effect Terhadap Return Saham (Studi empiris pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Fahmi., Irham & Hadi, Y.L. 2009. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Teori dan Soal Jawab. Bandung: Penerbit Erlangga

Fakhrudin, M., dan M. Sopian H. 2001. *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*. Buku Satu. Jakarta: Gramedia.

Herlies, D. A., & Nazar, M. R. (2021). *Analisis January Effect Pada Saham Perusahaan Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019*. *eProceedings of Management*, 8(1).

Husnan, Suad. (1998). *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sujana, I. N. (2017). Pasar Modal yang Efisien. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 33-40.
- Tandelilin, E., (2010), *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI)
- Tandelilin, Eduardus. (2017). *Pasar Modal: Manajemen Portofolio & Investasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Trisnadi, M. M., Sedana, P., & Bagus, I. (2016). *Pengujian Anomali Pasar: Day of The Week Effect pada Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Wiarta, I., Daniyanti, D., & Etriya, E. (2020). Anomali *return* pada pasar modal Indonesia (Studi pada bank BUMN di Bursa Efek Indonesia). *Journal Development*, 8(2), 152-157.
- Xiao, B. (2016). *The Monthly Effect and The Day of The Week Effect in The American Stock Market*. International Journal of Financial Research, 7(2), 11-15
- Yunita, N.K.E dan Rahyuda, H 2019, 'Pengujian Anomali Pasar (January Effect) di Bursa Efek Indonesia', Jurnal Manajemen Unud, vol. 6, no. 7, pp 3514-3523
- Zacks, M. (2012). *The Little Book of Stock Market Profits*. Canada: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Pengaruh Konsep *Tri Kaya Parisudha* Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi

Ni Kadek Yuni Candra Dewi⁽¹⁾
Ni Putu Ayu Kusumawati⁽²⁾
Rai Dwi Andayani. W.⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jalan Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: nikdyunicandradewi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of Tri Kaya Parisudha and the competence of human resources that influence the occurrence of accounting fraud tendencies, where there is also an internal control system that has a direct effect as moderation. This research was conducted at the Village Credit Institution (LPD) in Kerambitan District using a questionnaire and involving 75 respondents. The data analysis method used is SEM PLS with the help of Smart PLS software. This study showed that (1) concept of tri kaya parisudha had a negative and significant impact on the tendencies of accounting fraud.(2) The competence of human resources had a negative and significant impact on the tendencies of accounting fraud.(3) The internal control system is able to moderate (strengthen) the relationship between Tri Kaya Parisudha and the tendency of accounting fraud.(4) The internal control system is capable of moderating (weakening) the relationship between human resource competence and the tendencies of accounting fraud.

Keywords: *Tri Kaya Parisudha Concept, Human Resource Competence, Internal Control System, Accounting Fraud Tendency*

PENDAHULUAN

Kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi adalah suatu tindakan penipuan atau kesalahan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan pihak lain. Di Indonesia kasus kecurangan terjadi hampir di setiap daerah. Lembaga keuangan merupakan organisasi atau lembaga yang memiliki potensi kecurangan (*fraud*) paling besar, karena transaksi keuangan cenderung lebih banyak terjadi di lembaga keuangan, termasuk salah satu lembaga keuangan yang berada di tingkat pedesaan khususnya di Provinsi Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Data LPD tahun 2021 menunjukkan jumlah LPD yang tidak sehat di Kabupaten Tabanan cukup tinggi yaitu berjumlah 18 LPD, dimana Kecamatan Kerambitan menjadi salah satu kecamatan yang memiliki LPD tidak sehat terbanyak dengan jumlah 5 LPD. Tidak sehatnya

Lembaga Perkreditan Desa tidak terlepas dari penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal LPD untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*).

Kecurangan dapat disebabkan oleh faktor mental atau psikologis yang rendah sehingga individu memikirkan jalan pintas untuk mencapai sesuatu, dimana ini datang dari nilai-nilai yang dianut tiap individu (Munidewi, 2017) sehingga penggunaan konsep religiusitas dalam akuntansi terutamanya dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan. Rasionalisasi tumbuh dari dalam diri manusia, yang kemudian mendorongnya untuk melakukan tindakan penipuan atau kecurangan jika perilaku etis berdasarkan nilai-nilai agama tidak tertanam dalam dirinya. Aspek nilai spiritual yang mendasari etika perilaku pegawai dalam harmonisasi lembaga perkreditan desa di Bali salah satunya adalah nilai-nilai yang tertanam dalam *Tri Kaya Parisudha*. Perilaku etis pegawai berdasarkan nilai-nilai spiritual Hindu penting dan layak untuk dikaji karena sebagian besar peneliti sebelumnya lebih mengutamakan aspek manajerial tanpa memperhatikan aspek moral yang dilandasi nilai-nilai spiritual, padahal pada kenyataannya aspek manajerial saja tidak cukup jika masih ada keinginan dalam diri manusia untuk melakukan tindakan kecurangan.

Selain nilai-nilai spiritual yang tertanam di dalam diri tiap individu, kemampuan yang dimiliki juga memegang peranan yang penting. Wolfe dan Hermason (2004) menyatakan bahwa kompetensi atau kemampuan seseorang di dalam organisasi yang tidak dimiliki oleh orang lain akan menjadi kesempatan atau peluang untuk melakukan tindak korupsi. Di sisi lain, Ruankew (2016) menyatakan bahwa bersama dengan teori *fraud triangle*, kompetensi juga dapat memberikan kerangka kerja berharga yang dapat membantu pimpinan dalam membuat keputusan untuk meminimalkan korupsi.

Dalam mengatasi problema kecurangan, juga diperlukan pengendalian internal dalam sebuah lembaga atau instansi. Sistem pengendalian internal bisa menjadi alat ukur yang efektif dalam mengantisipasi penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya kecenderungan kecurangan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori atribusi berusaha menerangkan perilaku seseorang. Teori ini menjabarkan bahwa perilaku individu akan disebabkan oleh kombinasi kekuatan internal dan kekuatan eksternal yang disebut *dispositional attributions* dan *situasional attributions*. Perilaku karena faktor internal merupakan perilaku yang berada dalam kontrol individu itu sendiri, sehingga nilai-nilai yang tertanam dalam diri tiap individu dan kompetensi yang dimilikinya sangat berkaitan dengan

kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Sedangkan perilaku karena faktor eksternal disebabkan karena pengaruh dari luar, seperti lingkungan, tekanan, peluang dan faktor lain, dimana berdasarkan teori *fraud triangle* peluang terjadinya tindakan kecurangan dalam perusahaan dapat terjadi karena lemahnya Sistem Pengendalian internal.

Tri Kaya Parisudha ialah tiga perbuatan suci dalam ajaran Agama Hindu yang mengajarkan dengan pola pikir yang baik akan menjadi dasar ucapan yang baik, yang kemudian menciptakan perilaku yang baik sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum dan agama termasuk tindak kecurangan akuntansi. Sehingga hipotesa dalam penelitian ini yaitu:

H₁: Konsep *Tri Kaya Parisudha* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam melakukan tindakan kecurangan, apabila seseorang memiliki kompetensi berarti orang tersebut memiliki kekuasaan atau kewenangan yang dapat disalahgunakan. Sehingga hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi

Teori atribusi menerangkan penyebab internal perilaku individual dalam diri seseorang dapat memicu terjadinya suatu tindakan kecurangan, sehingga konsep *Tri Kaya Parisuda* yang mengajarkan perbuatan baik (berpikir, berkata dan berbuat) sesuai dengan ajaran agama dapat mencegah pelanggaran hukum dan agama. Dalam teori *fraud triangle*, peluang melakukan tindak kecurangan dapat disebabkan oleh lemahnya internal kontrol sehingga diperlukan sistem pengendalian internal. Sehingga hipotesa dalam penelitian ini, sebagai berikut:

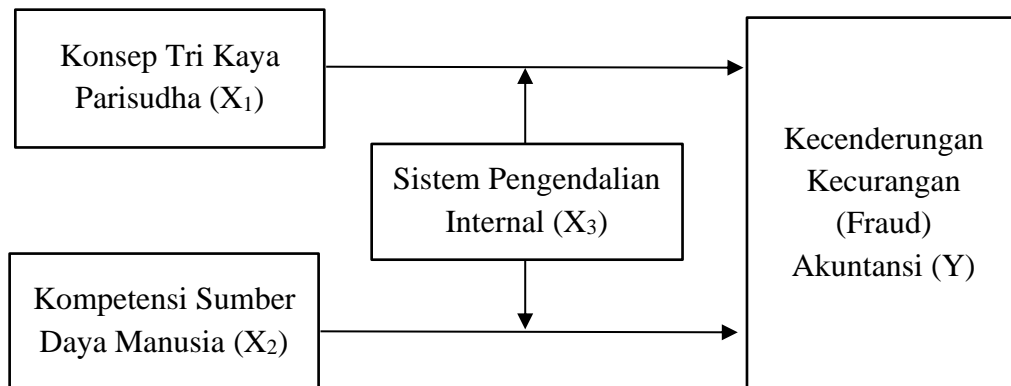
H₃: Sistem pengendalian internal dapat memoderasi (memperkuat) hubungan antara konsep *tri kaya Parisuda* dengan kecenderungan kecurangan(*fraud*) akuntansi.

Kompetensi yang dimiliki seseorang dapat menjadi peluang melakukan kecurangan. Berdasarkan teori *fraud triangle*, peluang melakukan kecurangan dapat disebabkan oleh lemahnya internal kontrol perusahaan sehingga perlu ada sistem pengendalian internal sebagai alat ukur yang baik dalam memperkirakan penyimpangan yang akan terjadi sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya kecenderungan kecurangan. Sehingga hipotesa dalam penelitian ini, sebagai berikut:

H₄: Sistem pengendalian internal dapat memoderasi (melemahkan) pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

METODE PENELITIAN

Adapun kerangka berpikir yang peneliti gunakan sebagai berikut:



Sumber: Kerangka Berpikir Peneliti (2023)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan LPD di Kecamatan Kerambitan yang berjumlah 25 LPD dengan total karyawan sebanyak 128 orang dan ditentukan sampel sesuai kriteria sebanyak 75 responden yang terdiri dari pimpinan, bendahara dan sekretaris di masing-masing LPD. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada objek penelitian. Data sekunder terdiri dari data pegawai dan LPD. Metode analisis data yang digunakan adalah SEM PLS dengan bantuan software Smart PLS yang terdiri dari uji statistic deskriptif, uji pengukuran (*outer model*), dan uji model struktural (*inner model*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel Konsep *Tri Kaya Parisudha* tergolong sangat tinggi dengan nilai rerata indikator sebesar 4,38. Variabe Kompetensi Sumber Daya Manusia tergolong sangat tinggi dengan nilai rerata indikator sebesar 4,37, Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi tergolong sangat rendah dengan nilai rerata indikatornya 1,55 dan variabel sistem pengendalian internal tergolong sangat tinggi dengan nilai rerata indikatornya sebesar 4,48.

Adapun karakteritik responden ialah: 1) responden dalam penelitian ini dominan berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 responden (52%). 2) responden dalam penelitian ini dominan memiliki pendidikan terakhir SLTA yaitu berjumlah 55 responden (73,3%), 3) responden dalam

penelitian ini dominan berusia >45 tahun yaitu sebanyak 59 responden (78,7%), dan 4) responden dalam penelitian ini paling banyak karyawan dengan masa kerja selama >10 tahun sebanyak 58 responden (77,3%).

Hasil perhitungan mengenai nilai *outer loading* berdasarkan kriteria *convergent validity*, menunjukkan ada indikator yang tidak memenuhi syarat valid dengan nilai *outer loading* kurang dari 0,70 sehingga harus dihapus dari model. Adapun indikator yang dikeluarkan tersebut adalah indikator TKP.1, TKP.2 pada variabel *Tri Kaya Parisudha*. Indikator KKA.2, KKA.4 pada variabel kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan *Discriminant Validity*, seluruh kontruk memiliki nilai AVE >0,50 dan nilai \sqrt{AVE} tiap kontruk besarnya antara 0,829 s.d 1,000 lebih tinggi dari angka korelasi yang besarnya antara -0,126 s.d 0,813 sehingga dikatakan valid. Kemudian nilai *Cronbach Alpha* dan *composite reliability* tiap kontruk menghasilkan nilai atau skor lebih tinggi dari 0,60 sehingga dapat dikatakan konsisten atau reliabel.

Evaluasi model struktural dengan *R-square* menunjukkan bahwa nilai *R-square* kecenderungan kecurangan akuntansi 0,670 berdasarkan kriteria Chin (Ghozali,2021), dimana model tersebut tergolong model yang kuat, artinya adalah variasi *Tri Kaya Parisudha*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sebesar 67% terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi.

Evaluasi model struktural dengan *F-square* menunjukkan bahwa variabe *Tri Kaya Parisudha* memiliki pengaruh yang besar dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang kecil terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi.

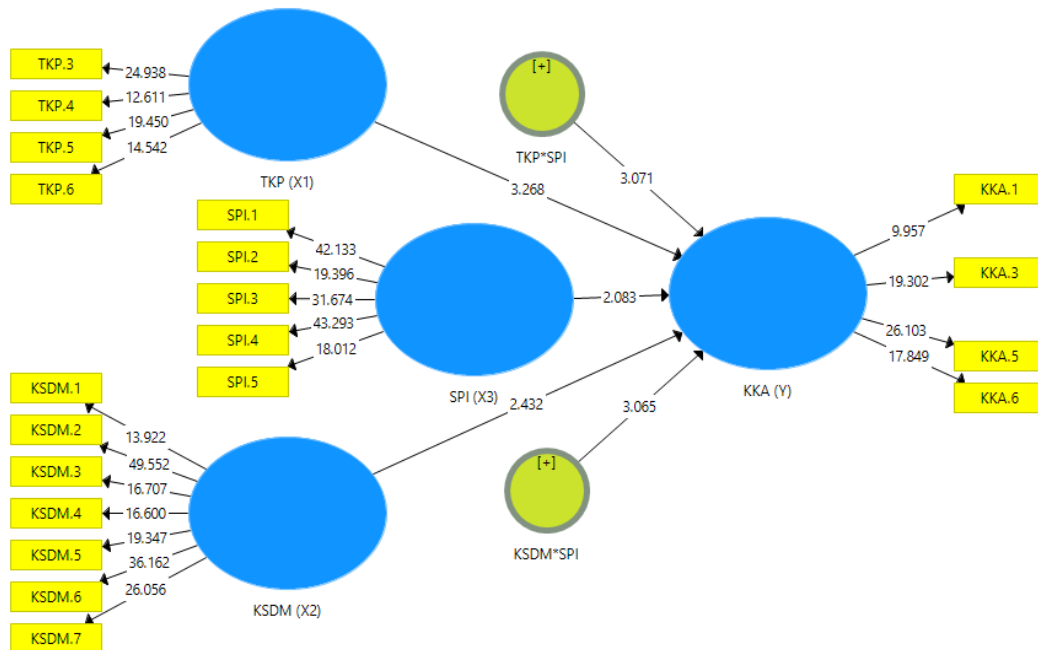
Selanjutnya pengujian hipotesis menggunakan *Path Analysis* yang diharapkan dapat menolak H0 atau memiliki nilai sig < 0,05 (atau nilai t statistika > 1,96 dengan taraf signifikan 0,05). Pada Tabel 1 disajikan hasil statistik dengan *Path Analysis*

Tabel 1 Path Analysis dan Pengujian Statistik

	Sampel Asli (O)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values	Keterangan
TKP (X1) -> KKA (Y)	-0.320	0.098	3.268	0.001	Signifikan
TKP*SPI -> KKA (Y)	0.312	0.102	3.071	0.002	Signifikan
KSDM (X2) -> KKA (Y)	-0.277	0.114	2.432	0.015	Signifikan
KSDM*SPI -> KKA (Y)	-0.238	0.078	3.065	0.002	Signifikan
SPI (X3) -> KKA (Y)	-0.304	0.146	2.083	0.038	Signifikan

Sumber: Data Diolah (2023)

Sehingga dapat digambarkan model bootstrapping dalam penelitian ini seperti berikut:



Gambar 1: Model Bootstrapping

Sumber: Data Diolah (2023)

Dapat dilihat dalam tabel 1 bahwa konsep *Tri Kaya Parisuda* memiliki pengaruh yang negatif sebesar -0,320 terhadap Kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dan memiliki hubungan signifikans pada taraf 0,05 dengan nilai t statistika sebesar 3,268.

Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh negatif sebesar -0,277 terhadap kecederungan Kecurangan (*fraud*) akuntansi dan hubungan ini signifikan pada taraf 0,05 dengan nilai t statistika sebesar 2,432.

Sistem pengendalian internal mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara konsep *Tri Kaya Parisuda* dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi sebesar 0,312 dan hubungannya signifikan pada taraf 0,05, dimana nilai t statistiknya sebesar 3,071.

Sistem pengendalian internal mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi sebesar -0,238 dan hubungannya signifikan pada taraf 0,05, dimana nilai t statistiknya sebesar 3,065.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh konsep *Tri Kaya Parisuda* terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) Akuntansi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa konsep *tri kaya Parisuda* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Dengan demikian, hipotesa pertama dalam penelitian ini dapat diterima.

Dispositional attributions dalam teori atribusi merupakan penyebab internal yang mengacu pada perilaku individual dalam diri yang memicu seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang berada dibawah kendali individu itu sendiri termasuk melakukan kecurangan. Sehingga penerapan Konsep *Tri kaya Parisudha* yang baik di dalam diri tiap individu dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif dan signifikans terhadap kecenderungan kecurangan(*fraud*) akuntansi. Dengan demikian hipotesa kedua dalam penelitian ini ditolak.

Hal ini dikarenakan persepsi responden kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kinerja yang baik, karena seseorang yang tidak mempunyai kompetensi untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan akan berdampak pada kinerja yang buruk dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan termasuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang rendah di dalam perusahaan dapat menyebabkan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan sehingga meningkatkan resiko kecurangan.

3. Pengaruh konsep *Tri Kaya parisuda* Terhadap kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Dengan Sistem pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa sistem pengendalian iinternal mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antara Konsep *Tri Kaya Parisudha* dengan Kecenderungan kecurangan (*Fraud*) Akuntansi. Dengan demikian hipotesa ketiga dalam penelitian ini dapat diterima.

Kecurangan dapat disebabkan oleh faktor psikologis yang rendah sehingga individu memikirkan jalan pintas untuk mencapai sesuatu, dimana ini datang dari nilai-nilai yang dianut tiap individu, sehingga penerapan konsep *Tri Kaya Parisudha* yang baik di dalam diri tiapindividu dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Konsep *Tri Kaya Parisuda* memiliki pengaruh yang paling dominan dalam penelitian ini. Meskipun demikian, peluang kecurangan

masih dapat terjadi karena lemahnya internalkontrol suatu perusahaan, sehingga perlu diperkuat dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik untuk meminimalkan kecurangan.

4. Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud) akuntansi Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa sistem pengendalian intern mampu memoderasi dan memperlemah hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi. Dengan demikian hipotesa keempat dalam penelitian ini dapat diterima.

Ketika sumber daya manusia sudah memiliki kompetensi yang baik, maka kecurangan (*fraud*) dapat diminimalkan. Namun kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi bisa saja masih terjadi jika kompetensi sumber daya manusia yang tinggi tidak digunakan semestinya, sehingga diperlukan adanya sistem pengendalian internal yang kuat untuk mengontrol hal tersebut. Ini berarti bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan dapat mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi, namun jika tidak diawasi dengan baik atau system pengendalian internal lemah maka kecurangan Akuntansi akan semakin tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah:

1. Konsep *tri kaya parisudha* memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan Kecurangan (*fraud*) akuntansi.
2. Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
3. Sistem pengendalian internal mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antara konsep *tri Kaya Parisudha* dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
4. Sistem pengendalian internal mampu memoderasi dan melemahkan hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kecenderungan Kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji aspek serupa, dianjurkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempergunakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan menggunakan sampel yang lebih luas agar tingkat generalisasi lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Adnyana, P. G. S. P. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Bystander Effect terhadap Kecenderungan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana BUMDes (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klungkung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Dan Humanika*, 12(2), 404–412.
- Atmadja, A. T., dan Saputra, A. K. 2017. *Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7-16.
- Bali Express. 2021. 47 LPD di Tabanan Macet Total. <https://baliexpress.jawapos.com/bisnis/03/03/2021/47-lpd-di-tabanan-macet-total> (diakses pada 18 April 2022)
- BaliPolitika.com. 2021. Tabanan Pimpin Jumlah LPD Bangkrut di Bali. <https://www.balipolitika.com/tabanan-pimpin-jumlah-lpd-bangkrut-di-bali/> (diakses pada 20 April 2022)
- Bali Post. 2022. Kembali, Kejari Tabanan Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi LPD Belumbang. <https://www.balipost.com/news/2022/02/03/248430/Kembali,Kejari-Tabanan-Tetapkan-Tersangka...html> (diakses 26 Mei 2022)
- Ghozali, Imam., (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha, 2008, *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*, Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- IAPI. 2011. *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Kariani, Ni Made Dwi. 2019. Pengaruh Religiusitas dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Fakultas Ekonomi Bisnis & Pariwisata. Akuntansi. Universitas Hindu Indonesia: Denpasar
- Karyono, 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: C.V Andi
- LP LPD Kabupaten Tabanan (2021)
- Munidewi, I. A. B. (2017). Akuntabilitas dalam perspektif ajaran karma phala sebagai pedoman untuk membangun karakter auditor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 54-64.
- Njonjie, P., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 10(2), 79. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24955>

- Novi, P., Dewi, A., & Atmadja, A. T. (2021). Pengaruh Konsep Tri Kaya Parisudha , Keefektifan Pengendalian Internal , Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Karangasem. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 2, 852–864.
- Oktavia, T. A. (2018). Determinan Kecurangan Berbasis Diamond Fraud dan Perilaku tidak Etis sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lumajang. *Tesis : Universitas Jember*. 9–23.
- Rahayu, Nelvin P, Diyah Probowulan, A. M. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Kompensasi dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 212–222.
- Ruankew, Thanasak Ph.D. 2016. Beyond the Fraud Diamond. International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER). Colorado State University-Global Campus. Colorado, United States.
- Sari, S. P., Kartika, & Prasetyo, W. (2020). Pengaruh Fraud Diamond Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 41.
- Savitri, A. A., Sujana, E., & Prayudi, M. A. (2019). Pengaruh Budaya Tri Kaya Parisudha, Proteksi Awig-Awig , Dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Akuntansi S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1)
- Spencer and Spencer. (2008). *Competence At Work: Model For Superior Peformance*. John Wiley And Sons, Inc.
- Sugianingrat, Ida Ayu Putu Widani, et all. (2017). Minimizing Fraudulent Behavior through Trikaya Parisudha-based leadership and Good Corporate Governance. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(1), 52–63.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhardana, K.M. 2007. *Tri Kaya Parisudha Bahan Kajian Untuk Berpikir Baik Berkata Baik dan Berbuat Baik*. Surabaya: Paramitha
- Suryandari, N. N. A., Endiana, I. D. M., Susandya, A. A. B. A., & Apriada, K. (2021). The Role of Employee Ethical Behavior and Organizational Culture in Preventing Fraud. *PalArch's Journal of Archeology of Egypt*, 18(8), 916–929.
- Wirakusuma, I. G. B., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi dan Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1545. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p26>

Wolfe, David T. Dana R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond: Considering The Four Elements of Fraud. CPA Journal. 74.12: 38-42. The Fraud Diamond: Considering The Four Elements of Fraud. The New York State Society of CPAs.

Zimbelman et al. 2014. Akuntansi Forensik. Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat

Pengaruh *Peronal Cost*, Komitmen Organisasi, Lingkungan Etika, Dan Intensitas Moral Terhadap Intensi Melakukan Tindakan *Whistleblowing* Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Blahbatuh

**I Gusti Ayu Diah Adnyaswari⁽¹⁾
 Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati⁽²⁾
 Ni Wayan Yuniasih⁽³⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jalan Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
 e-mail: adnyaswarid@gmail.com

ABSTRACT

Whistleblowing is an act of reporting by reporters who are members of an organization or outside membership of an organization regarding acts of violation, illegal actions that aim to uncover a fraud that exists in the organization. Whistleblowing is influenced by many factors such as personal costs, organizational commitment, ethical environment and moral intensity. The objective of this investigation is to establish how personal cost, ethical environment, organizational commitment, and moral intensity influence an individual's inclination to blow the whistle.

In this research, 168 participants who worked for Village Credit Institutions located in the Blahbatuh District were selected as the study population. Various statistical methods, including multiple linear regression, t-test, F-test, and the coefficient of determination, were utilized to analyze the collected data. The research findings indicate that the inclination to blow the whistle is influenced by various factors. Personal cost was found to have a significant negative impact on the willingness to take whistleblowing action, whereas organizational commitment, ethical environment, and moral intensity were found to have significant positive effects on the intention to take such action. The magnitude of the influence of the independent variables on the intention to take whistleblowing action is 54.5%. Suggestions that can be given by researchers are Village Credit Institutions (LPD) throughout the Blahbatuh District in increasing the intention to take whistleblowing actions, they should always provide protection to employees who report fraudulent acts, guide employees so that later they have good ethics and morals. As well as building employee organizational commitment.

Keywords: *Personal Cost, Organizational Commitment, Ethical Environment, Moral Intensity, Intention to Take Whistleblowing Actions*

PENDAHULUAN

Sebuah lembaga perkreditan desa beroperasi di seluruh desa adat atai desa pekraman di provinsi Bali. LPD didirikan terutama untuk mendukung dan menjalankan program dari pemerintah dalam upaya pengembangan ekonomi desa dengan berusaha mendidik masyarakat untuk membiasakan menabung dan memberikan kredit untuk mendukung usaha kecil masyarakat. Saat ini kemajuan ekonomi desa sangat jelas terlihat dengan adanya LPD, namun meskipun terlihat memberikan efek yang positif, banyak LPD di Bali yang bangkrut atau bangkrut dengan baik. Hal ini terlihat dari dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa beberapa LPD bermasalah bahkan bangkrut. Menurut Sujana (2018), Faktor LPD mengalami kebangkrutan disebabkan praktik korupsi yang banyak terjadi.

Merdikawati (2012) menyatakan, laporan merupakan upaya dalam menghindari kesalahan akuntansi dan mengembalikan kepercayaan publik. Pelaporan merupakan tindakan melaporkan kesalahan, perilaku ilegal atau tidak etis di dalam organisasi atau kepada pihak eksternal oleh anggota organisasi yang aktif dan tidak aktif. Sesuai dengan "Panduan Pelaporan dan Pelaporan" KNKG, pengungkapan kegiatan yang tidak sesuai dengan kode etik, ilegal atau kegiatan lain yang dapat merugikan seluruh kompeten dari organisasi tersebut baik itu karyawannya ataupun organisasinya.

Dilansir dari Bali Post, kasus kecurangan yang menyita perhatian seluruh masyarakat Bali khususnya kota Gianyar adalah terjadinya penggelapan dana debitur dan deposito nasabah yang pelaku utamanya adalah seorang ibu beranak 2 yang berkedudukan sebagai pegawai di bagian tabungan. Adapun lokasi fraud tersebut yakni di LPD Belusung, Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar. Kasus korupsi ini terkuak ketika banyak nasabah yang akan menarik simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito mengalami penghambatan dan tidak kunjung di cairkan. Sehingga mengakibatkan banyaknya pelaporan tentang hal tersebut di LPD Belusung. Untuk mencari jalan keluarnya, pihak desa melakukan audit dan terkuak dana sebesar Rp 2,5 Miliar yang perlu dipertanyakan, dan dana tersebut berasal dari dana tabungan dan deposito dari nasabah. Dengan adanya pelaporan oleh suatu pihak akan sangat berguna untuk mengungkap kejahatan yang telah dilakukan, tindakan pelaporan tersebut disebut dengan *Whistleblowing*. Kasus tersebut tercantum pada berita harian Bali Post yang diperbincangkan masyarakat. (Sumber : BaliPost.) *Whistleblowing* adalah sebuah tindakan pelaporan oleh pelapor yang berstatus anggota organisasi ataupun di luar keanggotaan organisasi mengenai tindakan pelanggaran, tindakan ilegal yang bertujuan untuk mengungkap suatu kecurangan yang terdapat di organisasi terkait..

Intensi untuk melaporkan pelanggaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah *personal cost* yang menjadi faktor awal yang memainkan peran penting dalam hal terkait. Bagustianto dan Nurkholis (2015) menjelaskan perihal pc adalah suatu persepsi yang dimiliki oleh pelapor dimana hal ini pelapor masih terhubung dengan organisasi yang dilaporkan mengenai suatu resiko pembalasan balas dendam yang mengurangi minat pelapor untuk melaporkan terjadinya suatu kecurangan yang ada di organisasi itu.

Faktor lain yang ditemukan mempengaruhi intensi melakukan tindakan laporan isu etis adalah dedikasi organisasi. Jika setiap karyawan memiliki jiwa komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya maka ia akan mengembangkan rasa memiliki dan mengabdikan terhadap organisasinya.

Faktor ketiga yang dianggap mempengaruhi melakukan tindakan whistleblowing adalah lingkungan etika. Institusi dengan lingkungan etika yang kuat dapat meningkatkan waktu pelaporan dan berbanding terbalik dengan institusi dengan lingkungan etika yang lemah (Suzila, 2018).

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas moral menjadi faktor keempat yang mempengaruhi intensi untuk melaporkan pelanggaran. Intensitas moral ini berhubungan dengan persepsi mengenai regulasi perilaku pada teori perilaku yang tertata. Ada banyak penelitian tentang *Whistleblowing*, namun pada kenyataannya penelitian itu memberikan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, investigasi terhadap pelapor masih sangat penting. Penelitian lebih lanjut tentang *whistleblowing* penting untuk meningkatkan pentingnya pelaporan yang benar dan tidak benar untuk mencegah insiden yang merugikan organisasi atau bisnis. Berdasarkan fenomena yang dikemukakan, dengan itu penulis berkeinginan melakukan penelitian berjudul “Pengaruh *Personal Cost*, Komitmen Organisasi, Lingkungan Etika, dan Intensitas Moral Terhadap Intensi Melakukan Tindakan *Whistleblowing* Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Blahbatuh”.

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan, maka dinyatakan adanya beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh personal cost terhadap intensi untuk melakukan *whistleblowing*?
2. Bagaimana pengaruh loyalitas terhadap organisasi terhadap intensi untuk melakukan *whistleblowing*?
3. Bagaimana pengaruh lingkungan etika terkait intensi untuk melakukan *whistleblowing*?
4. Bagaimanakah pengaruh intensitas moral terhadap intensi melakukan tindakan *whistleblowing*?

KAJIAN PUSTAKA

Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan teori perilaku organisasi prososial mendefinisikan teori perilaku organisasi prososial sebagai tindakan oleh anggota organisasi dan anggota ke organisasi. Berdasarkan penjabaran teori yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori perilaku organisasi prososial merupakan teori yang mendasari dan mendukung whistleblowing.

Berbicara tentang whistleblowing, ini merujuk pada suatu tindakan di mana seseorang melaporkan kecurangan yang terjadi di dalam suatu organisasi yang dapat merugikan organisasi tersebut. Dari berbagai teori yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa whistleblowing merupakan suatu tindakan pengungkapan kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi kepada mereka yang mempunyai hak melakukan tindakan terkait hal tersebut.

Bagustianto dan Nurkholis (2015) menjelaskan *personal cost* merupakan persepsi yang dimiliki oleh pelapor dimana hal ini pelapor masih terhubung dengan organisasi yang terlapor mengenai suatu resiko pembalasan balas dendam yang mengurangi minat pelapor untuk melaporkan suatu tindakan kecurangan yang terjadi di organisasi itu.

Menurut Greenberg dan Baron (2013:160), komitmen organisasi mengacu pada seberapa besar keterlibatan karyawan dalam organisasi dan motivasi untuk mempertahankan keanggotaannya, termasuk dalam hal sikap setia karyawan dan semangat untuk bekerja secara optimal di tempat kerja.

Perilaku dan tindakan etika seseorang berdampak pada orang lain dan lingkungan sekitarnya, serta lingkungan kerja, karena lingkungan lembaga adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi anggotanya (Riandi, 2017). Krehastuti (2014) mendefinisikan bahwa intensitas moral adalah konstruksi yang terdiri dari karakteristik yang berbeda yang merupakan perluasan dari topik yang berbeda terkait dengan masalah moral yang paling penting dalam keadaan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang niat dan perilaku etisnya.

Satu hal yang dipertimbangkan karyawan saat melaporkan penipuan adalah risiko penipuan atau pembalasan. Menurut Curtis (2006), pembalasan berupa ancaman yang akan diterima pengadu karena melaporkan suatu pelanggaran dapat berupa transfer yang tidak membantu atau peninjauan praktik yang tidak adil. Hipotesis berikut diusulkan yang mempunyai dedikasi organisasi yang tinggi ia dapat berperilaku yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawabnya guna mencapai tujuan organisasi. Hal ini erat kaitannya dengan teori perilaku organisasi prososial, menurut Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan bahwa tindakan anggota organisasi terhadap organisasi, individu dan kelompok. Hipotesis berikut diusulkan:

“H2 : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap intensi melakukan tindakan *Whistleblowing*”

Faktor lingkungan etika dalam organisasi dapat menjadi pendukung untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa individu yang berada dalam lingkungan etika yang kuat dan patuh terhadap standar yang ada, lebih cenderung memiliki keinginan untuk melaporkan pelanggaran. Hipotesis berikut diusulkan:

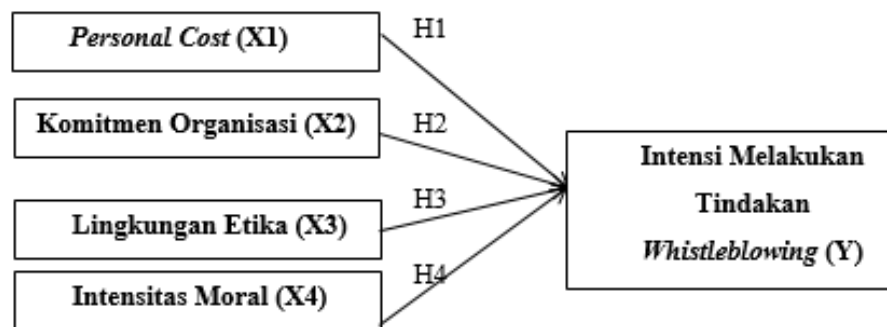
“H3 : Lingkungan etika berpengaruh terhadap intensi melakukan tindakan *Whistleblowing*”

Intensitas moral terkait dengan kontrol perilaku yang dirasakan. Kontrol perilaku yang dirasakan adalah keyakinan seseorang bahwa pengamatan yang mereka terima adalah karena kontrol mereka sendiri atas perilaku yang dirasakan (Astrie, 2015). Hipotesis berikut diusulkan:

“H4 : Intensitas Moral berpengaruh terhadap intensi melakukan tindakan *Whistleblowing*”

METODE PENELITIAN

Kerangka penelitian adalah suatu struktur konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan variabel penting yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Rangka penelitian merupakan landasan suatu penelitian yang secara teoritis menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat. Data utama yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif adalah pendapat dari responden yang diperoleh selama penyebaran kuesioner, dikuantifikasi sedemikian rupa sehingga dapat diolah secara statistik.



Sumber : Data Diolah, 2023

Beberapa teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diantaranya, Data akan diolah dengan analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran data melalui nilai rata-rata, nilai maksimum dan minimum, serta nilai standar deviasi. Selain itu, analisis ini juga berguna untuk memeriksa kualitas data dan hipotesis yang diuji. Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara setiap pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian. Validitas suatu penelitian dapat dilihat dari nilai korelasi Pearson yang harus lebih besar dari 0,30. Uji reliabilitas juga dilakukan untuk memastikan konsistensi atau kestabilan jawaban pada setiap pertanyaan dalam kuesioner dari waktu ke waktu. Tingkat reliabilitas instrumen dianggap tinggi jika koefisien Cronbach Alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,60. (Ghozali, 2016 dan 2013).

Uji normalitas tujuannya untuk memeriksa apakah variabel terikat serta variabel bebas model regresi berdistribusi normal. Salah satu cara untuk memeriksa apakah suatu variabel memiliki distribusi normal adalah dengan melakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Jika probabilitas signifikan yang dihasilkan dari uji tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal. (Ghozali, 2016). Maksud dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengevaluasi adanya variasi yang tidak seragam pada sisa-sisa pengamatan dalam model regresi linier. Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas adalah regresi nilai residual absolut variabel dependen (independen), dan jika

nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut tidak memiliki heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Analisis uji multikolinearitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi yang signifikan antar variabel independen dalam model regresi. Untuk menentukan adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 dan tolerance lebih kecil dari 0,1, maka hal tersebut dapat menandakan adanya multikolinearitas dalam model (Ghozali, 2016). Analisis regresi linier berganda, dimana nantinya dalam penelitian ini diperoleh persamaan: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$. Uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Uji kecocokan model (F-test) dilaksanakan untuk mengukur kesesuaian model regresi linier berganda. Tingkat signifikansi $F = \alpha = 0,05$ artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel dependen, pengujian model regresi dianggap memadai. Uji t-statistik (t-test) membandingkan signifikansi variabel independen pada tingkat $\alpha = 0,05$. Jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian ini adalah 168 responden dari seluruh pegawai LPD di seluruh wilayah Blahbatuh. Kuesioner dibagikan pada tanggal 8 Februari 2023 dengan total 168 kuesioner, pada tanggal 20 Februari 2023 dikembalikan 168 kuesioner.

Dari hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa *personal cost* memiliki N sebanyak 168, nilai min. 18, nilai maks. 45, rata-rata sebesar 29,61 dan standard deviasi 7,029. Komitmen organisasi memiliki N sebanyak 168, nilai min. 32, nilai max 80, rata - rata 62,13 dan standard deviasi 12,193. Lingkungan etika memiliki N sebanyak 168, nilai minimum 14, nilai maksimum 35, rata - rata 27,30 dan standard deviasi 5,571. Intensitas moral memiliki N sebanyak 168, nilai minimum 12, nilai maksimum sebesar 30, rata - rata 19,52 dan standard deviasi 5,325. Intensi melakukan tindakan *whistleblowing* menunjukkan N sebanyak 168, nilai min. 8, nilai max. 20, rata-rata sebesar 15,33 dan standard deviasi 3,383.

Berdasarkan hasil uji validitas terlihat bahwa semua koefisien korelasi dianggap signifikan jika nilainya lebih besar dari 0,30 maka semua instrumen valid. Dari hasil uji reliabilitas terlihat bahwa nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,70 untuk masing-masing instrumen tersebut, sehingga semua instrumen reliabel.

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,061 > 0,05, menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Sedangkan uji multikolinieritas menunjukkan

bahwa nilai tolerance semua variabel independen $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Artinya tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, didapatkan bahwa probabilitas signifikansi untuk setiap model lebih besar dari $0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada model regresi.

“Hasil Uji Regresi Linear Berganda”

Berdasarkan hasil uji Regresi Linear Berganda dapat diketahui persamaan regresinya menjadi: $Y = 5,904 - 0,078X_1 + 0,096X_2 + 0,097X_3 + 0,159X_4 + e$. Persamaan regresi di atas memberikan nilai α sebesar $5,904$, yang menunjukkan bahwa dengan asumsi variabel bebas konstan, maka nilai Y (intensi melaporkan) sebesar $5,904$ satuan. 2) Nilai koefisien regresi β_1 *personal cost* adalah $-0,078$, yang menunjukkan bahwa setiap kali *personal cost* meningkat, maka intensi melakukan tindakan *whistleblowing* menurun. 3) Semakin meningkatnya komitmen organisasi, maka meningkat pula niat untuk melaporkan, hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi komitmen organisasi sebesar $0,096$. 4) Koefisien regresi β_3 lingkungan etika sebesar $0,097$, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi lingkungan etika, maka niat untuk melaporkan juga meningkat. Koefisien regresi β_4 untuk intensitas moral sebesar $0,159$, hal ini menunjukkan bahwa setiap kali intensitas moral meningkat, maka intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing* juga meningkat.

Berdasarkan hasil Uji F, nilai signifikansinya adalah $0,000$ dan $lt; 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian dianggap dapat diuji dan pengujian hipotesis dapat dilanjutkan. Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai adjusted R-squared sebesar $0,545$ yang berarti bahwa $54,5\%$ variabel niat untuk melaporkan dijelaskan oleh varian dari empat variabel *independen personal cost*, komitmen organisasi, lingkungan etika, intensitas moral dan kejelasan tujuan anggaran. Selebihnya ($100\% - 54,5\% = 45,5\%$) dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini..

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan koefisien regresi variabel *personal cost* sebesar $-0,078$ dan signifikansi sebesar $0,029; 0,05$. Artinya variabel biaya SDM berpengaruh negatif signifikan terhadap niat publikasi yang artinya "H0 ditolak" dan "H1 diterima". Koefisien regresi variabel komitmen organisasi yaitu $0,096$ dan signifikansi sebesar $0,000$ dan $lt; 0,05$. Artinya variabel komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap intensi pelaporan, yang berarti "H0 ditolak" dan "H2 diterima". Koefisien regresi var. lingkungan etis sebesar $0,097$ dan signifikansi sebesar $0,014$ dan $lt; 0,05$. berarti var. lingkungan etis berpengaruh positif signifikan terhadap niat *whistleblowing*, yang berarti "H0 ditolak" dan "H3 diterima". Koefisien regresi variabel intensitas moral sebesar $0,159$ dan signifikansi sebesar $0,001$ dan $lt; 0,05$. bahwa adanya

pengaruh positif yang signifikan antara variabel Intensitas Moral dan Intensi Whistleblowing, sehingga "H0 harus ditolak" dan "H4 dapat diterima".

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara variabel personal cost dan intensi whistleblowing pada semua karyawan LPD Se-Kecamatan Blahbatuh, yang berarti semakin tinggi personal cost maka semakin rendah pula intensi untuk melakukan whistleblowing. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Aliyah (2015) bahwa *personal cost* berpengaruh negatif signifikan terhadap intensi melakukan tindakan *whistleblowing*

Variabel niat whistleblowing pada pegawai LPD Blahbatuh dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel komitmen organisasi. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi, maka semakin tinggi pula niat untuk melakukan whistleblowing. Sehubungan dengan teori perilaku organisasi prososial, Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan tindakan anggota organisasi terhadap individu, kelompok atau organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anita Dewi (2019) dan Setiawat dan Ratnasari (2016) bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap niat whistleblower.

Variabel lingkungan etis berpengaruh positif signifikan terhadap niat melaporkan tindak pidana. Artinya semakin baik etika lingkungan Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwitia Permata Syahsa dkk (2022) dan Sartika Dewi dan Firah Mulya (2020) bahwa lingkungan etis memiliki pengaruh baik signifikan terkait intensi dari tindakan whistleblower.

Intensi whistleblowing dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh intensitas moral, yang berarti semakin kuat intensitas moral maka semakin besar kecenderungan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi pada LPD Blahbatuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Permata Syahsa, dkk. (2022), yang menemukan bahwa intensitas moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblower*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa personal expense memiliki pengaruh tidak baik dan signifikan terkait intensi pelaporan, artinya makin tinggi biaya pribadi, intensi pelaporan makin rendah. - aktivitas meniup . Komitmen organisasi berpengaruh positif dan meningkat terkait niat dari tindakan whistleblowing, berarti makin baik dedikasi organisasi, makin besar niat dalam melakukan tindakan whistleblowing. Lingkungan etika berpengaruh positif dan signifikan, yaitu. semakin baik lingkungan etika, makin besar intensi tindakam whistleblowing. Intensitas morall berpengaruh positif dan signifikan terkait intensi melakukan tindakan whistleblowing, artinya semakin baik intensitas moral maka semakin tinggi intensi pelaporan..

Berdasarkan hasil penelitian berpengaruh *personal cost*, komitmen organisasi, lingkungan etika dan intensitas moral terkait intensi dalam tindakan *whistleblowing*, sehingga bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Blahbatuh dalam meningkatkan intensi melakukan tindakan *whistleblowing* hendaknya selalu memberikan perlindungan kepada karyawan yang melaporkan tindakan kecurangan, membimbing karyawan agar nantinya memiliki etika dan moral yang baik. Serta membangun komitmen organisasi karyawan.

Daftar Pustaka

- Astrie. S. Dan Octavia. E. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Auditor Untuk Melakukan Tindakan *Whistleblowing* (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Surakarta Dan Yogyakarta). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Brief, A.P. Dan S.J. Motowidlo. (1986) Prosocial Organizational Behaviors. *Academy Of Managemnt Review* (11(4): 710-725.
- Agustianto Dan Nurkholis. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pefawai Negeri Sipil (Pns) Untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing (Studi Pada Pns Bpk Ri). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*.
- Curtis, M.B.206. Are Audit-Related Ethical Decisions Dependent Upon Mood?. *Journal Of Buisiness Ethics* 68: 191-209.
- Dwitia Permata Syahsa, Dkk. (2022). Pengaruh Lingkungan Etika, Intensitas Moral, Dan Komitmen Profesional Terhadap Intensi *Whistleblowing*. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.1.(1).
- Hariani Eka, Dkk. (2019). Pengaruh Komitmen Profesional, Pertimbangan Etis, *Personal Cost*, *Reward* Terhadap Intensi *Intenral Whistleblowing*. (Studi Empiris Pada Opd Kabupaten Siak). *Jurnal Politeknik Caltrex Riau*, Vol.12.(12), 19-28.
- Krehastuti. D.K. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Auditor Untuk Melakukan *Whistleblowing*. *Jurnal Diponogoro Akuntansi*.
- Merdikawati, Dkk. (2012) Hubungan Komitmen Profesi Dan Sosialisasi Antifipatif Mahasiswa Akuntansi Dengan Niat *Whistleblowing* (Studi Empiris Pada Mahasiswa Strata 1 Jurusan Di Tiga Universitas Negeri Teratas Di Jawa Tengah Dan Di Yogyakarta). Phd Diss, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Riandi, G. (2017). Pengaruh Sifat Machiavellian, Lingkungan Etika Dan *Personal Cost* Terhadap Intensi Untuk Melakukan *Whistleblowing* Internal (Studi Empiris Pada Bank Bri Provinsi Riau). *Jom Feb*,1,1-15
- Setiawati, Ratna Sari. (2016). Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Itensitas *Moral* Dan Tindakan Akuntan Melakukan *Whistleblowing*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.17.(1), 257-282.
- Suzila. (2018). Pengaruh Sifat *Machiavellian* Dan Lingkungan Etika Terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing* (Studi Eksperimentasi Pada Skpd Di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman).

Bitkom Research, 63(2), 1–3.

Usman Halim, Yohanes Rura. (2021). Pengaruh Profesional Cost Dan Pemberian Reward Terhadap Tindakan *Whistleblowing*. *Equilibrium Universitas Muhammadiyah*, Vol. 10.(1), 1-8.

Yacinta Rhea Simbolon. (2021) Pengaruh Profesionalisme, Intensitas Moral, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Niat *Whistleblowing* (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi*

Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi, Persepsi Korupsi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Gede Pramana Putra⁽¹⁾
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati⁽²⁾
Ni Wayan Yuniasih⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jln. Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
 e-mail: pramanaputragede@gmail.com

ABSTRACT

Based on data from the Central Bureau of Statistics, the realization of state revenue from the tax sector in 2019 was IDR 1,955 trillion. Given the large portion of revenue from the tax sector to state revenue, special attention is needed in order to maintain compliance from the taxpayers themselves. Taxpayer decisions in the context of carrying out their obligations can be influenced by various factors, in this study the limiting factors used are the application of information technology, perceptions of tax corruption, and tax rates. The sample in this study were individual taxpayers registered at KPP East Denpasar, totaling 100 samples, which were determined by the probability sampling method with the simple random sampling technique. The type of data used is quantitative data sourced from primary data and secondary data. In this study the data analysis technique used was multiple linear regression analysis with the coefficient of determination test, F and T. The results showed that the application of information technology, perceptions of tax corruption and tax rates had a positive significant effect on individual taxpayer compliance at KPP East Denpasar.

Keywords: *Application of Information Technology, Perceptions of Tax Corruption, Tax Rates, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik (2017-2019) realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 ialah sebesar 1.955 triliun rupiah. Pendapatan negara pada tahun 2019 ini bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 1.546 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 408 triliun rupiah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan terbesar bersumber dari bidang perpajakan. Pada tahun 2020 pendapatan negara mengalami penurunan menjadi 1.628 triliun rupiah. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, dimana tingkat kepatuhan dari wajib pajak sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Jumlah WP	Jumlah SPT	Rasio Kepatuhan
2018	44.775	39.908	89,13%
2019	46.723	40.741	87,20%
2020	59.360	43.147	72,69%
2021	56.250	49.532	88,06%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kanwil DJP Bali, 2022

Mengingat pentingnya fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan utama negara, pembayaran hingga pelaporan pajak perlu diawasi dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menjaga kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam menjaga kepatuhan wajib pajak diperlukannya berbagai macam kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak, kemudahan dalam hal ini dapat berupa penerapan teknologi informasi pada layanan perpajakan sehingga layanan perpajakan dapat diakses dimanapun. Dalam upaya menjaga kepatuhan wajib pajak, diperlukan juga kesadaran dari setiap kuasa pengguna anggaran agar tidak melakukan korupsi yang dapat menciderai kepercayaan wajib pajak. Dalam perhitungan pajak, tarif pajak juga berdampak besar terhadap keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, hal ini didasarkan atas pertimbangan wajib pajak akan titik rasionalitas dari beban pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan bahasan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi informasi, persepsi korupsi pajak dan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu dapat dijadikan salah satu masukan dan sumber pustaka bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut tentang objek yang serupa. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan mampumenjadi bahan pertimbangan untuk Direktorat Jendral Pajak, serta bagi kuasa pengguna anggaran agar dapat menjaga kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak

KAJIAN PUSTAKA

Teori atribusi dideskripsikan sebagai teori mengenai proses perilaku seseorang dalam mengambil suatu keputusan tertentu. Teori ini menitikberatkan terhadap penyebab suatu perilaku dari orang lain ataupun dirinya yang dapat dikategorikan menjadi dua sumber faktor, yaitu faktor yang bersumber dari internal (atribusi disposisional) ataupun faktor yang bersumber dari eksternal (atribusi situasional). Faktor yang bersumber dari internal atau atribusi disposisional menerangkan bahwa tindakan atau perilaku seseorang berasal dari kompetensi diri dari individu yang bersangkutan hal ini mencakup sikap dan sifat individu, ciri kepribadian, kemampuan diri, hingga motivasi diri. Dalam menilai suatu perilaku seseorang dapat pula dipengaruhi oleh faktor eksternal (atribusi situasional) dimana faktor eksternal yang dapat berupa faktor lingkungan, faktor ekonomi hingga tekanan dari orang lain (Luthans, 2005:182)

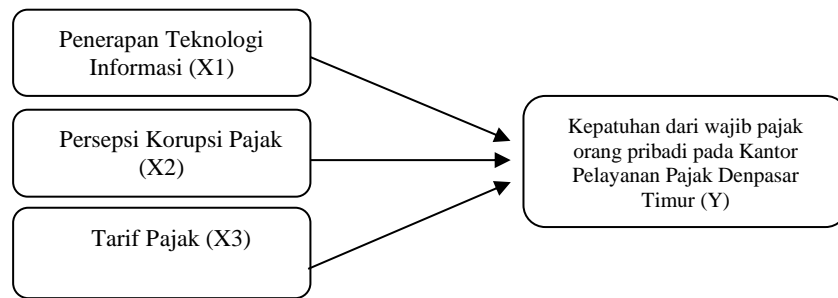
H3: Diduga tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode pendekatan kuantitatif yang mengarah kepada penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas. Penelitian kuantitatif dengan asosiatif dan dengan tipe kausalitas yaitu penelitian dengan tujuan untuk memahami suatu hubungan sebab akibat antara 2 (dua) variabel ataupun lebih, dimana untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (jawab responden) dan data sekunder (realisasi penerimaan dan jumlah wajib pajak). Data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada narasumber secara langsung dan data sekunder didapatkan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Bali Unit Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada hipotesis maka berikut adalah kerangka berpikir penelitian ini.

Gambar 1

Kerangka Berpikir Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi, Persepsi Korupsi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



Pada penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *accidental sampling* dimana teknik *accidental sampling* ialah penentuan secara spontan dan tidak disengaja pada suatu populasi yang ditentukan (Sugiyono, 2007:67). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur yang berjumlah 59.360 wajib pajak. Besaran sampel yang dipakai dalam penelitian ini didapat dari perhitungan metode Slovin berdasarkan jumlah dari wajib pajak yang tergolong sebagai orang pribadi yang teradministrasi pada wilayah KPP Denpasar Timur sebanyak 59.360 wajib pajak, dengan rumus:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

$$n = \frac{59.360}{(1 + 59.360(0,1)^2)}$$

$$n = 99,83$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Keterangan:

n adalah besaran sampel, N adalah besaran populasi, e adalah batas toleransi kesalahan

Maka, berdasarkan perhitungan ini jumlah responden yang diambil yaitu sejumlah 100 responden dengan penyebaran kuisisioner secara langsung. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis data. Teknik analisis regresi linear berganda ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana hubungan antar lebih dari 2 (dua) variabel, yangmana didalam penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana pengaruh penerapan teknologi informasi, persepsi korupsi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Pada penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap kuesioner yang digunakan. Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastitas yang bertujuan untuk meyakinkan model yang digunakan. Pada penelitian ini juga dilakukan uji koefisien determinasi (R²), Uji F dan Uji T dimana pada intinya yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan dari model penelitian terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Serta Reliabilitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Item Pernyataan	Validitas		Reliabilitas	
			Pearson Correlation	Ket.	Alpha Cronbach	Ket.
1	Penerapan Teknologi Informasi	X 1.1	0,785	Valid	0.799	Reliable
		X 1.2	0,790	Valid		
		X 1.3	0,763	Valid		
		X 1.4	0,704	Valid		
		X 1.5	0,688	Valid		
2	Persepsi Korupsi Pajak	X 2.1	0,798	Valid	0.816	Reliable
		X 2.2	0,839	Valid		
		X 2.3	0,828	Valid		
		X 2.4	0,565	Valid		
		X 2.5	0,754	Valid		
3	Tarif Pajak	X 3.1	0,815	Valid	0.841	Reliable
		X 3.2	0,755	Valid		

		X 3.3	0, 811	Valid		
		X 3.4	0, 738	Valid		
		X 3.5	0, 809	Valid		
4	Kepatuhan	Y 1.1	0, 742	Valid	0.809	Reliable
	Wajib	Y 1.2	0, 820	Valid		
	Pajak	Y 1.3	0, 779	Valid		
	Orang	Y 1.4	0, 712	Valid		
	Pribadi	Y 1.5	0, 721	Valid		

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam instrument penelitian memiliki nilai *pearson correlation* diatas 0,3 dan *Alpha Cronbach* (koefisien alpha) diatas 0, 7 yang berarti instrument penelitian merupakan *construct* yang kuat dan bersifat reliabel.

Sebelum dilakukannya teknik analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu perlu dilakukannya uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize Resd.
N		100
Normal Parameter	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1.43259151
Most Extreme Difference	Absolute	,063
	Positive	,053
	Negative	-,063
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distrution is Normal		
b. Calculated from data.		
c. Lillicfors Significannce Corection		
d. This is a lower buond od the true significannce		

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil pengujian pada tabel diatas tingkat signifikansi sebesar 0,200, dimana $0,200 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas

Uji Multikolinearitas dapat dilakukan melalui mengetahui nilai pada VIF (*Variance Inflation Factor*) pada masing masing model pada regresi. Apabila suatu nilai tolerance dari 0,10 atau VIF kurang daro 10 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016:103)

Tabel 4
Hasil Uji Multikoleniaritas

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.429	1.258		2.726	.008		
Penerapan Teknologi Informasi (X1)	.374	.095	.377	3.949	.000	.383	2.614
Persepsi Korupsi (X2)	.247	.103	.257	2.395	.019	.302	3.308
Tarif Pajak (X3)	.224	.088	.257	2.550	.012	.344	2.906

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel diatas dilihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dengan mengetahui nilai signifikan antara variabel independent dengan nilai absolut dari residualnya. Apabila nilai pada signifikansi lebih besar dari 0.05, maka dikatakan tidak terjadi maslaah heteroskedastisitas. Menurut hasil pengujian didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.280	.717		3.179	.002
Penerapan Teknologi Informasi (X1)	-.067	.054	-.201	-1.239	.218
Persepsi Korupsi (X2)	.013	.059	.041	.225	.822
Tarif Pajak (X3)	-.001	.050	-.004	-.023	.982

a. Dependent Variabel: ABS_RES

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi melebihi dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis pada regresi linier berganda dilakukan agar diketahui ada atau tidaknya pengaruh ketiga variabel bebas yaitu terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil penelitian ialah sebagai berikut:

Tabel 6
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc	VIF
(Constant)	3.429	1.258		2.726	.008		

Penerapan Teknologi Informasi (X1)	.374	.095	.377	3.949	.000	.383	2.614
Persepsi Korupsi (X2)	.247	.103	.257	2.395	.019	.302	3.308
Tarif Pajak (X3)	.224	.088	.257	2.550	.012	.344	2.906

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 3,429 + 0,374 X_1 + 0,247 X_2 + 0,224 X_3$$

Dari persamaan ini, dapat diterjemahkan sebagai berikut:

1. $a = 3,429$. Persamaan ini diartikan bahwa nilai constant sebesar 3,4289 yang artinya apabila penerapan teknologi informasi, persepsi korupsi, dan tarif pajak tidak mengalami perubahan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 3,429.
2. $b_1 = 0,374$. Persamaan ini diartikan bahwa adanya pengaruh yang bersifat positif serta signifikan antar variabel X1 dengan Y sebesar 0,374 yang memiliki arti pada setiap perubahan penerapan teknologi informasi sebesar satu satuan maka akan menyebabkan perubahan pada kepatuhan wajib pajak sebesar nilai b_1 (0,374) satuan dengan syarat variabel lain diasumsikan tetap.
3. $b_2 = 0,247$. Persamaan ini diartikan pengaruh yang bersifat positif serta signifikan antar variabel persepsi korupsi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,247 yang memiliki arti pada setiap perubahan persepsi korupsi pajak sebesar satu satuan maka akan pula menyebabkan perubahan kepatuhan pada wajib pajak senilai b_2 (0,247) dengan perasumsian variabel lain ialah tetap.
4. $b_3 = 0,224$ persamaan ini diartikan pengaruh yang bersifat positif serta signifikan antar variabel X3 dengan variabel Y sebesar 0,223, yang memiliki arti setiap perubahan yang terjadi kepada tarif pajak sebesar satu satuan akan menyebabkan pula perubahan kepatuhan wajib pajak sebesar b_3 (0,223) dengan perasumsian variabel lain tetap.

Dari Persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa arah hubungan variabel adalah positif atau menunjukkan pengaruh yang se-arah.

Tabel 7
Uji Koefisien Determinasi

diterima). Kaitannya dengan teori atribusi ialah, dalam atribusi situasional dimana penerapan teknologi informasi menjadi pertimbangan eksternal bagi wajib pajak. Sesuai dengan hasil pembahasan variabel diatas dapat diartikan: melalui teknologi informasi, wajib pajak dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan pajak, tanpa diperlukannya banyak pengorbanan yang pada akhirnya kemudahan akses layanan ini menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Akbar dan Apollo (2020:7) yang menampilkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang bersifat positif terhadap tingkat kepatuhan dari wajib pajak.

2. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel independent persepsi korupsi memiliki nilai t-hitung senilai 2,395 memiliki signifikansi sebesar 0,019, dapat diterjemahkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi (hipotesa kedua diterima). Kaitannya dengan teori atribusi ialah pada atribusi disposisional persepsi wajib pajak atas kasus korupsi dapat dikategorikan sebagai faktor internal bagi wajib pajak. Sikap dan pandangan wajib pajak atas kredibilitas pemerintah dalam hal ini kuasa pengguna anggaran mampu mempengaruhi keputusan wajib pajak. Pandangan ini erat kaitannya dengan asas kepercayaan, dimana biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak dirasa percuma bahkan dalam kondisi ekstrim wajib pajak memilih untuk tidak melakukan kewajibannya. Pada akhirnya asas kepercayaan dari persepsi masing masing wajib pajak atas kasus korupsi pajak ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kartika, Jefri, dan Suhartati (2020:7-8) yang menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak wajib pajak.

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel independent tarif perpajakan mempunyai nilai t-hitung senilai 2,550 serta taraf signifikan sebesar 0,012, ini dapat diterjemahkan bahwa penerapan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang bersifat positif serta signifikan dengan kepatuhan dari wajib pajak pada wilayah KPP Denpasar Timur. (hipotesa ketiga diterima). Dalam prinsip ekonomi, seorang individu berupaya untuk mempertimbangkan pengorbanan agar tercapai titik rasionalitas dalam menentukan suatu keputusan. pengorbanan yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Teori atribusi dalam hal ini tarif pajak termasuk kedalam teori atribusi situasional, dimana tarif

pajak ini yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap rasionalitas wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dengan kata lain semakin kecil tarif pajak maka semakin patuh wajib pajak tersebut. Hasil dari penelitian hipotesa ketiga ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, dan Noviari (2019:21) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Dengan tarif pajak yang memenuhi asas keadilan, diharapkan mampu menciptakan rasa adil dan setara dalam hati wajib pajak atas kewajiban yang harus dipenuhi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan teknologi informasi memiliki pengaruh positif signifikan kepada kepatuhan dari wajib pajak pribadi pada wilayah KPP Denpasar Timur.
2. Persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh positif signifikan kepada kepatuhan dari wajib pajak pribadi pada wilayah KPP Denpasar Timur.
3. Tarif Pajak memiliki pengaruh positif signifikan kepada kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jendral Pajak, penerapan teknologi informasi merupakan hal yang krusial mengingat modernisasi dibidang pelayanan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, namun modernisasi pula memerlukan sumber daya tambahan guna menjaga agar teknologi tidak mudah rusak dan terjadi eror mengingat jumlah wajib pajak yang tidak sedikit tentunya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.
2. Bagi KPP Pratama Denpasar Timur, penerapan teknologi informasi pada KPP tentunya mengadaptasi ketentuan yang dianjurkan oleh Direktorat Jendral Pajak, namun akan lebih baik bila dimungkinkan dilakukannya penambahan personil dalam pelayanan online. Ini bertujuan untuk mencegah antrian online yang tidak diperlukan yang dikhawatirkan nantinya akan mengurangi kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.
3. Terhadap wajib pajak pada wilayah kerja KPP Denpasar Timur, mengingat besarnya persentase pemasukan melalui bidang perpajakan terhadap total pemasukan negara, ada baiknya wajib pajak senantiasa memenuhi kewajibannya secara baik, benar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salembat Empat.

Nurmantu. (2000). *Dasar-dasar perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill-Co

Rahayu, Siti Kurnia. (2006). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Jakarta: Rekayasa Sains

Republik Indonesia. (1999). *Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140*. Jakarta

Republik Indoensia (2007). *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*. Jakarta

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133*. Jakarta

Republik Indonesia. (2019). *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197*. Jakarta

Sanjaya, Wina. (2015). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sugiyono, (2007), *Metodologi Penelitian Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Utama, Made Suyana. (2014). *Aplikasi Analisi Kuantitatif. Edisi Ke-8*. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Sistem pengendalian intern yaitu suatu sistem yang menyangkut tentang struktur organisasi, metode dan ukuran perusahaan yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan suatu organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (Mulyadi, 2001:163). Sistem pengendalian intern terhadap penerimaan kas meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran perusahaan yang dikoordinasikan perusahaan. (Mulyadi, 2001:164), selain itu unsur pokok sistem pengendalian intern meliputi organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan wewenang secara tegas.

Kas merupakan hal yang penting dalam setiap transaksi perusahaan, untuk itu diperlukan suatu pengendalian intern yang mengatur penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga setiap arus transaksi yang berhubungan dengan kas dapat dicatat dengan baik. Karena sifatnya yang mudah untuk dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan pemiliknya, maka kas mudah digelapkan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penerimaan kas. Langkah yang preventif untuk mencegah terjadinya penggelapan kas yaitu dengan pengendalian intern terhadap kas.

Menurut Undang–Undang No.10 Tahun 1998 pengertian BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Kas merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah bank karena kas merupakan asset perusahaan yang paling lincer dan mudah untuk disalahgunakan. BPR Angsa Sedanayoga (BAS Bank) adalah sebuah bank perkreditan rakyat yang berdiri sejak 9 Agustus 1993 yang berlamat di Jalan Raya Batubulan no. 168 Sukawati, Gianyar dan sudah memiliki kantor kas di Lantai Dasar Kios No. 19 Pasar Rakyat Gianyar.

Setelah memahami tentang sistem pengendalian intern penerimaan kas, maka berikut ini akan diuraikan beberapa permasalahan yang terdapat pada BPR Angsa Sedanayoga. Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan Direktur PT BPR Angsa Sedanayoga pada 10 Februari 2022 Sistem Pengendalian Intern tidak berjalan secara optimal dimana terdapat perangkapan tugas dan wewenang serta tanggungjawab pada bagian yang berkaitan dengan penerimaan kas belum berjalan semestinya. Dimana teller merangkap tugas dari bagian CS. Pada PT BPR Angsa Sedanayoga terdapat selisih pada penerimaan kas perusahaan dimana ada nasabah yang membayarkan listrik secara tunai namun bukti pembayarannya terselip di tanggal yang berbeda sehingga menimbulkan selisih pada kas yang masuk ke perusahaan, hal ini akan menimbulkan selisih pada kas yang masuk ke perusahaan. Permasalahan yang kedua yaitu berdasarkan struktur oraganisasi bagian SPI tidak berfungsi secara optimal dimana bagian SPI

mengecek transaksi tidak di hari berikutnya tetapi berdekatan dengan akhir bulan dan bagian SPI juga mengambil tugas mengurus pajak perusahaan. Dengan adanya perangkatan tugas tersebut akan menyebabkan terjadinya pencatatan yang sebenarnya tidak terjadi di hari itu sehingga tidak dapat dipercaya kebenarannya, sebagai akibatnya kas yang ada dalam perusahaan tidak terjamin keamanannya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan komponen utama dari struktur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian. (Lampiran 1).

Terlepas dari penerapan sistem pengendalian intern yang kurang berjalan secara optimal. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT BPR Angsa Sedanayoga dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada PT BPR Angsa Sedanayoga**”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal penerimaan kas pada PT BPR Angsa Sedanayoga?

Dengan tujuan penelitian:

1. Untuk mendeskripsikan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada PT BPR Angsa Sedanayoga yang selama ini berjalan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Mulyadi (2001:183) Sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. *The Committee of Sponsoring Organization (COSO)* yang dikutip oleh Bodnar dan Hopowood (2001:182) adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan oprasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. Menurut Mulyadi (2001:163), menyatakan bahwa tujuan sistem pengendalian intern dilihat dari definisi sistem pengendalian intern adalah: Menjaga kekayaan organisasi, Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, Mendorong efisiensi serta Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut PSAK No.2 kas merupakan investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan paling cepat dapat dicairkan dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan yang signifikan. Kas menurut Mulyadi (2001:163), adalah “Kas diartikan sebagai alat pertukaran dan

juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Sedangkan menurut Sukrisno Agus (2017 : 230) menyatakan bahwa kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Dari beberapa pengertian kas diatas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan asset perusahaan yang paling lancar yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Selain itu kas juga dengan mudah bisa diselewengkan sehingga harus dijaga agar tidak terjadi kas menganggur atau sering disebut dengan *Idle Cash*.

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk mencatat kegiatan penerimaan uang di perusahaan dari penjualan tunai maupun dari piutang usaha yang dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan.

1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Setoran Tunai

Pada perusahaan jasa perbankan sumber penerimaan kasnya berasal dari setoran tunai dan penerimaan dari piutang. Pada penerimaan kas dari setoran tunai kasir menerima pembayaran atau setoran tunai dari nasabah atas setoran tabungan. Pada sistem penerima kas dari setoran tunai atas tabungan ini, nasabah yang akan menyetorkan harus terlebih dahulu mengisi slip setoran dengan disertai buku tabungan yang bersangkutan.

2. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Piutang

Sumber penerimaan kas suatu perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbankan biasanya berasal dari piutang dan setoran tunai, piutang didapatkan dari pembayaran para debitur.

Penelitian sebelumnya:

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rosy dan Zumrotus (2018) yang meneliti Efektivitas Pengendalian Internal Atas Transaksi Kas Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu diketahui bahwa pengendalian internal kas yang cukup efektif yang dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kewaspadaan pihak bank dalam menjaga kekayaannya. Namun kenyataannya ada yang masih tidak sesuai dengan SOP yang telah digunakan.
2. Menurut penelitian yang dilakukan M. Fauzan (2018) yang meneliti Sistem Pengendalian Intern Terhadap Fungsi Penerimaan Kas Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengendalian intern terhadap fungsi penerimaan kas di PT Bank Muamalat cabang Pematangsiantar sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang diperoleh yaitu 3,20 yang terdapat pada interval 2,51- 3,25 dengan katagori baik.
3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Devi Sella (2019) yang meneliti Analisis Keterbukaan

Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Bagi Sustainbility BPR Bank Jogja Sebagai Wujud Antisipasi Ketidak Pastian Akibat Pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan fakta dan analisis pengaruhnya secara langsung atau tidaknya menggunakan Structural Equation Model. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa analisis keterbukaan dari penerimaan dan pengeluaran kas BPR Bank Jogja telah berjalan dengan baik, senada dengan teridentifikasi beberapa kelebihan dan kelemahan. Dimana faktor yang mendominasi mempengaruhi keterbukaan penerimaan dan pengeluaran kas di BPR Bank Jogja didominasi oleh akuntabilitas dalam meningkatkan keterbukaan penerimaan dan pengeluaran kas. Semakin baik peran akuntabilitas, maka semakin meningkatnya keterbukaan penerimaan dan pengeluaran kas pada BPR Bank Jogja.

4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Debby Sarapi, dkk(2019) yang meneliti Evaluasi Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada PT Bank BRI Cabang Tahuna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada perusahaan ini. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem pengendalian intern atas penerimaan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tahuna telah memenuhi unsur unsur Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas dan berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya pemisahan tugas, tanggung jawab dan batasan wewenang yang jelas pada setiap unit kerja yang terdapat pada perusahaan, serta perusahaan dipimpin oleh seorang kepala unit sebagai orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan unit baik oprasional maupun personil, dan juga sistem pengamanan fisik kas yaitu uang kas yang ada didalam kantor disimpan didalam lemari besi yang dilengkapi dengan kunci kombinasi angka yang bersifat rahasia, pemeriksaan intern dilaksanakan secara insidental dan laporan harian dibuat tiap hari kerja sehingga keadaan keuangan dapat diketahui.
5. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Baiq Nini, dkk(2022) yang meneliti Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas PD BPR NTB Cabang Selong Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi terkait dengan sistem pengendalian intern penerimaan kas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PD BPR NTB Lombok Timur telah cukup baik dalam melaksanakan sistem pengendalian intern terkait dengan penerimaan kas baik dari pemisahan tugas, pemberian wewenang, pengamanan asset dan dokumen penting serta catatan dan dokumen yang digunakan telah memadai. Namun masih kurangnya perputaran jabatan atau posisi terkait di bagian penerimaan kas seperti kasir sehingga jika terjadi perputaran jabatan, maka dapat mengurangi potensi kecurangan,

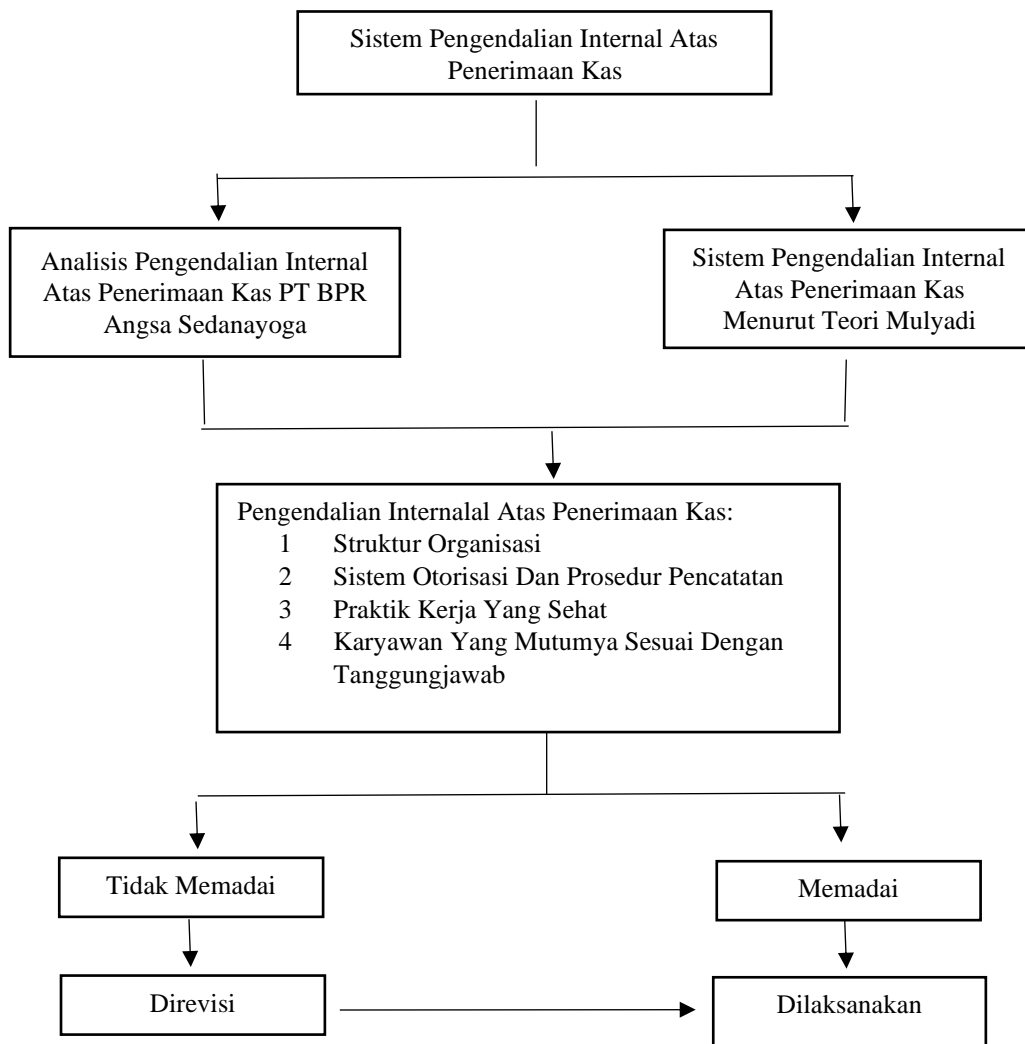
penyalahgunaan dokumen terkait kas.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di PT BPR Angsa Sedanayoga. Subjek penelitian ini adalah menggunakan Direktur PT BPR Angsa Sedanayoga. Penelitian tersebut akan mendapatkan data hasil sistem pengendalian internal dalam atas penerimaan kas dengan sampel sebagai berikut:

1. Ibu NI Ketut Sari Astit selaku Direktur PT BPR Angsa Sedanayoga yang selanjutnya disebut sebagai narasumber. Data yang didapat berupa hasil wawancara dan dokumentasi.

Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan yaitu:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan 3 metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Observasi yaitu usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini penulis mengamati bagaimana SPI pada PT BPR Angsa Sedanayoga dalam mengaudit sistem penerimaan kas perusahaan.
2. Metode Wawancara metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan koresponden. Dalam hal ini penulis mewawancarai SPI dan bagian *Accounting* yang berkaitan dengan penerimaan kas pada PT BPR Angsa Sedanayoga untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
3. Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan - peraturan, catatan harian, gambar dan sebagainya.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Metode ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2016, Prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data pada PT BPR Angsa Sedanayoga mengenai sistem pengendalian intern penerimaan kas.
2. Mereduksi data yang dikerjakan
3. Melakukan analisis tentang sistem pengendalian intern penerimaan kas
4. Membuat kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi dan wawancara dengan Direktur PT BPR Angsa Sedanayoga, diperoleh hasil penerapan sistem pengendalian internal atas kas sebagai berikut:

1. Dari segi penerimaan kas, Sumber Penerimaan Kas Perusahaan berasal dari tabungan ataupun deposito dari para nasabah, pembayaran kredit dari debitur serta perusahaan kami juga bekerja sama dengan Arindo yang berguna untuk pembelian pulsa listrik atau HP, pembayaran listrik dan air. Penerimaan kas ini dilakukan langsung oleh nasabah ke kantor atau kami juga menggunakan sistem jemput boleh oleh kolektor maupun Account Officer dan penerimaan kas

ini juga bisa secara transfer yang dilakukan oleh nasabah melalui bank umum ke rekening yang dimiliki perusahaan.

2. Dari segi penerapan sistem pengendalian internal, PT BPR Angsa Sedanayoga dalam sistem pengendalian intern belum berjalan secara optimal, dimana terdapat perangkapan tugas dari beberapa bagian yang bersangkutan dengan penerimaan kas perusahaan seperti bagian kasir yang merangkap tugas bagian customer service dan juga bagian SPI yang seharusnya mengaudit laporan transaksi di hari berikutnya namun melakukan audit berdekatan dengan akhir bulan. Hal ini dikarenakan SPI pada perusahaan mengurus pajak perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya pengendalian Internal Penerimaan Kas pada PT BPR Angsa Sedanayoga belum berjalan dengan baik, belum sesuai dengan unsur – unsur yang terdapat pada teori pengendalian internal penerimaan kas. Hal ini terbukti dengan adanya perangkapan fungsi penerimaan kas karena keterbatasan jumlah karyawan sehingga tidak efektif dalam pengendalian intern. Dalam suatu perusahaan setiap terjadinya transaksi akan ada otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan transaksi tersebut. Pada proses pencatatan dilakukan secara manual dan sistem. Dimana perusahaan bekerjasama dengan Aplikasi Reatil BPR yaitu PT Sineri Prakarsa Utama. Namun Untuk transaksi penerimaan kas melalui transfer bank hanya melalui chat online saja yang dimana hal ini kurang efektif dikarenakan pengajuan setiap transaksi tidak bisa dilihat secara detail berupa fisik, transaksi bisa saja terlewat karena ketutup chat yang lain. Pembagian tanggung jawab dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada PT BPR Angsa Sedanayoga dalam peneriman kas sudah menggunakan formulir yang menggunakan slip setoran yang diberi nomer urut tercetak, setiap transaksi tidak dilakukan oleh satu unit saja, dan secara berkala sudah melakukan pencocokan pada asset yang dimiliki perusahaan. Namun untuk pemeriksaan mendadak belum terlaksana dengan baik karena yang bertugas memeriksa pekerjaan karyawan adalah kasi dari setiap bagian. sehingga yang bertugas untuk melihat dan mengendalikan pekerjaan para karyawan adalah para kasi dari setiap bagian. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, system otoritas dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya bergantung pada sumber daya manusia yang melaksanakannya. Karyawan yang mempunyai integritas tinggi dalam arti mempunyai tingkat kecakapan yang sesuai dengan tanggung jawab sangat mendukung keefektifan system pengendalian intern yang baik dan memadai. Selanjutnya, PT BPR Angsa Sedanayoga juga memberlakukan pemberian sanksi dan bimbingan apabila terdapat karyawan yang bermasalah. Dan juga para karyawan mendapatkan pelatihan susuai dengan tugas

dan tanggungjawabnya yang dilakukan di perusahaan maupun diluar perusahaan baik dari perbarindo maupun narasumber yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno. (2017). Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntansi oleh Akuntan Publik. *Edisi 5. Buku 1. Salemba Empat.*
- Arianti, Devi Sella. (2019). Analisis Keterbukaan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Bagi Sustainability BPR Bank Jogja Sebagai Wujud Antisipasi Ketidakpastian Akibat Pandemi Covid-19. *E- Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia Vol.15.No.1.2019.*
- Claudia,Salibana Sharon Debora;Ontoh,Winston;Walandow,Stanley
- Kho.(2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Hotel Gran Manado.*E-Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi .Vol.7,No.1.2019*
- Fauzan, M. (2018). Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Kas Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pematangsiantar. *E-Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 2.2018.*
- Fiqqiya,Nurfatin;Irwansyah;Kurniawan,Indra Suyoto.(2020).Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah.*E-Jurnal FEB Universitas Mulawarman Samarinda.Vol.17,No.1.2020.*
- Kusnia,Hilaatul Mila;Anwar,Achmad Syaiful Hidayat;Mudrifah.(2020).Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas (Studi Kasus Pada CV Sekartika Jati Rencana). *E-Jurnal Akademi Akuntansi.Vol.3,No.2.2020.*
- Novita Sari,Ayu (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Perum Perumnas Regional I Medan.*Skripsi.Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara.*
- Pratiwi,Yulianita Rochmana & Priono,Hero.(2021).Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Fungsi Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Orthopedi Dan Traumatologi Surabaya.*E-Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi.Vol.14,No.1.2021.*
- Pratiwi,Ni Putu Ayu Andika.(2022) Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT Karya Manajemen Solusindo.*E-Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia.2022.*
- Rahayu, Baiq Nini Ifani., Lestari,Baiq Anggun Hilendri., & Jumaidi,Lalu Takdir. (2022). Sistem Pengendalian Intern Penerimaan KAs PD BPR NTB Cabang Selong Lombok Timur. *E- Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Vol. 2 No. 1. 2022.*
- Sarapi, Debby E.R., Manoppo,Wilfried S., & Keles, Dantje. (2019). Evaluasi Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada PT Banl BRI Cabang Tahuna. *E-Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Vol.8. No. 1. 2019.*

Situmorang, Hartati. (2013). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.*

Utomo, Agus. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada PDAM Tirta Jeneberang Gowa. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar.*

Yasa, I Gede Agus Purna; Jayanti, L.G.P. Sri Eka; Sutapa, I Nyoman.(2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Di LPD Desa Pekraman Bayad. *E-Journal of Public and Business Accounting Universitas Warmadewa, Vol.2, No.2, Desember 2021, Hlm 26-35.*

Zendra, Rosy Aprieza Puspita & Sholihah, Zumrotus. (2018). Ewektivitas Pengendalian Internal Atas Transaksi Kas Pada Bank Pembayaran Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep. *E-Jurnal Kajian Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. Vol. 2. No. 1. Hal. 54-66. 2018.*

Pengaruh Moralitas Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Studi Kasus Bumdes Amertha Desa Patas)

Komang Pande Gerry Astrana Putra ⁽¹⁾

Ni Putu Ayu Kusuma Wati ⁽²⁾

Putu Nuniek Hutnaleontina ⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: gerryastrana@gmail.com

ABSTRACT

Fraud is deceiving the truth and knowingly obtaining something to which the perpetrator has no right. The occurrence of fraud can be caused by internal factors of companies and individuals. The data source used in this study is the primary data for this study in the form of respondents' responses to distributed questionnaire statements. Morale has a significant positive impact on fraud prevention. This indicates that the higher the morale of an individual, the more likely it is that fraud can be prevented. An internal control system has a significant positive impact on fraud prevention. This shows that a better internal control system can prevent fraud.

Keywords : *Morality, internal control system, fraud*

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi di dunia saat ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi banyak juga dampak negatif akibat ketidaksempurnaan sistem yang ada. Alhasil, para akuntan yang selalu ingin untung dengan segala cara untuk terus mencari celah di dalam sistem akuntansi yang ada saat ini. Kecurangan akuntansi adalah contohnya. *Fraud* adalah suatu bentuk tipuan yang disengaja dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian tanpa sepengetahuan pihak yang dirugikan dan keuntungan bagi pelaku penipuan tanpa diketahui kepada pihak yang dirugikan (Alison, 2006; 45).

Terdapat faktor-faktor yang bisa memberi pengaruh terhadap terjadinya kecurangan akuntansi, salah satunya faktor yang dapat memicu kecurangan akuntansi itu bisa terjadi yaitu ada faktor kesempatan, faktor kesempatan yaitu pelaku tindakan kecurangan bisa mengambil untung dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian, dari kesempatan tersebut dapat menjadi kekurangan yang menempel pada sistem pengendalian intern yang ada pada organisasi ataupun perusahaan, contohnya rancangan dari pengendalian intern yang tidak tepat, maka dari itu bisa memberikan celah, selanjutnya pengendalian ataupun kontrol tidak dilakukan dengan konsisten pada pelaksanaan proses bisnis, pengamatan yang bisa berjalan berkaitan dengan proses bisnis yang ada, dan yang terakhir yaitu praktik-praktik yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku.

Tindakan dengan sengaja melakukan menambah atau mengurangi jumlah tertentu adalah tindakan kecurangan akuntansi hingga menjadi ketidakakuratan penyajian pada laporan keuangan. Akan tetapi, momen pelaku menjalani tindak curang bergantung terhadap posisi pelaku pada objek kecurangan. Karyawan dalam suatu perusahaan dapat melakukan kecurangan biasanya untuk keuntungan pribadi karyawan tersebut, contohnya disalahgunakannya aktiva. Sedangkan, manajer di dalam suatu perusahaan memiliki momen yang lebih terbuka jika ingin melakukan tindakan *fraud* dibandingkan karyawannya. Umumnya manajer menjalankan tindakan kecurangan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, contohnya keketidakkuratannya laporan keuangan.

Kasus kecurangan banyak disebabkan oleh tanpa berjalannya sistem pengendalian intern dimana pengendalian atau pengawasan yang ada sangat lemah, integritas buruk bahkan tidak ada integritas sedikitpun, regulasi dan hasil kerja yang sangat buruk yang dapat membuat pelaku kecurangan dengan bebas bisa menjalani tindakannya . Dan sifat orang itu sendiri berhubungan erat dengan kecurangan yang bisa dilakukan. Watak seseorang tercermin pada pribadi dan cara berpikir seseorang bisa menunjukkan bahwa kepatutan dan kebenaran sangat vital dan harus diperkuat dan dipelihara dengan baik supaya bisa memberi kita pondasi yang kuat untuk diri kita sendiri supaya tidak berbuat kecurangan itu sendiri.

Seperti kejadian yang terjadi di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Seorang mantan ketua Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang bernama Hernawati diduga melakukan penggelapan atau korupsi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Amertha Desa Patas antara tahun 2010 sampai 2017. Menurut keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng I Putu Gede Astawa pada saat siaran pers di Denpasar, 21 Januari 2022 (Nusabali.com) “Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017 tersebut tersangka menjabat sebagai Ketua BUMDes Amertha Desa Patas. Kerap melakukan penarikan uang tanpa didampingi bendahara, sehingga jumlah kerugian keuangan sebesar Rp. 511.664.752,"

Proses penyidikan mengungkapkan bahwa tersangka melakukan perbuatan melawan hukum beserta beberapa taktik, yang terjadi antara lain yaitu kas yang tidak seimbang yang diciptakan dari kredit palsu. Setiap banjar dinas pada desa tersebut dibuatkan kredit fiktif oleh pelaku, mulai tahun 2013 sampai tahun 2015 timbulnya cash bon dari pengurus, melakukan penarikan uang dengan tidak adanya dampingan dari bendahara dan hanya sekali melakukan penarikan uang dengan bendahara. Tindakan tersangka mengakibatkan BUMDes Amertha Desa Patas mengalami defisit finansial yang berjumlah Rp. 511.664.752.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi salah satunya adalah nilai moral petugas. Terjadinya kecurangan (*fraud*) dipengaruhi oleh tanggung jawab moral dari manajemen instansi atau organisasi. Makin rendahnya nilai moral petugas akan semakin besar pula timbulnya perilaku *fraud*. Hal yang dapat mendorong aparat berlaku curang dalam akuntansi adalah moral yang buruk dari kalangan petugas. Kecurangan akuntansi terkait erat pada tingkatan moral petugas dikarenakan kecurangan akuntansi adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini diperkuat oleh penelitian Suandewi (2021), Laksmi dan Sujana (2019) dan Lestari dan Ayu (2021) membuah hasil bahwa moralitas memeberi pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Masalah kecurangan akuntansi bisa diatasi dengan dilakukannya pengawasan, pengendalian internal yang baik bisa memberikan capaian pengawasan yang baik pula yang mana sangat diperlukan.

Hal yang dapat memberikan peluang kepada manajemen untuk lebih siap mengatasi pergeseran ekonomi, pangsa pasar, dan kompetisi yaitu dengan cara pengendalian internal yang baik. Besarnya kemungkinan munculnya kesalahan dan kecurangan bisa semakin besar terjadi jika pengendalian intern suatu perusahaan lemah. Namun apabila pengendalian intern kuat, berarti peluang akan perbuatan kecurangan bisa dikurangi. Pernyataan ini dikuatkan dengan penelitian Widyawati et al (2019), Paramitha dan Adiputra (2020) bahwa pengendalian intern berdampak pada pencegahan kecurangan (*fraud*).

KAJIAN PUSTAKA

Teori keagenan (*agency theory*) didefinisikan Jensen dan Meckling (1976) yaitu perjanjian antar satu pemilik atau lebih dengan manajer. Kaitan tersebut timbul pada saat satu pemilik atau lebih menyertakan orang lain (*agent*) guna menjalankan sejumlah layanan setelah itu memberikan kewenangan ke *agent* untuk mengambil keputusan. *Agent* mempunyai perjanjian guna memperlihatkan tanggung jawabnya pada *principal*, sebaliknya *principal* mempunyai perjanjian guna menyerahkan tambahan ke *agent*. Sasaran yang pertama dari teori keagenan yaitu demi memperbesar nilai perusahaan dengan cara meningkatkan kesejahteraan pemiliknya.

Fraud diartikan dalam Oxford *English Dictionary* dalam Intal dan Do (2002), yaitu tindak melawan hukum penyelewengan yang memakai penyajian rekayasa guna memperoleh kemakmuran untuk mengambil secara paksa hak dan kepentingan pihak lain. Menurut sudut pandang Tunggal (2005) parameter yang dipakai guna melakukan kalkulasi berhubungan dengan keinginan berbuat curang diambil pada usaha tata pengelolaan pencegahan kecurangan yaitu,

menciptakan budaya yang transparan, saling keterbukaan dan membantu. Pelatihan *fraud awareness*, prosedur seleksi yang adil dan jujur, lingkup kerja yang memberikan dampak positif pada, kode etik yang ada jelas, gampang dimengerti, dan dipatuhi. Tumbuhkan citra bahwa setiap tindak berbuat curang akan menerima hukuman yang sepadan. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan.

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) menyatakan bahwa pengendalian intern ialah suatu pengolahan terpaut oleh perseorangan, manajemen, dan dewan komisaris, guna memberi kepercayaan untuk mencapai stabilitas suatu laporan, memelihara kesejahteraan, ketaatan kepada hukum, serta efisiensi dan efektivitas prosedur (Zamzami, 2016).

Sebelumnya, penelitian yang dilakukan Suandewi (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan). Hasil pengamatan ini menyatakan yaitu moralitas memberi pengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Laksmi dan Sujana (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Mengelola Dana Desa. Pengamatan ini memberikan hasil yaitu moralitas memberi pengaruh positif pada pencegahan kecurangan (*fraud*). Lestari dan Ayu (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Pengamatan ini memberikan hasil yaitu moralitas berpengaruh pada pencegahan kecurangan. Yusuf, dkk (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah). Pengamatan ini memberikan hasil yaitu moralitas dan pengendalian intern memberikan pengaruh secara simultan pada pencegahan kecurangan. Penelitian yang dilakukan Usman, dkk (2015) dengan judul Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). Dari pengamatan ini memberikan hasil yaitu pengendalian intern tidak berdampak pada pencegahan kecurangan.

Maka dari itu hipotesis yang ada di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Moralitas memberi pengaruh pada pencegahan kecurangan (*fraud*) di Bumdes Amertha Desa Patas

Teori dari perkembangan moralitas individu menunjukkan bahwa tingkat pemikiran moral setiap individu akan memengaruhi perilaku etis yang dihasilkan, watak yang diperlihatkan dari personal serta tingkat pemikiran moral yang baik sangat berlawanan dengan personal yang mempunyai tingkat pemikiran moral yang buruk saat mengatasi kesulitan pilihan moral. Ini mengungkapkan bahwa makin baik tingkat pemikiran etis personal akan memperendah potensi personal untuk berbuat suatu kecurangan, akan tetapi semakin rendah tingkat penalaran moral setiap orang maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan semakin tinggi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Suandewi (2021), Laksmi dan Sujana (2019) dan Lestari dan Ayu (2021) yang menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh moralitas.

H₂ : Pengendalian intern berpengaruh pada pencegahan kecurangan (*fraud*) di Bumdes Amertha Desa Patas

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) menyatakan bahwa pengendalian intern yaitu pengolahan terpaut oleh perseorangan, manajemen, dan dewan komisaris, guna memberi kepercayaan untuk mencapai stabilitas suatu laporan, memelihara kesejahteraan, ketaatan kepada hukum, serta efisiensi dan efektivitas prosedur (Zamzami, 2016). Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Widyawati et al (2019), Paramitha dan Adiputra (2020) memberikan hasil pengendalian intern memberi pengaruh pada pencegahan kecurangan (*fraud*).

METODELOGI PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif tipe kausalitas digunakan pada penelitian ini. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Bumdes Amertha Desa Patas, data-data dari penelitian didapat dari penyebaran kuisisioner kepada responden. Data kuantitatif adalah jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu penelitian ini merupakan jawaban dari responden atas instrumen pernyataan kuesioner yang disebar. Sampel jenuh adalah sampel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu cara penentuan sampel jika semua populasi anggota dipergunakan menjadi sampel. Populasi pada penelitian ini adalah 13 orang pejabat pemerintah desa dan 17 orang pengelola Badan Usaha Milik Desa. Jadi total sampel adalah 30 orang.

Berasal dari pengamatan di atas, studi ini menggunakan analisis PLS-SEM umumnya terdapat dua sub model yang pertama yaitu model pengukuran (*outer model*) dan yang kedua yaitu

model structural (*inner model*). Model pengukuran yakni *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, *Reliability*. Model Struktural (*Inner Model*) yakni *R-square*, *F-square* dan *Path Analysis*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden yang terdiri dari pejabat Desa Patas beranggotakan 13 orang dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amertha Desa Patas yang berjumlah 17 orang. Rata-rata jawaban responden atas pernyataan kuesioner terkait moralitas (X1) cukup baik yaitu sebesar 2,73. Rata-rata jawaban responden pada pernyataan kuesioner terkait sistem pengendalian intern (X2) cukup baik yaitu sebesar 3,08. Rata-rata jawaban responden atas pernyataan kuesioner terkait pencegahan kecurangan (*fraud*) (Y1) cukup baik yaitu sebesar 2,90. Hasil penghitungan *outer loading* menyatakan bahwa indikator-indikator sudah mencukupi syarat untuk valid didasarkan pada standar *discriminant validity* ialah nilai *outer loading* diatas 0,60. Variabel bisa dikatakan layak jika akar AVE (\sqrt{AVE}) tiap konstruk lebih dari nilai korelasi antara konstruk dan tiap-tiap nilai AVE lebih dari 0,50 (Lathan dan Ghozali, 2012:78-79). Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa nilai AVE masing masing konstruk lebih besar dari 0,50 maka syarat valid bisa terpenuhi didasarkan pada kriteria *discriminant validity*. Hasil pengukuran bisa dibilang dapat dipercaya, jika *composite reliability* dan *cronbach alpha* mempunyai hasil lebih dari 0,70. *Composite reliability* dan *Cronbach alpha* yaitu perhitungan konsistensi antara blok indikator. Nilai dari *composite reliability* dan *Cronbach Alpha* dari hasil perhitungan menyatakan bahwa setiap konstruk memberikan nilai lebih dari 0,60 berarti syarat reliabilitas telah terpenuhi didasarkan pada standar *composite reliability*.

Pengukuran model struktural ini diproses dengan cara, antara lain : a. *R-Square* (R^2), b. *f Square*, c. *Path Analysis*. Hasil perhitungan membuktikan bahwa nilai R^2 akuntabilitas pencegahan kecurangan 0,338 berdasar pada acuan Chin (Ghozali, 2021), sehingga model ini tergolong dalam acuan model moderat, maksudnya yaitu keragaman sistem keuangan desa, partisipasi penganggaran, dan pengawasan sebesar 33,8%. Variabel moralitas memiliki nilai *f square* 0,181 lebih besar atau sama dengan 0,15 maka variabel moralitas termasuk ke dalam medium effect. Sedangkan unsur sistem pengendalian intern mempunyai nilai *f square* 0,160 lebih dari 0,15 maka variabel sistem pengendalian intern juga termasuk ke medium effect.

TABEL 4.1 PATH ANALISIS DAN PENGUJIAN STATISTIK

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 Moralitas -> Y Pencegahan Kecurangan (Fraud)	0.367	0.394	0.176	2.083	0.037
X2 Sistem Pengendalian Intern -> Y Pencegahan Kecurangan (Fraud)	0.345	0.346	0.174	1.986	0.047

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa:

1. Moralitas memberi pengaruh positif yaitu sebesar 0,367 pada pencegahan kecurangan dan kaitan tersebut yaitu di tingkat 0,05 serta t-statistik 2,083 yaitu 1,96 lebih besar dari nilai t-tabel.
2. Sistem pengendalian intern memberi pengaruh positif sebesar 0,345 pada pencegahan kecurangan dan kaitan tersebut besar di tingkat 0,05, serta t-Statistik 1,986.

Hipotesis pertama (H1) menerangkan bahwa pengaruh moralitas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) menunjukkan bahwa moralitas memberi pengaruh positif dan signifikan pada pencegahan kecurangan (*fraud*). Maka dari itu hipotesis pertama pada penelitian ini yang memperlihatkan bahwa moralitas memberi pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat diterima (H1 didukung). Sesuai dengan Duska (1982) teori moral adalah wujud ekspresi yang diungkapkan seseorang menurut nilai hukum dan norma yang berlaku sesuai dengan lingkup setiap orang. Teori perkembangan moralitas individu menandakan tingkat pemikiran moral yang dimiliki oleh seseorang akan memberi pengaruh perilaku etis yang dihasilkan, perilaku yang diperlihatkan oleh setiap orang bersama dengan tingkat pemikiran akhlak atau moral yang baik akan sangat berlawanan pada orang yang mempunyai tingkat pemikiran akhlak atau moral yang buruk saat melawan dilema moral ataupun etika. Hal tersebut mengungkapkan bahwa makin tinggi tingkat pemikiran akhlak atau moral seseorang maka semakin kecil kemungkinan orang tersebut

untuk melakukan perbuatan curang, sedangkan sebuah keinginan untuk melakukan perbuatan curang akan tinggi saat tingkat pemikiran akhlak ataupun moral seseorang itu rendah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Suandewi (2021), Laksmi dan Sujana (2019), dan Lestari dan Ayu (2021) yang memberikan hasil yaitu moralitas memberi pengaruh pada pencegahan kecurangan (*fraud*).

Hipotesis kedua (H2) menerangkan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memberi pengaruh positif dan kuat pada pencegahan kecurangan (*fraud*). Maka dari itu hipotesis yang kedua yang ada dalam penelitian ini menyimpulkan yaitu sistem pengendalian intern memberi pengaruh pada pencegahan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) dapat diterima (H2 didukung). Pengendalian Internal adalah suatu prosedur atau kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi kerugian akibat kemungkinan ancaman terhadap keamanan informasi dan untuk memastikan bahwa fokus perusahaan bisa tercapai. Committee of Sponsoring Organizations (COSO) menyatakan bahwa pengendalian intern ialah suatu pengolahan terpaut perseorangan, pengurus, dan dewan komisaris, guna memberi kepercayaan untuk mencapai stabilitas suatu laporan, memelihara kesejahteraan, ketaatan kepada hukum, serta efisiensi dan efektivitas prosedur (Zamzami, 2016). Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Widyawati et al (2019), Paramitha dan Adiputra (2020) memberikan hasil bahwa pengendalian intern memberi pengaruh pada pencegahan kecurangan (*fraud*).

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Moralitas memberi pengaruh positif dan signifikan pada pencegahan kecurangan (*fraud*). Ini menunjukkan kian baik moralitas individu sehingga semakin bisa mencegah terwujudnya kecurangan (*fraud*).
- 2) Sistem pengendalian intern memberi pengaruh positif dan signifikan pada pencegahan terjadinya tindak curang (*fraud*). Ini menunjukkan bahwa kian baik sistem pengendalian intern akan menjadi semakin bisa kecurangan (*fraud*) itu bisa dicegah.

Beberapa saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu diharapkan memperluas objek penelitian dan menambahkan variabel yang terkait pencegahan kecurangan, moralitas dan sistem pengendalian intern. Serta memperluas populasi agar hasil penelitian mampu memiliki tingkat generalisasi yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Alison.2004.*Fraud Auditing*.The Internal Auditing Jurnal
- Coso.2013.Internal Control – Integrated Framework.*Exdecutive Summary*
[Www.Coso.Org](http://www.coso.org). Diakses Tanggal 5 November 2019.
- Dewi, P.F.K., G.A.Yuniarta, M.A.Wahyuni. 2017. Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, Dan Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi Pada Desa Kabupaten Buleleng).*E-Journal SI.Ak Universitas Pendidikan Ganessa*.
- Duska, Roland. Dan Mariellen Whelan. 1982. *Perkembangan Moral*.Yogyakarta: Yayasan Kanisius
- Ghozali, Imam.2021.*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Intal, Tiina & Linh Thuy Do. 2002. Financial Statement Fraud-Recognition Of Revenue And The Auditor’s Responsibility For Detecting Financial Statement Fraud. Accounting And Finance Master Thesis. Goteborg University.
- Jensen, M. & Meckling, W. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, And Ownership Structure. Journal Of Financial Economics, Vol. 3: 305-360.
- Laksmi, Putu Santi Putri Dan Sujana, I Ketut. 2019. Pengaruh Kompetensi Sdm, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*
- Lestari, Ida Ayu Mega Evia Dan Ayu, Putu Cita. 2021. Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Juli 2021*’
- Nikmatia, Dkk.(2021). Pengaruh Moralitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dana Bumdes Di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo*
- Suandewi, Ayu Ni Kadek.2021.Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Sistem Pengendalian Intern Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Juli 2021*
- Tunggal, Amin Widjaja. 2005. *Audit Kecurangan*. Jakarta: Harvindo
- Paramitha, Ni Putu Yulia Dan Adiputra, I Made Pradana. 2020. Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan

Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol : 11 No : 2 Tahun 2020 Eissn: 2614 – 1930

Puspita,Dkk.2021.Analis Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi Dan Moralitas Manajemen Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Persediaan Di Pt Rinjani Farma. *Jurnal Ganesha*

Widyawati,Dkk.2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bumdes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 10 No: 3 Tahun 2019 E-Issn: 2614 – 1930

www.Nusabali.Com

Yusuf, Dkk.2021. Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah). *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*

Zamzami, F., Faiz, I.A., Mukhlis.2016.*Audit Internal: Konsep Dan Praktik. Yogyakarta: Ugm Press*

Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Mengwi

Ni Kadek Dwi Yuliantari ⁽¹⁾

Ni Komang Sumadi ⁽²⁾

I Wayan Budi Satriya ⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jalan Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
 e-mail: dwiyuliantari7@gmail.com

ABSTRACT

This study was carried out in order to obtain results from the impact of the whistleblowing system, internal control system, and competence of village officials to prevent fraudulent activity in the use of village funds in Mengwi District. The study population is 328 people who work as village officials, in 15 villages in the Mengwi District. This study used 120 people as a sample with the principle of non-probability sampling implemented by purposive sampling. The next test is applied, namely data validity test, classical assumption test and multiple regression analysis test. This study found that the Whistleblowing System, Internal Control System and Competence of Village Apparatuses have positive effects on Fraud Prevention in Village Fund Management.

Keywords: *whistleblowing system, internal control system, competence of village officials, fraud*

PENDAHULUAN

Desa ialah jembatan pemerintah dalam melakukan pembangunan, hal ini karena pembangunan yang ada di tingkat desa akan langsung berdampak pada masyarakat. Jadi dana itu menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan warga desa. Diperolehnya dana desa itu menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah desa untuk bisa mengelolanya dengan baik dan benar untuk peningkatan kesejahteraan serta pembangunan desa.

Dikelolanya dana desa oleh pemerintah desa harus secara efektif dengan visi yang sudah ditetapkan lewat musyawarah bisa diraih secara maksimal. Diberikannya bantuan dana desa itu menjadi sebuah kewajiban pada pemerintah desa sebagai penanggungjawab pada tingkat desa untuk mampu mengelola serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya peningkatan pada kesejahteraan masyarakat desa serta memberikan arti pada pembangunan desa.

Fraud ialah sebuah perilaku yang melanggar norma-norma bermasyarakat serta tindakan yang hanya menguntungkan pelaku dan merugikan banyak orang (IAPI, 2013). Jadi diperlukan tindakan pencegahan dalam mengelola dana desa supaya kecurangan tersebut bisa diminimalisir. Tindakan pencegahan kecurangan dijalankan untuk menghindari penipuan, manipulasi, plagiarisme, pencurian oleh oknum tertentu untuk mengeruk kepentingan pribadi. Untuk

menanggulangi hal tersebut diperlukan cara yang tepat. Pencegahan tindakan kecurangan untuk pengelolaan sebuah dana desa dapat dilakukan melalui penerapan *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal, dan peningkatan kompetensi aparaturnya.

Kasus penyalahgunaan anggaran dana desa sampai sekarnag masih ada di desa itu, contohnya persoalan korupsi yang ada di Kecamatan Mengwi. Kasus tersebut mengenai dugaan korupsi dari Kepala Desa Baha, Kecamatan Mengwi, yang memberikan kerugian pada negara yakni Rp 1,006,633,856.95. Kepala Desa Baha dicurigai menjalankan praktik korupsi APBDes TA 2016/2017. Dalam anggaran tahun 2016, Desa Baha memperoleh anggaran yakni Rp 7,8 miliar yang diperoleh dari pendapatannya, baik dari pajak, pemerintah pusat, bantuan dan pendapatan asli daerah itu sendiri. Namun pada pelaksanaannya ada program yang tidak dijalankan serta masih ada anggaran yang diam sebanyak Rp 835,2 jt di rekening terdakwa. Sesudah adanya inpeksi dari Inspektorat Pemerintah Kab. Badung ditemukan selisih setelah dibandingkan saldo pada pencatatan desa dengan saldo yang terdapat pada rekening desa. Dimana pada pencatatan buku kas desa tercantum dana Rp 835,2 jt, namun aslinya pada bank hanya ada Rp 26,7 jt, jadi didapat selisih sebanyak Rp 776.453.611 (Miasa, 2019).

Kasus korupsi APBDes juga ada di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi. Mantan perbekerl Mengwitani menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan kegiatan korupsi APBDes membuat Negara rugi sebesar Rp 1.227.031.888,06. Pemerolehan dana APBDesa Mengwitani pada 2014 masuk sebanyak Rp 6,5 miliar. Jadi dari dana tersebut terakumulasi pengeluaran sebanyak Rp 5,3 miliar dimana seharusnya tersisa Rp 1,2 Miliar. Tapi setelah diselidikit oleh Tim Inspektorat Kabupaten Badung mendapati sisa anggaran hanya ada sebanyak Rp 3,2 juta lebih. Selisih yang diperoleh sangatlah besar hal ini menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab tidak dapat mempertanggungjawabannya (Miasa, 2018).

KAJIAN PUSTAKA

Fraud atau kecurangan ialah sebuah kegiatan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat. Mengacu pada konsep dari Cressey dalam Clinton (2015), penyebab adanya tindakan kecurangan berasal dari *Fraud Triangle Theory* dimana tersusun atas *Pressure, Opportunity, Rationalization* (3). Studi ini lebih mengarah pada pemakaian konsep *Fraud Triangle*, hal ini disebabkan karena pada studi ini variable yang diterapkan ialah proksi dari tiga unsur dari teori *Fraud Triangle*.

Studi ini condong memakai teori *Fraud Triangle* karena pada konsep ini memaparkan pentingnya sustu instansi bisa mengurangi terjadinya kecurangan (*fraud*). Seorang dengan sikap

yang bertanggungjawab yang tinggi atas tugas yang diemban, akan condong tidak akan melakukan tindakan-tindakan kecurangan.

Satu dari sekian usaha *whistleblowing system* yakni memberikan laporan atas apa yang telah dijalankan oleh anggota dari organisasi baik itu yang aktif maupun tidak, dimana itu tindakan yang melanggar maupun tidak melanggar baik yang ada di lingkungan kerja organisasi maupun luar. Sistem ini ialah sebuah wadah yang menjadi sarana dari *whistleblower* untuk melaporkan kegiatan kecurangan (Dewi et al., 2022). *Whistleblowing system* ialah alat yang tepat dan baik dalam mendeteksi serta mencegah adanya kecurangan.

H1: *Whistleblowing System* Berdampak Positif Kepada Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan KEMESDA Nomor 19 Tahun 2015 memberikan definisi Sistem Pengendalian Internal (SPI) ialah kegiatan yang dijalankan secara berkelanjutan oleh atasan dan pegawai guna menciptakan keyakinan ketercapaian visi organisasi yang dibentuk dengan kegiatan sebaik mungkin, laporan keuangan yang andal, asset negara yang diamankan, mematuhi peraturan yang berlaku.

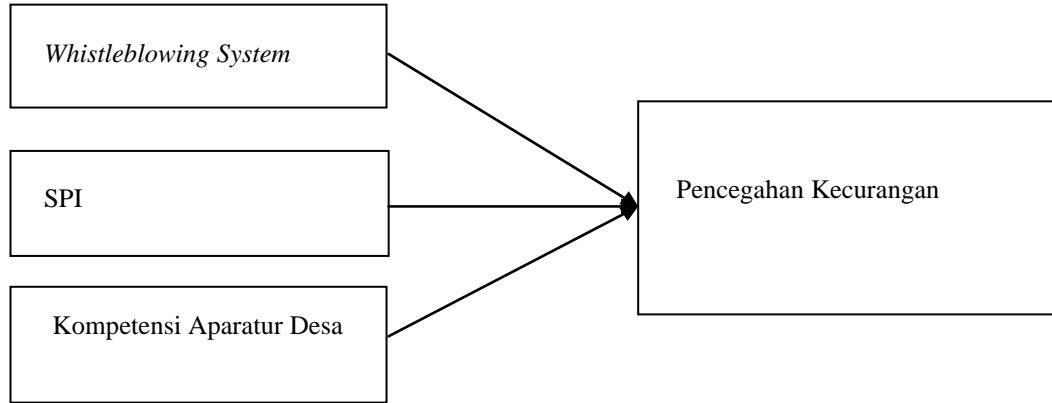
H2: Sistem Pengendalian Internal Berkontribusi Secara Positif Kepada Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi aparatur ialah kemampuan yang ada pada diri aparatur tersebut baik itu pengetahuan, sikap, dan lainnya yang harus ada dalam diri mereka demi bisa menjalankan seluruh tugas yang diberikan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab penuh (Chalida et al., 2022).

H3: Kompetensi Aparatur Berkontribusi Secara Positif Kepada Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa.

DESAIN PENELITIAN

Pada studi ini kerangka pemikiran peneliti ini adalah *whistleblowing system*, SPI, serta kompetensi aparatur desa kepada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Mengwi. Desain studi dapat digambarkan yakni :



Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 328 orang dengan posisi menjadi perangkat desa pada 15 desa yang tercatat di Kecamatan Mengwi. Studi ini mengambil sampel sebesar 120 orang yang diambil dari metode *non-propability sampling* yakni melewati cara *purposive sampling*, dimana sampel dipilah dengan kriteria yang sudah ditentukan.

HASIL PENELITIAN

Data studi diambil dengan bantuan kuesioner yang diberikan pada 15 Desa di Kecamatan Mengwi. Kuesioner disebarkan sebanyak 120 dan semua kuesioner kembali seluruhnya.

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Wistleblowing	120	22.00	35.00	27.6167	3.25185
SPI	120	39.00	55.00	46.9083	3.83043
Kompetensi	120	44.00	65.00	57.6417	5.47077
Pencegahan <i>Fraud</i>	120	20.00	30.00	25.6583	2.85944
Valid N (listwise)	120				

Hasil untuk statistic deskriptif ialah sebagai berikut:

Melalui hasil diatas terlihat bahwa variabel Pencegahan Fraud (Y) memperlihatkan skor rata-rata > standar deviasi artinya data studi ini berjenis homogen, artinya aparatur desa di Kecamatan Mengwi memiliki pencegahan fraud yang sama. Skor rata-rata mengarah ke skor artinya bahwa aparatur desa di Kecamatan Mengwi memiliki pencegahan fraud yang cenderung tinggi.

Melalui hasil diatas terlihat bahwa variabel Whistleblowing System (X1) memperlihatkan skor rata-rata > standar deviasi artinya data studi ini berjenis homogen, artinya aparatur desa di Kecamatan Mengwi memiliki Whistleblowing System yang kurang lebih sama. Skor rerata

mengarah ke skor minimum penjabarannya ialah aparatur desa di Kecamatan Mengwi memiliki Whistleblowing System yang cenderung tinggi.

Melalui hasil diatas terlihat bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) memperlihatkan skor rata-rata > standar deviasi artinya data studi ini berjenis homogen, artinya aparatur desa di Kecamatan Mengwi punya system pengendalian internal yang kurang lebih sama. Skor rata-rata mengarah ke nilai maksimum artinya aparatur desa di Kecamatan Mengwi memiliki sistem pengendalian internal yang cenderung tinggi.

Melalui hasil diatas terlihat bahwa variabel Kompetensi Aparatur (X3) memperlihatkan skor rata-rata > standar deviasi artinya data studi ini berjenis homogen, artinya aparatur desa di Kecamatan Mengwi memiliki Kompetensi Aparatur Desa yang kurang lebih sama. Skor rerata mengarah ke nilai maksimum yang menunjukkan bahwa aparatur desa di Kecamatan Mengwi memiliki Kompetensi Aparatur Desa yang cenderung tinggi.

Tabel 2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik			
Jenis uji	Hasil		Keterangan
Uji normalitas	Asymp. Sig (2-tailed)	0,06	0,060 > 0,05 jadi data penelitian ini berdistribusi normal
Uji multikolinieritas	VIF	1.529	Nilai VIF <10 dan tolerance > 0,1 artinya data studi bebas dari multikolinieritas
		1.479	
		1.914	
	Tolerance	0.654	
		0.676	
Uji heteroskedastisitas	Sig	0.773	Sig > 0,05 artinya penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas
		0.996	
		0.074	

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Standardized Beta	T-Hitung	Sig.	Keterangan
<i>Constant</i>	-4.773	1.953	.016	
<i>Whistleblowing system</i>	.164	2.568	.011	Signifikan
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	.352	5.612	.000	Signifikan
Kompetensi Aparatur Desa (KAD)	.469	6.567	.000	Signifikan
R2	0.683			
F Statistik	86.565			
P-value	0,000			
Unsur Dependen	Pencegahan Kecurangan			

Dari table ini, dapat dibuatkan fungsi regresi sebagai berikut.

Pencegahan *Fraud* = -4,773 + 0,164X1 + 0,352X2 + 0,469X3 + ε

ialah adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran. Sebuah organisasi dengan system keamanan yang baik dan berjalan dengan ketat, cenderung tidak akan ada kejadian tindakan-tindakan kecurangan. Pencegahan sebuah *fraud* bisa dijalankan dengan baik bilamana sistem pengendalian internal yang diimplementasikan organisasi dengan benar dan tanpa pandang bulu. Salah satu unsur untuk sistem pengendalian internal ialah kegiatan dalam bidang pengawasan yang langsung berhadapan dengan system penilaian yang berkelanjutan (Az-Zahra et al., 2021). Sistem pengendalian internal yang efektif akan membantu melindungi aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran. Sistem pengendalian internal sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi, fraud dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang tersebut dapat diminimalisir dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif. Hasil studi ini memiliki hasil yang konsisten dengan studi dari (Romadaniati et al., 2020) dengan hasil SPI mempunyai dampak kepada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa pada Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Melalui Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel Tabulasi menyatakan hipotesis 3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa memiliki pengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan fraud triangle oleh Cressey dalam Clinton (2015) dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa ada tiga situasi yang mendukung terjadinya sebuah kecurangan. Dimana tiga kondisi tersebut ialah adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran. Seorang yang mempunyai sikap yang bertanggungjawab yang tinggi atas tugas yang dibebankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada di masyarakat, cenderung tidak akan melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Kompetensi Aparatur Desa merupakan kompetensi yang berkaitan dari kemampuan seseorang untuk berfikir baik dan positif dengan berhubungan dari pemecahan masalah. Pada kompetensi aparatur desa harus menggunakan pemahaman akuntansi yang baik sehingga nantinya mampu menyebabkan pengelolaan keuangan yang professional dan baik sehingga dapat menanggulangi potensi

terjadinya kecurangaan (Islamiyah et al., 2020). Sesungguhnya aparaturnya mengemban kewajiban dan tanggung jawab harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dengan terlibatnya masyarakat yang berperan memantau dan menilai diharapkan dapat mengurangi tingkat penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparaturnya desa (Aprilia & Yuniasih, 2021). Semakin tinggi kompetensi aparaturnya desa dengan memaksimalkan system pengendalian internal maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan mencegah terjadinya kecurangaan atau fraud. Oleh karena itu Pemerintah setempat berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan pemerintah baik melalui pendidikan maupun pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Hasil studi ini sejalan dengan studi dari (Dewi et al., 2022). Kompetensi Aparatur Desa Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun beberapa kesimpulan yang bisa peneliti berikan setelah melakukan studi ini ialah:

1. *Whistleblowing System* mempunyai pengaruh positif kepada Pencegahan Kecurangaan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Artinya semakin baik *whistleblowing system* yang ada dalam pemerintah desa di Kecamatan Mengwi akan lebih baik dalam mencegah sebuah keurangaan pada pengelolaan dana desa.
2. SPI berdampak ke arah positif kepada Pencegahan Kecurangaan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Kesimpulannya semakin baik SPI pada pemerintahan desa membuat pencegahan adanya *fraud* pada pengelolaan dana desa semakin tinggi.
3. Kompetensi Aparatur Desa mempunyai dampak kepada Pencegahan Kecurangaan Pada Pengelolaan Dana Desa. Artinya semakin baik kompetensi aparaturnya desa dan sadar akan tanggungjawabnya maka akan memberikan kontribusi yang positif pada pencegahan kecurangaan pada tatakelola dana desa di Kecamatan Mengwi.

SARAN

1. Saran peneliti untuk studi ini ialah agar memperhatikan Kompetensi Aparatur, SPI dan *whistleblowing system* karena mempunyai andil yang penting meningkatkan pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Mengwi.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebisa mungkin menggunakan unsur lainnya yang menjadi factor dalam mencegah kecurangaan dalam pemakaian dana desa, selanjutnya peneliti juga

bisa mengambil sampel yang lebih luas lagi seperti pengambilan yang berskala Kabupaten untuk bisa mendapatkan hasil studi yang dapat diperbandingkan.

Daftar Pustaka

- Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Whistleblowing *System*, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 185. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25933>
- Aprilia, K. W. I., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangandes (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 25–45. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK>
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesityy terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Ayu Az-Zahra, R. S., Jaelani, A., & Nursi, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada PT. Bank KEB Hana Indonesia Wilayah Jakarta. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2(2), 38–44. <https://doi.org/10.34306/abdi.v2i2.555>
- Chalida, N. N., Pramita, Y. D., & Maharani, B. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Sensitivity Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)*.
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- IAPI. (2013). *Standar Audit (SA 220)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Miasa. (2018). *Korupsi APBDes Mantan Prebeker Mengwitani Dihukum 15 Bulan*. Balipost.Com.

Miasa. (2019). *Sidang Korupsi APBDES, Oknum Perbekel Baha Dipenjara 4,5 Tahun*. Balipost.Com.

Riyanto, R. F., & Arifin, Z. (2022). Efektivitas Whistleblowing System Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian *Fraud*. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 105–122. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12922>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.

Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against *Fraud* Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06>

Widyani, I. G. A. A. T., & Wati, N. W. A. E. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa Dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud* Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 160–187.

Pengaruh Komitmen Organisasi, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*) Pada LPD Se-Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Pande Putu Valentini⁽¹⁾

I Wayan Sudiana ⁽²⁾

I Putu Deddy Samtika Putra ⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jalan Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: valentini12345.ppv@gmail.com

ABSTRACT

Currently, there are many fraud cases in Indonesia. Financial institutions are the organizations most affected by this action. This study was conducted to find factors that may influence cheating propensity in LPD. B. Impact of organizational involvement, effectiveness of internal controls, and good corporate governance practices. All employees work at his LPD in the Kintamani district with a total population of 244. In this study, up to 71 individuals were sampled using probability sampling and tested using multiple linear regression analysis techniques. The results of this study show that increased organizational commitment, effective internal controls, and good corporate governance implementations can reduce the likelihood of fraud. In the future, it is hoped that this research will be used to guide his LPD when developing anti-fraud strategies within the organization.

Keywords: *Organizational Commitment, Internal Control, Good Corporate Governance, Fraud*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi saat ini semakin berkembang dan menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif. Saat ini pengaruh yang dominan adalah kasus kecurangan di perusahaan. Menurut Karyono (2002) Dewi dan Atmadja (2017), fraud termasuk tindakan melawan hukum yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan jika dapat dilakukan oleh orang internal maupun eksternal perusahaan. Saat ini kasus penipuan banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang paling mungkin mengalami peristiwa ini. Lembaga keuangan berperan penting dalam upaya menghidupkan kembali perekonomian negara. Lembaga keuangan memainkan peran dominan dalam transaksi keuangan negara di tingkat kabupaten dan desa. LPD merupakan lembaga karena transaksi keuangan banyak terjadi baik di tingkat kabupaten dan desa, terutama di lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Salah satu lembaga keuangan tingkat desa khususnya di Provinsi Bali disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Ada juga beberapa kasus penipuan di LPD. Seperti kasus LPD Kecamatan Kintaman Kabupaten Bangli yaitu LPD Langgahan yang mengalami kerugian lebih dari Rp2,7 miliar. Berawal dari laporan nasabah yang tidak dapat mencairkan tabungan dan deposito yang dititipkan di LPD Langgahan. Kasus korupsi ini menyebabkan negara, dalam hal ini LPD Langgahan, mengalami kerugian sebesar Rp. 2.793.225.515, menurut investigasi berdasarkan hasil audit perusahaan audit independen K. Gunarsa. Dari total kerugian negara Rp 2,793 miliar, I Made M diduga menikmati Rp 1,961 miliar setiap bulan selama 9 tahun. “Rata-rata setiap bulan dikalikan 3 juta rupiah, dikalikan 5 juta rupiah,” ujar mantan Kasat Reskrim Polsek Kuta Utara Badung, Bali itu. Dalam kasus ini, tersangka mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 1.073.517.500. Sementara itu, sisa Rp. 887.944.000 tidak dikembalikan. Tersangka melakukan tindak pidana korupsi dengan mengambil uang LPD secara tunai dan juga menggunakan simpanan (tabungan sosial). Ini terjadi antara tahun 2009 hingga 2018. Mi Made M juga tidak menyetorkan tabungan pelanggan yang disetorkan. Untuk setoran, pelanggan menerima tanda terima, tetapi uangnya tidak disetorkan secara tunai. Tersangka menggunakan uang itu untuk berjudi dan kebutuhan sehari-hari. Meski mantan bendahara LPD telah ditetapkan sebagai tersangka, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. (*bali.tribunnews.com/2022*).

Terjadinya kecurangan dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Tingginya komitmen manajer dan karyawan terhadap organisasi dapat membuatnya enggan berbuat curang (Widiutami, dkk, 2017). Meningkatkan komitmen organisasi karyawan mengurangi penipuan. Rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi maka karyawan tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat curang (Lyana dan Sujana, 2021).

Berdasarkan penelitian (Waluyo, 2006) dalam (Widiutami, dkk 2017), bahwa pengawasan yang baik diperlukan untuk meminimalkan masalah kecurangan dengan berusaha meningkatkan efektivitas pengendalian internal, termasuk reformasi perundang-undangan, perbaikan sistem pengendalian dan pengawasan serta penerapan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Peneliti KPK menemukan bahwa pengendalian internal yang lemah dalam organisasi menciptakan peluang terjadinya kecurangan (Helmjaya, 2014). Buruknya sistem pengawasan dapat menyebabkan individu melakukan penipuan dan melanggar hukum.

Penerapan *good governance* juga mempengaruhi terjadinya fraud. Dengan adanya penerapan *good governance* di organisasi akan meminimalkan kecenderungan terjadinya kecurangan. Tingginya penerapan *good governance* dapat meminimalisir kecenderungan untuk berbuat curang (Dewi dan Atmadja, 2021). Peningkatan penegakan tata kelola yang baik telah menyebabkan pengurangan penipuan. Sebaliknya, jika prinsip *good governance* tidak

diterapkan, maka kecenderungan terjadinya kecurangan akan meningkat. (Lyana dan Sujana, 2021).

KAJIAN PUSTAKA

Fraud Triangle Theory dijadikan landasan teori pada studi ini. Teori ini menyebutkan bahwasanya ada 3 faktor penyebab terjadinya kecurangan, yakni tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran atas perbuatan tersebut. Nitimiani dan Suardika (2020), menjelaskan kecenderungan adalah keinginan, preferensi melakukan suatu hal, atau dorongan diri untuk menipu atau menipu ketika itu bisa dilakukan, diberi kesempatan atau tekanan untuk melakukannya. . Robin & Judge (2007) dalam Widiutami dkk (2017) mendefinisikan Komitmen sebagai kondisi ketika individu berada di pihak organisasi dan tujuannya serta ingin mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Pengendalian internal mencakup proses, prosedur dan kebijakan dari pihak manajemen untuk menyakinkan bahwa laporan keuangan yang dibuat tersebut andal dan mengikuti ketentuan akuntansi yang berlaku. *Good governance* adalah sistem pengendalian internal perusahaan yang ditujukan untuk mengelola risiko perusahaan dalam mencapai tujuan melalui upaya perlindungan terhadap aset milik perusahaan, dan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai investasi bagi *shareholder* (Effendi, 2009).

Widiutami, Sulindawati, dan Atmadja (2017) mengungkapkan bahwasanya efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, komitmen organisasi secara parsial mempengaruhi negatif signifikan pada kecenderungan kecurangan akuntansi, dan ketiga variable tersebut secara simultan mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Nitimiani dan Suardika (2020), moralitas individu, Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil kajian dari Lyana dan Sujana (2021) menyatakan bahwa secara parsial komitmen organisasi dan *good governance* mempengaruhi negatif signifikan pada kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan *locus of control* mempengaruhi positif signifikan terhadapnya.

Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi paham betul mengenai tugasnya dalam organisasi, dimana dalam menjalankan tugasnya tersebut diniatkan untuk mencapai tujuan organisasi bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, komitmen organisasi berpengaruh pada kecenderungan karyawan untuk berbuat curang. Semakin besar komitmen seorang karyawan terhadap organisasi, semakin banyak kecurangan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Tingkat loyalitas yang tinggi terhadap agensi mengindikasikan bahwa karyawan tersebut berkomitmen yang kuat terhadap agensi.

Meningkatkan komitmen organisasi karyawan mengurangi penipuan. Sebaliknya, karyawan yang komitmen organisasinya rendah biasanya cenderung untuk berbuat curang meningkat. Didasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan hipotesisnya yaitu:

H1: Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Efektivitas pengendalian internal merupakan keberhasilan operasi perusahaan atau tindakan yang diambil untuk mewujudkan tujuan tertentu melalui pelaporan keuangan yang berkualitas, memastikan efektivitas dan efisiensi operasi Perusahaan, dan menjamin ketaatan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Pengendalian internal memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Ketika pengendalian intern tidak berjalan dengan baik dan prosedur tidak dijalankan dengan baik, hal ini membuka peluang terjadinya kecurangan bagi pegawai yang terlibat dalam kegiatan operasional LPD dan sebaliknya, ketika pengendalian intern berjalan dengan baik, maka akan menghilangkan peluang terjadinya kecurangan. Didasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan hipotesisnya yaitu:

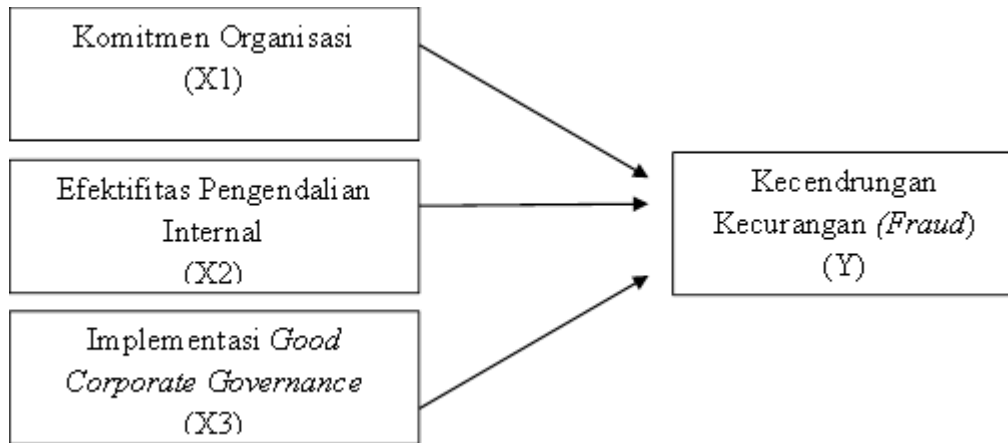
H2: Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Good governance adalah proses pengendalian pengelolaan organisasi dengan baik melalui upaya pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan. Penerapan *good governance* secara optimal menghilangkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Penelitian Dewi dan Atmadja (2021) menemukan bahwa penerapan *good governance* berdampak negatif signifikan pada tindakan curang. Artinya, tata kelola yang baik dapat mencegah tindakan curang. Semakin tinggi tingkat tata kelola yang baik, semakin rendah kecenderungan terjadinya kecurangan. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Lyana dan Sujana, pada tahun 2021 penerapan *good governance* mempengaruhi negatif signifikan pada tindakan curang. Didasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan hipotesisnya yaitu:

H3: Implementasi *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni penelitian kuantitatif adalah data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang dapat dinyatakan sebagai satuan hitung (Sugiyono, 2009).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Populasi penelitian ini yaitu pegawai LPD di wilayah Kintamani. LPD yang dijadikan lokasi penelitian sebanyak 56 LPD dan 244 pegawai. Jumlah sampelnya yaitu 244 orang yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin, dengan jumlah sampel ditetapkan sebanyak 71 orang. Teknik analisis data penelitian dengan beberapa uji berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas diperuntukan guna mengukur ketepatan jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden. (Gozali, 2001).

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas penelitian penting untuk memastikan data memiliki respon yang konsisten dari waktu ke waktu, yang ditunjukkan dengan nilai alpha > 0,60. .

3. Uji Normalitas

Tujuan pelaksanaan uji ini adalah untuk melihat data penelitian ini berdistribusi normal yang dibuktikan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Level sig. nilai tes harus > 0,05 (Ghozali: 2011).

4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas ini dilakukan guna menunjukkan bahwa tidak ada bias multikolinearitas pada data penelitian yang digunakan yang dapat mengganggu hasil penelitian.

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteros membuktikan bahwa data penelitian tidak menimbulkan gangguan apapun. Tes ini memberikan nilai toleransi yang harus > 0,10 dan VIF tidak boleh lebih besar dari 10.

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian akan menghasilkan persamaan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

7. Koefisien Determinasi (R²)

Ghozali (2016) menyampaikan bahwasanya koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen. Ketika (R²) mendekati 1, maka model berkemampuan baik dalam menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependennya, sebaliknya ketika (R²) mendekati (0), maka kemampuan model sangat lemah dalam menerangkan variabel independent terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini bantuan program SPSS dipakai untuk menentukan koefisien determinasi (R²).

8. Uji F (Uji Kelayakan Model)

Menurut Ghozal (2016:99), uji F-statistik tujuannya guna melihat pengaruh dari semua variabel independen pada metode ini memiliki efek simultan atau lengkap terhadap variabel dependen. Jika signifikansi uji F > 0,05 maka semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, dan begitu sebaliknya.

9. Uji t (Uji Statistik)

Pengujian hipotesis dengan uji-t diperuntukan guna melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya. Uji t dengan membandingkan tingkat signifikansi dari tiap-tiap variabel independen pada $\alpha = 0,05$ (Ghozali, 2016:95).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas dan reliabilitas setiap indikator variabel respon survei sebagai alat bantu yang tersedia sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Adapun hasil pengujiannya disajikan oleh peneliti sebagaimana dalam Tabel 4.2.

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Item Pernyataan	Validitas		Reliabilitas	
			Koefisien Korelasi	Ket.	Alpha Cronbach	Ket.
	Komitmen Organisasi (X ₁)	X1.1	0,617	Valid	0,730	Reliabel
		X1.2	0,651			
		X1.3	0,718			
		X1.4	0,589			
		X1.5	0,559			
		X1.6	0,482			

	Efektivitas Pengendalian Internal (X ₂)	X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5	0,740 0,768 0,751 0,743 0,681	Valid	0,786	Reliabel
	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (X ₃)	X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 X3.13 X3.14 X3.15 X3.16 X3.17 X3.18 X3.19	0,545 0,670 0,543 0,472 0,505 0,668 0,467 0,612 0,476 0,432 0,617 0,561 0,384 0,511 0,610 0,704 0,573 0,571 0,614	Valid	0,871	Reliabel
	Kecenderungan Kecurangan (Y)	Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9	0,445 0,583 0,602 0,657 0,763 0,634 0,515 0,738 0,549	Valid	0,784	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai koefisien korelasi seluruh variabel > 0,30 dan koefisien alfa (α) > 0,6, maka semua instrumennya valid dan reliabel oleh karena itu harus digunakan sebagai alat penelitian.

Sebelum suatu model persamaan regresi dianalisis dengan analisis regresi linier berganda, harus melewati uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas, sebagai berikut: .

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		71
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	3.09147846
Most Extreme Differences	Absolute	.152
	Positive	.081
	Negative	-.152
Test Statistic		.152
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Data penelitian dinyatakan lolos uji normalitas dengan perolehan tingkat signifikansi 0,200

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	13.480	5.174		2.605	.011		
Komitmen Organisasi	-.192	.184	-.146	-2.046	.009	.570	1.754
Efektivitas Pengendalian Internal	-.111	.233	-.070	-2.478	.004	.510	1.959
Implementasi Good Corporate Governance	-.274	.088	-.456	-3.102	.003	.512	1.952

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan

VIF hasil pengujian multikolinieritas untuk semua variabel bebas adalah 10 atau kurang dan angka toleransinya adalah 0,1 atau lebih. Artinya model regresi yang digunakan tidak menunjukkan adanya multikolinearitas.

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.985	3.591		-1.388	.170
Komitmen Organisasi	.145	.127	.176	1.140	.258
Efektivitas Pengendalian Internal	-.249	.162	-.251	-1.538	.129
Implementasi Good Corporate Governance	.110	.061	.291	1.789	.078

a. Dependent Variable: abs_res

Hasil pengujian heteroskedastisitas memperlihatkan tingkat signifikansi seluruh variabel adalah >0,05. Artinya model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas.

Tabel 5
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.480	5.174		2.605	.011
Komitmen Organisasi	-.192	.184	-.146	-2.046	.009
Efektivitas Pengendalian Internal	-.111	.233	-.070	-2.478	.004
Implementasi Good Corporate Governance	-.274	.088	-.456	-3.102	.003
R					0,509
R Square					0,259
Adjusted R Square					0,226
Uji F					7,807
Sig. Model					0,000

Dari hasil analisis Regresi Linear Berganda dalam Tabel 4.6, maka persamaan regresinya adalah:

$$Y = 13,480 - 0,192X_1 - 0,111X_2 - 0,274X_3 + e$$

Hasil analisis koefisien determinasi adjusted R^2 sebesar 0,226 menunjukkan bahwa 22,6% variabel kecenderungan kecurangan terkait dengan komitmen organisasi, efektivitas pengendalian intern dan penerapan *good governance*. Nilai F sebesar 7,807 dengan level signifikansi 0,000. Nilai signifikannya $< 0,05$, mengindikasikan secara simultan komitmen organisasi, efektivitas pengendalian internal dan penerapan tata kelola yang baik mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Artinya model penelitian ini valid.

Berdasarkan analisis terlihat nilai koefisien regresinya -0,192 dan bernilai t -2,046 yang nilai sig. $0,009 < 0,05$ maka komitmen organisasional variabel karya mempengaruhi negatif pada gaya tipuan, sehingga hipotesis terima H1. Hasil penelitian menjelaskan semakin berkomitmen seorang karyawan terhadap organisasi maka individu tersebut tidak ada niatan untuk berbuat curang. Komitmen organisasi mengacu pada tingkat keberpihakan karyawan terhadap organisasinya untuk mempertahankan keanggotaan pada organisasi tersebut. Tingginya komitmen karyawan ini akan membuatnya lebih memikirkan dan mengutamakan kepentingan organisasinya daripada kepentingannya sendiri. Selain itu, karyawan tersebut akan terus berupaya untuk memperbaiki organisasinya tersebut. Rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi membuatnya lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Hal ini didukung oleh

hasil studi dari Widiutam, Sulindawat, Atmadja (2017) dan Lyana dan Sujana (2021), dimana komitmen organisasi memberikan pengaruh negatif signifikan pada kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan hasil analisis ditunjukkan nilai koefisien parameternya yaitu $-0,111$ dan nilai $t = -2,478$ yang mana tingkat signifikansinya $0,004 < 0,05$, maka pengendalian intern mempengaruhi negatif terhadap gaya tipuan, sehingga terima H2. Hasil penelitian memperlihatkan makin efektif penerapan sistem pengendalian intern, makin rendah tingkat kecurangan LPD di seluruh wilayah Kintamani. Sistem pengendalian internal yaitu seperangkat kebijakan dan prosedur yang tujuannya guna memberikan keyakinan pada manajemen bahwa organisasi mampu mencapai tujuannya. Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme penting dari langkah-langkah yang terus diambil oleh manajer dan semua pegawai untuk menyakini bahwa tujuan organisasi akan tercapai jika operasional organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan aset pemerintah dan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Widiutami et al (2017) dan Widyaswari, et al (2017), dimana efektivitas pengendalian intern mempengaruhi negatif signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Hasil analisis terlihat nilai koefisien parameter yaitu $-0,274$ dan nilai $t = -3,102$ yang mana tingkat signifikansinya $0,003 < 0,05$ maka penerapan prinsip *good corporate governance* mempengaruhi negatif terhadap kecenderungan fraud, sehingga terima H3. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin baik *good corporate governance* diterapkan, maka kecurangan di kalangan LPD di seluruh wilayah Kintamani dapat dihindari. *Good corporate governance* merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya organisasi yang dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis atau produktif dalam mencapai tujuan. Penerapan *good governance* secara optimal mencegah tindakan curang. Hal ini didukung oleh pernyataan Lyana dan Sujana (2021) dan Dewi dan Atmadja (2021), dimana penerapan *good governance* berpengaruh negatif signifikan pada kecenderungan fraud.

SIMPULAN DAN SARAN

Studi menemukan hasil bahwa Komitmen organisasi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Implementasi *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu perlu adanya pelatihan bagi aparatur desa mengenai akuntansi guna menunjang peningkatan kemampuan kerja sehingga mereka lebih semangat dalam bekerja dan meningkatkan komitmen organisasi sehingga menghindari tindakan curang yang bisa dilakukan. Pengendalian internal di organisasi harus ditingkatkan dengan melakukan pengawasan yang ketat dan memberlakukan sanksi tegas bagi

pegawai yang bertindak melanggar hukum. Kedepannya *Good Corporate Governance* harus dijalankan dengan baik agar terjalin hubungan harmonis didalam perusahaan sehingga seluruh aktivitas yang berjalan didalam perusahaan bisa dijalankan dengan baik.

Daftar Pustaka

ACFE. (2016). Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse. Austin, Texas: Association of Certified Fraud Examiners.

COSO. 2013. Coso Internal Control – Integrated Framework.

Dewi A., Putu Novi Anesya dan Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2021. Pengaruh Konsep Tri Kaya Parisudha, Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Karangasem. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 12 No : 03 Tahun 2021 e- ISSN: 2614 – 1930.*

Ghozali. Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, BPFE Universitas Diponegoro, Semarang.

Karyono, Drs. 2013. Forensic Fraud. Andi. Yogyakarta.

Lyana, Komang Rosa dan Sujana, Edy. 2021. Pengaruh Komitmen Organisasi, Locus Of Control dan Implementasi Good Governance terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Seririt. *JURNAL AKUNTANSI PROFESI Volume 12 Nomor 02 2021 E-ISSN: 2686-2468; P-ISSN: 2338-6177 DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2>.*

Nitimiani, Ni Komang dan Suardika, Anak Agung Ketut Agus. 2020. Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Lpd Di Kecamatan Tegallalang. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Oktober 2020.*

Saftarini, R., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. 2015. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Bangli), 3 (1). Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

Sugiyono, P. D. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Widiutami, Ni Putu Sri., Sulindawati, Ni Luh Gede Erni., dan Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2017. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume 7 No. 1 Tahun 2017).*

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Se-Kecamatan Abiansemal

Ni Nyoman Lisa Trianti⁽¹⁾

Ni Wayan Yuniasih⁽²⁾

Kadek Dewi Padnyawati⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jalan Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: lisatrianti39@gmail.com

ABSTRACT

Conducted research with the aim of knowing the effect of the capacity of village fund management apparatus, organizational commitment, and internal control systems on the accountability of village fund management in villages throughout the Abiansemal sub-district. The population in this study were all village officials and institutions totaling 269 institutions spread over 18 villages in the Abiansemar District, the Government Area of the Abiansemar District, Badung Regency. The sample size for this study was 144 individuals identified by a targeted sampling technique and tested using multiple linear regression analysis techniques. The results of this study show that the capacity of the village fund management apparatus is not related to village fund management accountability. Institutional involvement is not a factor influencing village fund management accountability. The internal control system is positively related to accountability for village fund management. Forming regulations and policies related to efforts to increase accountability

Keyword : *Responsibilities of Village Fund Management .*

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah wilayah kesatuan hukum dengan batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan dalam mengatur serta mengurus kepentingan wilayahnya secara mandiri. Hal – hal yang bisa diatur oleh desa secara mandiri yakni seperti berbagai kepentingan penduduk di wilayahnya yang proses pengaturannya didasarkan atas inisiatif dari masyarakat, silsilah atau hak asal usul desa, serta tetap dilandaskan atas pengakuannya terhadap NKRI menghormati sistem kepemimpinan yang berlaku di Indonesia. Dana desa merupakan dana yang didapat dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Negara dimana sudah memang diperuntukan untuk kemajuan desa. Dana yang diperuntukan ini akan ditansfer atau dcairkan melalui APBD di wilayah Kabupaten/Kota dimana tujuannya sudah tentu untuk penyelenggaraan proses pemerintahan dan menopang kesejahteraan serta kemajuan masyarakat desa (Sutrepti et al. 2022).

Banyak sekali saat ini ditemukan kasus penyelewengan terhadap anggaran atau dana desa. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk dapat melakukan tindak kecurangan atau penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi bagi banyak pihak terutama masyarakat dan Negara. Hal ini terlihat dari kasus di Desa Baha, Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2016 ditemukan bahwa Kepada Desa I Putu Sentana melakukan penyelewengan terhadap dana desa mencapai lebih dari Rp 1 miliar dimana karena perbuatannya ini terdakwa harus mendekam dipenjara empat tahun lima bulan. Ditahun 2016, Desa Baha menerima dana APBDes mendapat sejumlah dana desa yang bersumber dari berbagai pos pendapatan. Dalam penyusunan anggarannya dana tersebut seharusnya digunakan dalam brbagai kegiatan desa. Tetapi realisasinya program kerja tidak berjalan dengan maksimal dan sisa anggarannya masuk kedalam rekening terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung terdapat selisih antara buku kas umum desa dengan saldo rekening Desa (Antaraneews.com, 2019).

Selanjutnya juga terdapat kasus penyalahgunaan Dana Desa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dilakukan oleh I Made Subarman dimana melakukan penyalahgunaan dana sebesar Rp 183 juta saat menjabat sebagai Klian Subak Desa Bongkasa Pertiwi, Abiansemal, Badung, periode 2015 – 2020. Dimana anggaran yang disalah gunakan dana BKK Provinsi Bali 2015 – 2018. Tindakan terdakwa dalam kasus tersebut adalah membuat laporan palsu atau palsu. Terdakwa membuat LPJ fiktif dengan tujuan agar Pemkot dan Pemprov Bali dapat menerima LPJ tersebut seolah-olah bantuan tersebut digunakan sesuai dengan RAB. Terdakwa yang menerima dana BKK Rp 300 juta dari Subak Karang Dalem, dulu mengoperasikan sebagian Subak tersebut senilai Rp 116.836.000. Pada saat yang sama, Rp. 183.164.000 yang tersisa tidak dapat dihitung, yang merupakan nilai kerugian negara bagian atau regional. (Tribun-Bali.com, 2021). Pada tahun 2022, kasus tersebut diselesaikan tanpa I Made Subarman naik banding, dan kasus tersebut disidangkan pada tahun 2021 (Wawancara dengan I Gusti Agung Gede Wiadnyana selaku Sekretaris Desa, pada tanggal 17 Maret 2023).

Tiap tahunnya jumlah dana desa yang diberikan pemerintah semakin meningkat yang dimana peningkatan ini tentunya membutuhkan tata pengelolaan yang kian ketat dan semakin baik sehingga menghindari peluang terjadinya penyelewengan dana (Amaliya dan Maryono 2020). Akuntabilitas akan sangat mempengaruhi prosedur pengelolaan dana desa yang

dimana didalamnya akan menyangkut kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam proses menjalankan aktivitas desa yang dalam kaitannya dalam upaya pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas menjadi sesuatu hal yang begitu penting dalam pemerintah desa karena akuntabilitas merupakan wujud dari pertanggung jawaban yang bisa diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa (Polutu dkk. 2022). Pemerintah desa yang bertanggung jawab memiliki pertanggung jawaban memberikan informasi kepada masyarakat, tidak hanya berkaitan tentang adanya anggaran dana desa tetap juga diberikan laporan terkait realisasi dari anggaran yang ada (Dewi dan Gayatri 2019).

Akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh faktor kompetensi aparatur pengelolaan dana desa. Kompetensi merupakan wujud kemampuan seseorang yang sangat dibutuhkan untuk bisa membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja (Pratiwi dan Dewi 2021). Kompetensi juga bisa dijadikan ukuran dalam mengetahui apakah pengelolaan dana desa bisa dilakukan dengan baik dan akuntabel. Kompetensi yang baik akan mendorong seseorang bekerja dengan lebih optimal serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Faktor kedua yaitu komitmen organisasi. Komitmen Organisasi akan mencerminkan keberpihakan karyawan terhadap perusahaan atau organisasinya saat ini, komitmen yang baik akan membuat seseorang ingin bertahan dalam organisasi dan mampu menerima berbagai tujuan yang akan dicapai organisasi tersebut (Sari dan Padnyawati 2021). Orang-orang yang terlibat secara aktif memiliki keyakinan yang kuat dan konsisten terhadap tujuan organisasi, termotivasi untuk tetap berada dalam organisasi sepanjang waktu, dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam organisasi sehingga dapat mencapai tujuannya. (Indriasih dkk. 2022).

Faktor ketiga yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah gabungan dari struktur dalam organisasi, sistem atau metode yang diterapkan dalam organisasi, serta ukuran yang dijadikan patokan untuk menjaga berbagai asset milik perusahaan, alat koordinasi untuk menjaga kekayaan perusahaan, alat untuk mengecek keandalan dalam sebuah laporan keuangan yang dibuat perusahaan, menciptakan efisiensi kerja, dan mendorong karyawan untuk patuh pada peraturan perusahaan (Polutu dkk. 2022). Sistem pengendalian internal yang baik akan akan mendorong peningkatan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan serta mampu meningkatkan kepercayaan

yang baik akan akan mendorong peningkatan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pemerintah desa terhadap sistem pengelolaan dana desa, dimana masyarakat mempercayai kebenaran dari sebuah laporan keuangan yang dihasilkan.

1. (Atiningsih dan Ningtyas 2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara positif signifikan.
2. (Amaliya dan Maryono 2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati secara positif.
3. (Aprilya dan Fitria 2020) hasil penelitian ini menunjukkan komitmen organisasi yang meningkat akan menjadi penyebab akuntabilitas pengelolaan dana desa juga mengalami peningkatan.

Kompetensi merupakan wujud kemampuan seseorang yang sangat dibutuhkan untuk bisa membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja (Pratiwi dan Dewi 2021). Kompetensi juga bisa dijadikan ukuran dalam mengetahui apakah pengelolaan dana desa bisa dilakukan dengan baik dan akuntabel. Kompetensi yang baik akan mendorong seseorang bekerja dengan lebih optimal serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

H1: Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Komitmen Organisasi akan mencerminkan keberpihakan karyawan terhadap perusahaan atau organisasinya saat ini, komitmen yang baik akan membuat seseorang ingin bertahan dalam organisasi dan mampu menerima berbagai tujuan yang akan dicapai organisasi tersebut (Sari dan Padnyawati 2021).

H2 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sistem pengendalian internal adalah gabungan dari struktur dalam organisasi, sistem atau metode yang diterapkan dalam organisasi, serta ukuran yang dijadikan patokan untuk menjaga berbagai asset milik perusahaan, alat kordinasi untuk menjaga kekayaan perusahaan, alat untuk mengecek keandalan dalam sebuah laporan keuangan yang dibuat perusahaan, menciptakan efisiensi kerja, dan mendorong karyawan untuk patuh pada peraturan perusahaan (Polutu dkk. 2022)..

7. Analisis Koefisien Determinasi bertujuan mengungkap besaran pengaruh yang bisa variabel X (bebas) sumbangkan terhadap variabel (Y).
8. Uji F merupakan pengukuran kelayakan model penelitian dimana nantinya dari uji ini akan diketahui apakah terdapat hubungan simultan antara keseluruhan variabel X terhadap variabel Ynya .
9. Uji-t merupakan pengujian yang ditujukan untuk menjawab hubungan secara individual atau parsial antara variabel X (bebas) terhadap varaibel terikatnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa	144	27.00	40.00	33.6528	3.22646
Komitmen Organisasi Sistem Pengendalian Internal	144	22.00	30.00	25.6875	2.52669
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	144	34.00	45.00	40.3403	3.49258
Valid N (listwise)	144	24.00	40.00	35.3889	3.60674

Sumber : Data primer diolah, 2023

Hasil uji statistik deskriptif diperoleh nilai minimum variabel (X1) adalah 27,00, nilai maksimum 40,00, mean 33,6528, dan standar deviasi 3,22646. Nilai minimum variabel (X2) adalah 22,00, nilai maksimum 30,00, nilai rata-rata 25,6875, dan standar deviasi 2,52669. Nilai minimum variabel (X3) adalah 34,00, nilai maksimum 45,00, nilai rata-rata 40,3403, dan standar deviasi 3,49258. Nilai minimum variabel (Y) adalah 24,00, nilai maksimum 40,00, rata-rata 35,3889, dan standar deviasi 3,60674 .

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa data penelitian akurat dimana dibuktikan dengan uji validitas yang menghasilkan nilai korelasi diatas 0,30. Data penelitian dikatakan konsisten sebab sudah terbukti lolos uji reliabilitas. Dalam tahap uji normalitas ditemukan nilai signifikansi data 0,058 yang menunjukkan data memiliki sebara normal. Penelitian ini juga memiliki data yang lolos uji multikolinearitas dan sudah dikatakan sangat layak untuk dikaji sebab data juga sudah memenuhi uji heteroskedastisitas.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Giriani dkk. 2021) serta (Matani dan Hutajulu 2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Besaran nilai X3 untuk parameternya yaitu 0,568 dan menunjukkan nilai t-hitung sebesar 6.055 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, variabel Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal adalah gabungan dari struktur dalam organisasi, sistem atau metode yang diterapkan dalam organisasi, serta ukuran yang dijadikan patokan untuk menjaga berbagai asset milik perusahaan, alat kordinasi untuk menjaga kekayaan perusahaan, alat untuk mengecek keandalan dalam sebuah laporan keuangan yang dibuat perusahaan, menciptakan efisiensi kerja, dan mendorong karyawan untuk patuh pada peraturan perusahaan (Polutu dkk. 2022). Sistem pengendalian internal yang baik akan akan mendorong peningkatan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pemerintah desa terhadap sistem pengelolaan dana desa, dimana masyarakat mempercayai kebenaran dari sebuah laporan keuangan yang dihasilkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini ditemukan bahwa kompetensi aparatur desa serta komitmen organisasi belum mampu mempengaruhi akuntabilitas. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Kedepannya diharapkan Pemerintahan Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa yang dibarengi dengan peningkatan moralitas individu pegawai yang dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kerja secara berkala. Pelatihan ini nantinya dapat mengasa kemampuan dan perilaku pegawai agar dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan pelatihan yang ada juga nantinya diharapkan komitmen organisasi juga dapat meningkat karena didorong oleh semangat kebersamaan pegawai selama pelatihan untuk bisa bekerja maksimal demi kemajuan perusahaan. Sistem pengendalian internal harus dijalankan dengan baik, seluruh tindak pelanggaran yang dilakukan pegawai harus ditindak dengan tegas dengan pemberian sanksi agar nantinya terbentuk disiplin kerja sehingga dapat menciptakan akuntabilitas.

Daftar Pustaka

- Amaliya, Riski, dan Maryono. 2020. "Pengaruh Kompetensi , Sistem Pengendalian Internal , Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." 13(1):122–33.
- Aprilya, Kartika Restu, dan Astri Fitria. 2020. "Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa." 9(3).
- Atiningsih, Suci, dan Aulia Cahya Ningtyas. 2019. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)." 10(1).
- Bali.antaranews.com. Koruptor APBDes Desa Baha-Badung diganjar 4,5 tahun penjara. Diakses dari website : <https://bali.antaranews.com/berita/138695/koruptor-apbdes-desa-baha-badung-diganjar-45-tahun-penjara>
- Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba, dan Gayatri. 2019. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." 26(2):1269–98.
- Dewi, Ni Made Ayu Monika dkk. 2022. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung)." 85–95.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1999). Stewardship Theory: CEO Governance and Shareholder Retuns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-69.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Giriani, Madhalena dkk. 2021. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana DesaDi Kecamatan Batujajar." *Indonesian Accounting Research Journal* 1(3):480–92.
- I Nyoman Jagra Sujatnika, Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2022. "Pengaruh Sistem Pelaporan , Kompetensi Perangkat Desa , Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung." 13(2):378–88.
- Indriasih, Dewi dkk. 2022. "Pengaruh Komitmen Organisasi , Sistem Pengendalian Internal , Kompetensi Pemerintah Desa , Transparansi , dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." 3(4):972–81. doi: 10.47065/ekuitas.v3i4.1331.
- Matani, Cornelia Desiana, dan Linda Hutajulu. 2020. "Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung Dikota Jayapura.” *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 5(3):21–45.

Mufti Arief Arfiansyah. 2020. “Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” 3(1):67–82.

Pahlawan, Enggar Wahyuning dkk. 2020. “Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.” 2(2):162–72.

Pebriyanto, I. Wayan, dan Ni Komang Sumadi. 2021. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Se-Kecamatan Sukawati).” 372–81.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB II Tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Polutu, Adriansah dkk. 2022. “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Des.” 3(2):66–78.

Putri Indah Pratiwi, Ratna Sari Dewi. 2021. “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.” 1(2):183–98.

Sarah, Siti dkk. 2020. “Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan SPI terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten indragiri hulu.” *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4(4):330–42.

Sari, Ni Made Rita, dan Kadek Dewi Padnyawati. 2021. “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan).” *Hita Akuntansi dan Keuangan* 544–62.

Sari, Rada Ratna dkk. 2022. “Faktor-Aktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” 7(1):46–59.

Situngkir, Anggiat, dan Benny Irawaty Simarmata. 2022. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Samosir).” *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* 5(2):96–104.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Eidos.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sutrepti, Ni Luh Putu Ari dkk. 2022. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi

Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se- Kecamatan Petang.” 25–35.

Tribun-Bali.com. Terbukti Korupsi Dana BKK, Klian Subak di Badung Made Subarman Menerima Dihukum 3 Tahun Penjara. Diakses dari website : <https://bali.tribunnews.com/2021/02/11/terbukti-korupsi-dana-bkk-klian-subak-di-badung-made-subarman-menerima-dihukum-3-tahun-penjara>

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Walyati, Fifit Nur, dan Farida. 2020. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan).” *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology* 270–85.

Widyatama, Arif dkk. 2017. “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).” 02(02):1–20.